



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 121 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. peta proses;
  - b. peta sub proses;
  - c. peta relasi; dan
  - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 MARET 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

## **LAMPIRAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 121 /KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 22 MARET 2022

### **TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bentuk komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya misi ke lima yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**,

Salah satu area Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Ketatalaksanaan. Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Tatalaksana bertujuan untuk mewujudkan proses penyelenggaraan organisasi dan administrasi pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. **Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*.** Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun

Peta Proses Bisnis sebagai acuan bagi setiap unit kerja dalam melaksanakan program secara kolaboratif sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tersebut, maka disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggambarkan proses bisnis yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi Pembangunan Daerah

## 1.2. Tujuan dan Manfaat

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 bertujuan untuk :

- 1) Menggambarkan arah pelaksanaan visi, misi, tujuan sesuai dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 agar setiap tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 2) Memudahkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal dalam melaksanakan aktivitas kegiatan lintas sektoral.
- 3) Mendukung proses sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas lintas sektor untuk percepatan pencapaian target kinerja.

Adapun manfaat dari Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- 1) Mempermudah proses identifikasi masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
- 2) Sebagai standar dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas kualitas pelaksanaan pekerjaan.

## **BAB II**

### **PENJABARAN VISI, MISI, TUJUAN DALAM PETA PROSES BISNIS**

#### 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah.
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial.
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*).
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk.
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan.
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah.
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk.
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah.
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah.
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan).
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur.
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan.
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita.
13. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara stabil dan berkelanjutan
			2. Berkurangnya Kemiskinan

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 2. Menguatnya Peranan NTT dalam perdagangan regional 3. Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat 4. Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan social	1. Berkurangnya ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah 2. Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat 3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	1. Pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
		2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	2. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah
			1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak air minum dan sanitasi
			2. Terlaksannya percepatan pembangunan elektrifikasi

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah 2. Menurunnya emisi gas rumah kaca 3. Menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang 4. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat NTT 3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

### 2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Prioritas 2 : Pembangunan Sektor Produktif dan Lingkungan.

Prioritas 3 : Pembangunan Pariwisata.

Prioritas 4 : Pembangunan Infrastruktur.

Prioritas 5 : Tata Kelola Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Proses Utama yaitu :

NTT01 : Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.

NTT02 : Peningkatan Pendapatan Masyarakat.

NTT03 : Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

NTT04 : Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata.

NTT05 : Peningkatan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi.

NTT06 : Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan.

NTT07 : Percepatan Reformasi Birokrasi.

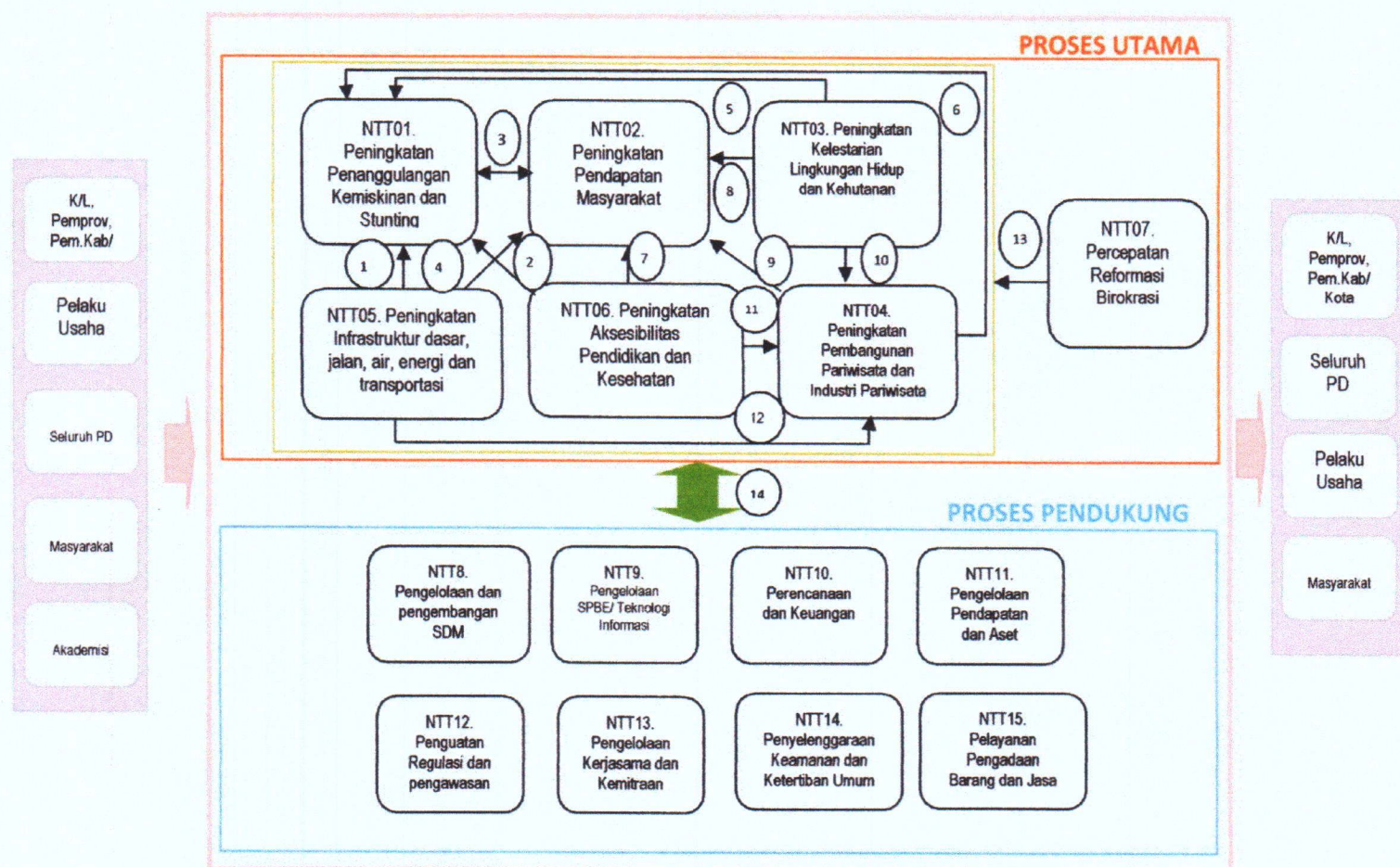
Ke 7 (tujuh) Proses Utama tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

### 2.4. Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Rangkaian alur kerja dalam Peta Proses Bisnis digambarkan dalam Peta Proses, Peta Sub Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi.

## A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ *stakeholder*/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*.



Penjelasan Proses :

1. Peningkatan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi mempengaruhi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;
2. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan mempengaruhi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;
3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat mempengaruhi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting begitu juga sebaliknya;
4. Peningkatan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

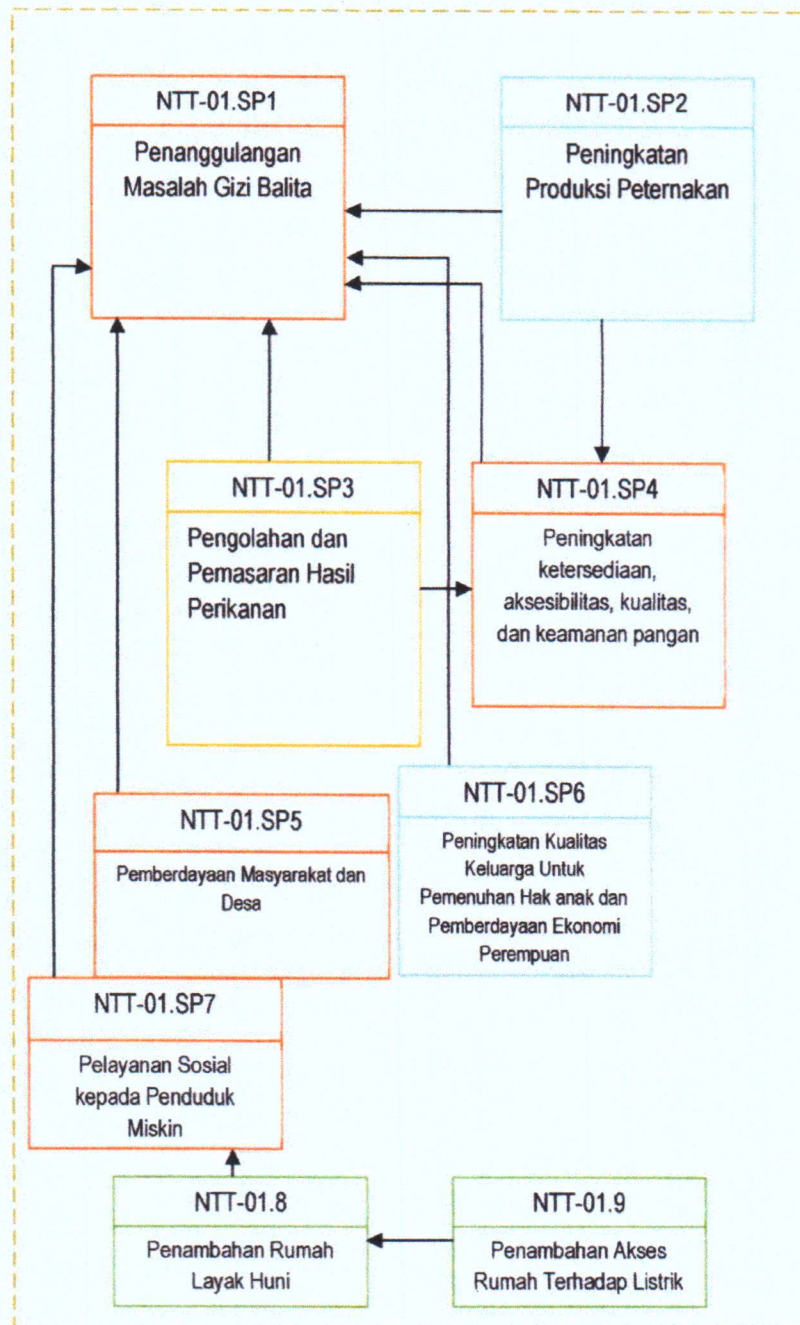
5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah mempengaruhi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;
6. Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata mempengaruhi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;
7. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
8. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
9. Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
10. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata;
11. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata;
12. Peningkatan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata;
13. Peningkatan Percepatan Reformasi Birokrasi mempengaruhi pencapaian proses NTT01 – NTT06;
14. Proses Pendukung mempengaruhi pencapaian proses utama dan sebaliknya proses utama mempengaruhi Peningkatan Percepatan Reformasi Birokrasi.

## B. PETA SUB PROSES

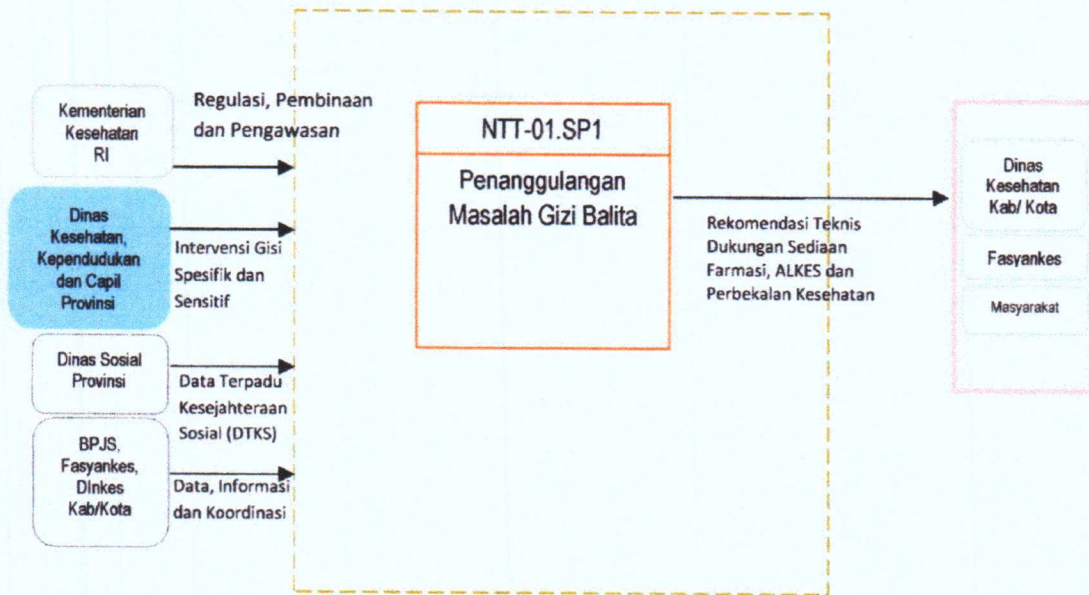
Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

### PETA SUB PROSES

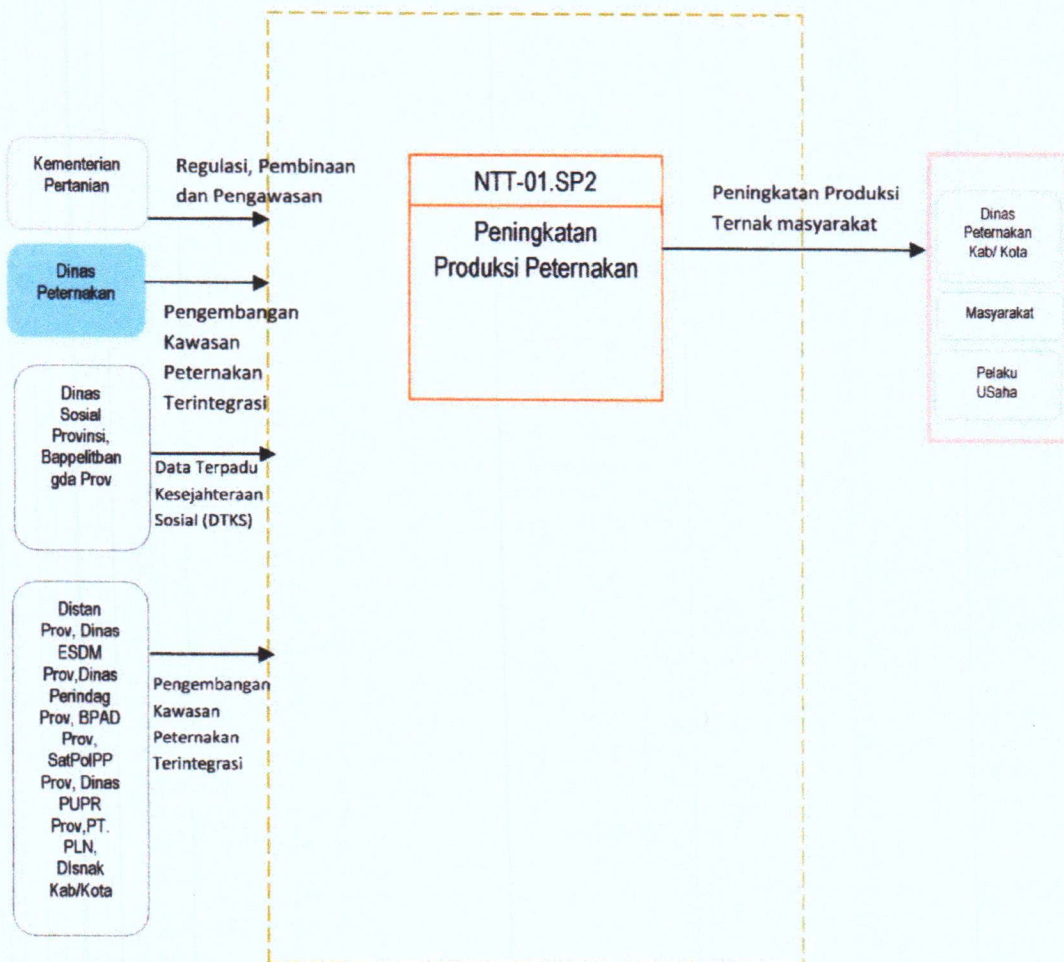
#### NTT-01 PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN STUNTING



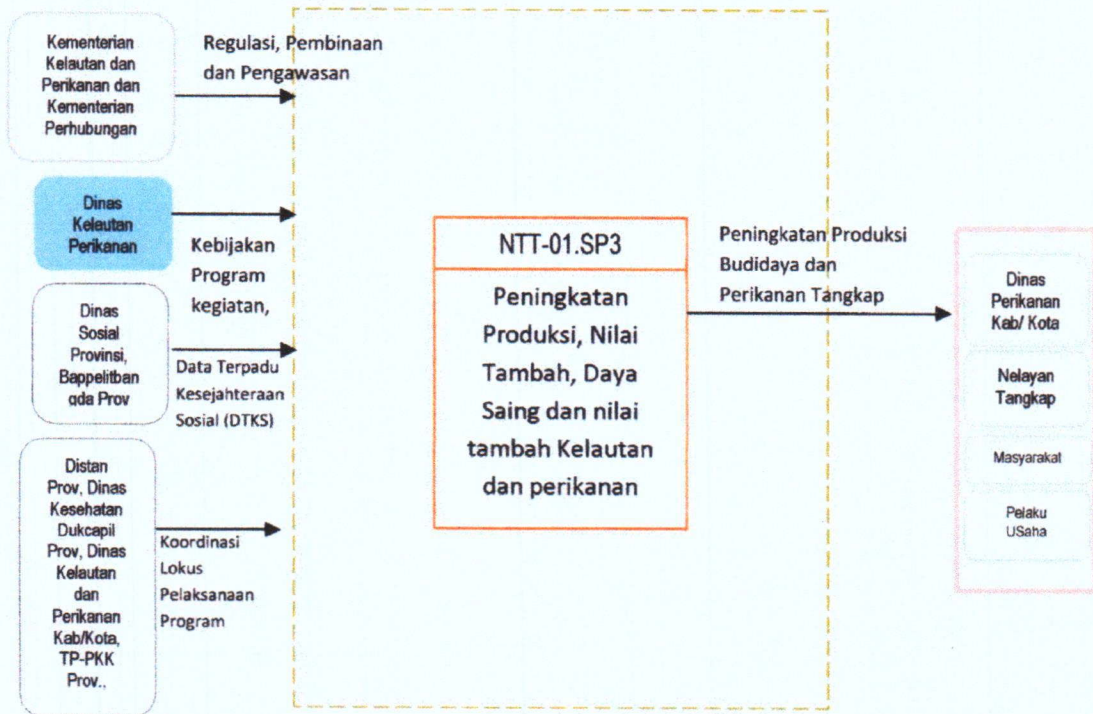
**a. NTT01.SP1 Penanggulangan Masalah Gizi Balita**



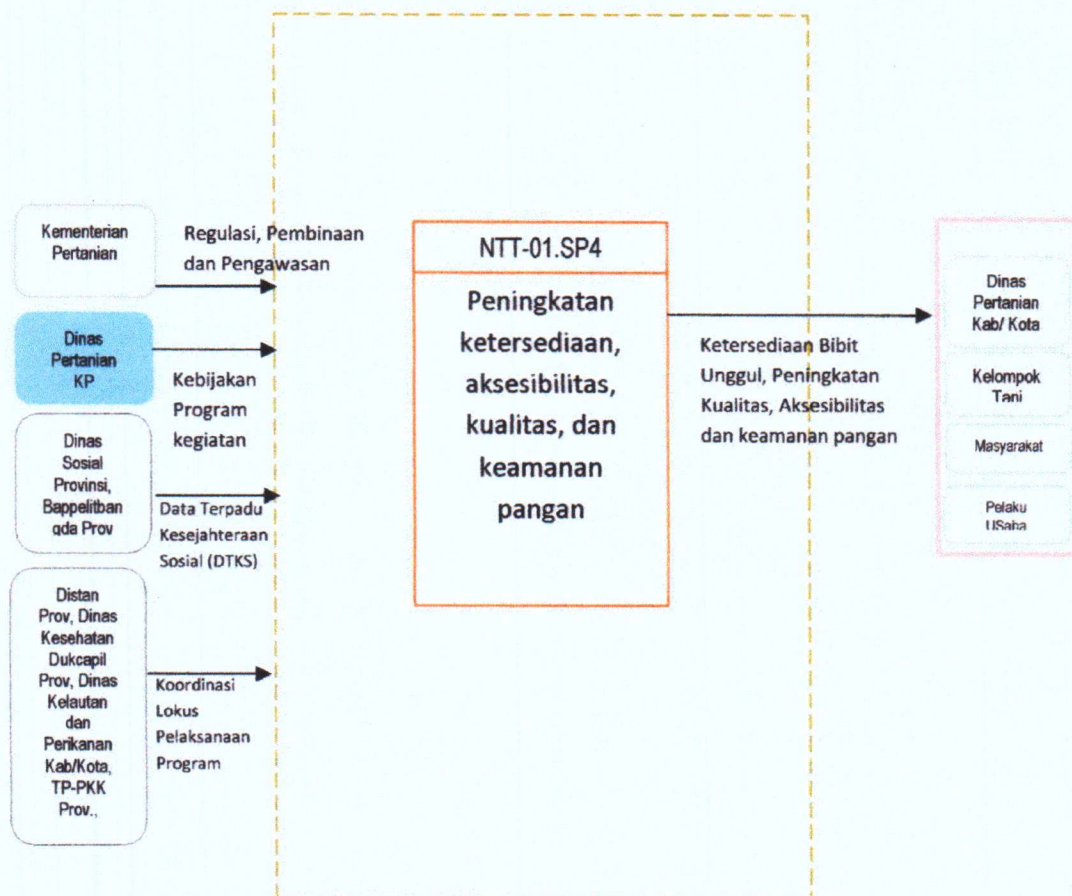
**b. NTT01.SP2 Peningkatan Produksi Peternakan**



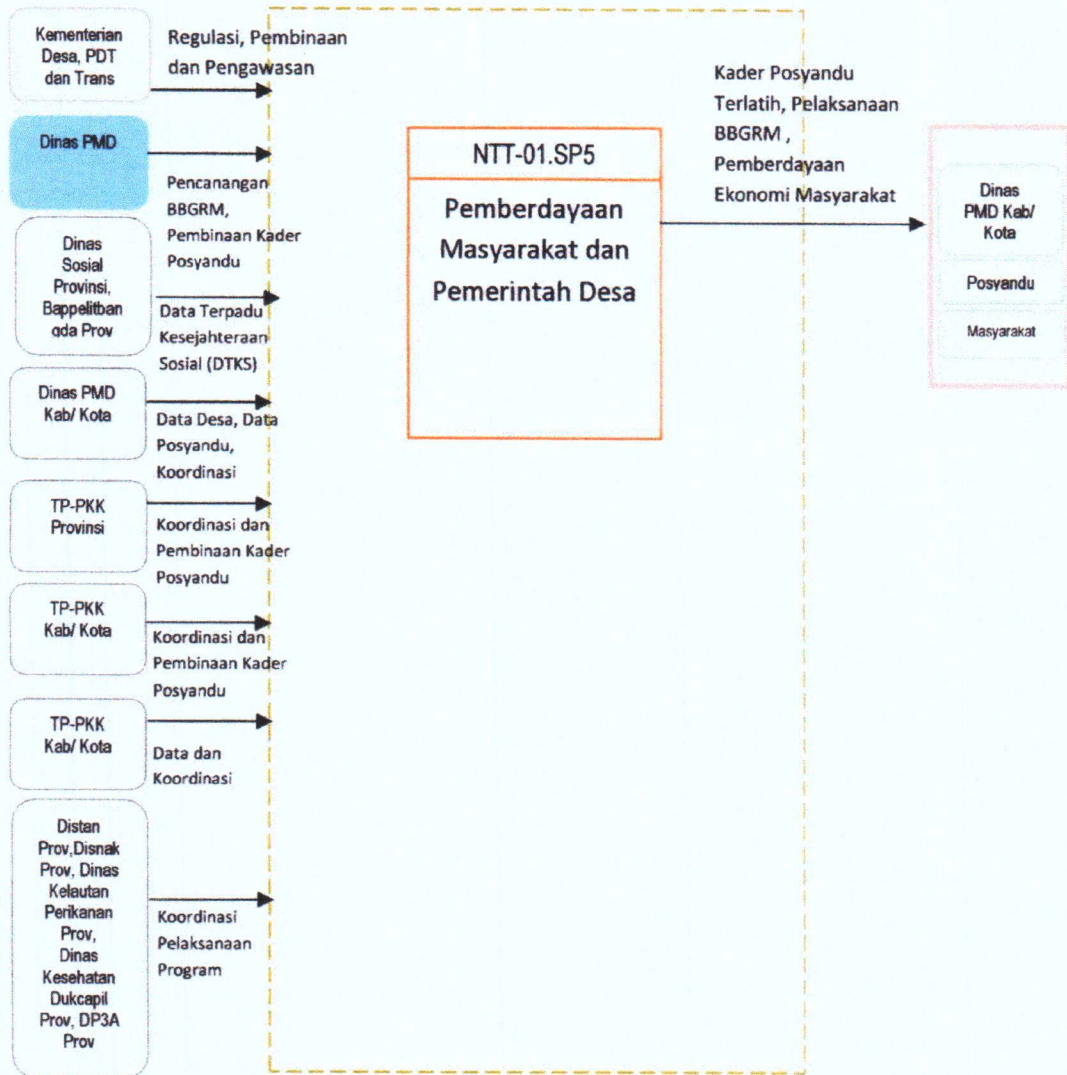
c. **NTT01.SP3 Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing dan nilai tambah Kelautan dan perikanan**



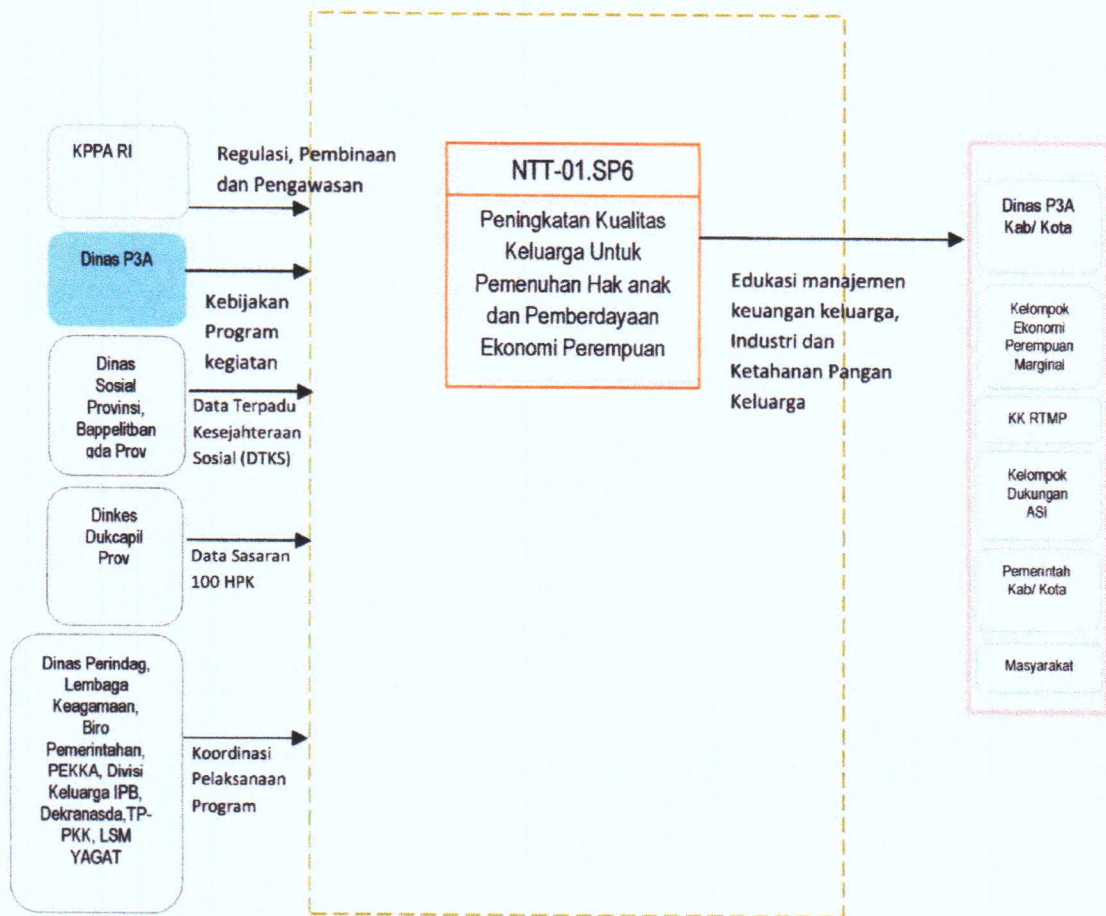
d. **NTT01.SP4 Peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan**



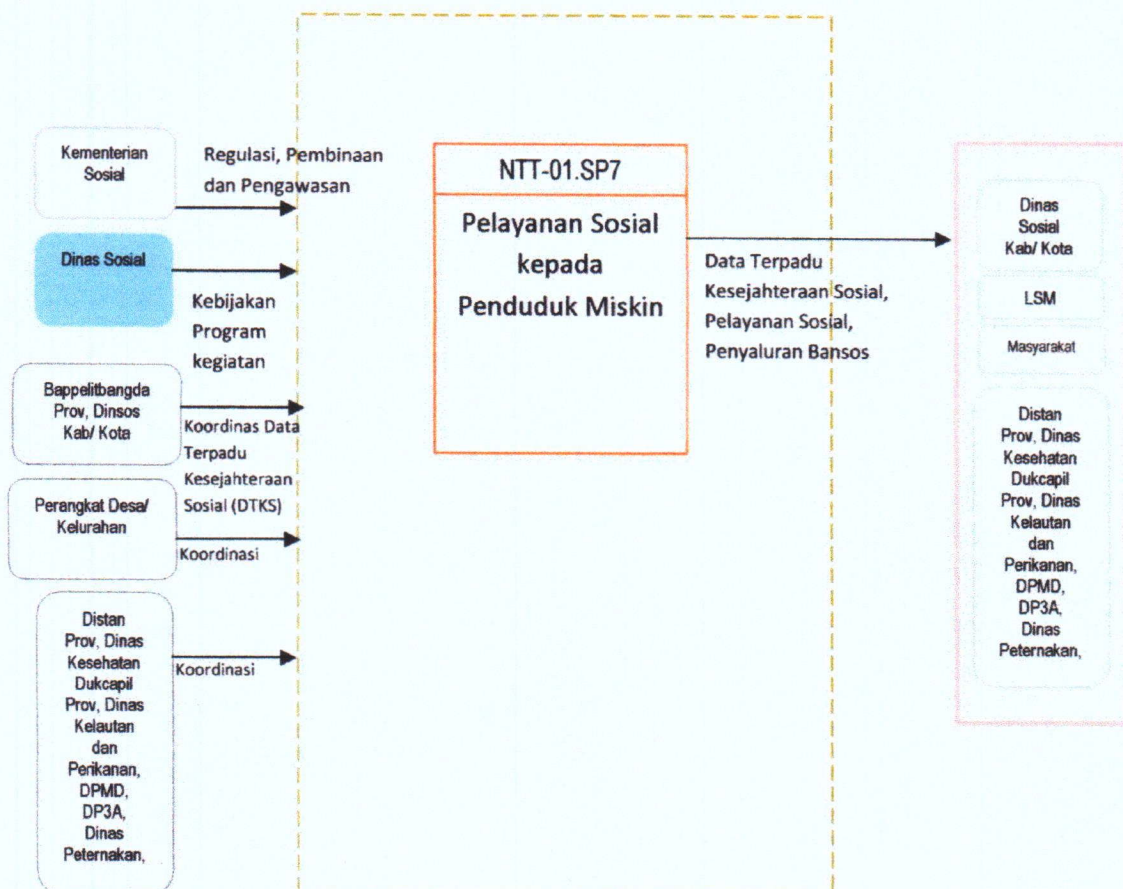
e. NTT01.SP5 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa



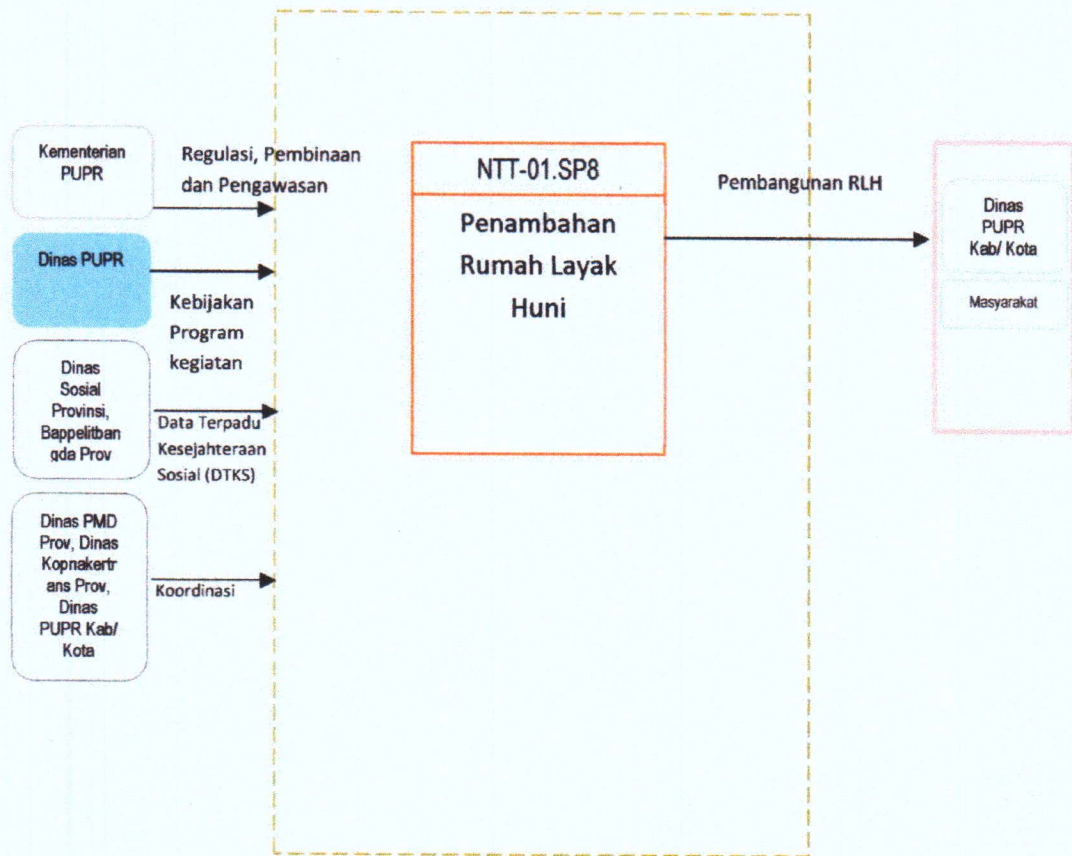
f. NTT01.SP6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



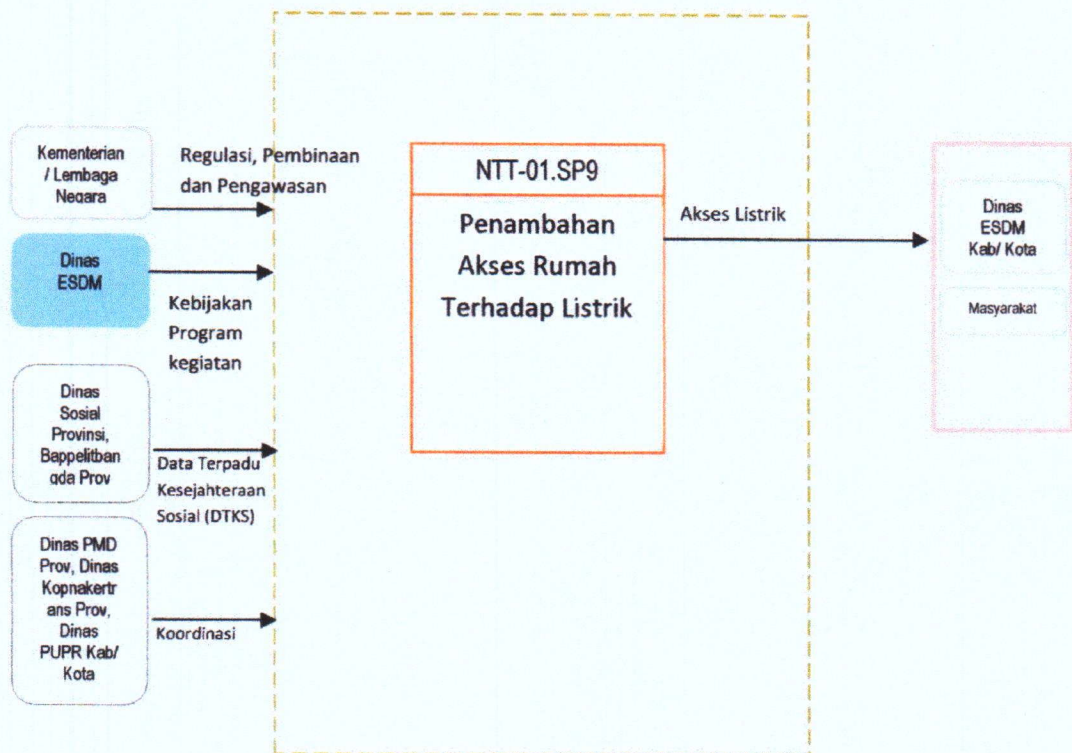
g. NTT01.SP7 Pelayanan Sosial kepada Penduduk Miskin



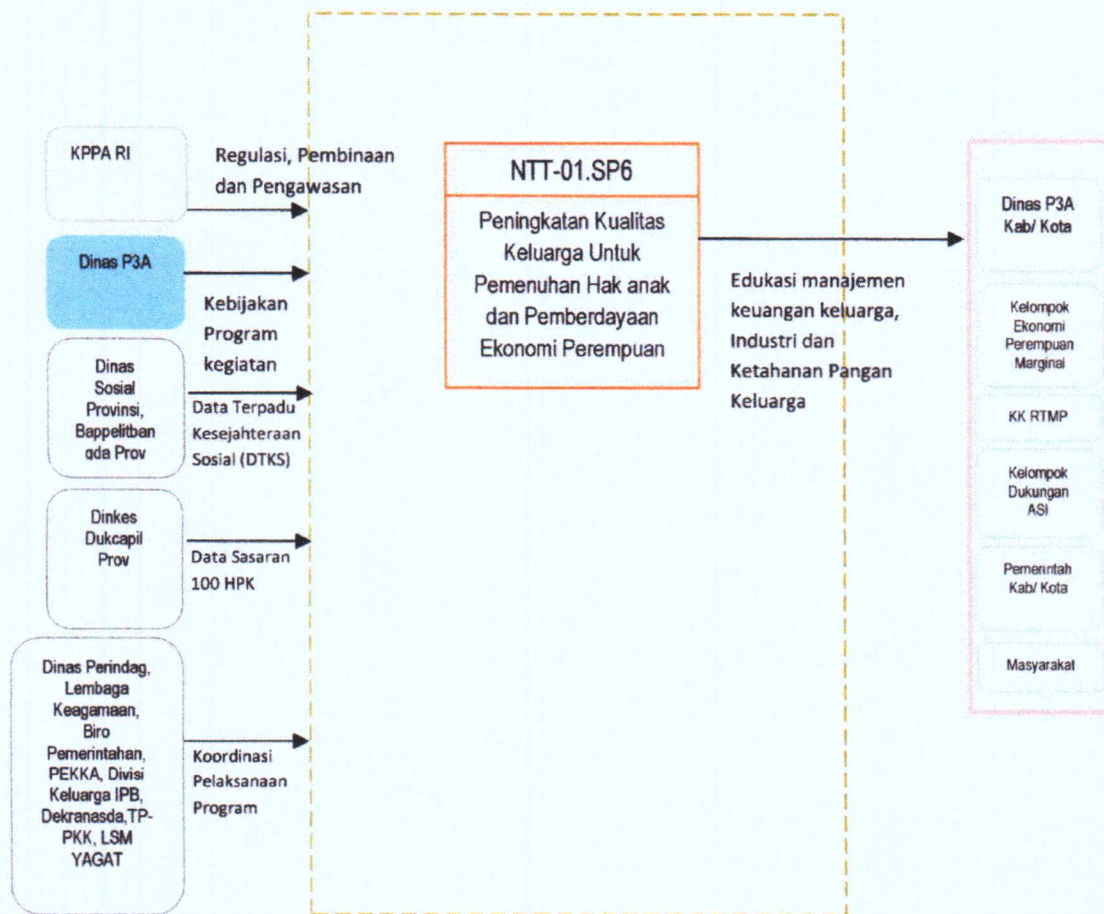
**h. NTT01.SP8 Penambahan Rumah Layak Huni**



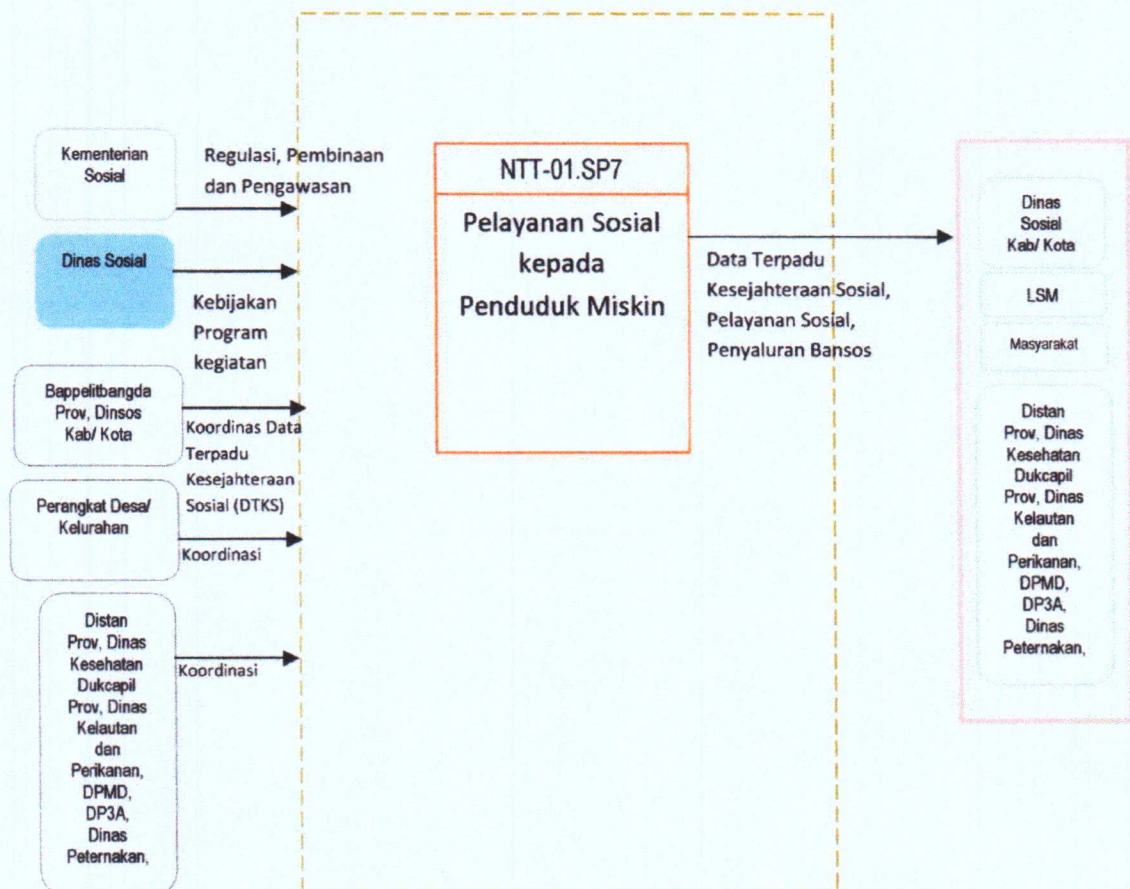
**i. NTT01.SP9 Penambahan Akses Rumah Terhadap Listrik**



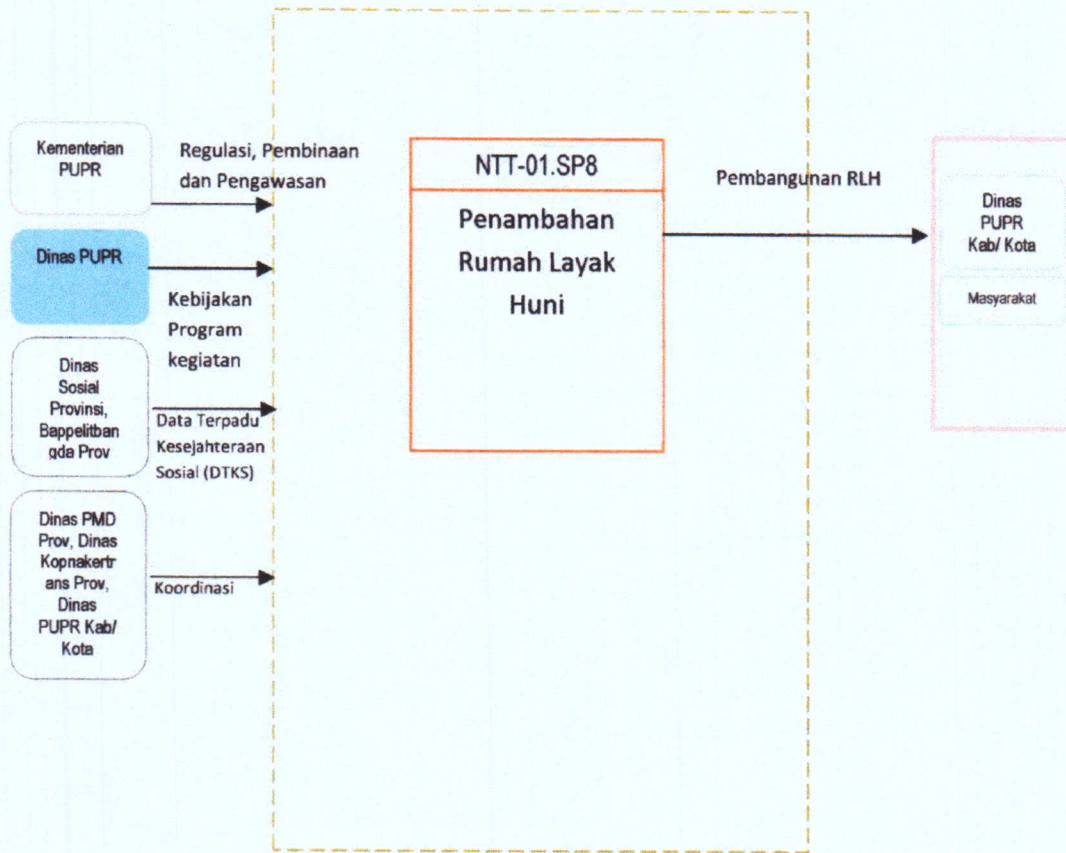
f. NTT01.SP6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



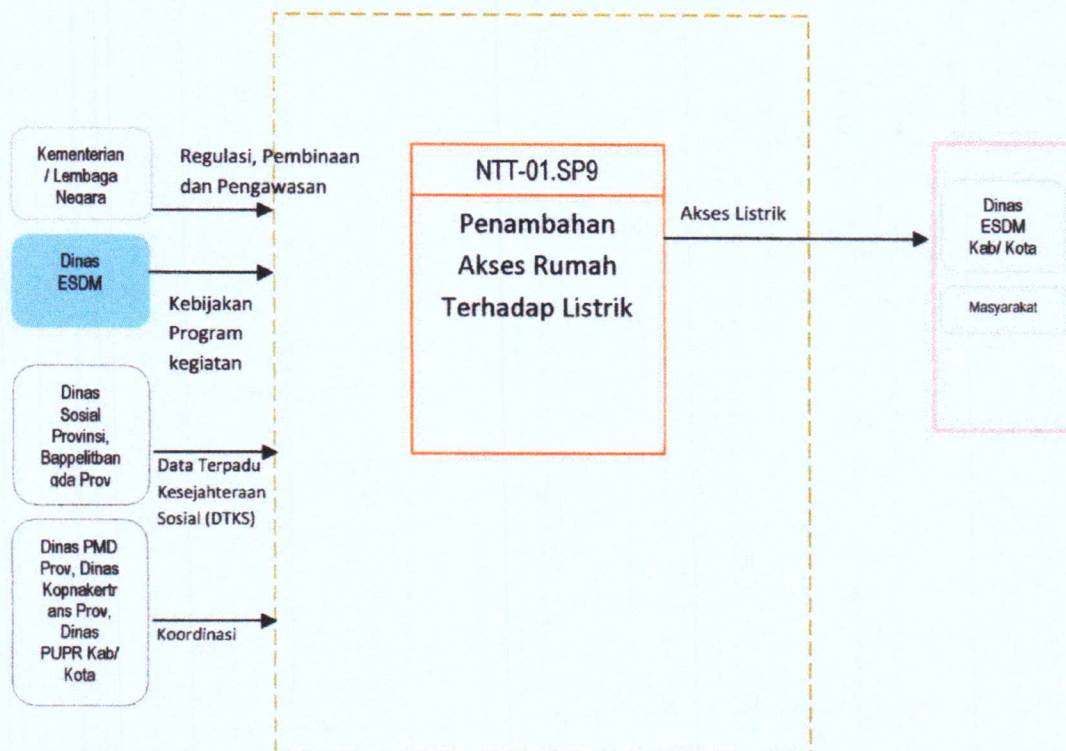
g. NTT01.SP7 Pelayanan Sosial kepada Penduduk Miskin



**h. NTT01.SP8 Penambahan Rumah Layak Huni**

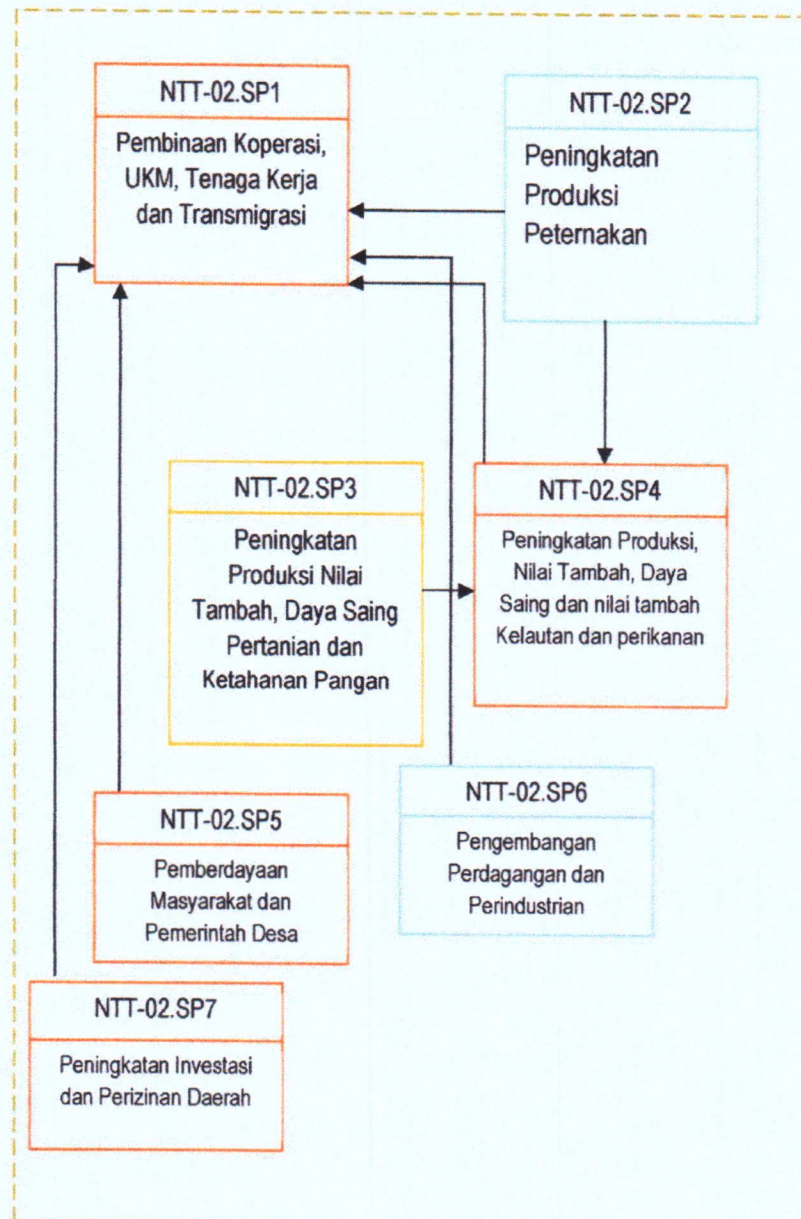


**i. NTT01.SP9 Penambahan Akses Rumah Terhadap Listrik**

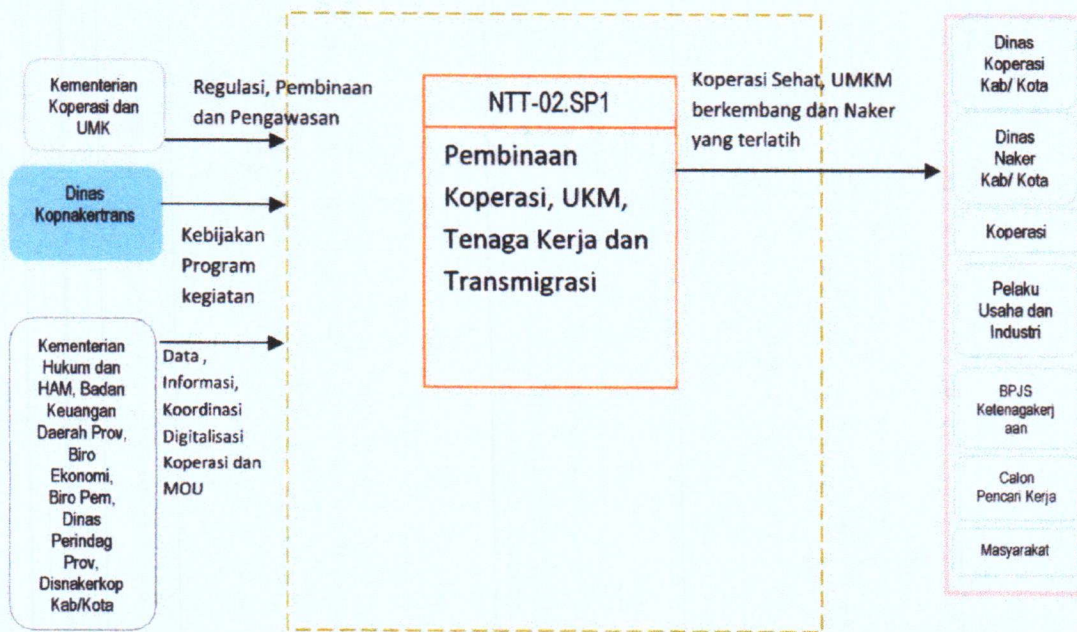


## PETA SUB PROSES

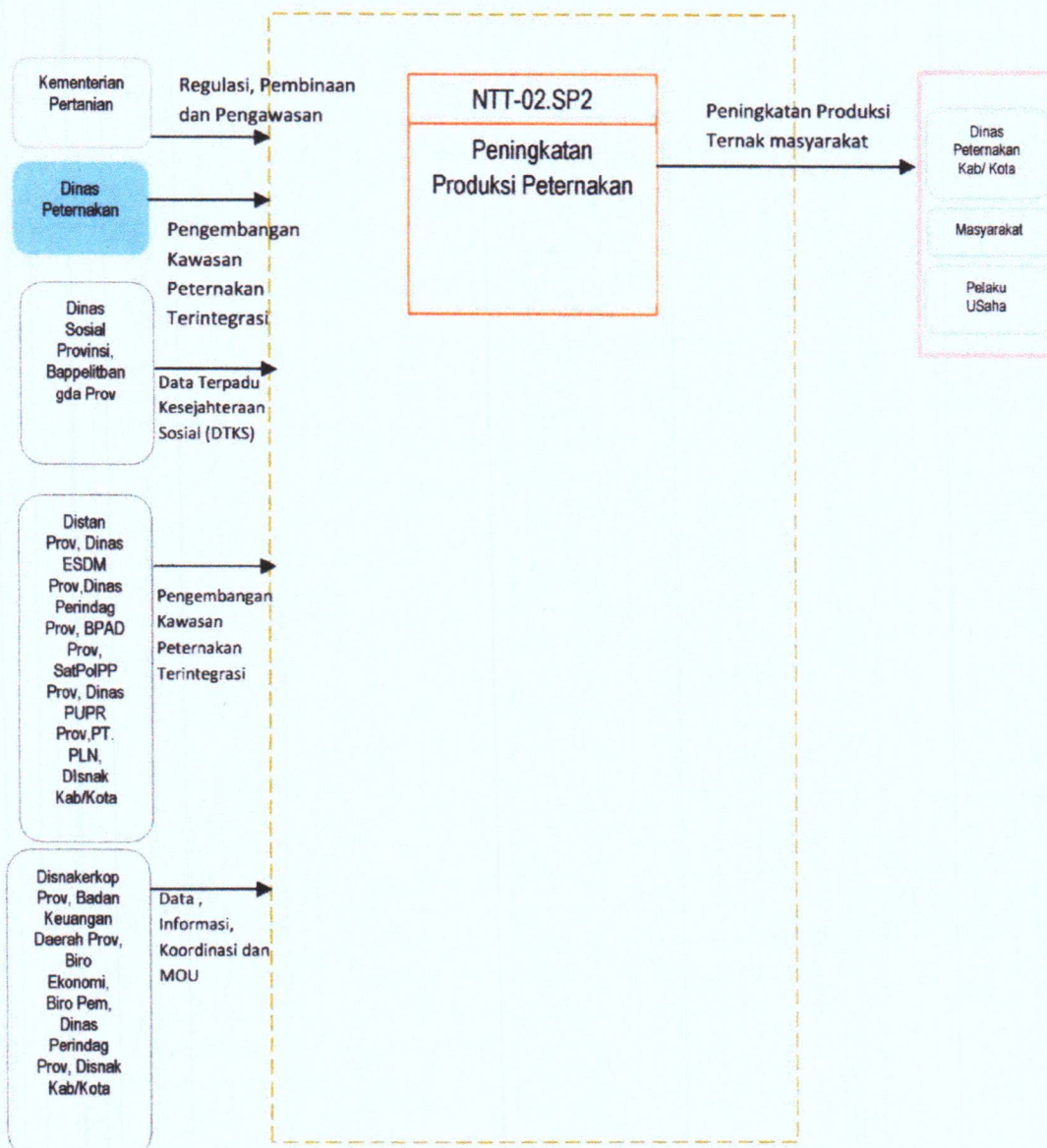
### NTT-02 PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT



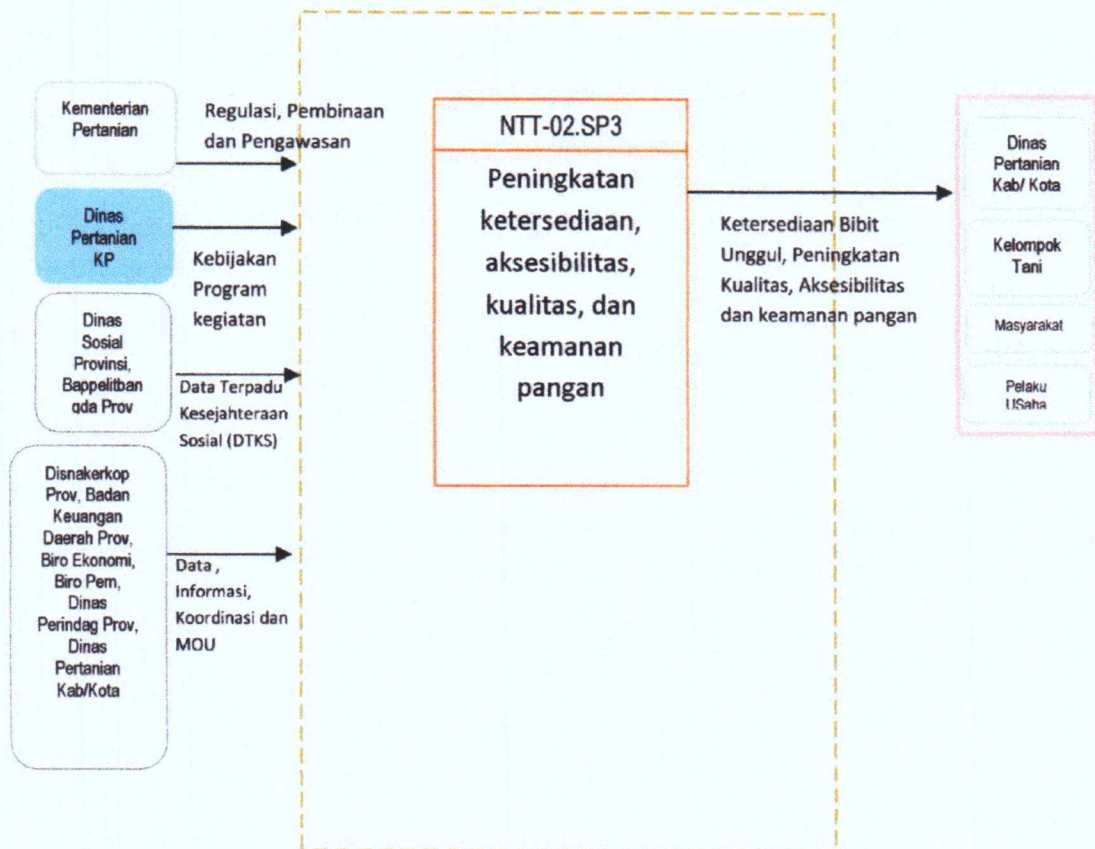
**a. NTT02.SP1 Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**



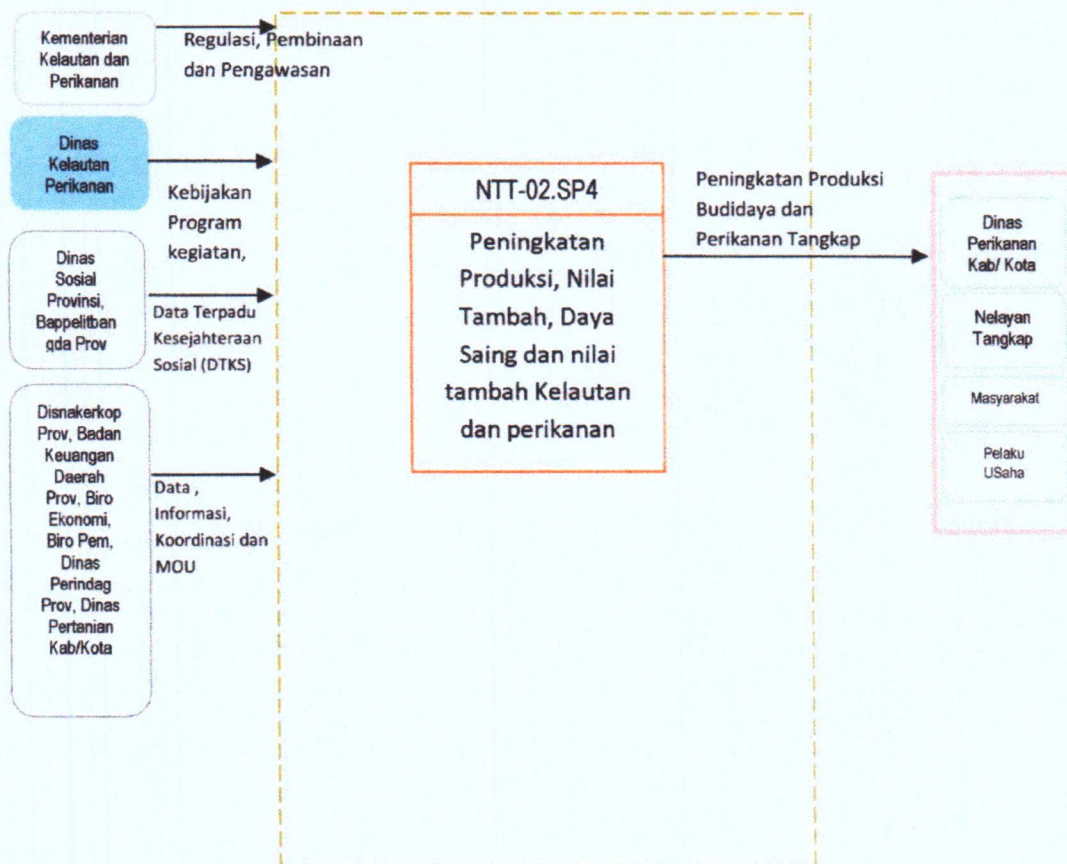
**b. NTT02.SP2 Peningkatan Produksi Peternakan**



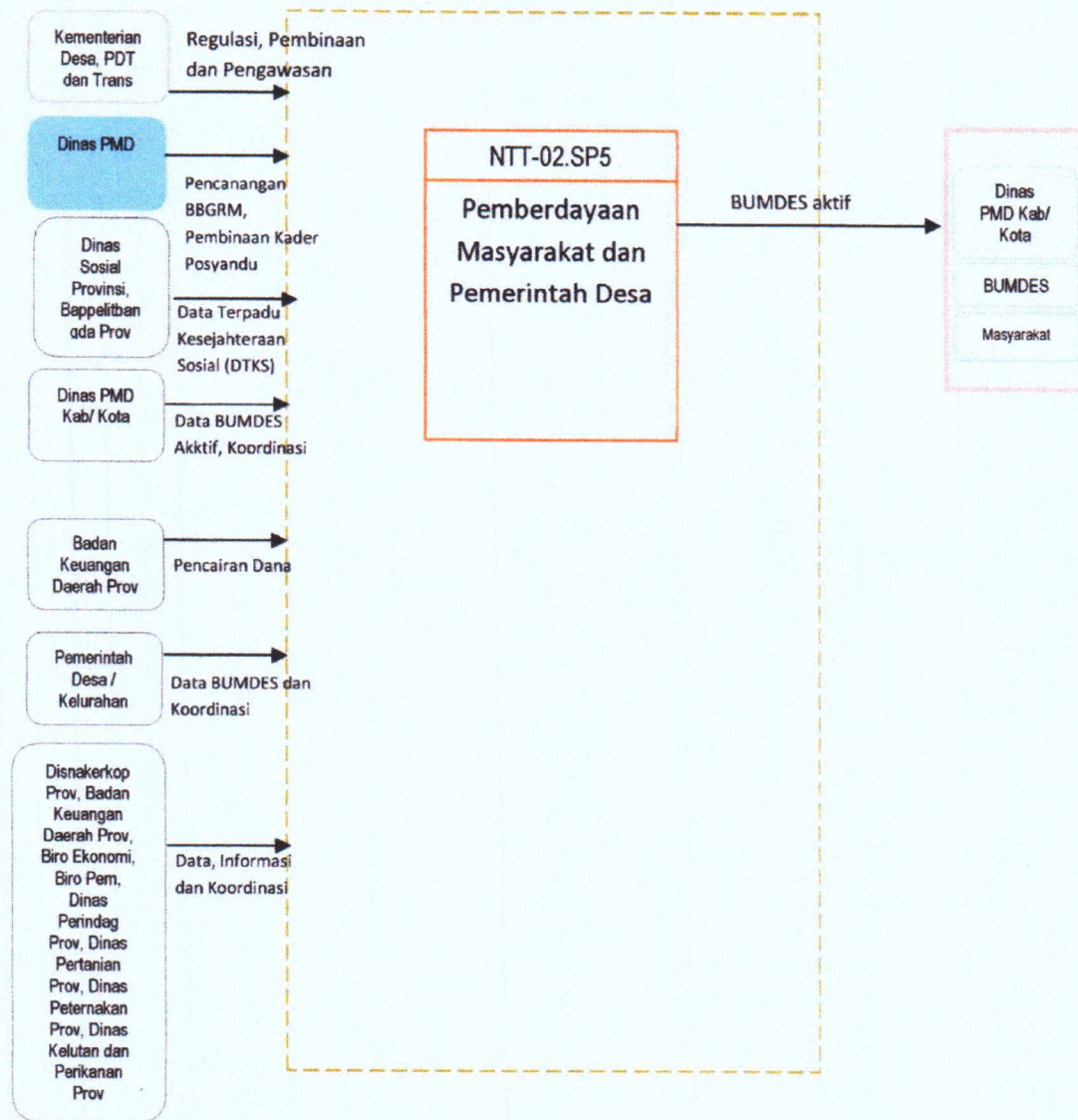
c. **NTT02.SP3 Peningkatan Produksi Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan**



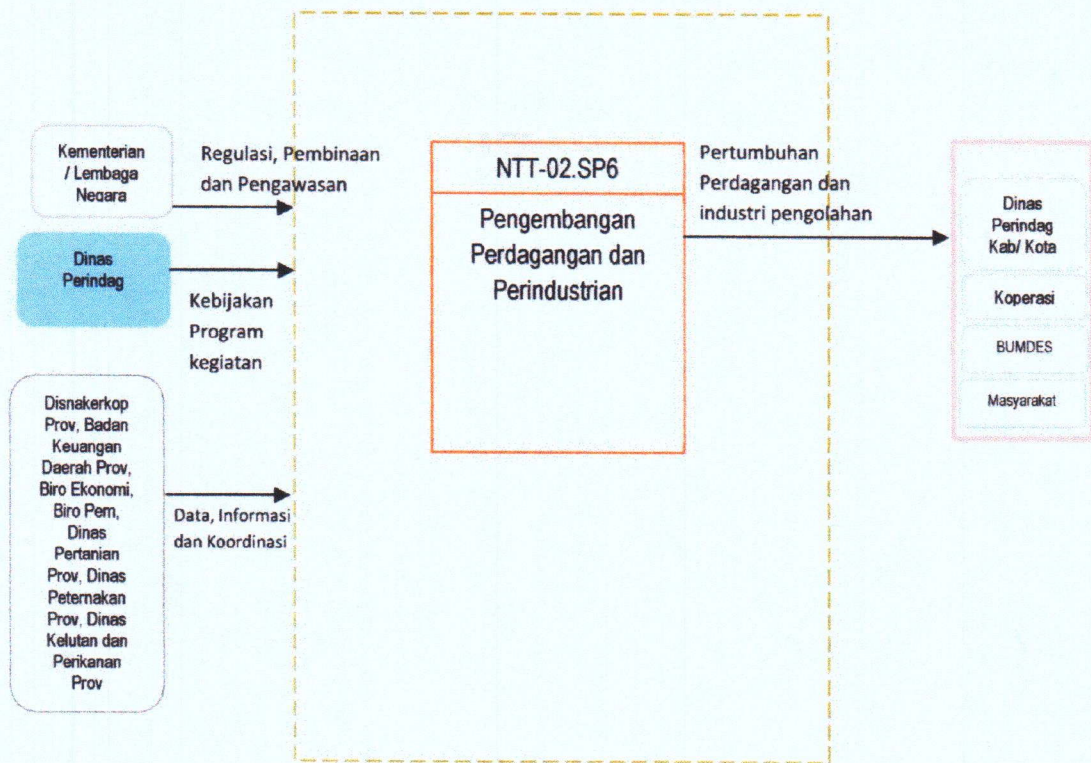
d. **NTT02.SP4 Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing dan nilai tambah Kelautan dan perikanan**



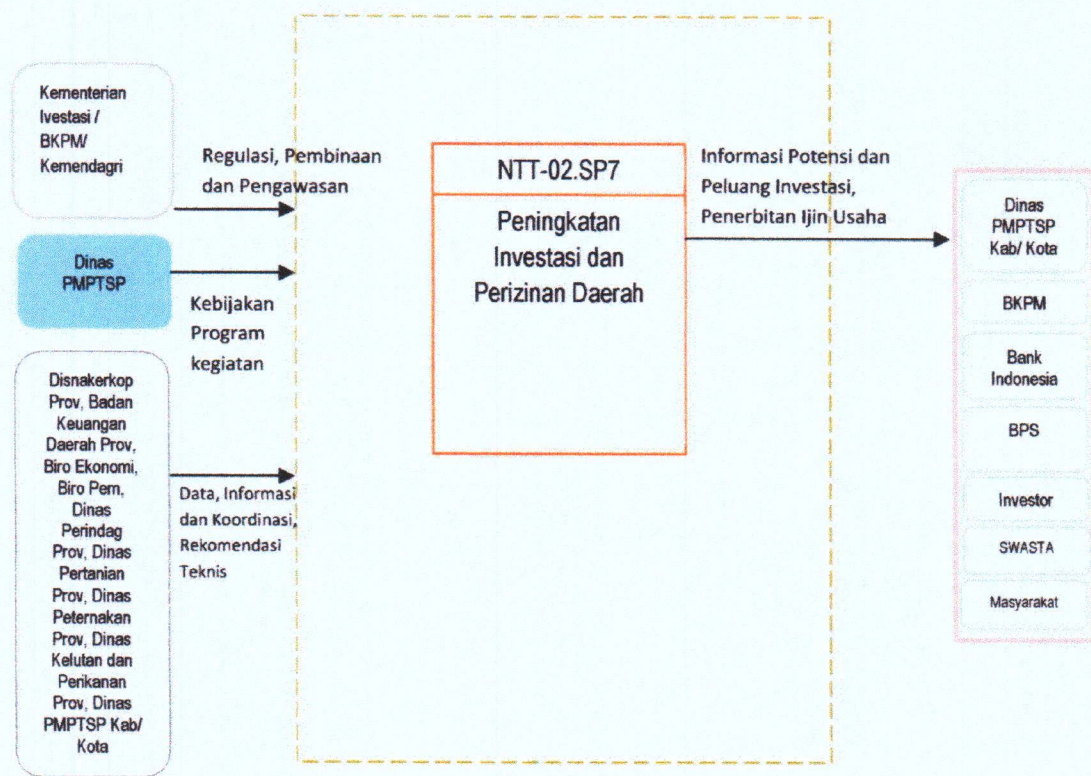
e. NTT02.SP5 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa



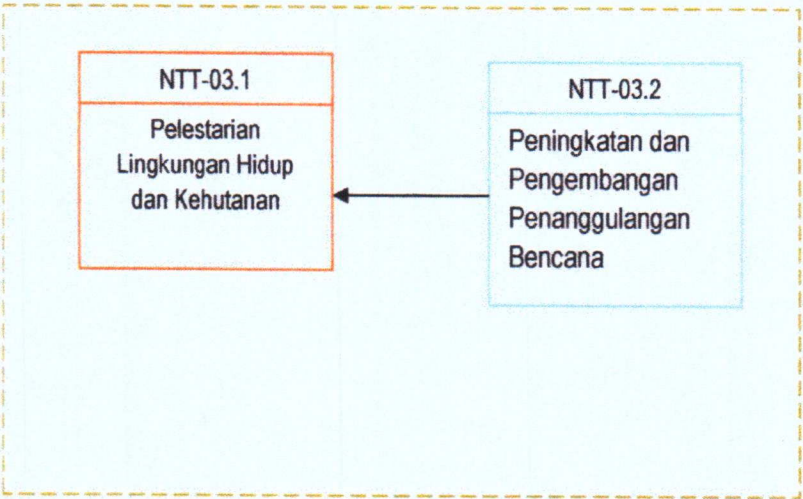
f. NTT02.SP6 Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian



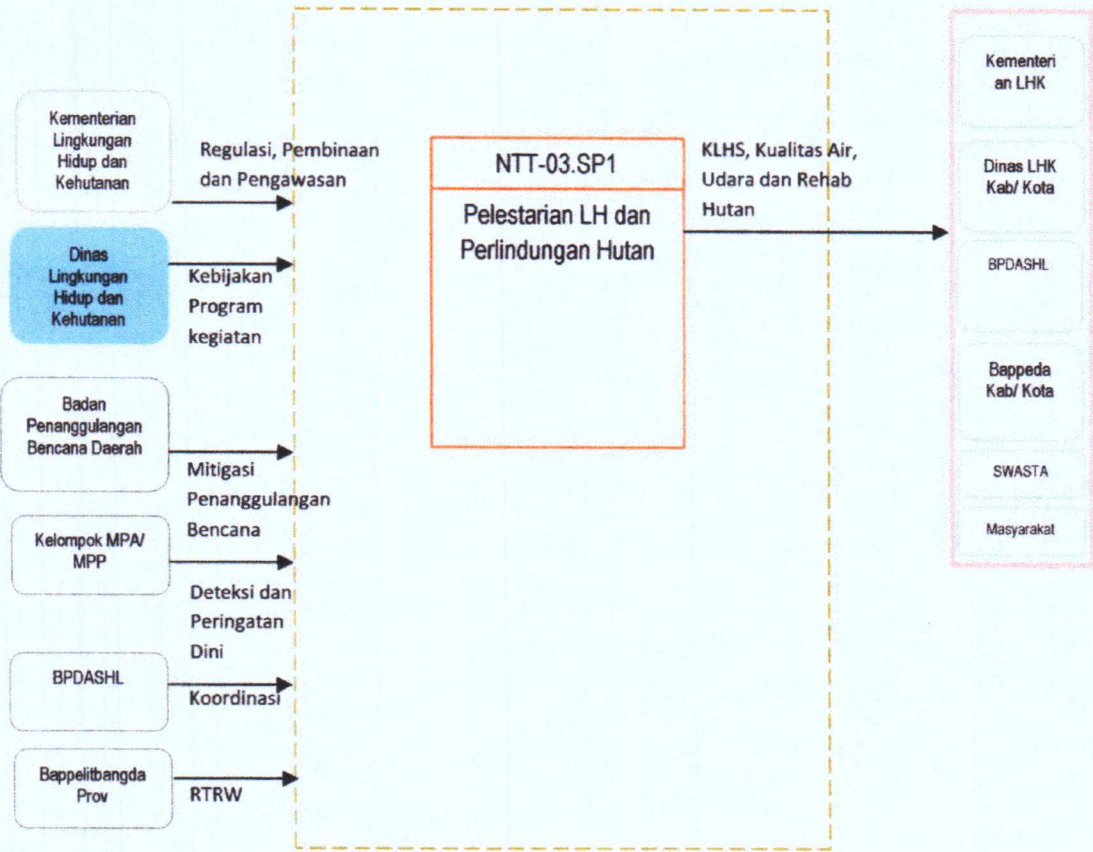
g. NTT02.SP7 Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah



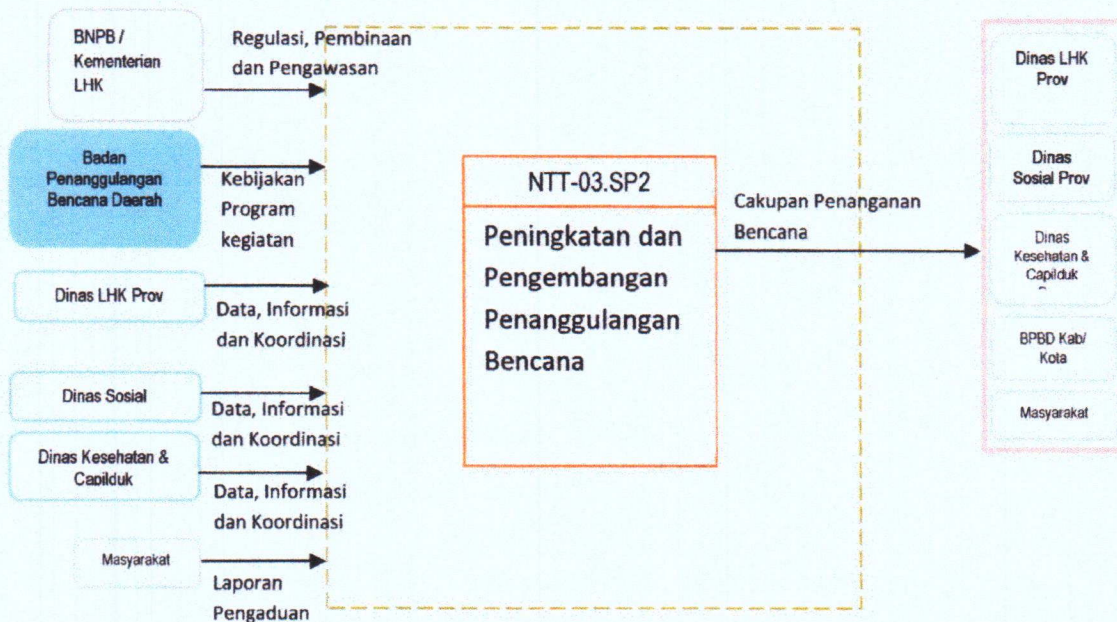
**PETA SUB PROSES**  
**NTT-03 PENINGKATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH**



**a. NTT03.SP1 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

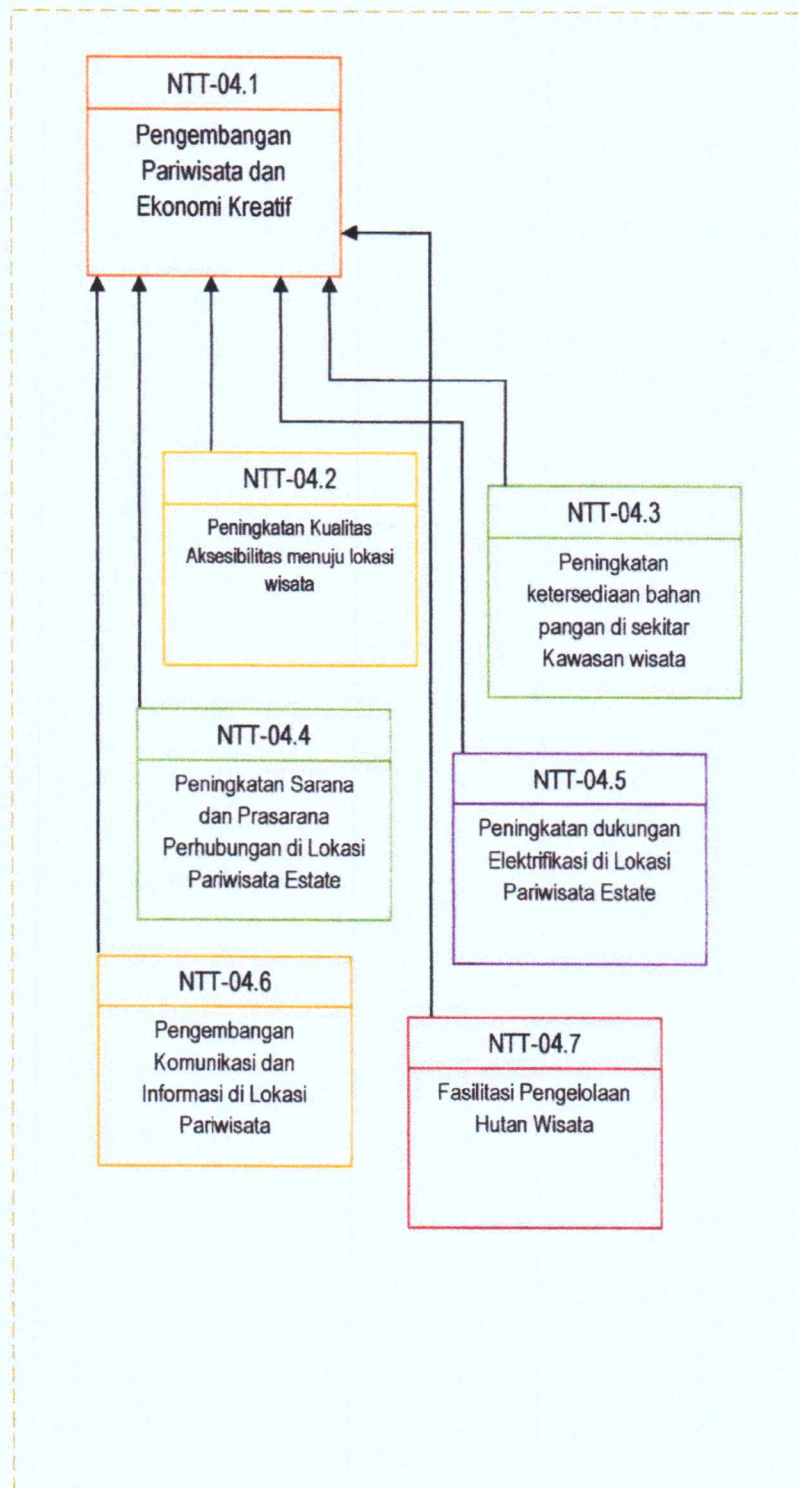


**b. NTT03.SP2 Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana**

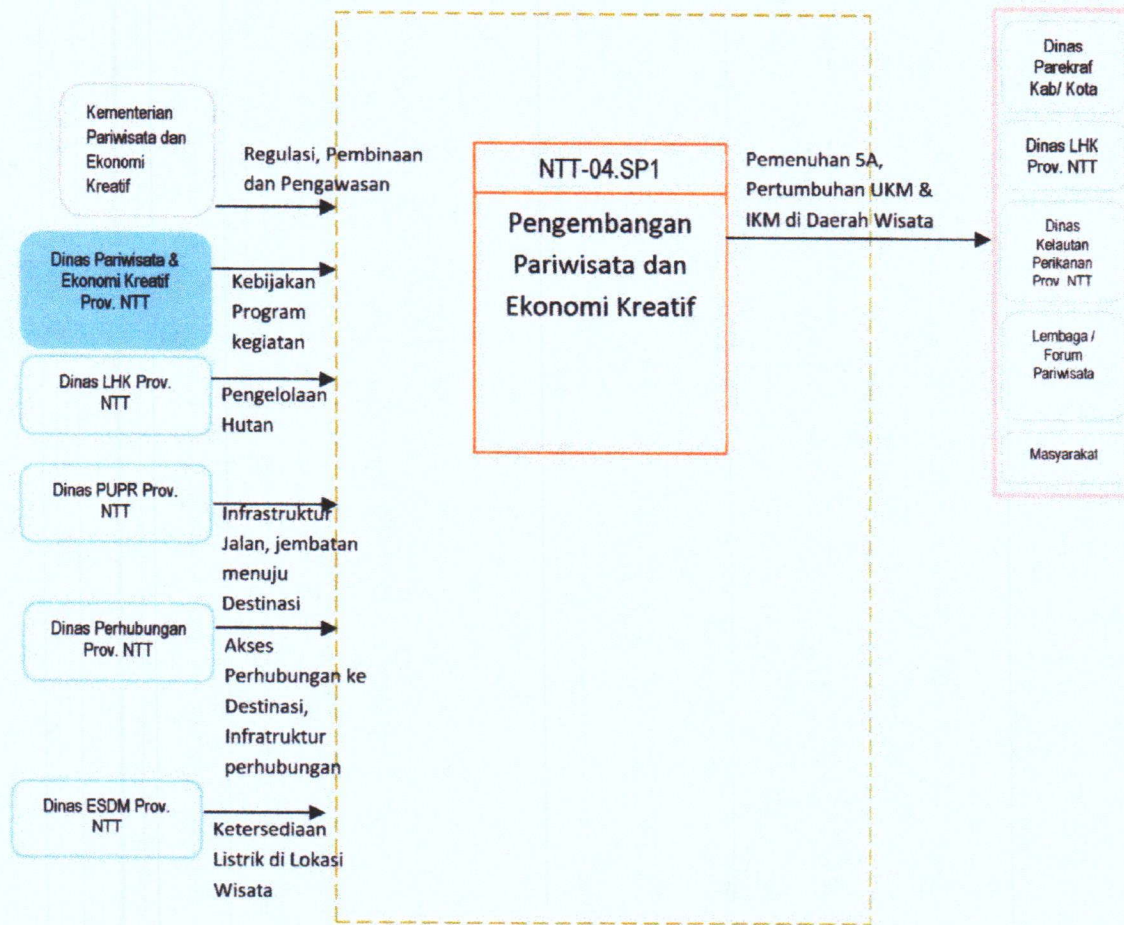


## PETA SUB PROSES

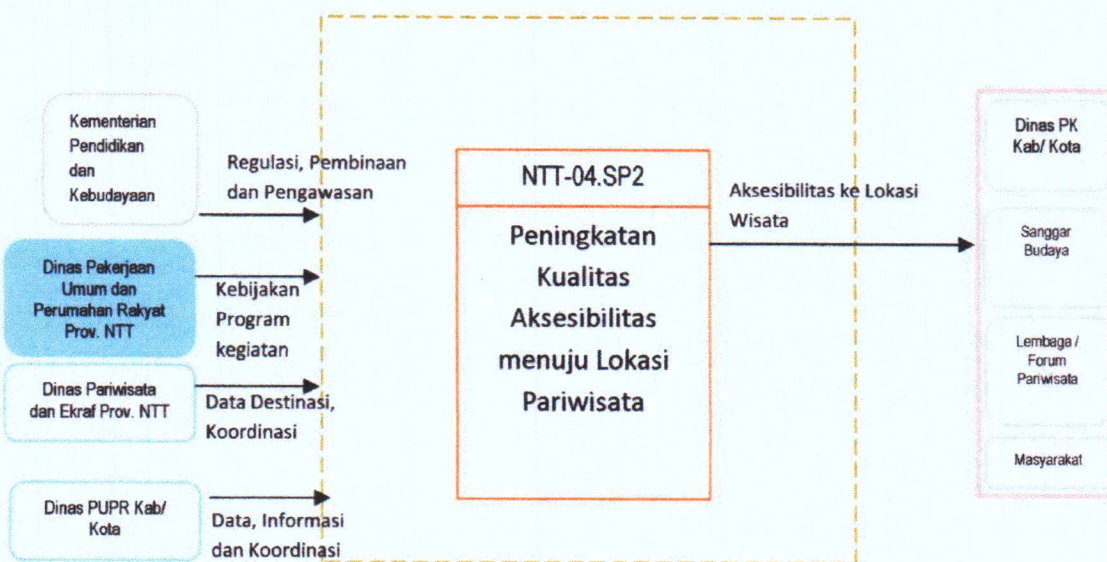
### NTT-04 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA



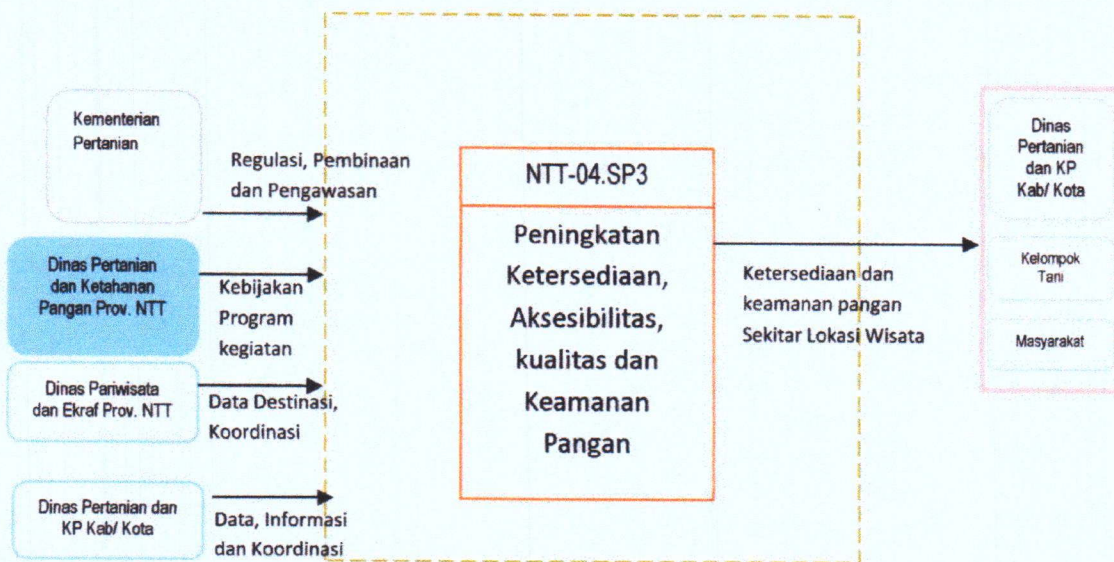
**a. NTT04.SP1 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**



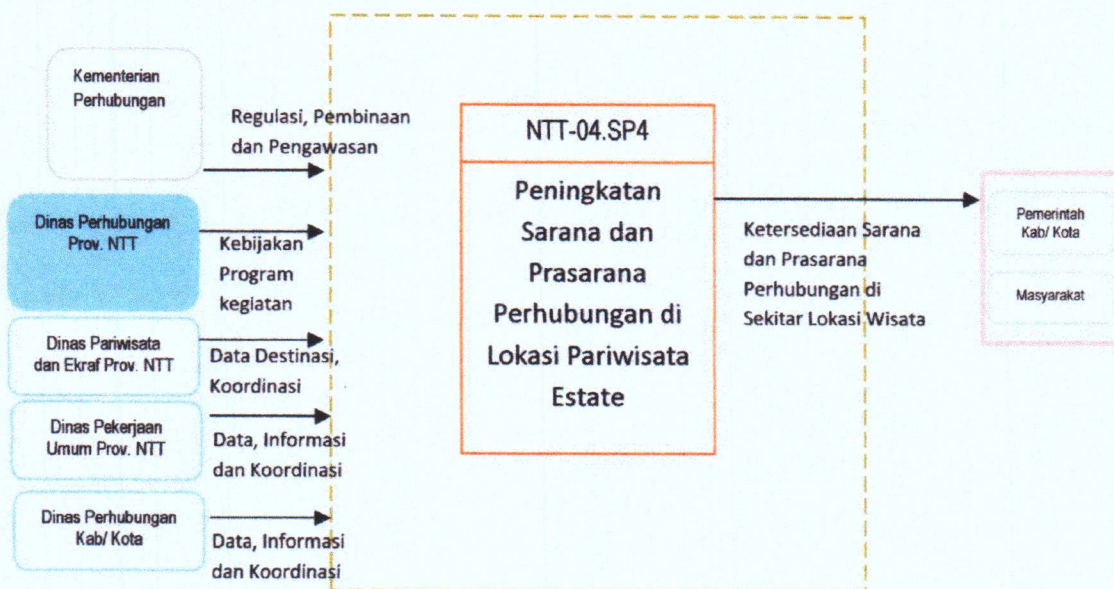
**b. NTT04.SP2 Peningkatan Kualitas Aksesibilitas menuju Lokasi Pariwisata**



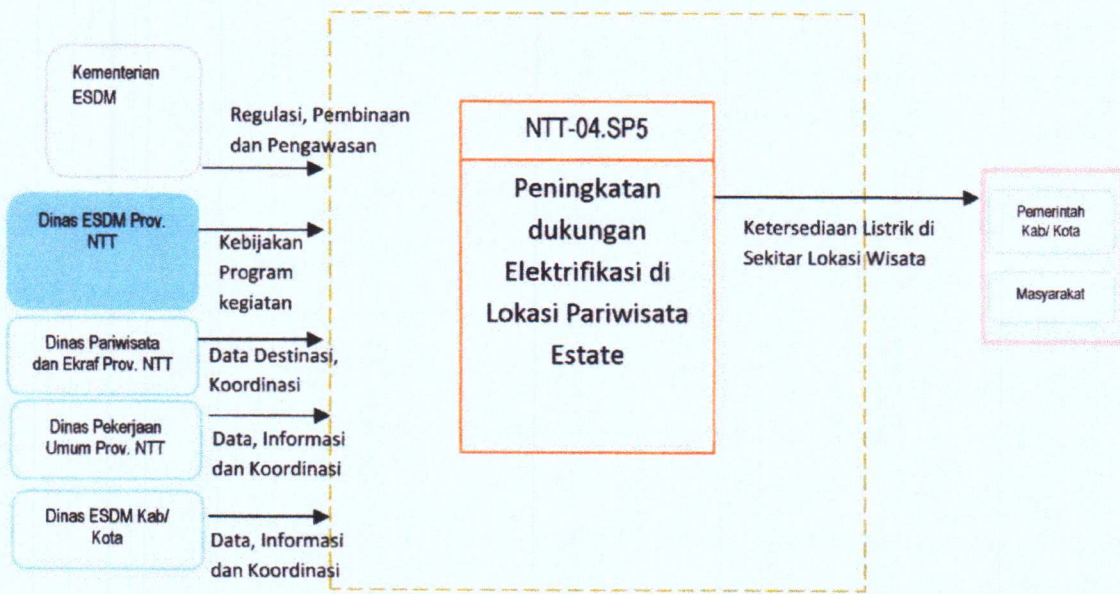
c. **NTT04.SP3 Peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan**



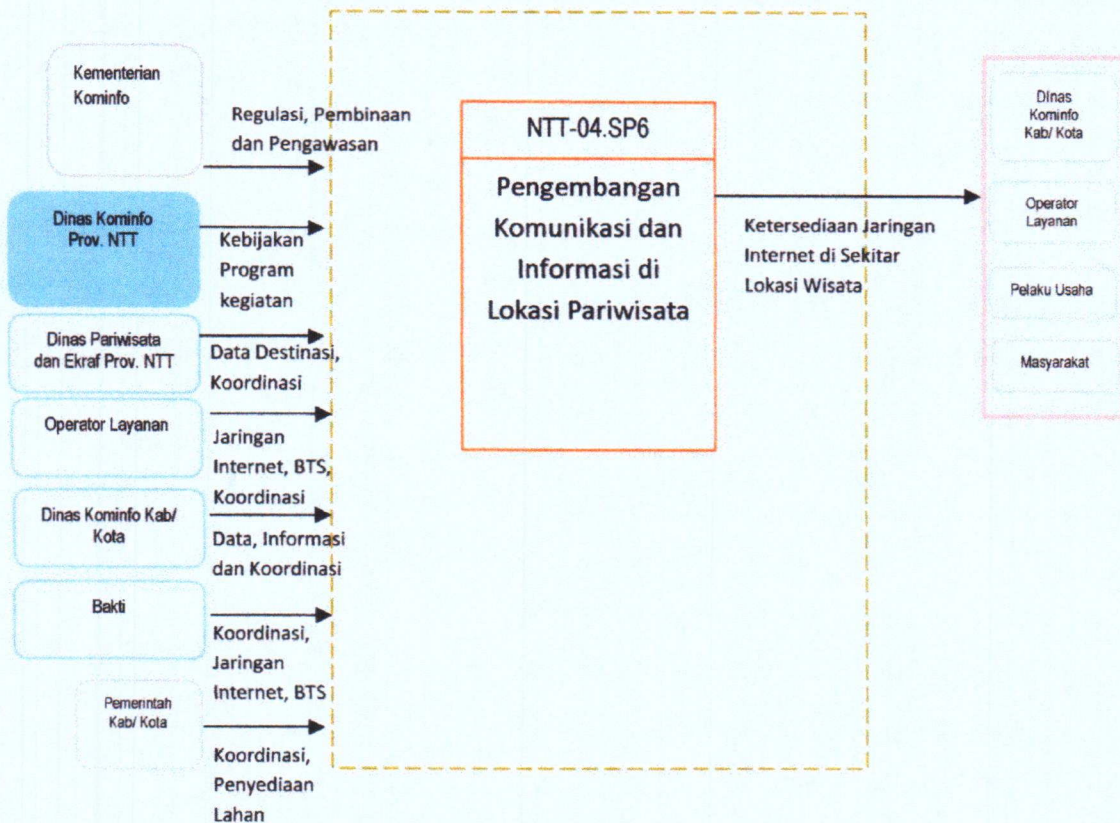
d. **NTT04.SP4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Lokasi Pariwisata Estate**



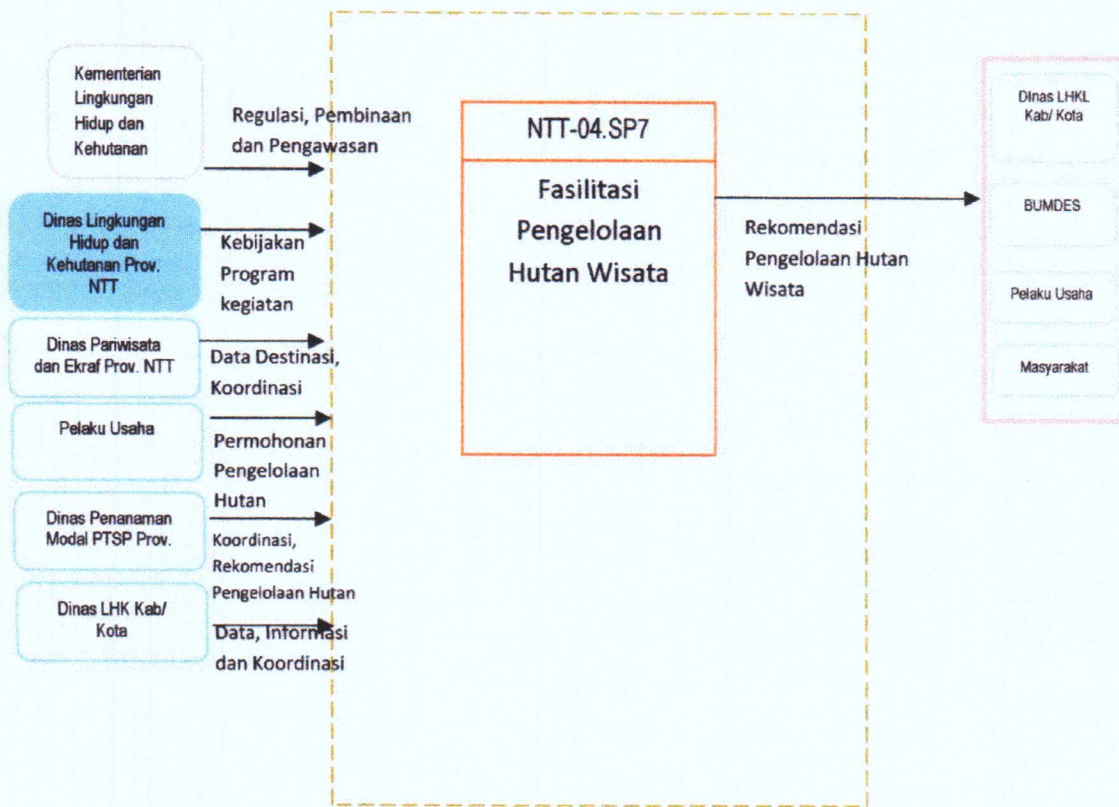
e. NTT04.SP5 Peningkatan dukungan Elektrifikasi di Lokasi Pariwisata Estate



f. NTT04.SP6 Pengembangan Prasarana Komunikasi dan Informasi di Lokasi Pariwisata

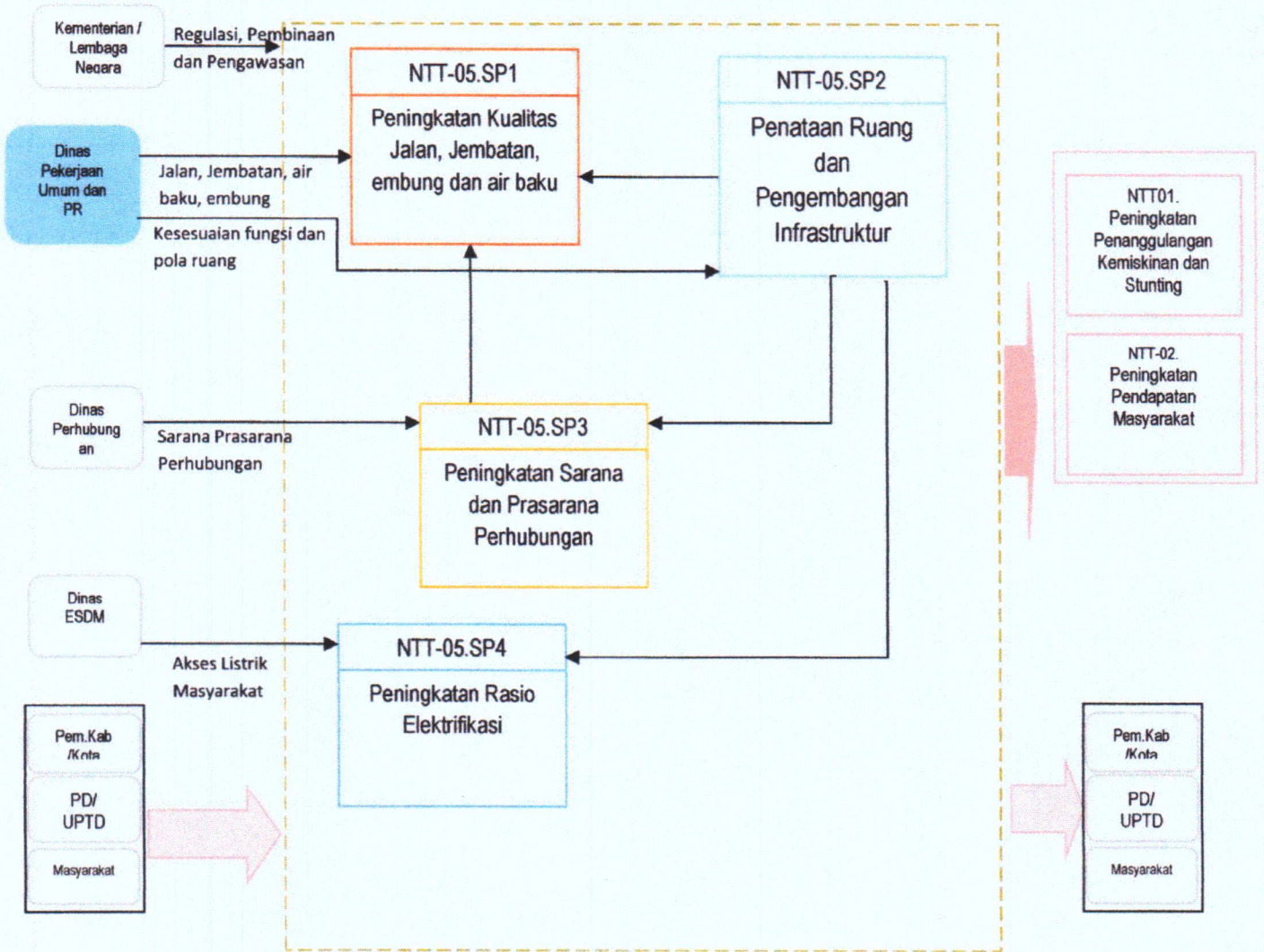


**g. NTT04.SP7 Fasilitas Pengelolaan Hutan Wisata**

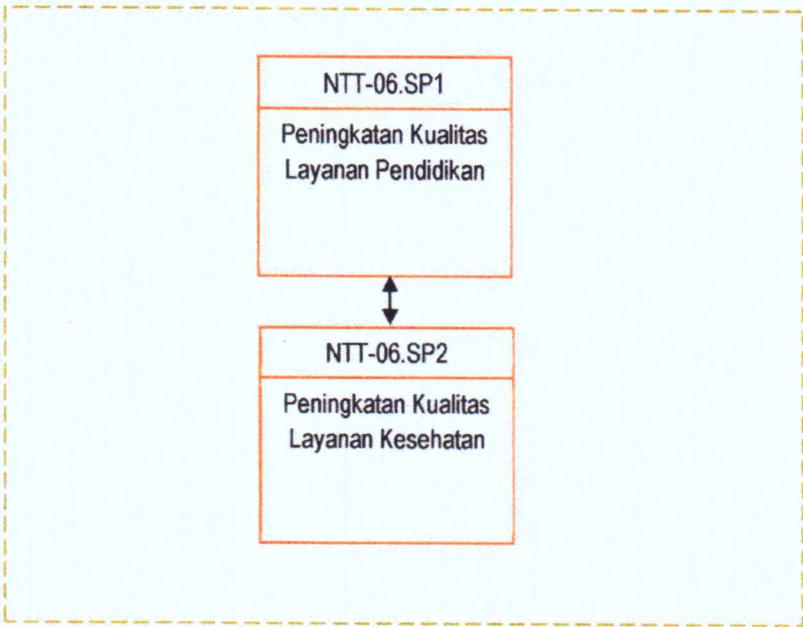


# PETA SUB PROSES

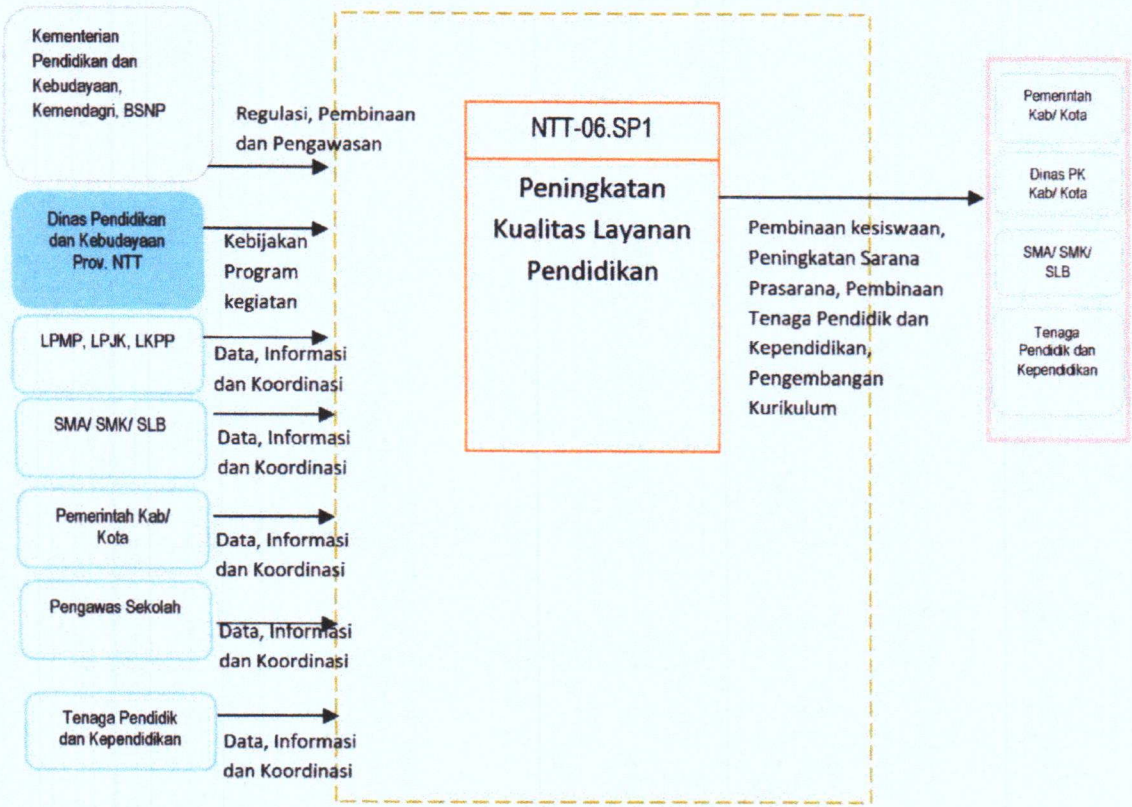
## NTT-05 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR, JALAN, AIR, ENERGI DAN TRANSPORTASI



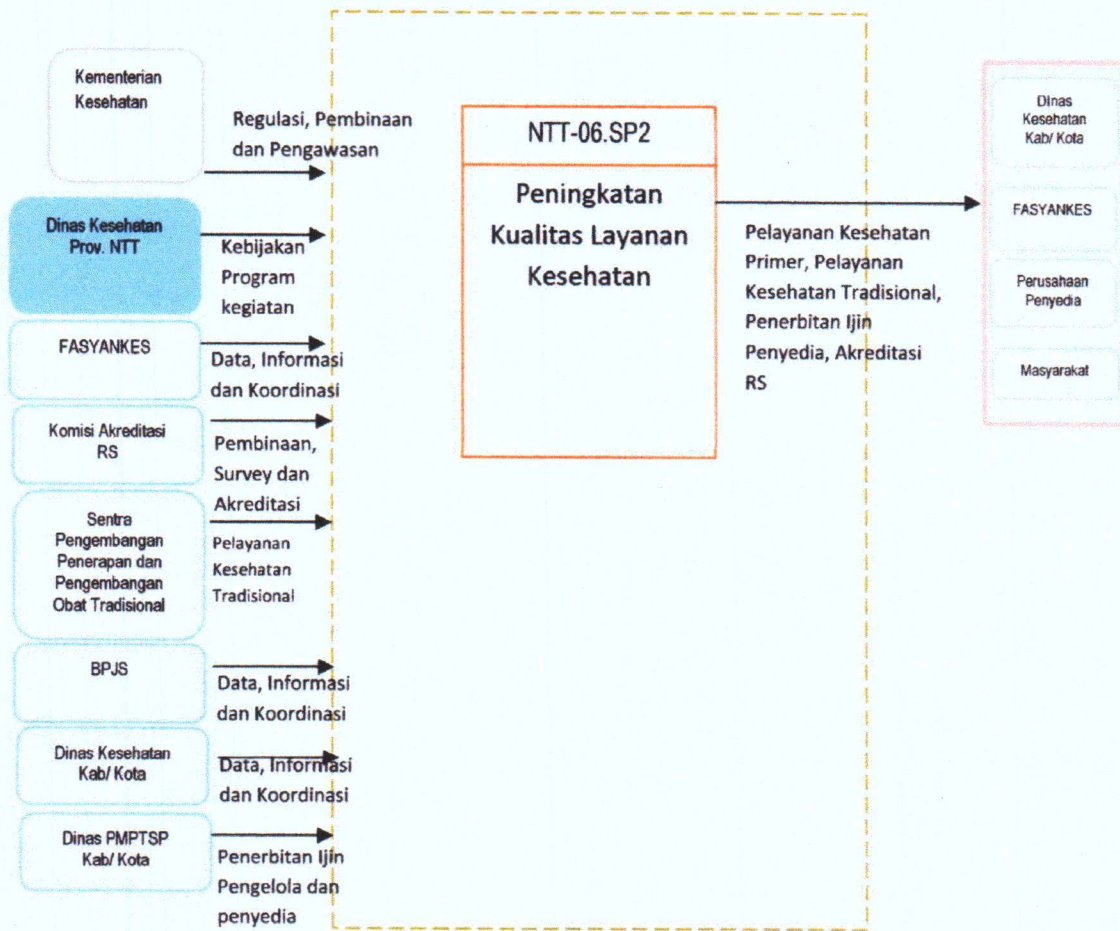
**PETA SUB PROSES**  
**NTT-06 PENINGKATAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**



**a. NTT06.SP1 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan**

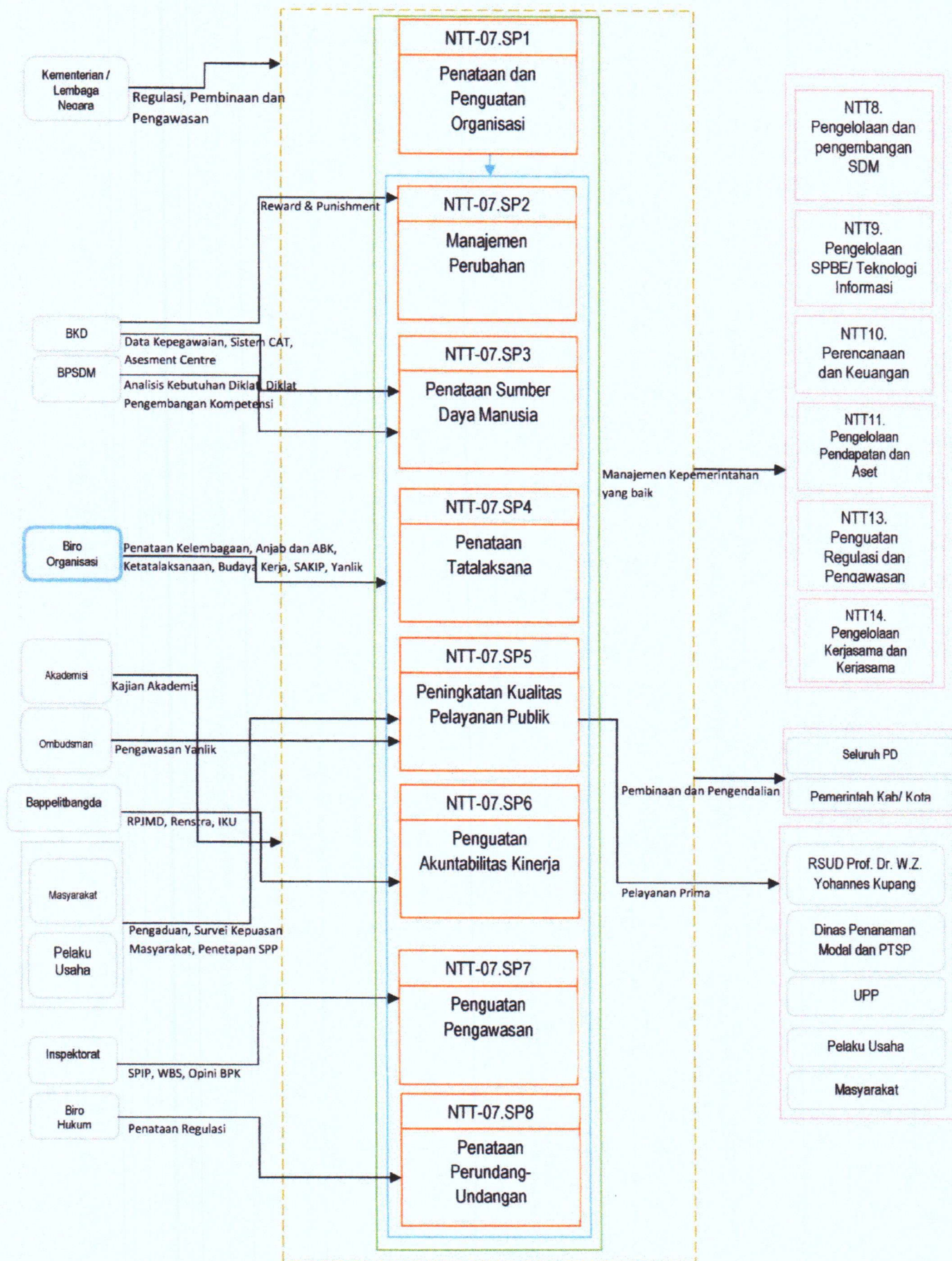


**b. NTT06.SP2 Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan**

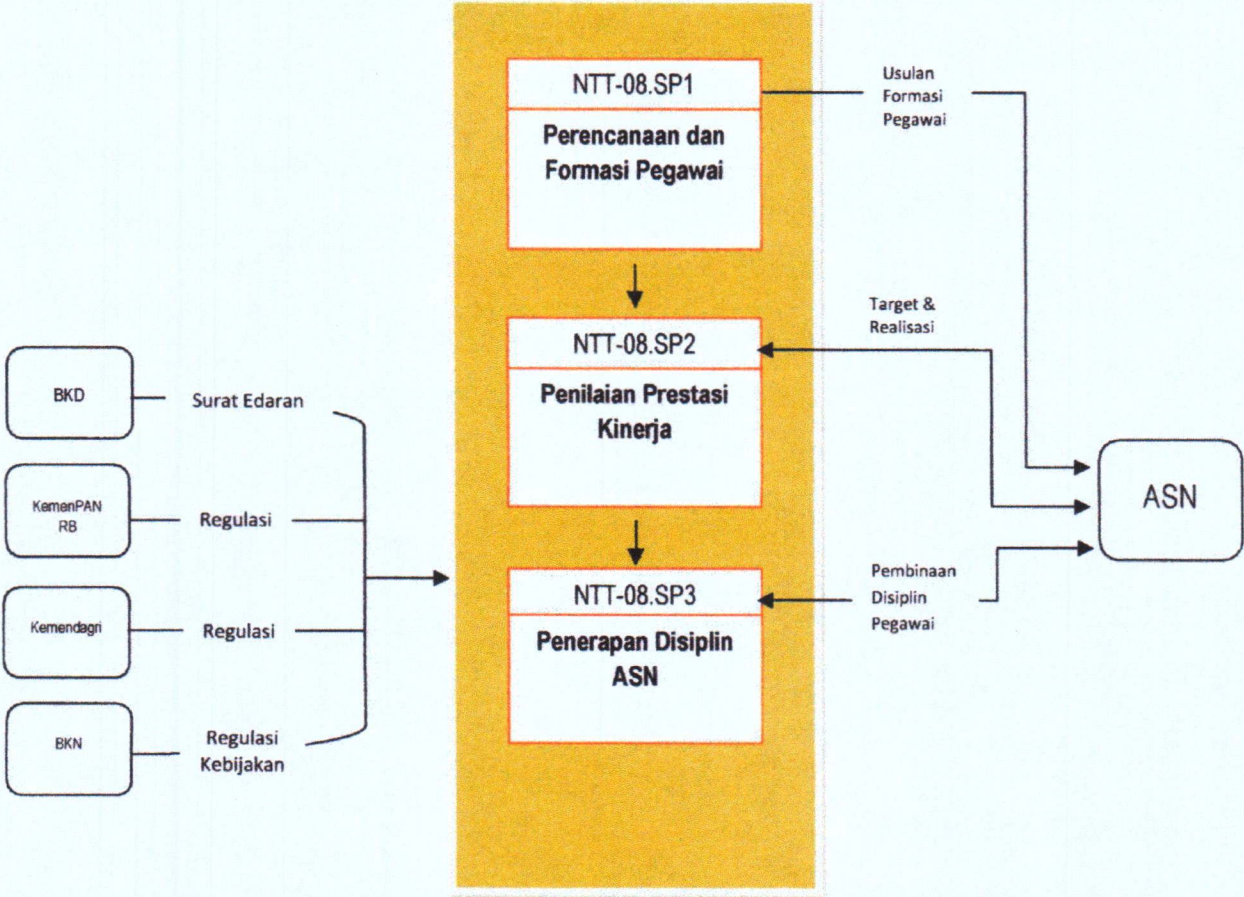


# PETA SUB PROSES

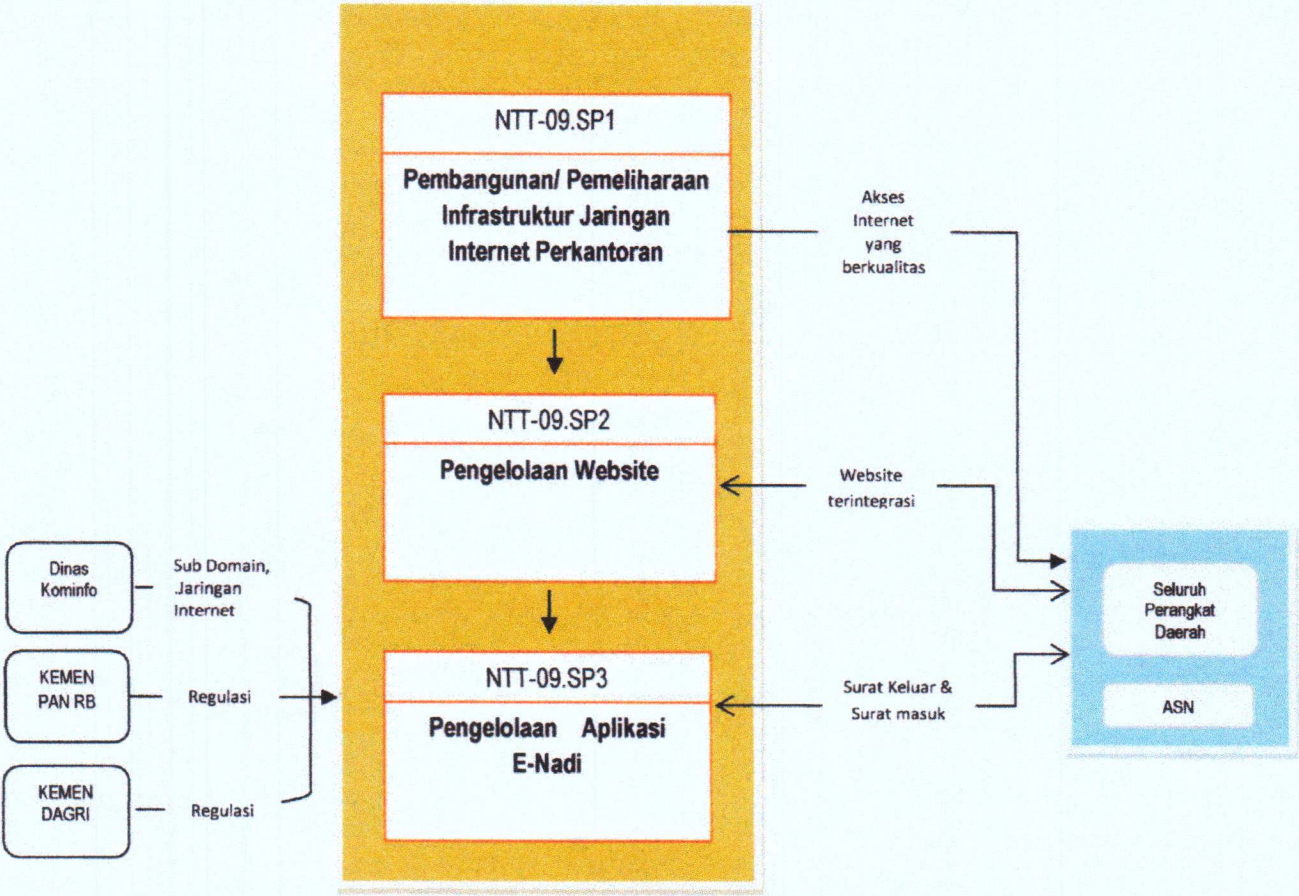
## NTT-07 PENINGKATAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI



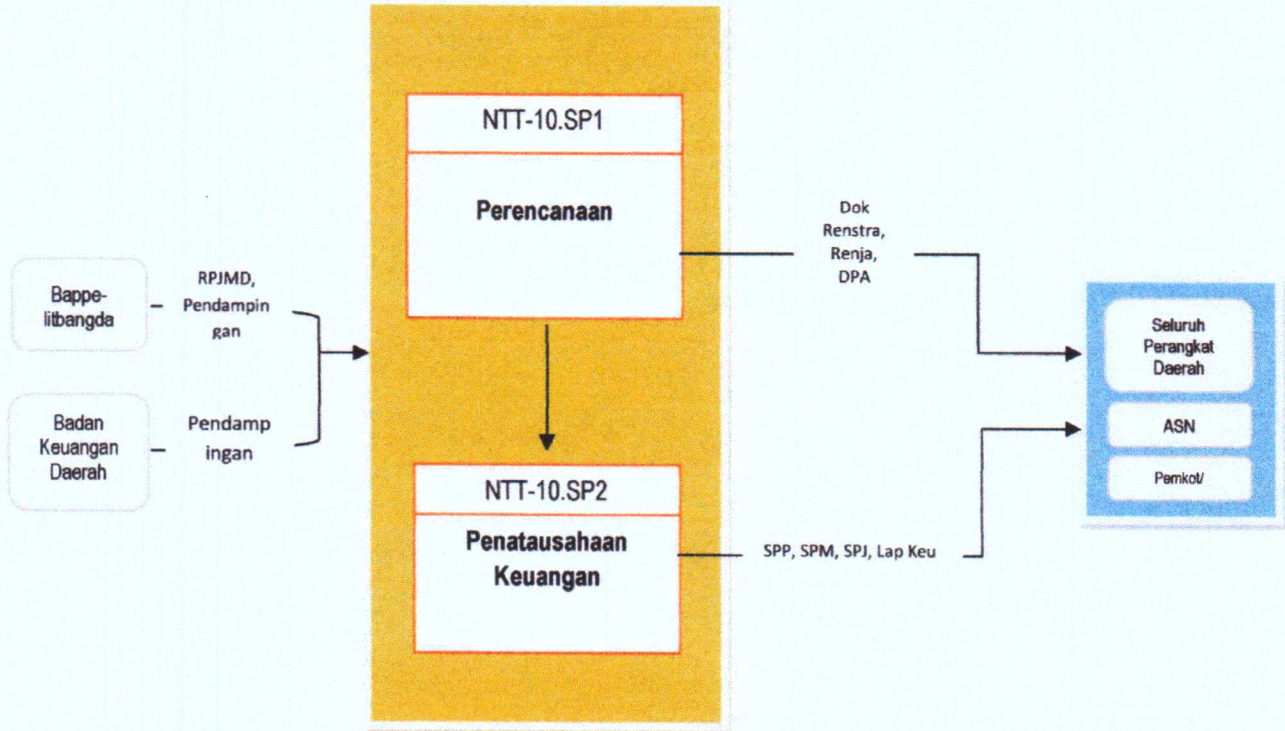
**PETA SUB PROSES**  
**NTT-08. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**



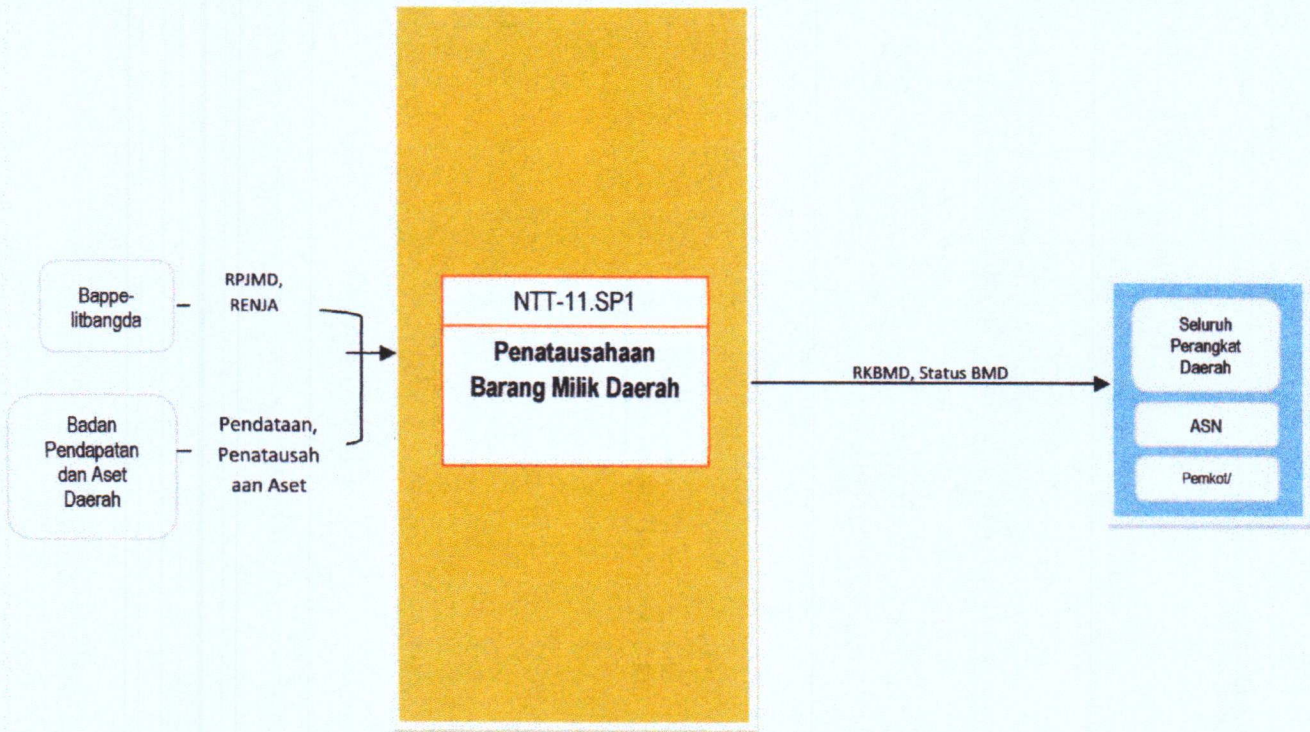
**PETA SUB PROSES**  
**NTT-09 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**



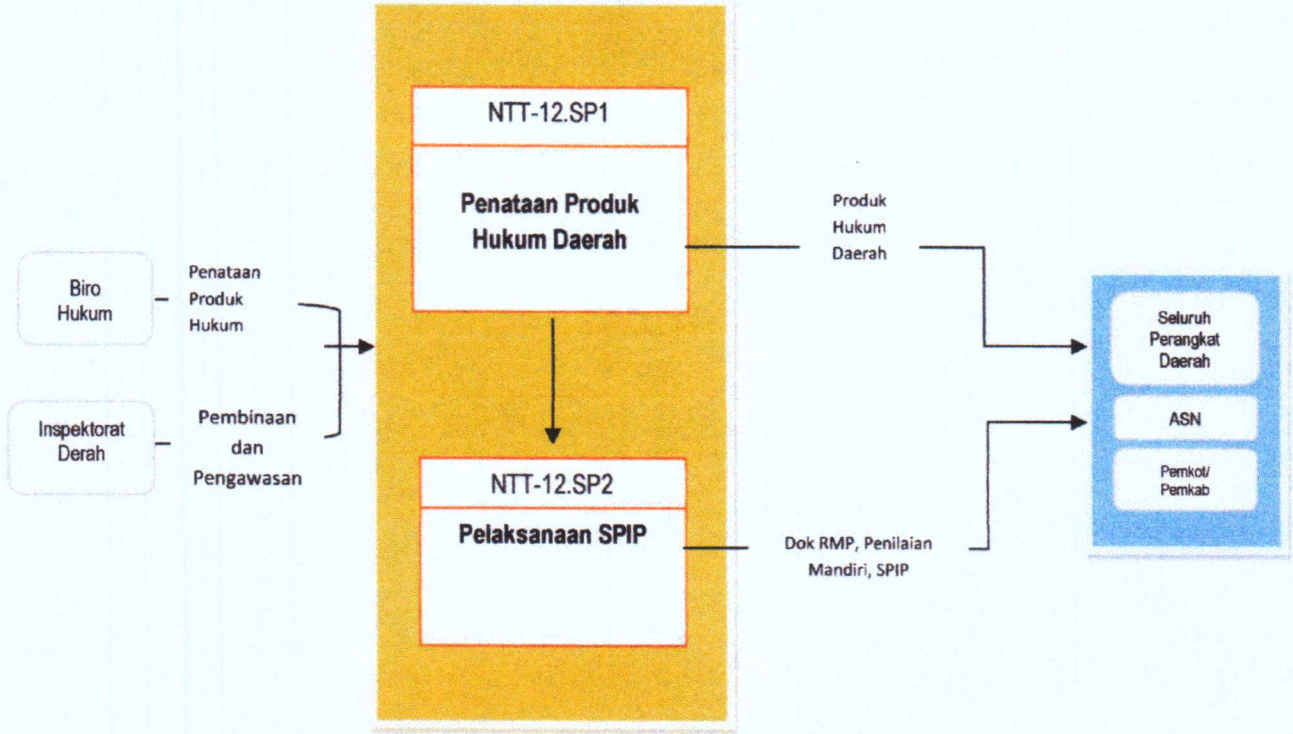
**PETA SUB PROSES**  
**NTT-10. PERENCANAAN DAN KEUANGAN**



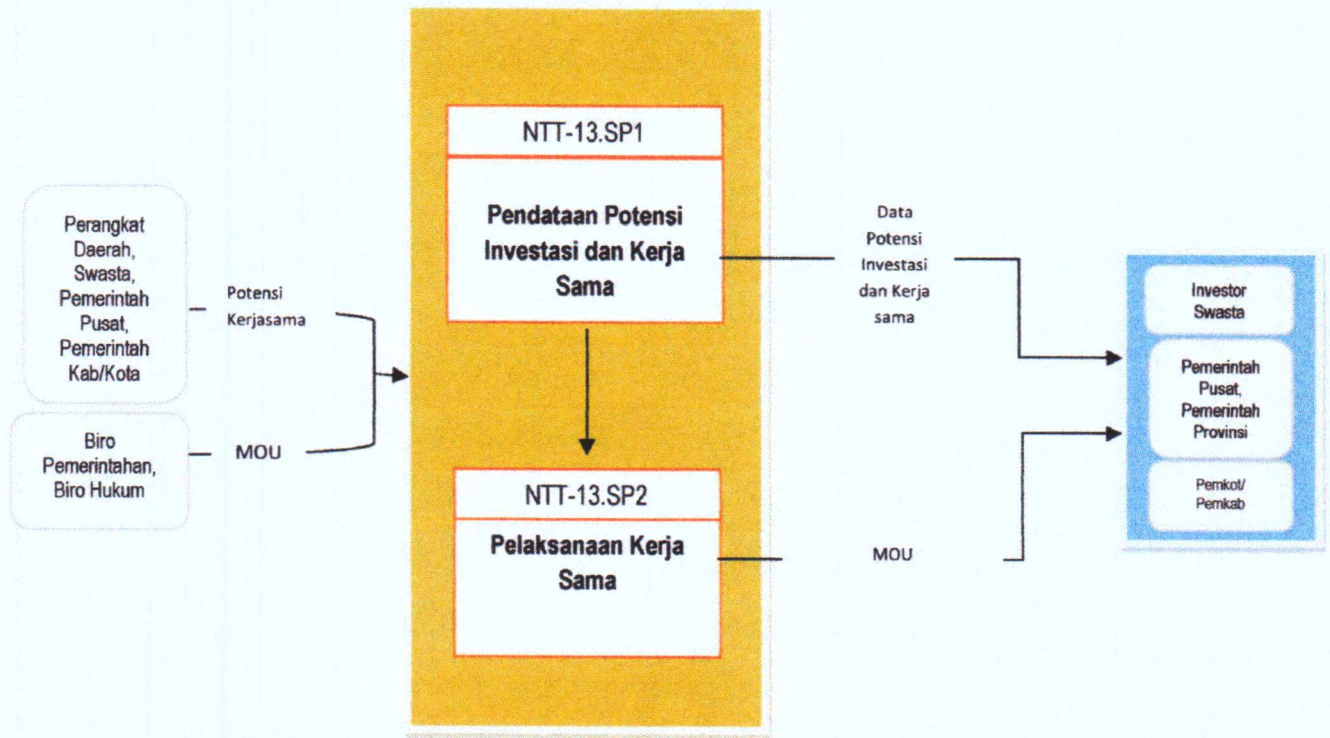
**PETA SUB PROSES**  
**NTT-11. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ASET**



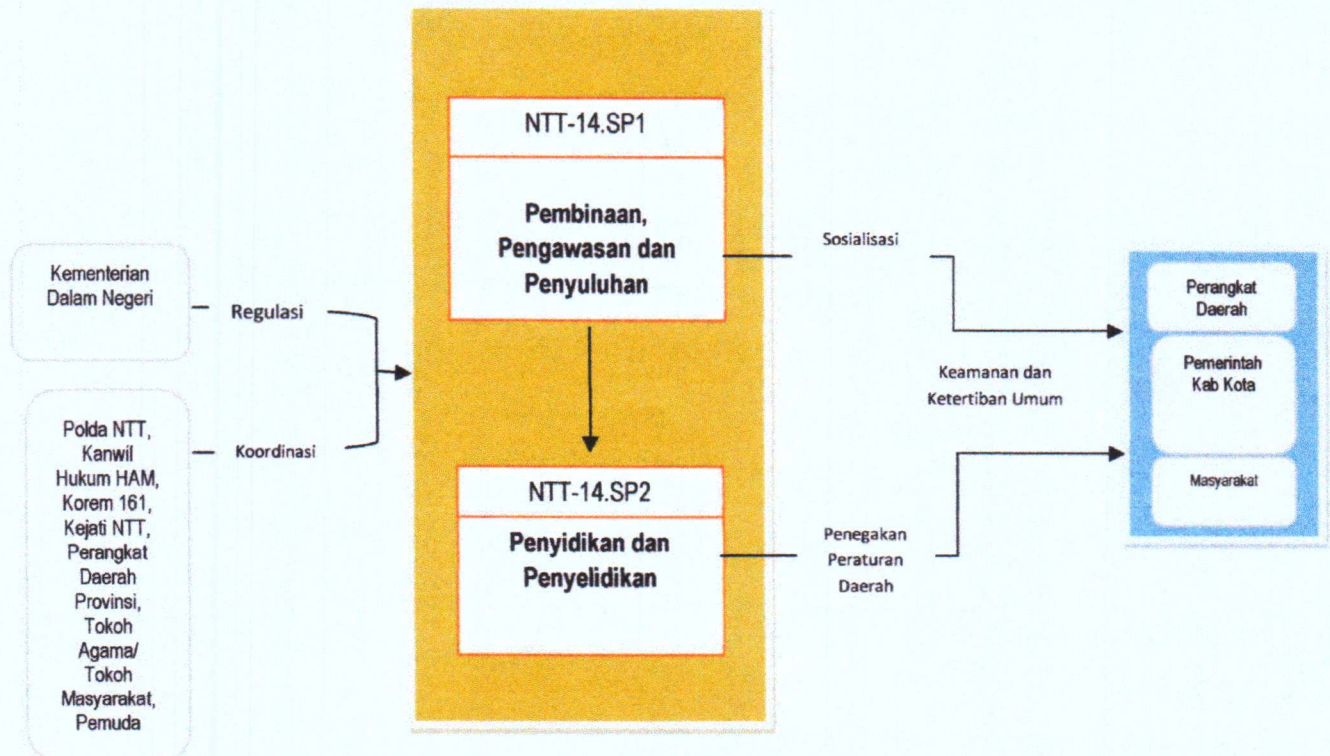
**PETA SUB PROSES**  
**NTT-12. PENGUATAN REGULASI DAN PENGAWASAN**



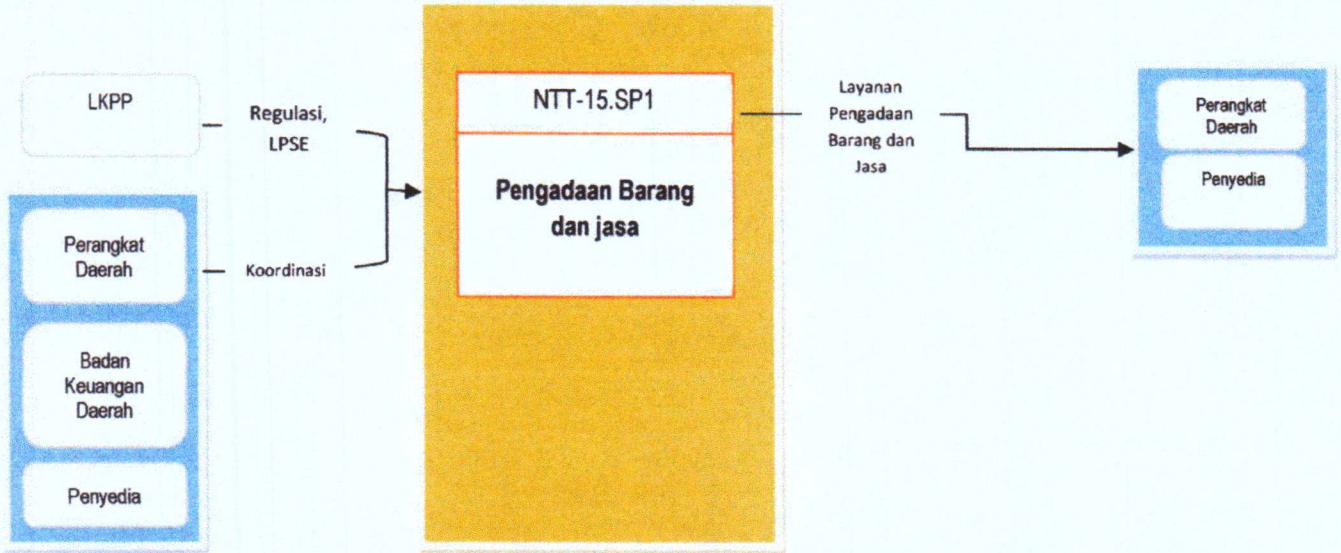
**PETA SUB PROSES**  
**NTT-13. PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**



**PETA SUB PROSES**  
**NTT-14. PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

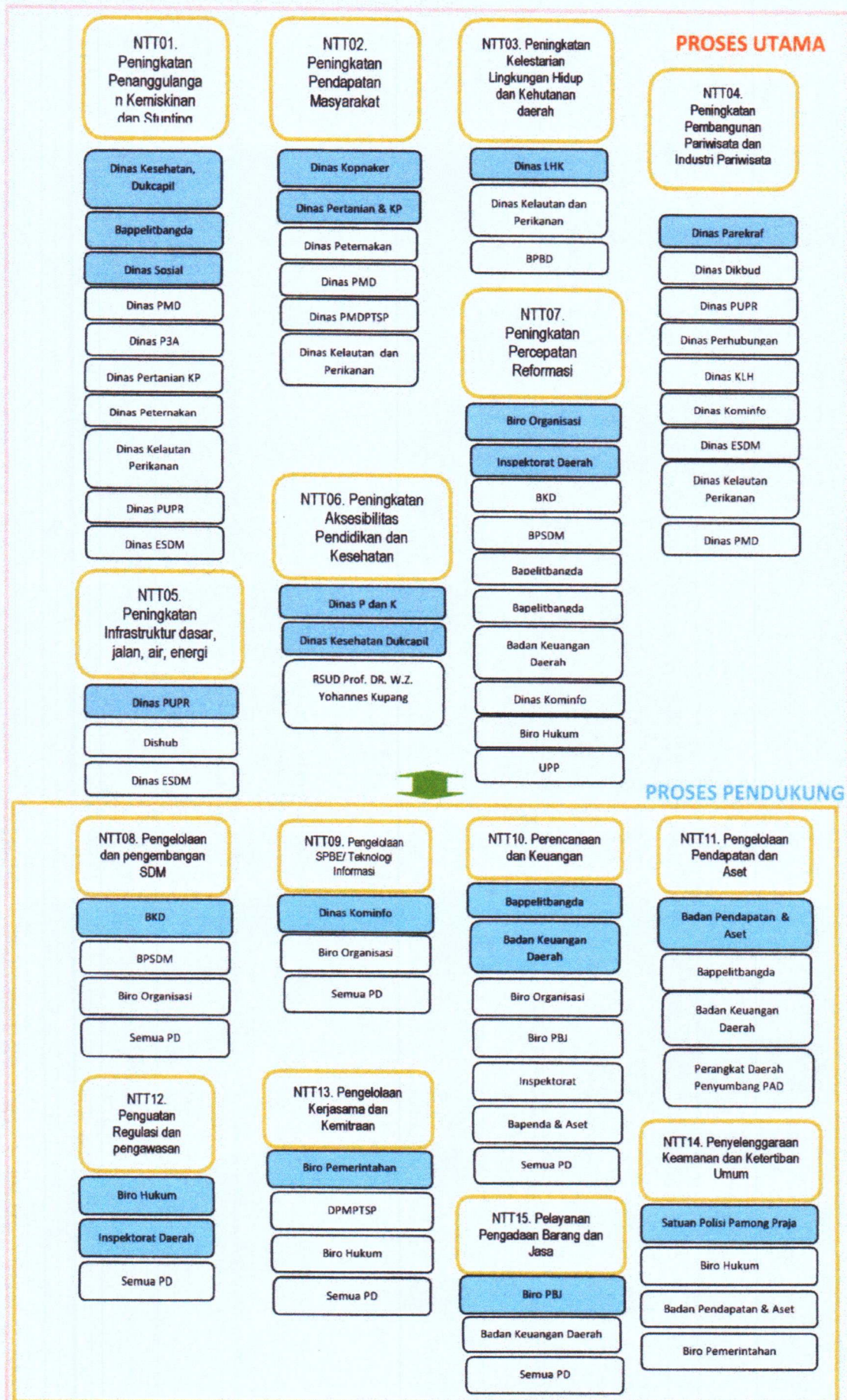


**PETA SUB PROSES**  
**NTT-15. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**



### C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

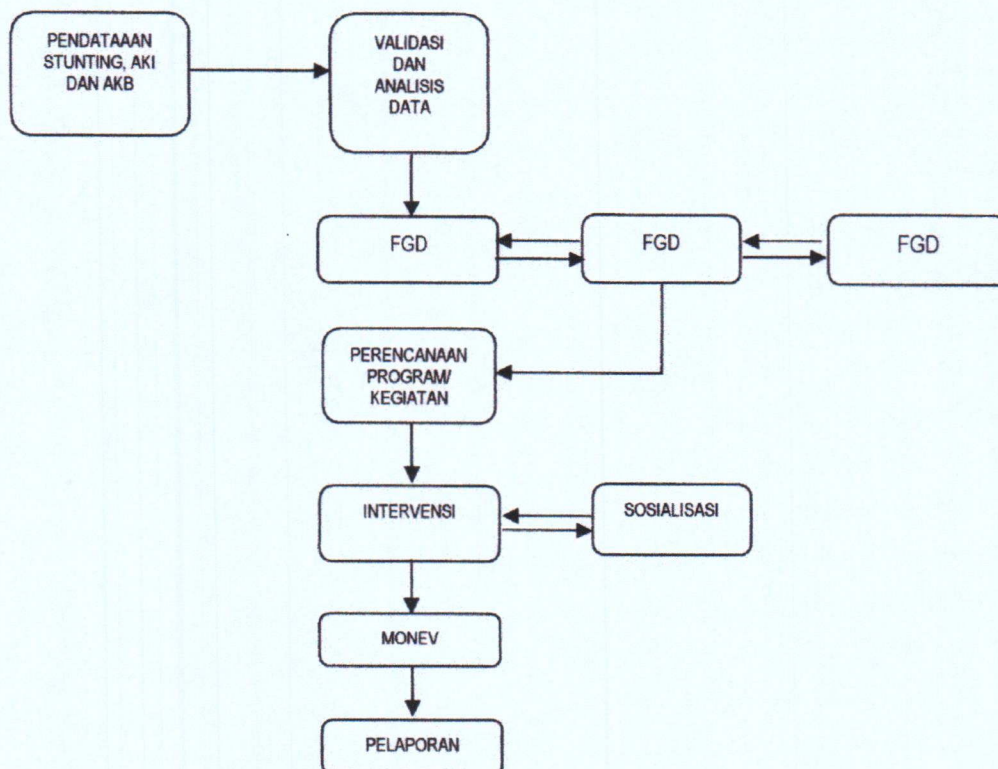


## D. PETA LINTAS FUNGSI

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

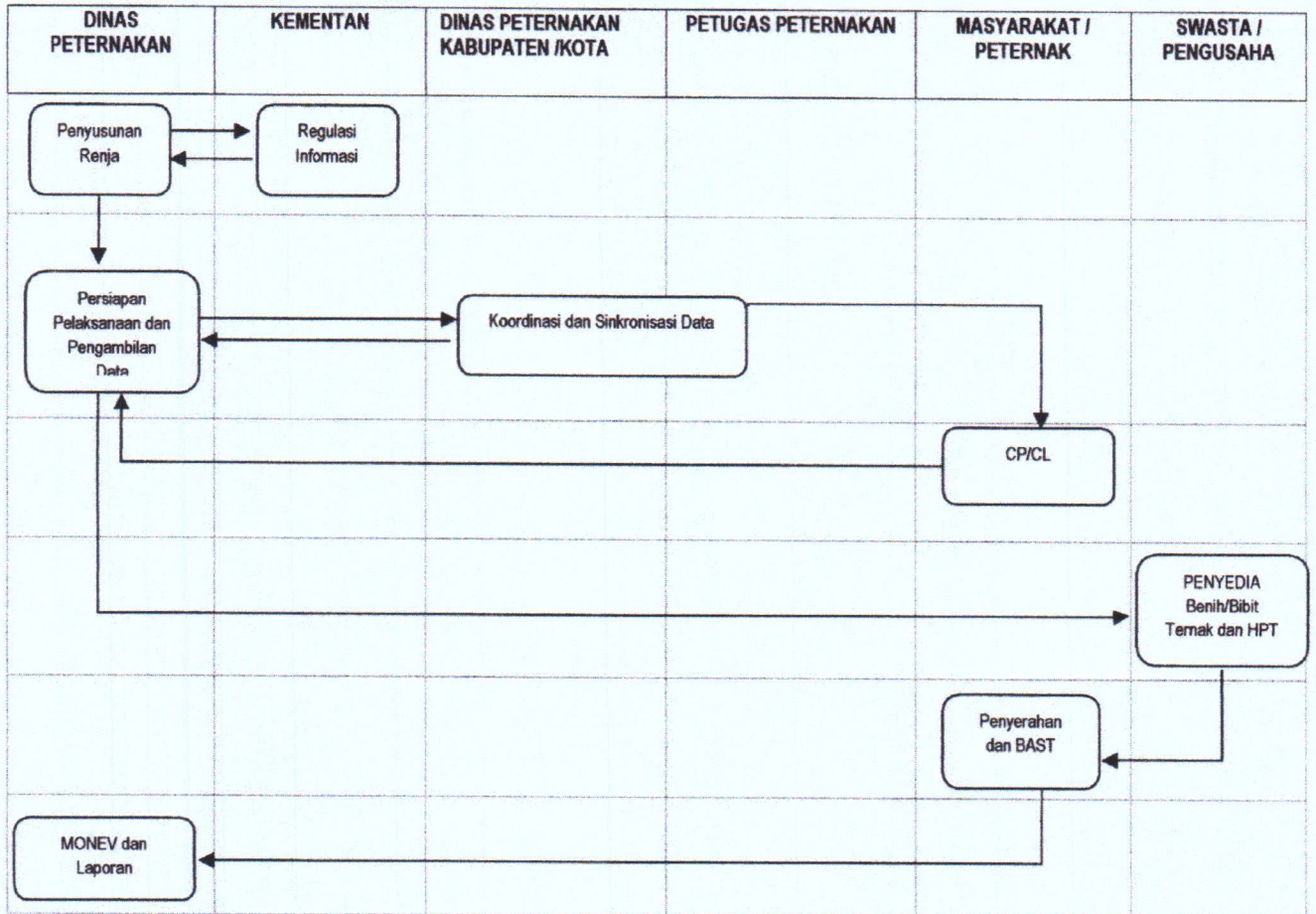
### NTT-01.SP1. PENANGGULANGAN MASALAH GIZI BALITA

<b>DINKES KAB/KOTA</b>	<b>DINKES DUKCAPIL PROVINSI</b>	<b>POKJA AMPL, POKJA STUNTING AKI AKB, BAPPELITBANGDA, TP PKK, LSM</b>	<b>TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT</b>
----------------------------	---	--	---

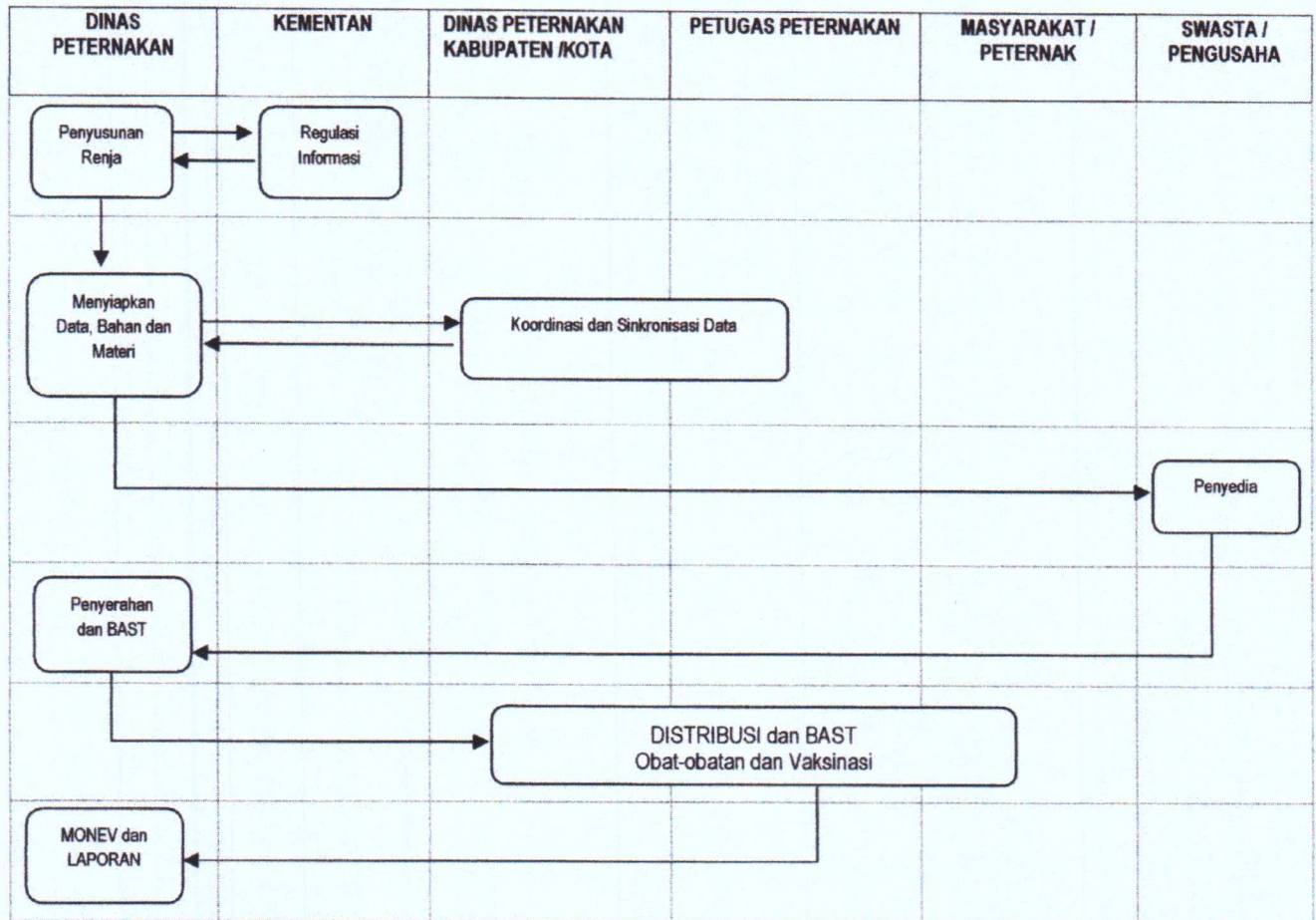


NTT-01.SP2. PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN

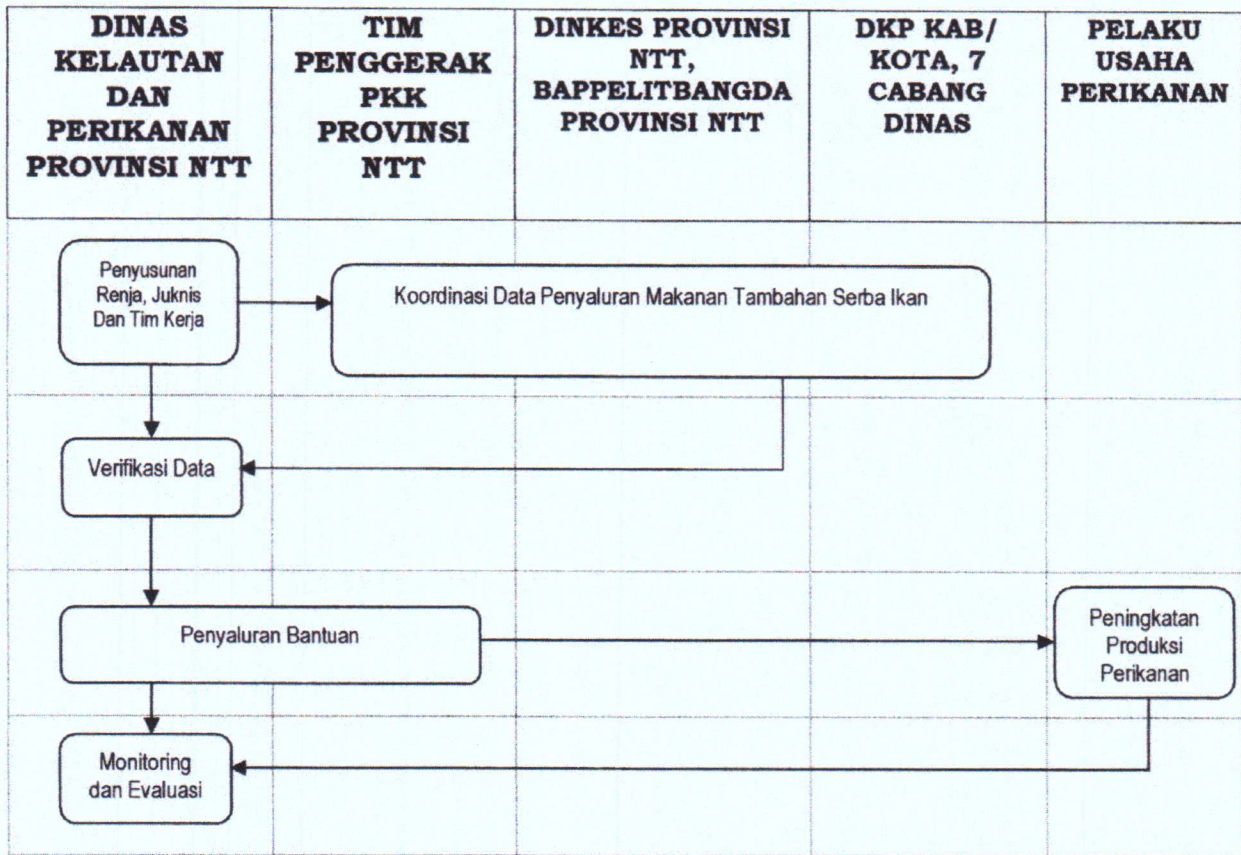
A. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN



**B. PENGENDALIAN RESIKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS**

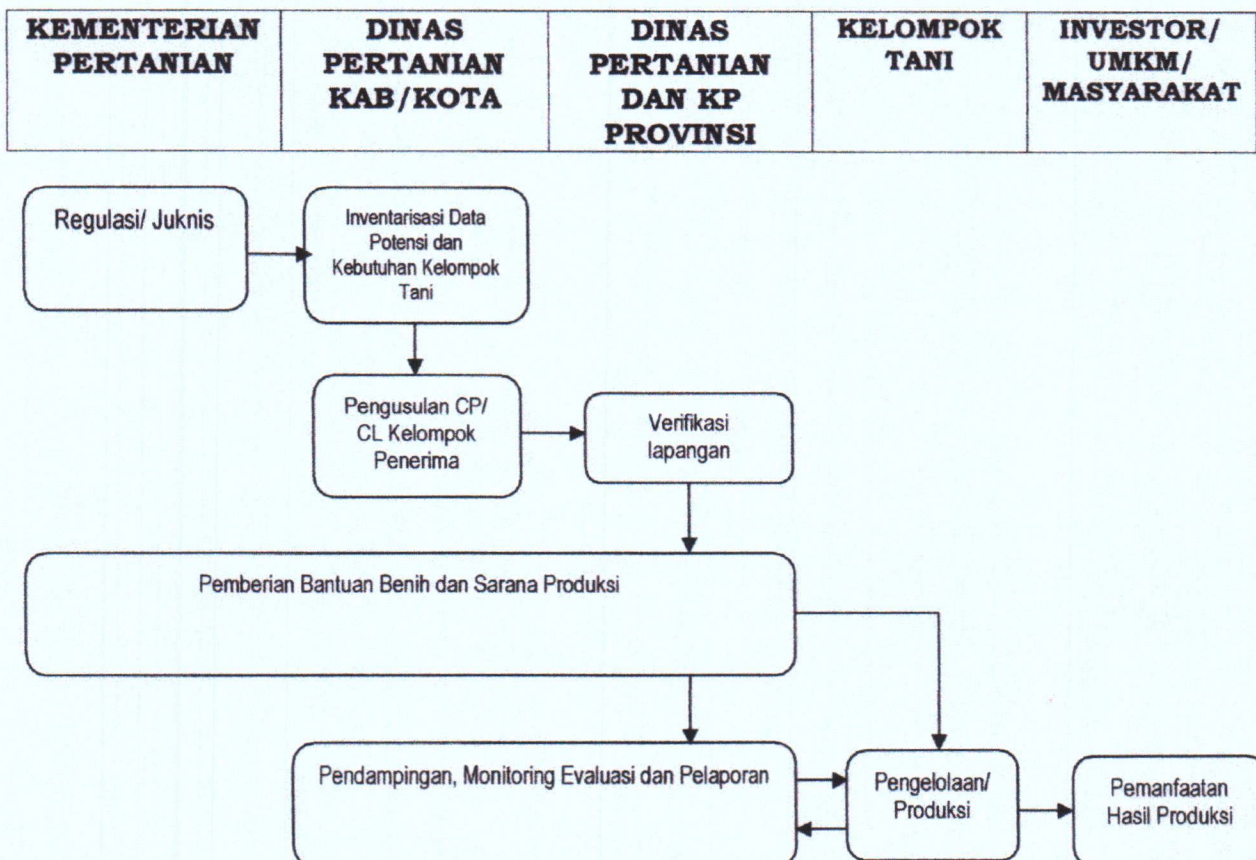


**NTT-01.SP3. PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



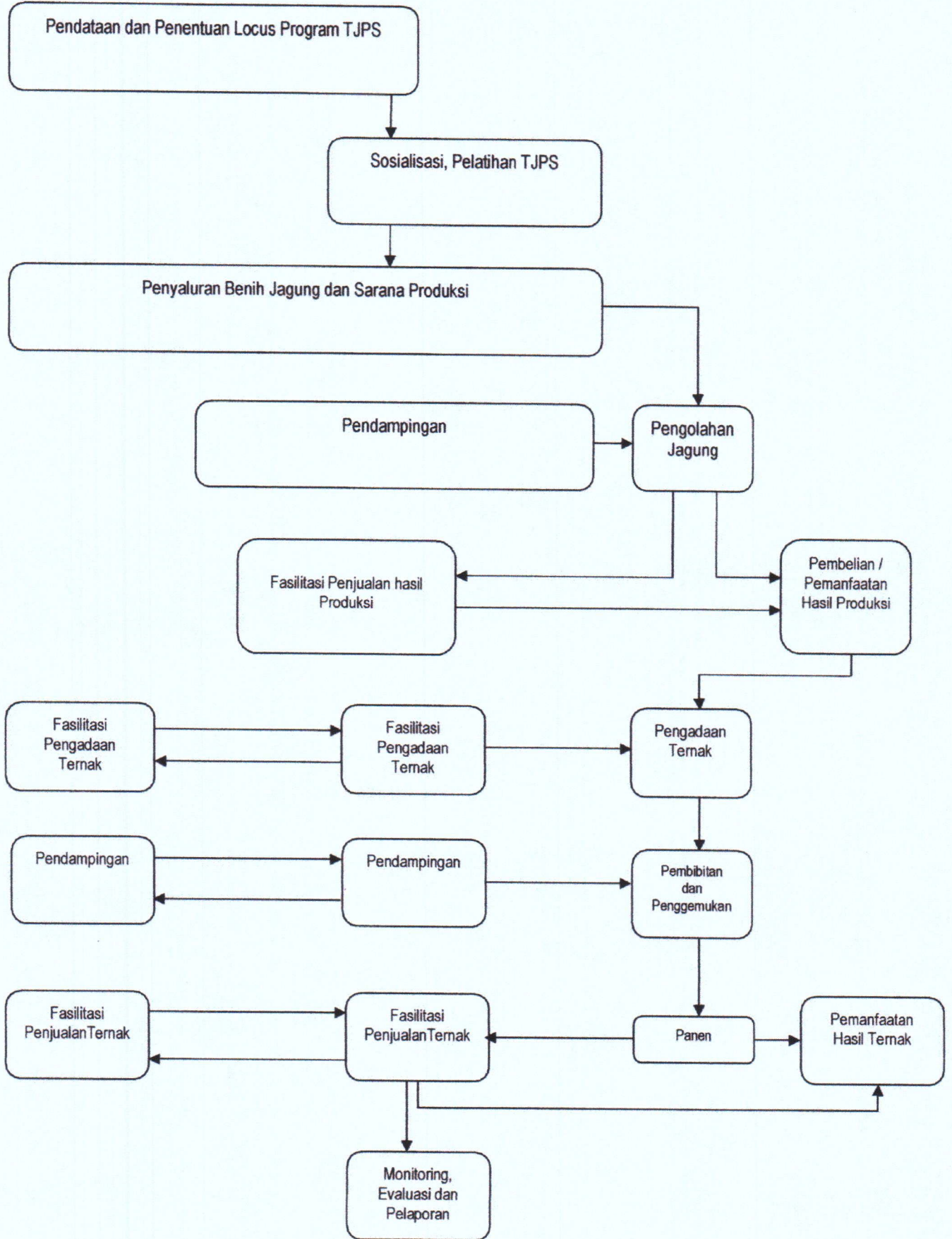
**NTT-01.SP4. PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KUALITAS, DAN KEAMANAN  
PANGAN**

**A. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN**

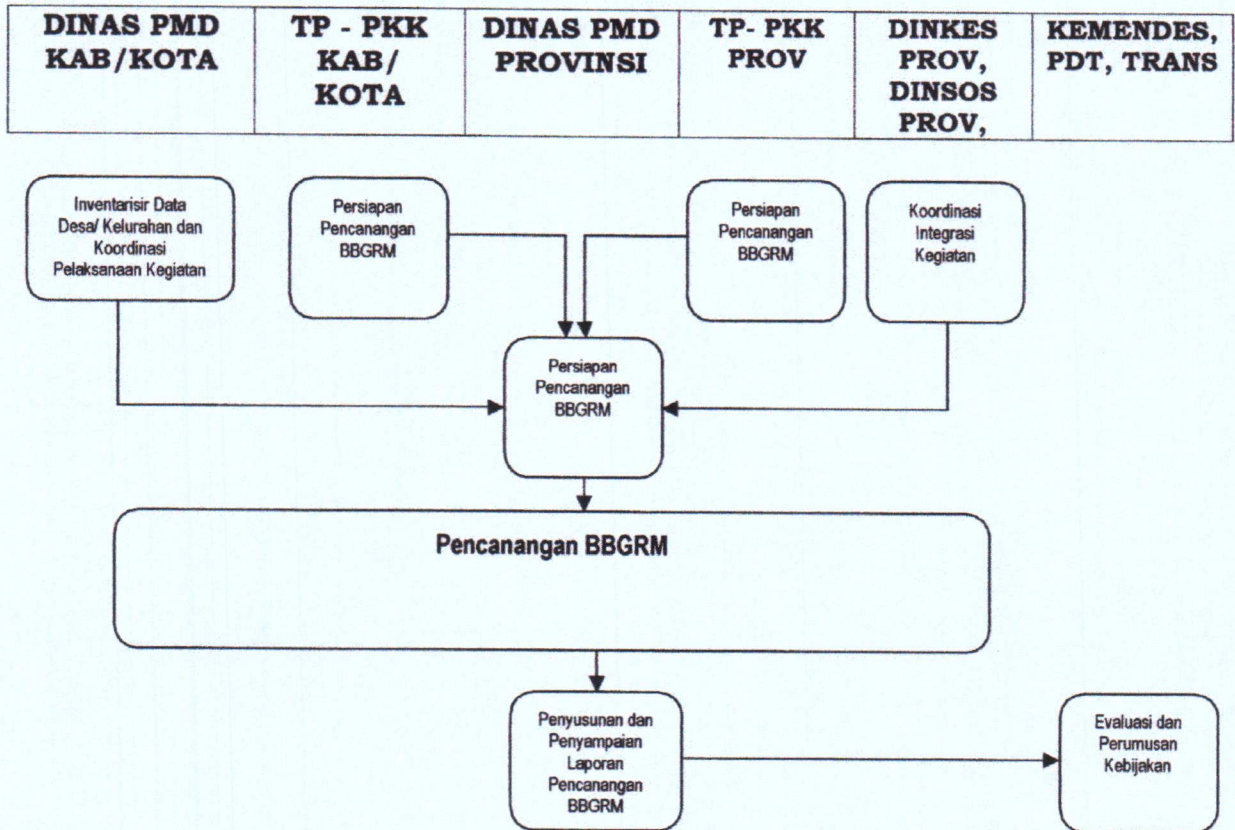


**B. TANAM JAGUNG PANEN SAPI (TJPS)**

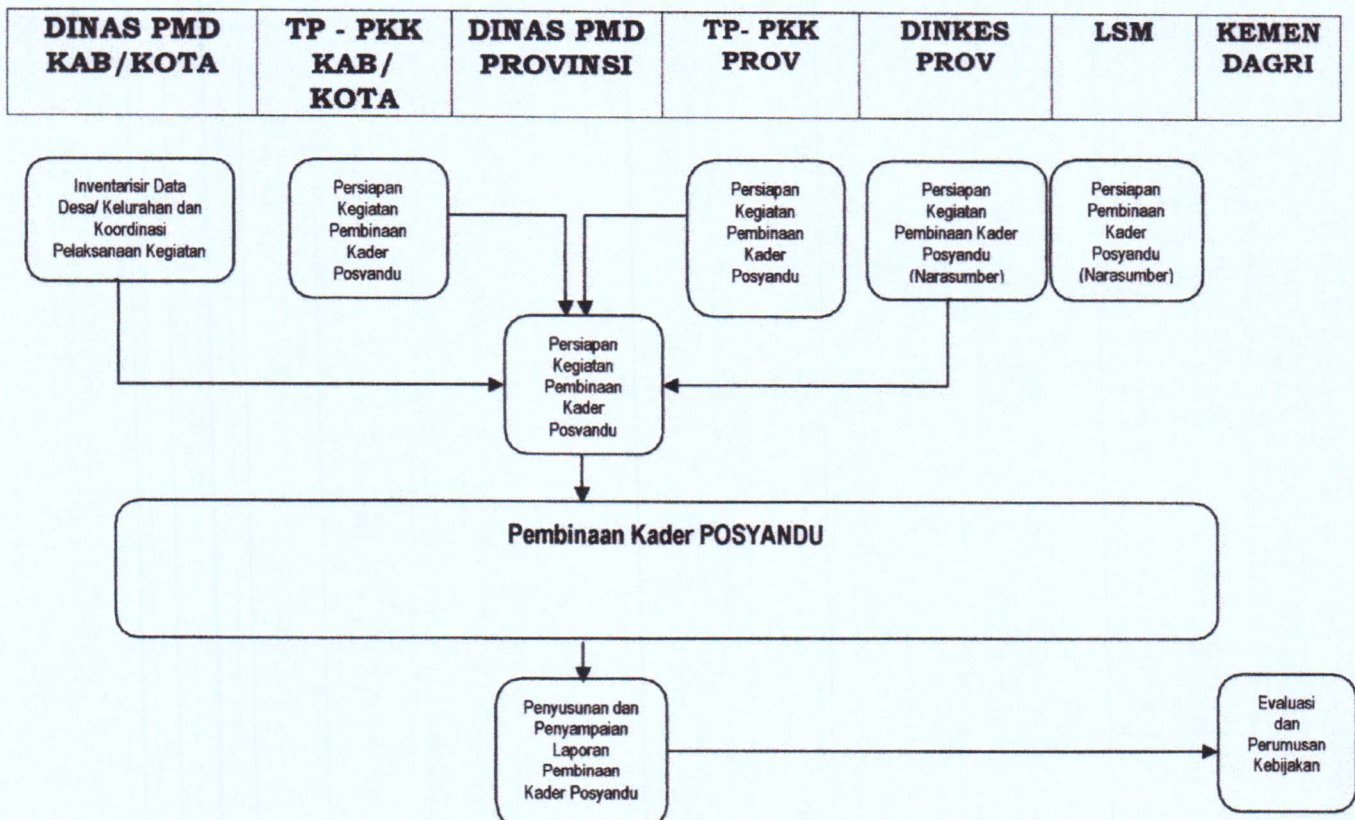
DINAS PETERNAKAN PROVINSI	DINAS PERTANIAN DAN KP PROVINSI	TIM AHLI TJPS	PENDAMPING TJPS	KELOMPOK TANI	INVESTOR/UMKM/MASYARAKAT
---------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------------------



**A. PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG (BGGRM)**

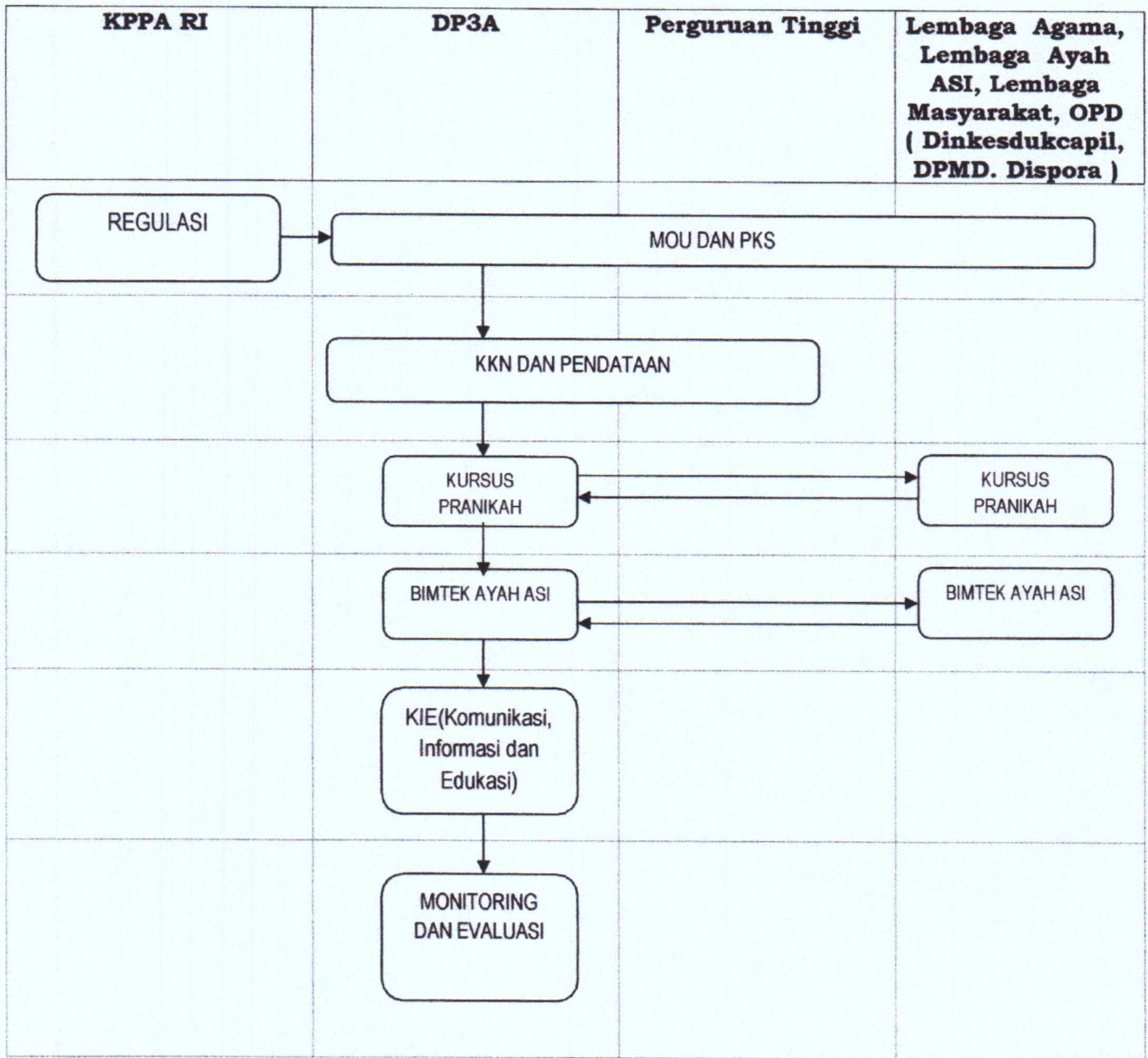


**B. PEMBINAAN KADER POSYANDU**

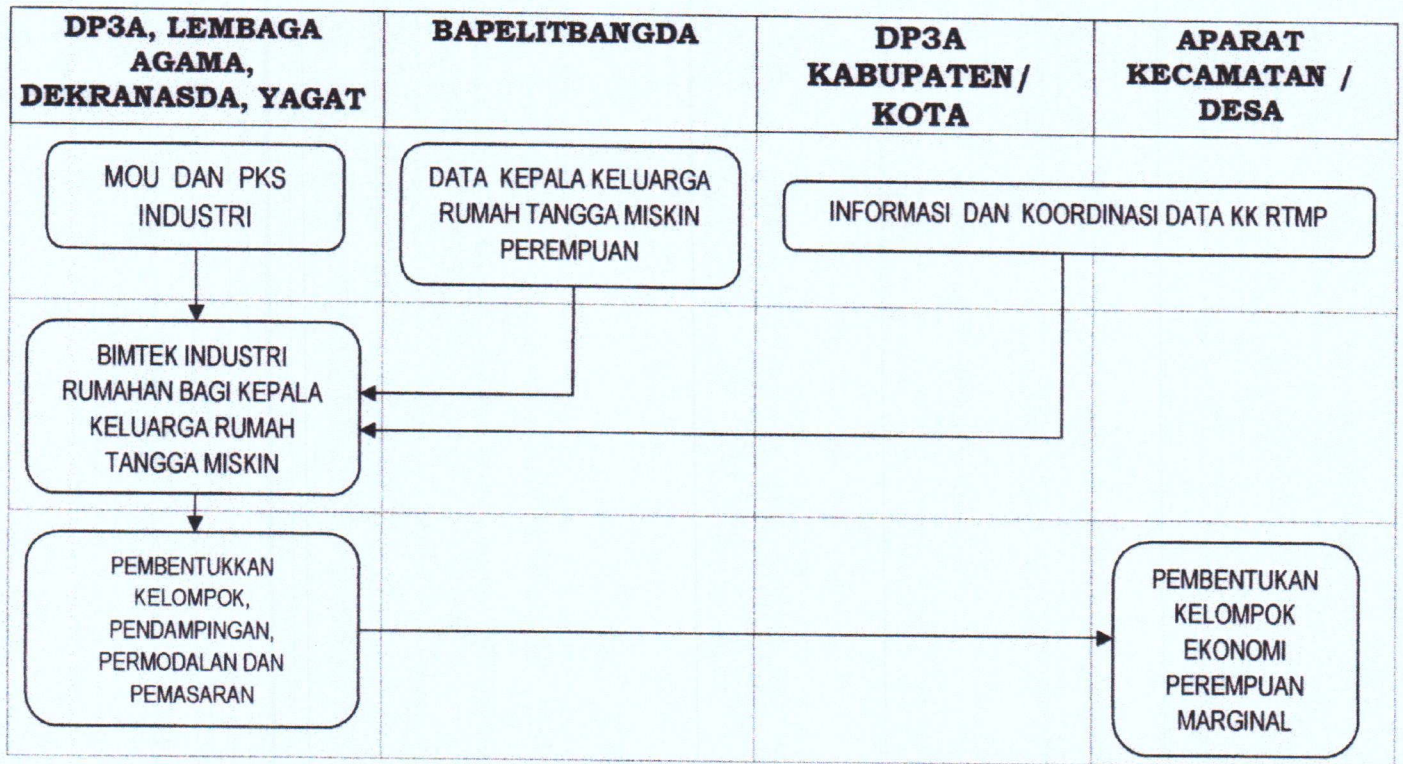


**NTT-01.SP6. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA UNTUK PEMENUHAN HAK ANAK DAN  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN**

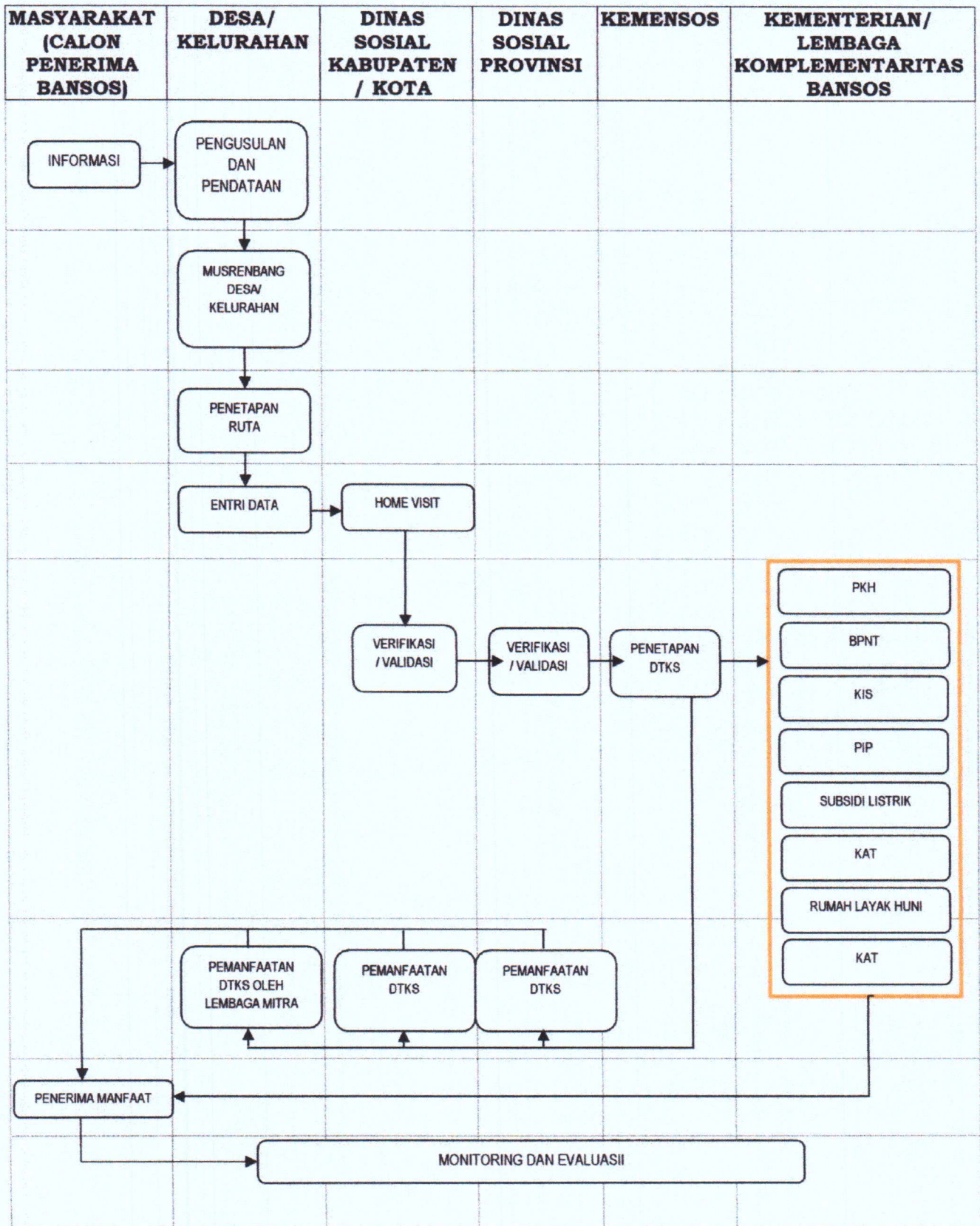
**A. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**



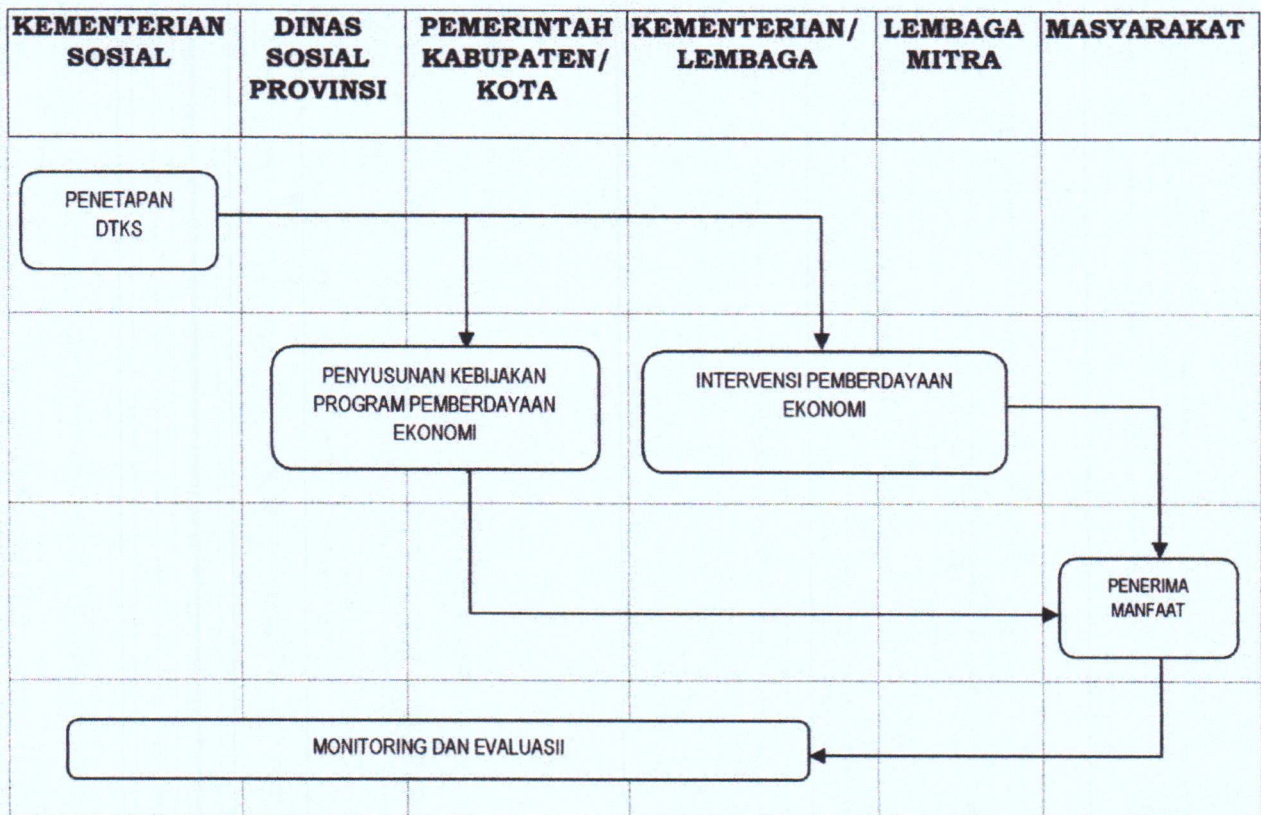
**B. PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MARGINAL**



A. PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

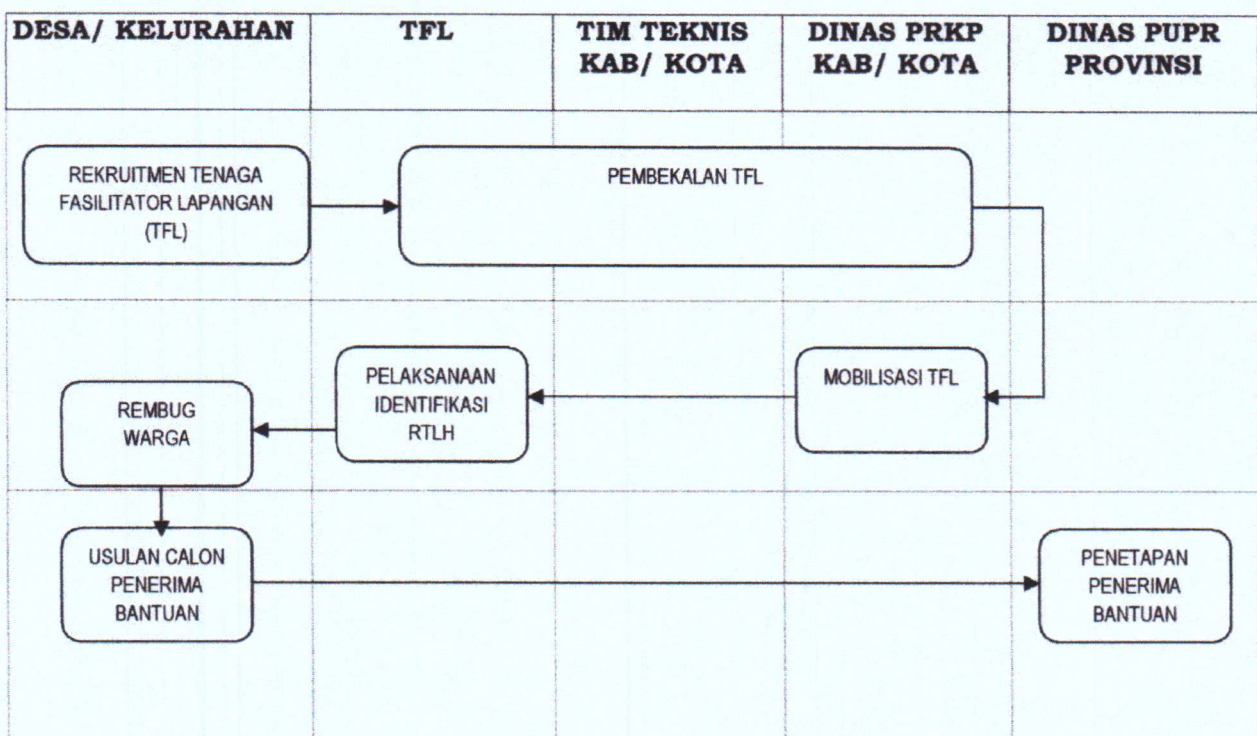


## B. PEMBERDAYAAN EKONOMI

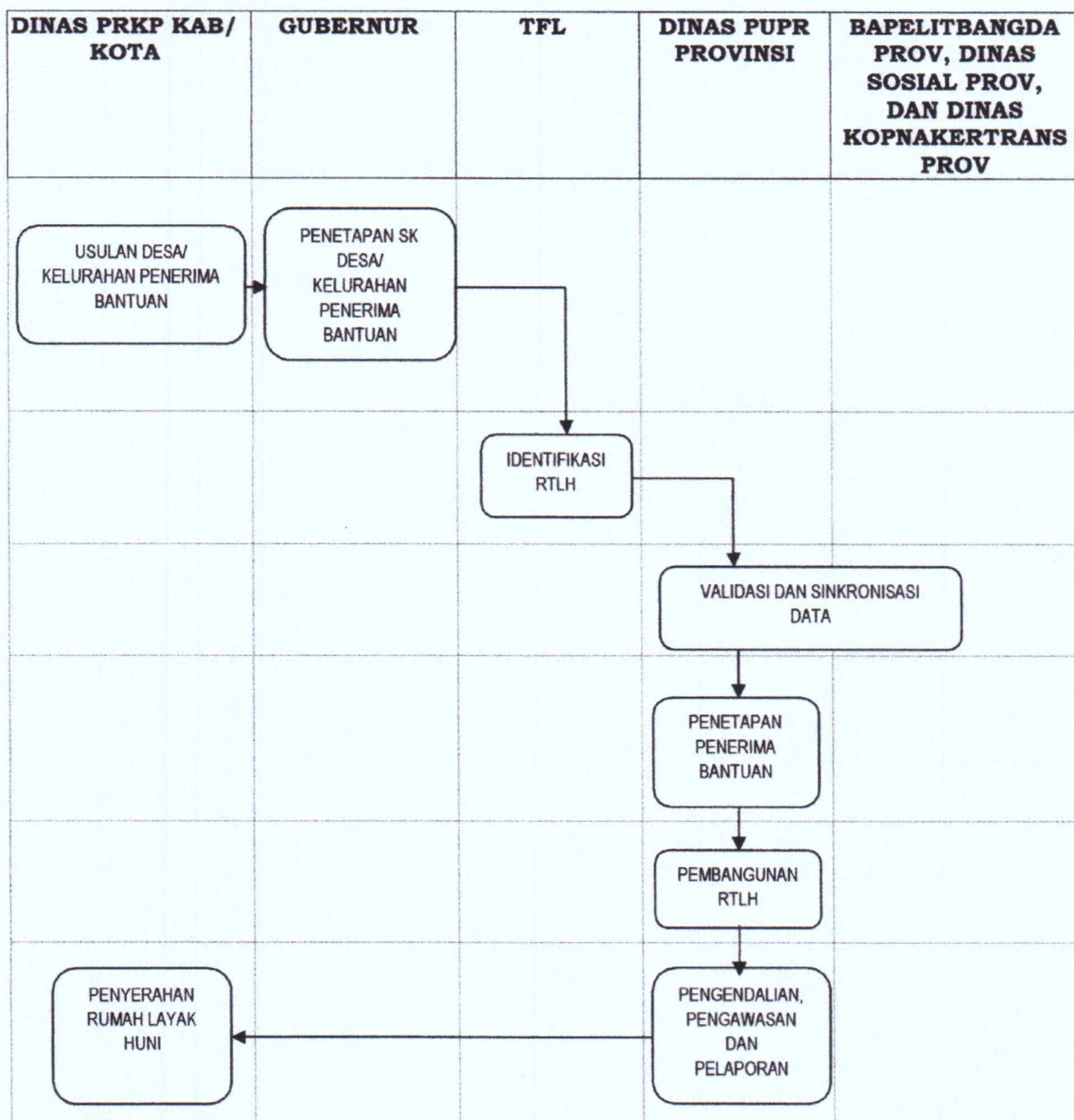


## NTT-01.SP8. PENAMBAHAN RUMAH LAYAK HUNI

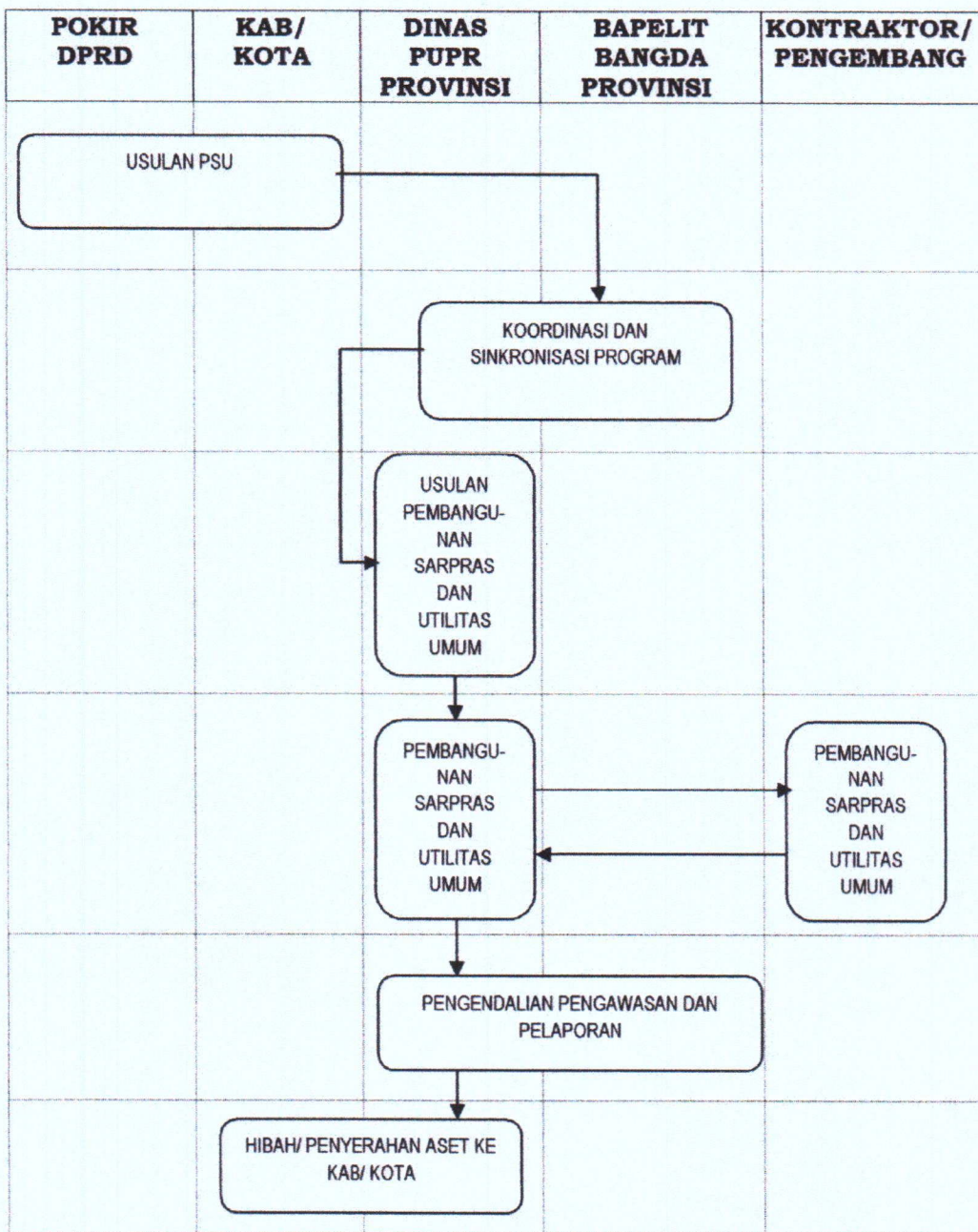
### A. IDENTIFIKASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



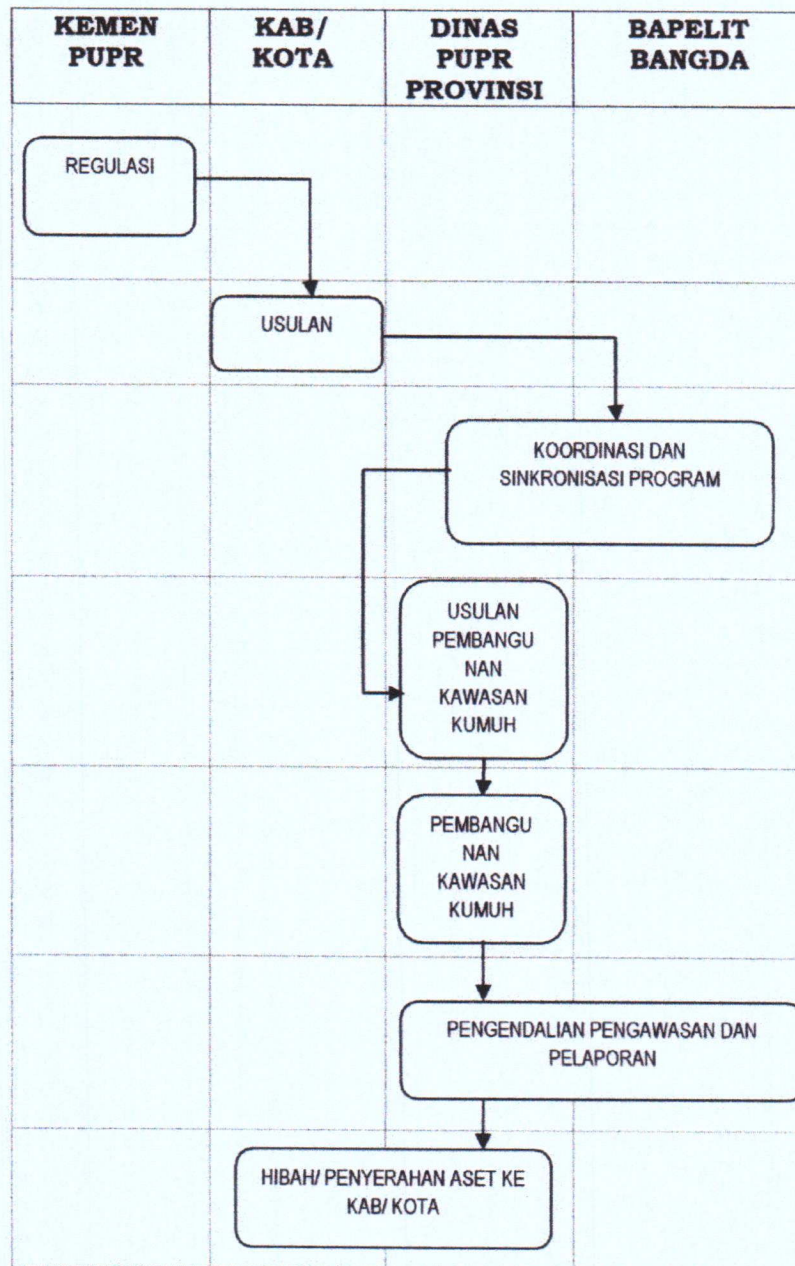
**B. PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI**



**C. PENGADAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM**

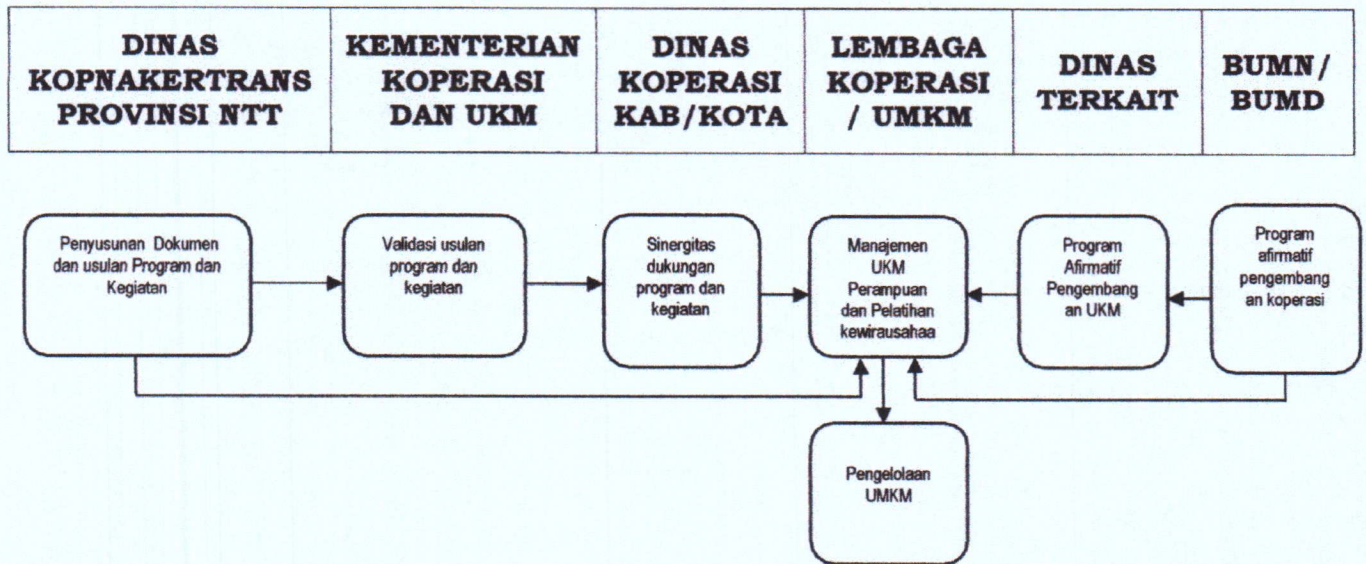


**D. PEMBANGUNAN KAWASAN KUMUH**

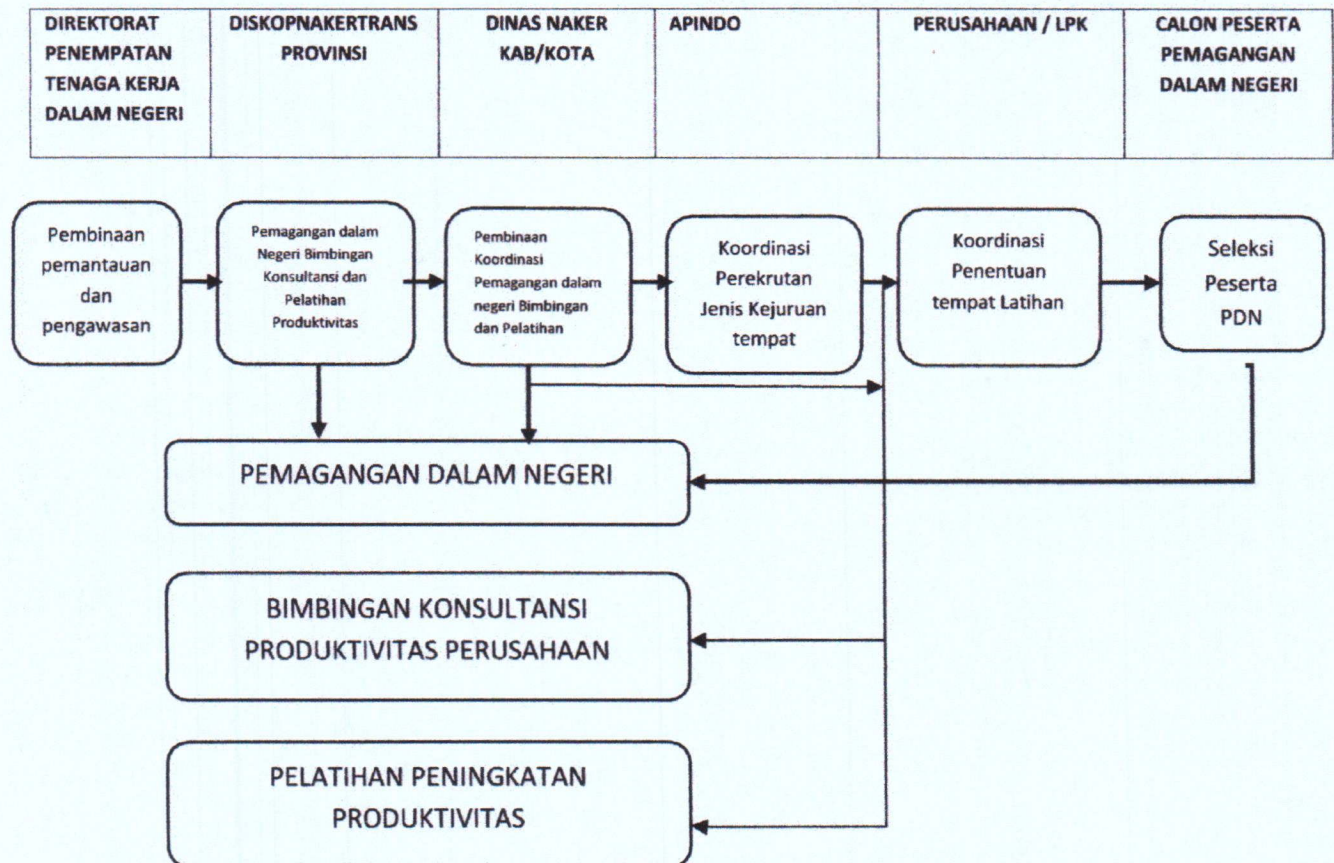




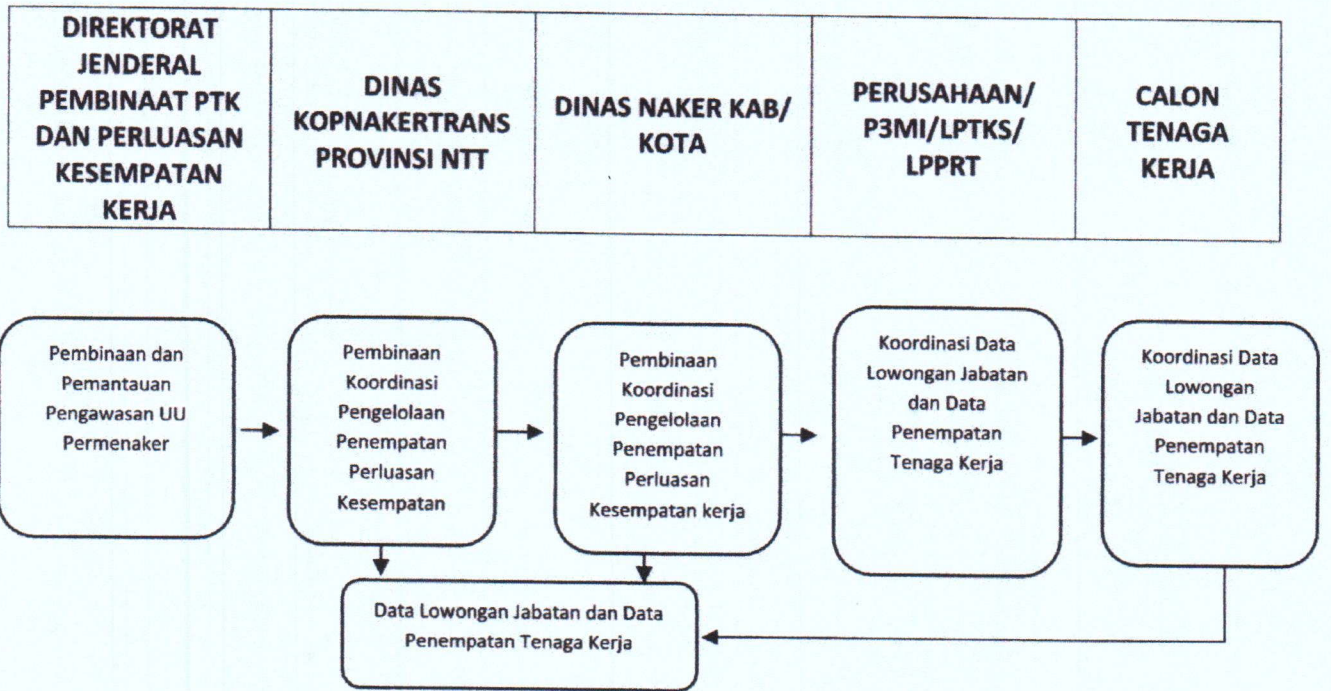
**B. PENINGKATAN UMKM MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PERAN SDM KOPERASI**



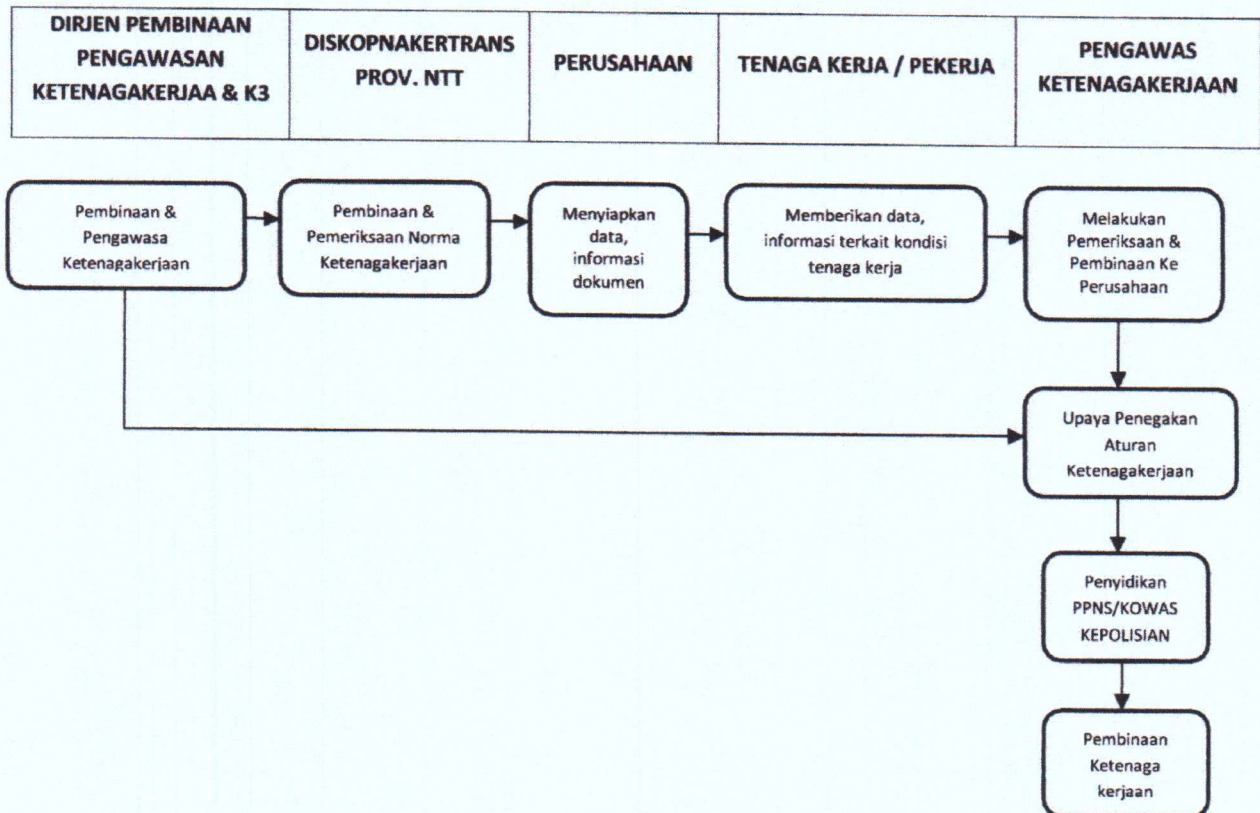
**C. PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**



#### D. PENGELOLAAN PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

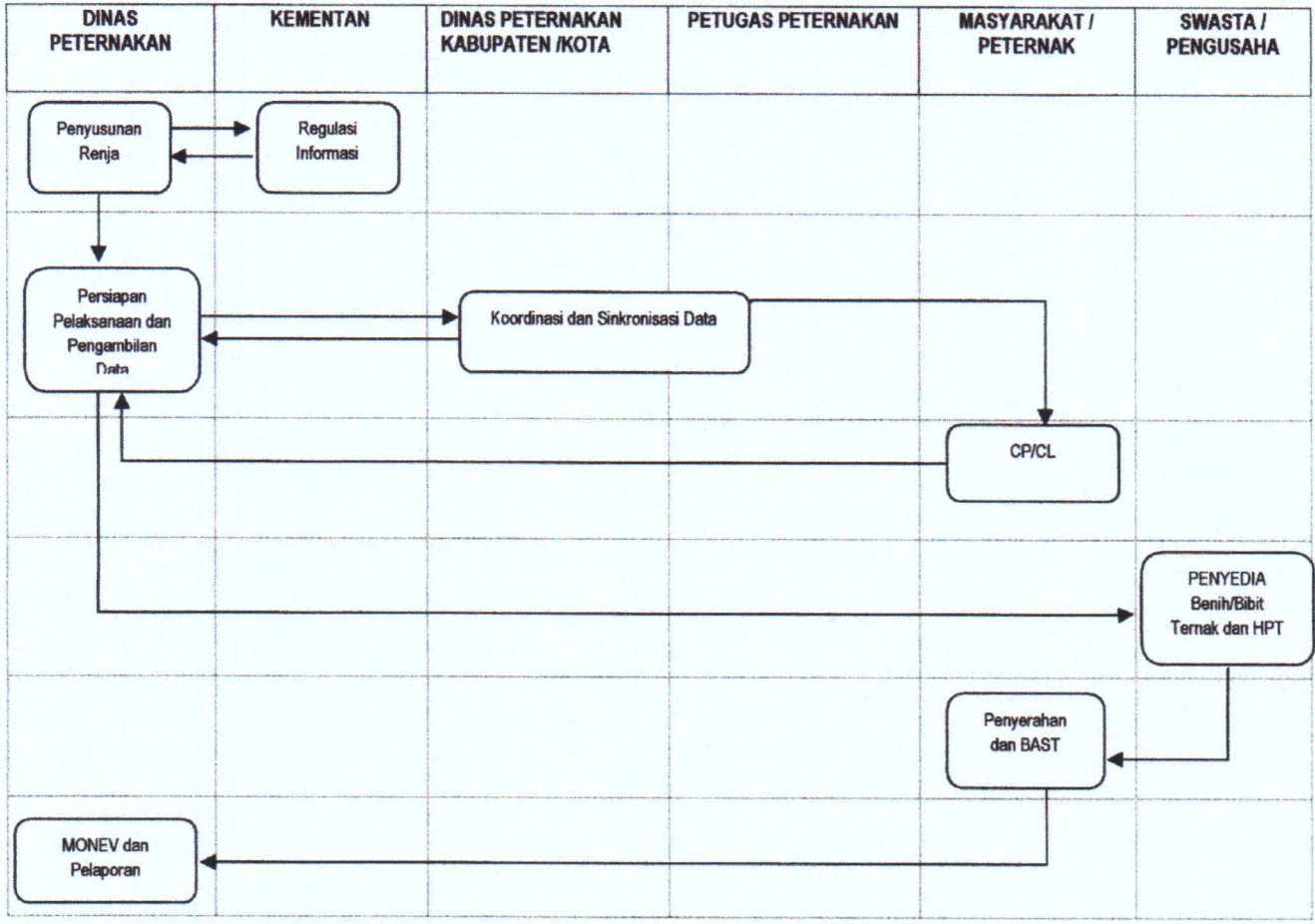


#### E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETANAGAKERJAAN

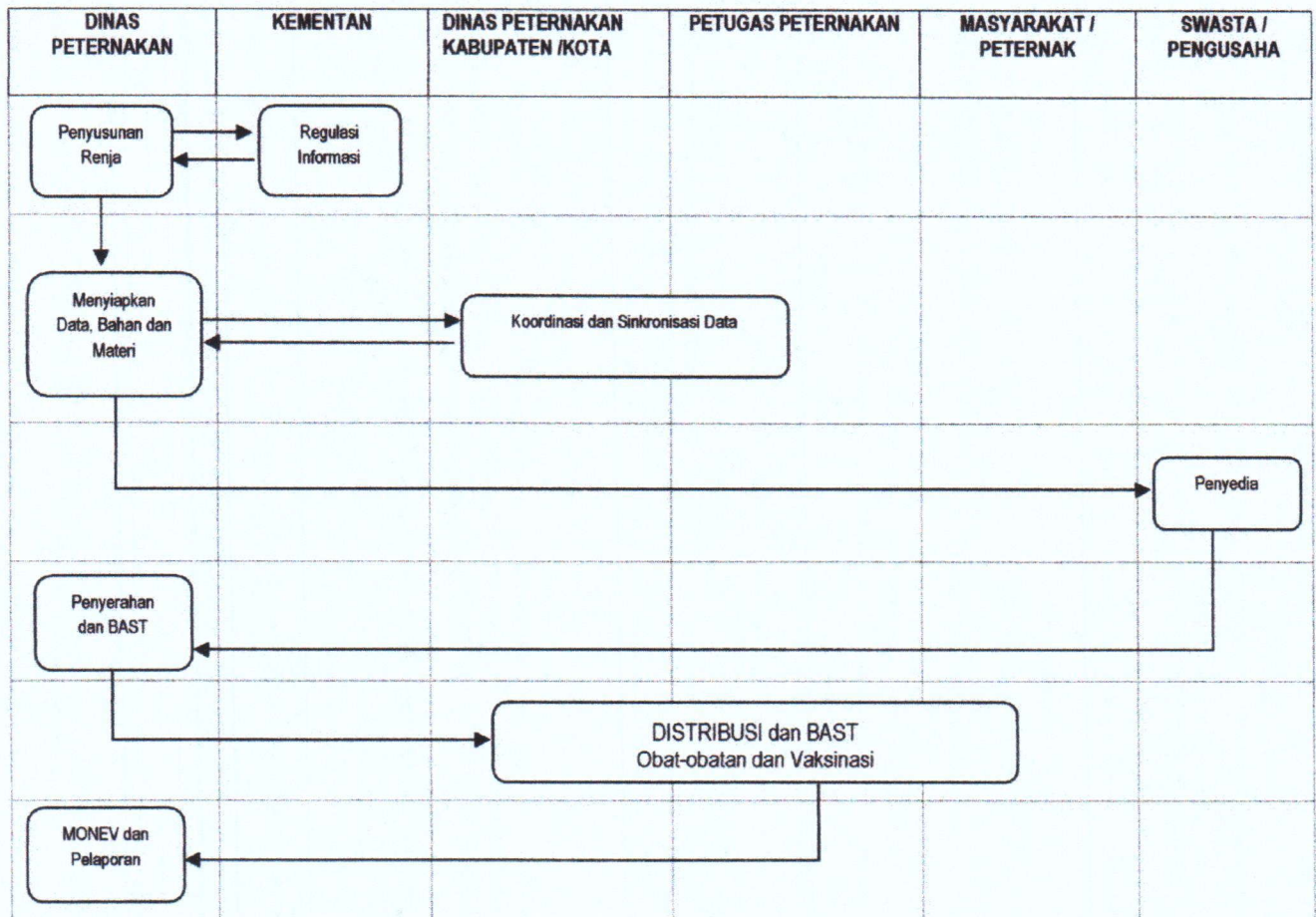


**NTT-02.SP2. PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN**

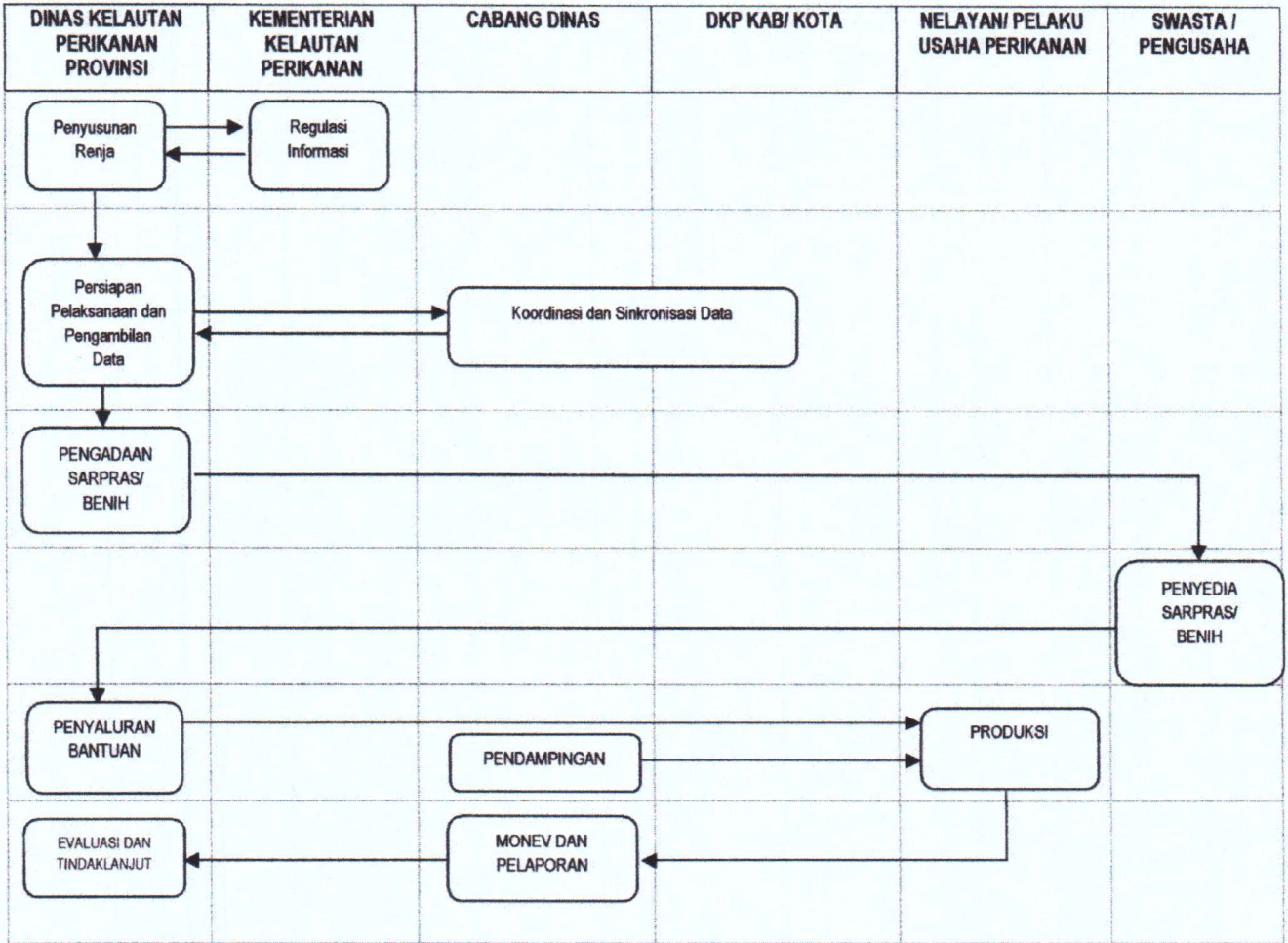
**A. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/ BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN**



**B. PENGENDALIAN RESIKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS**



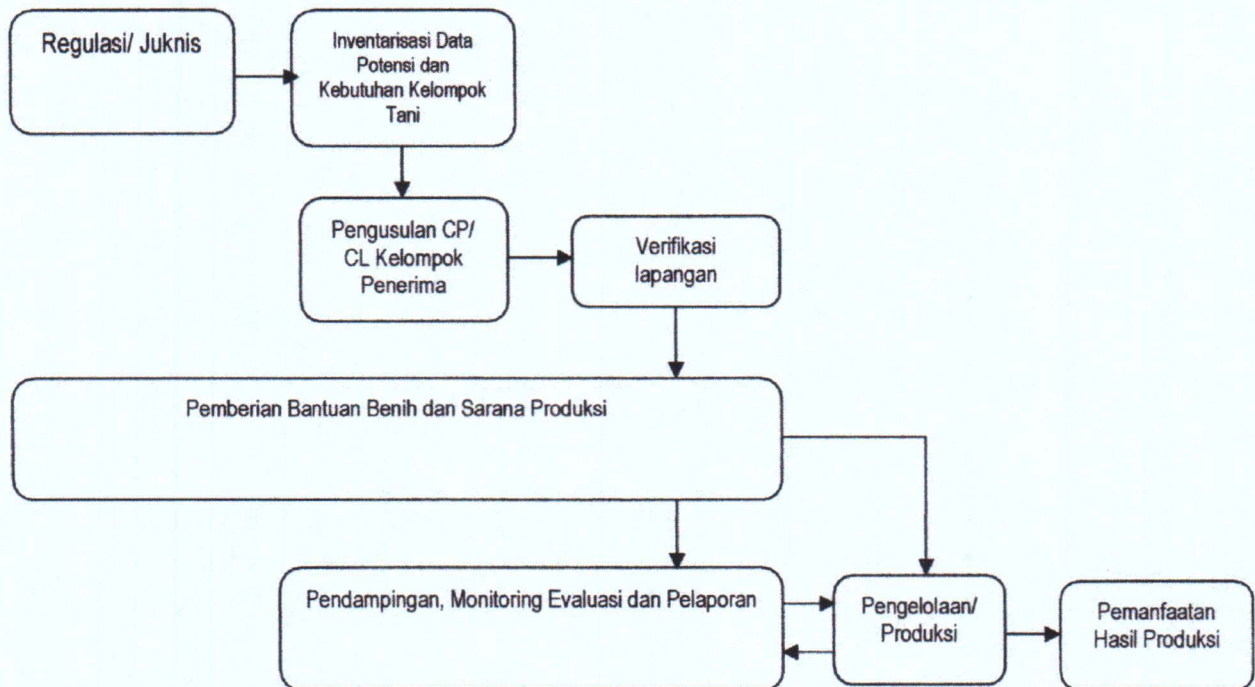
**NTT-02.SP3. PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**NTT-02.SP4. PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KUALITAS, DAN KEAMANAN PANGAN**

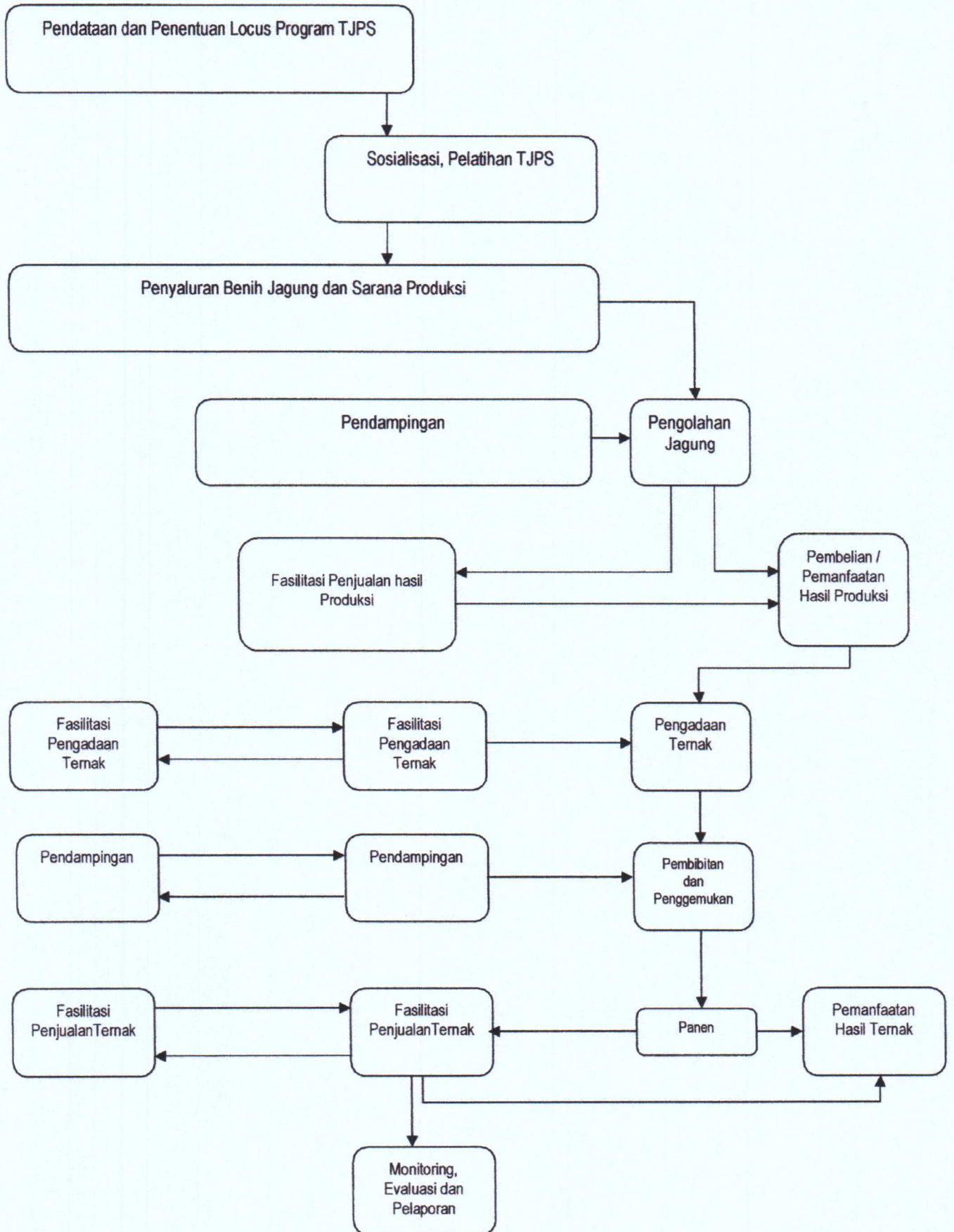
**A. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN**

<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<b>DINAS PERTANIAN KAB/KOTA</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KP PROVINSI</b>	<b>KELOMPOK TANI</b>	<b>INVESTOR/ UMKM/ MASYARAKAT</b>
----------------------------------	---	--	--------------------------	---



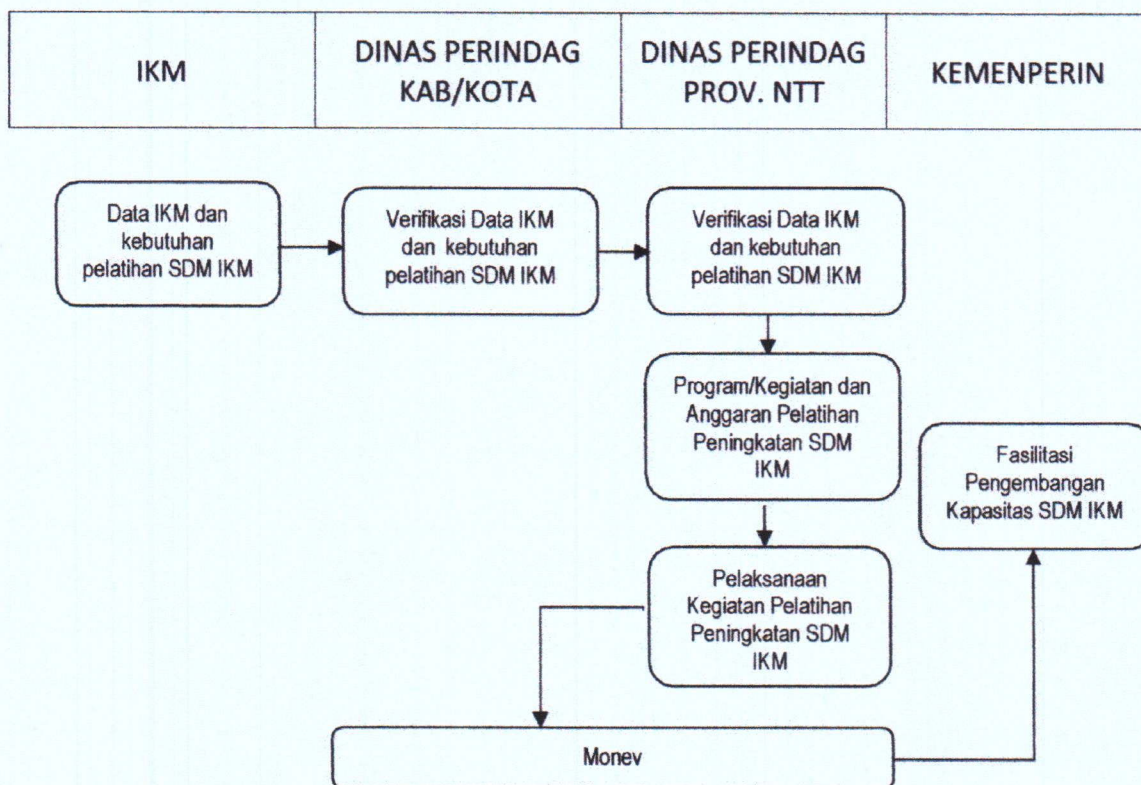
**B. TANAM JAGUNG PANEN SAPI (TJPS)**

DINAS PETERNAKAN PROVINSI	DINAS PERTANIAN DAN KP PROVINSI	TIM AHLI TJPS	PENDAMPING TJPS	KELOMPOK TANI	INVESTOR/UMKM/MASYARAKAT
---------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------------------

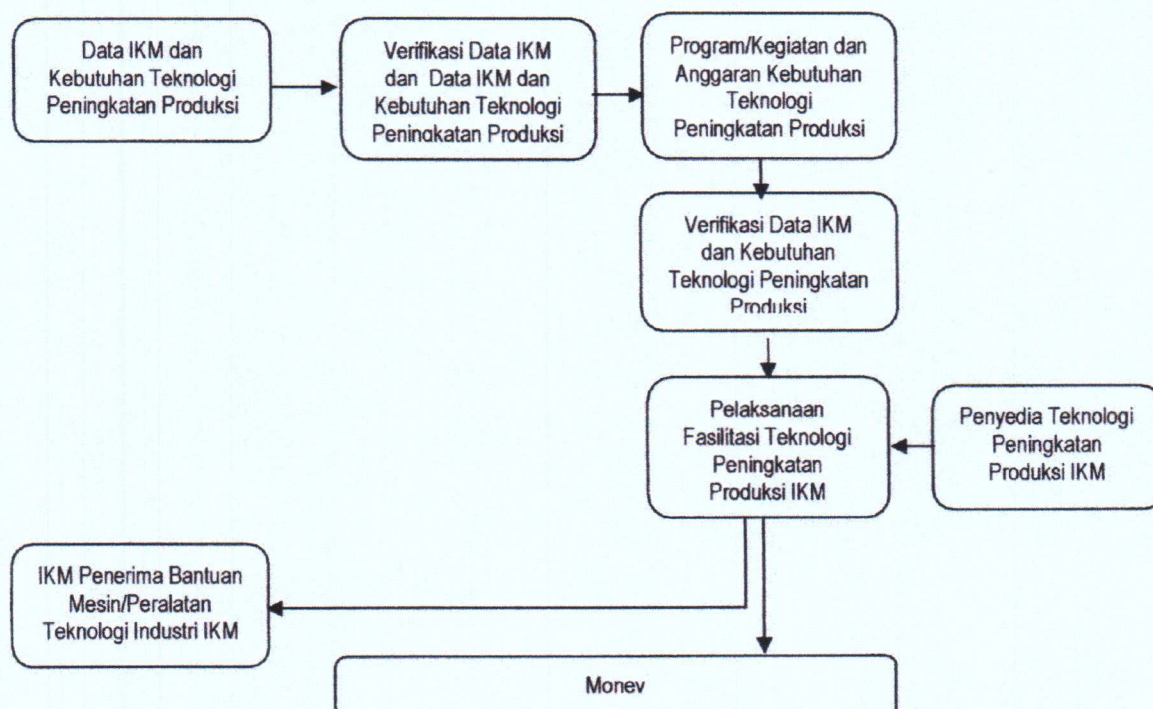
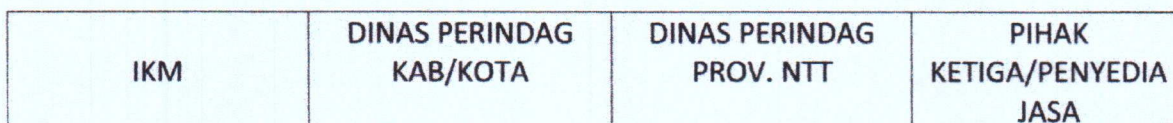




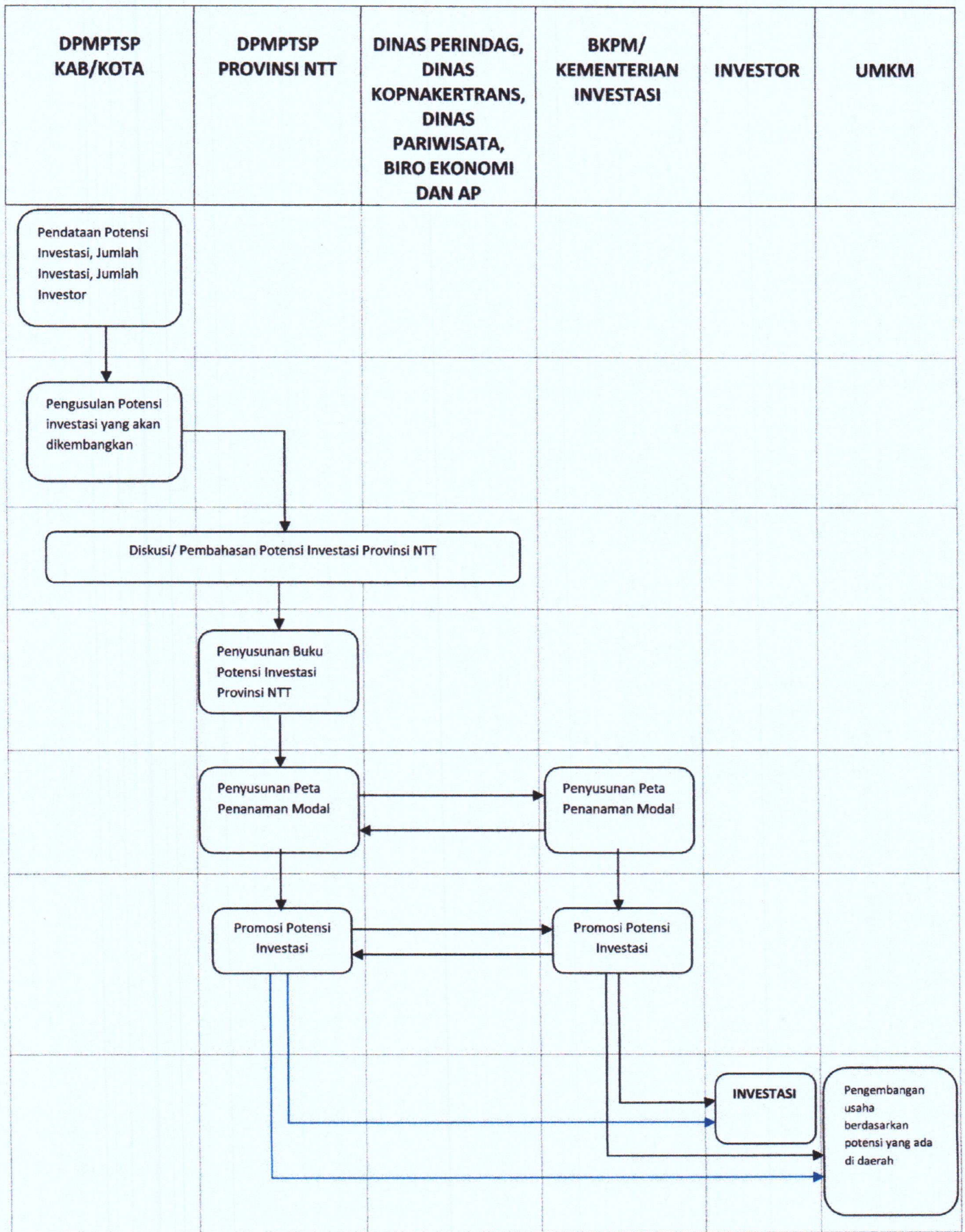
**A. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH**



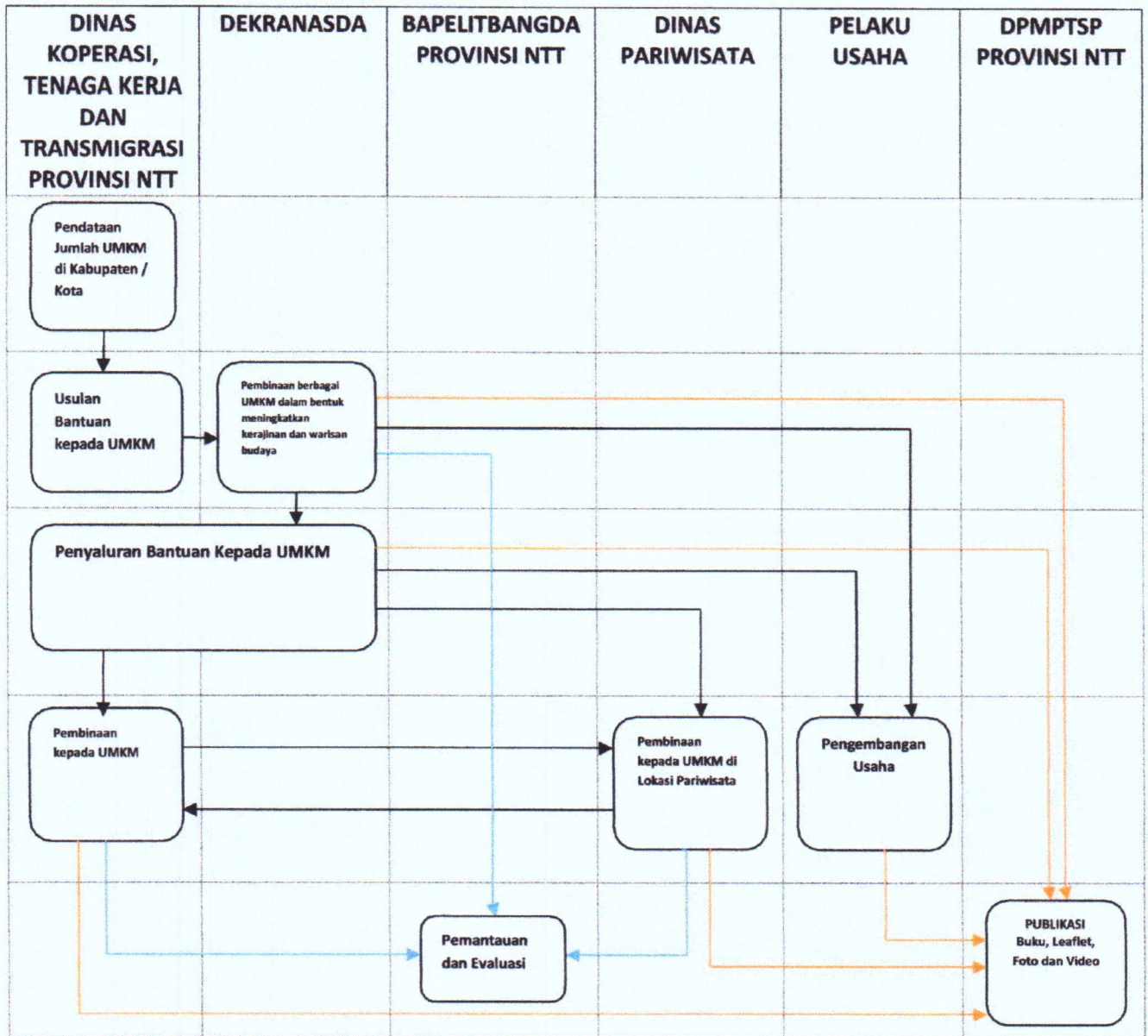
**B. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI, KREATIVITAS DAN INOVASI**



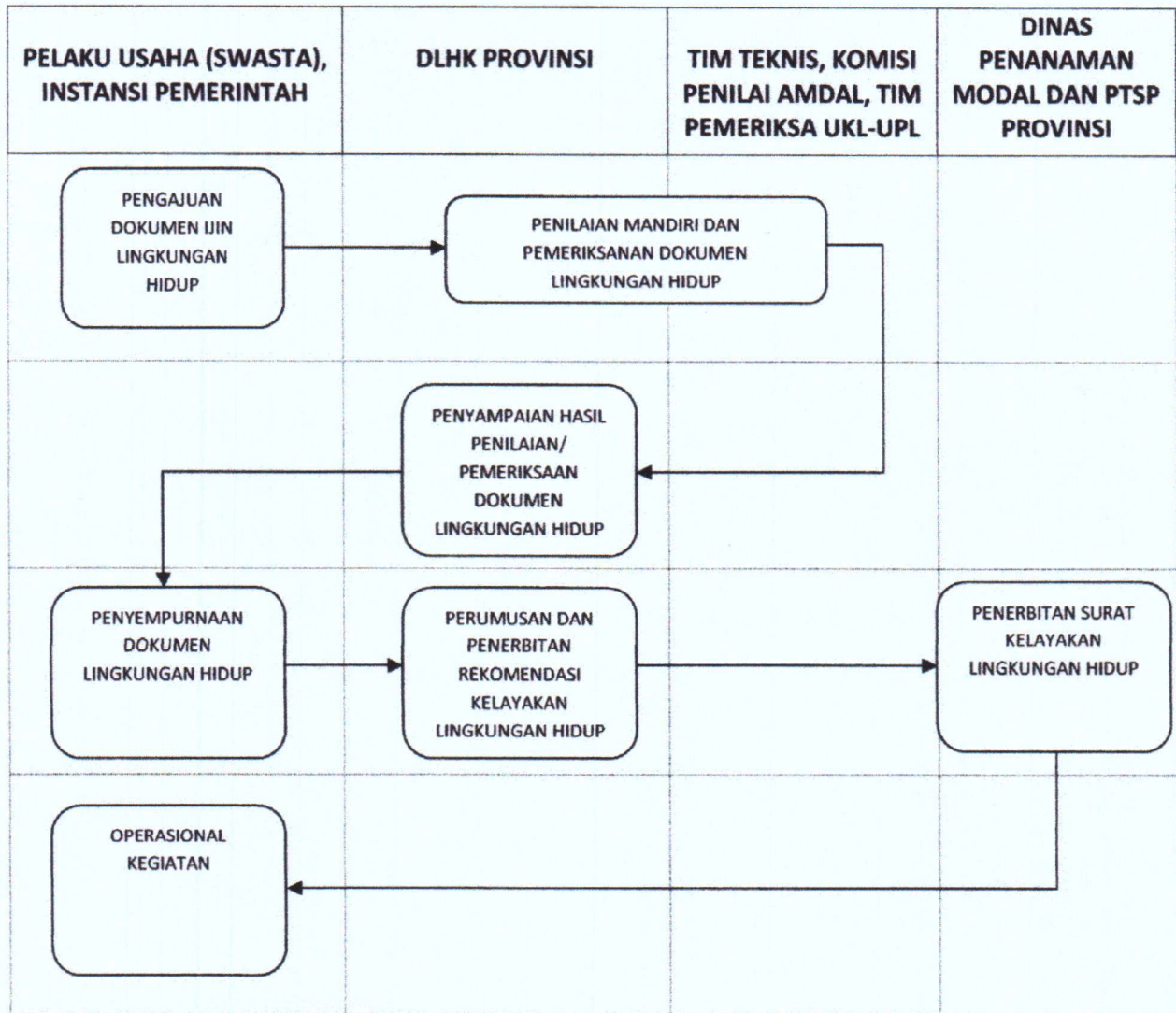
A. PENGEMBANGAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL



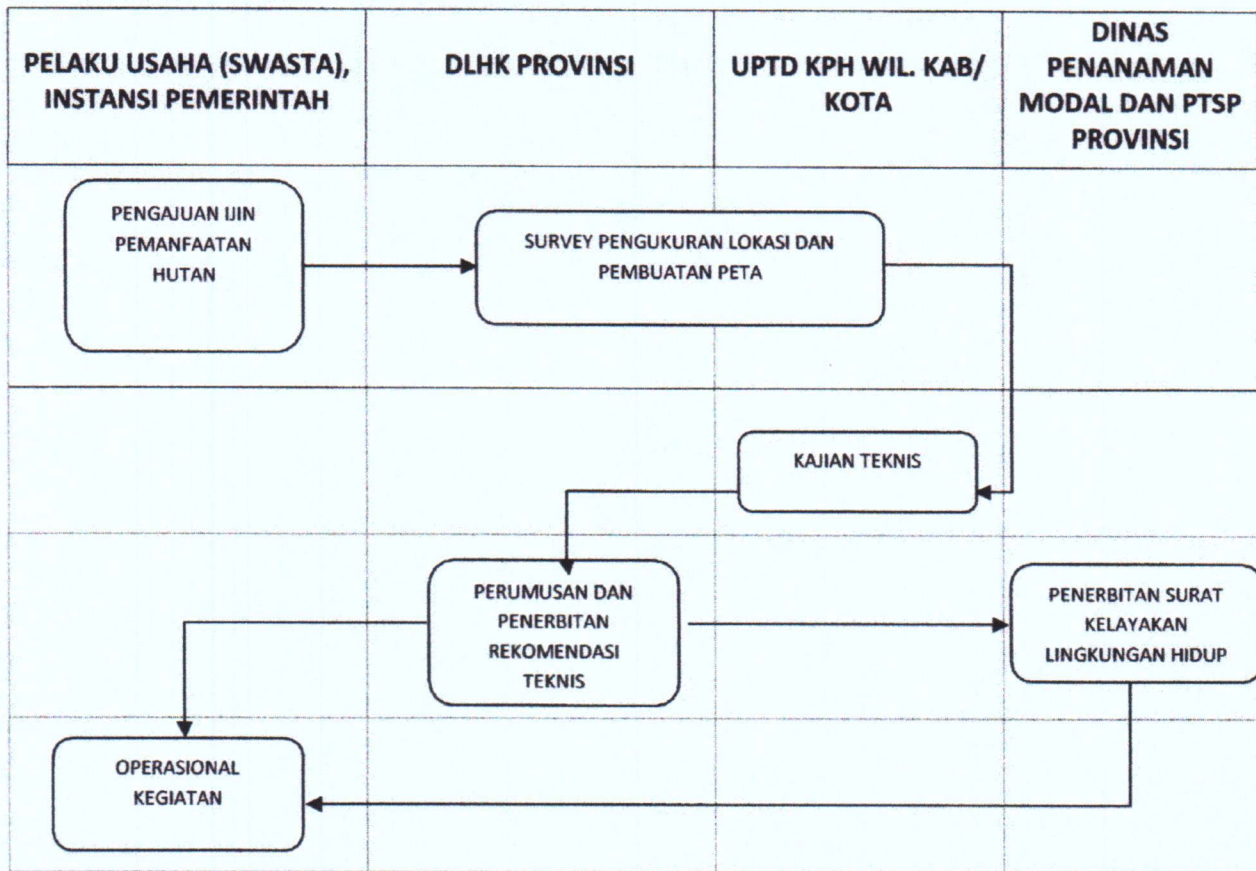
**B. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM**



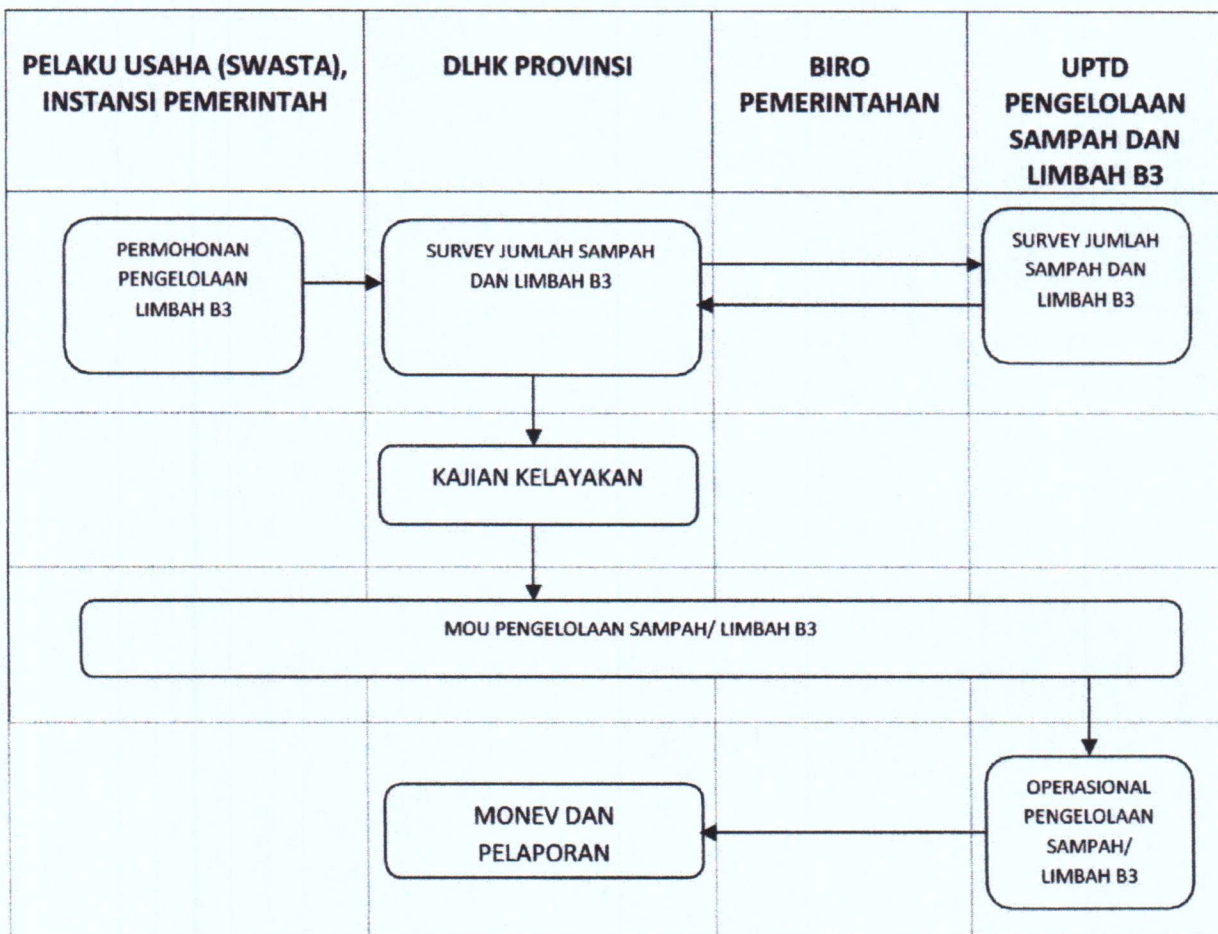
A. PENERBITAN REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP



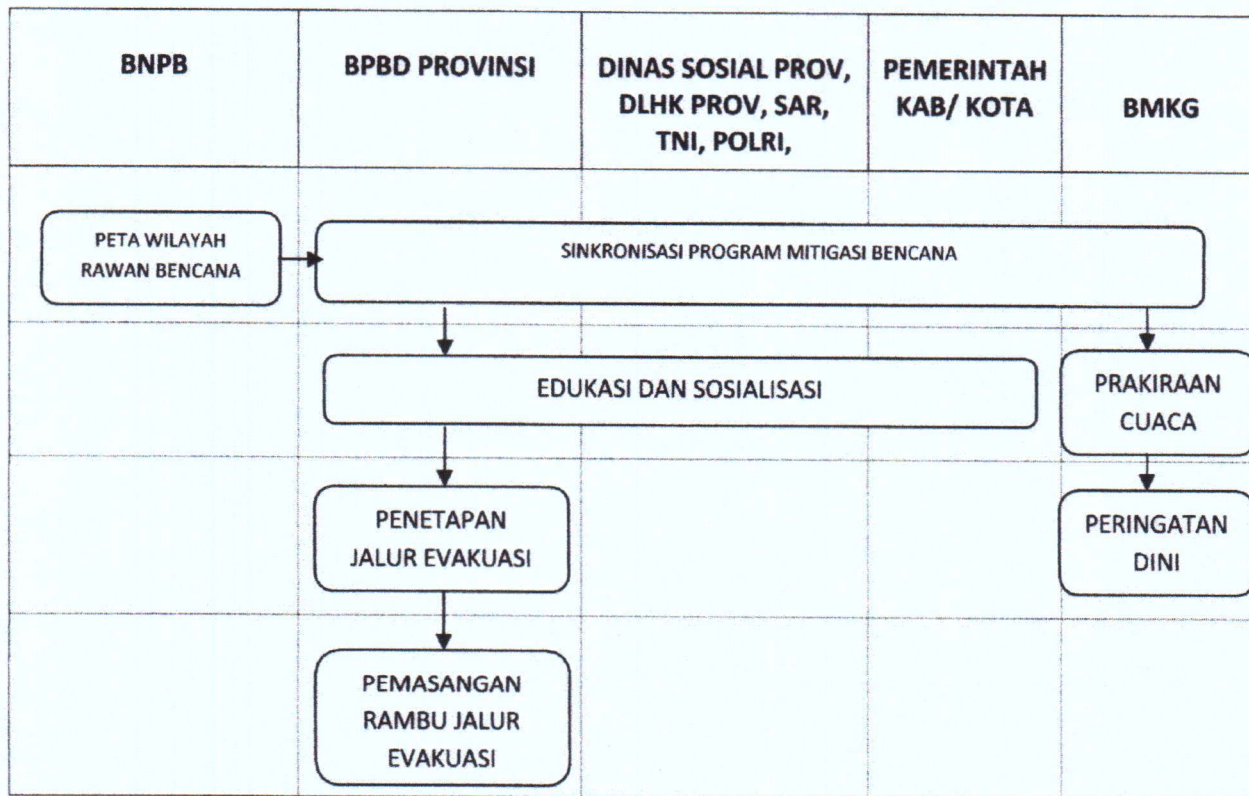
**B. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN**



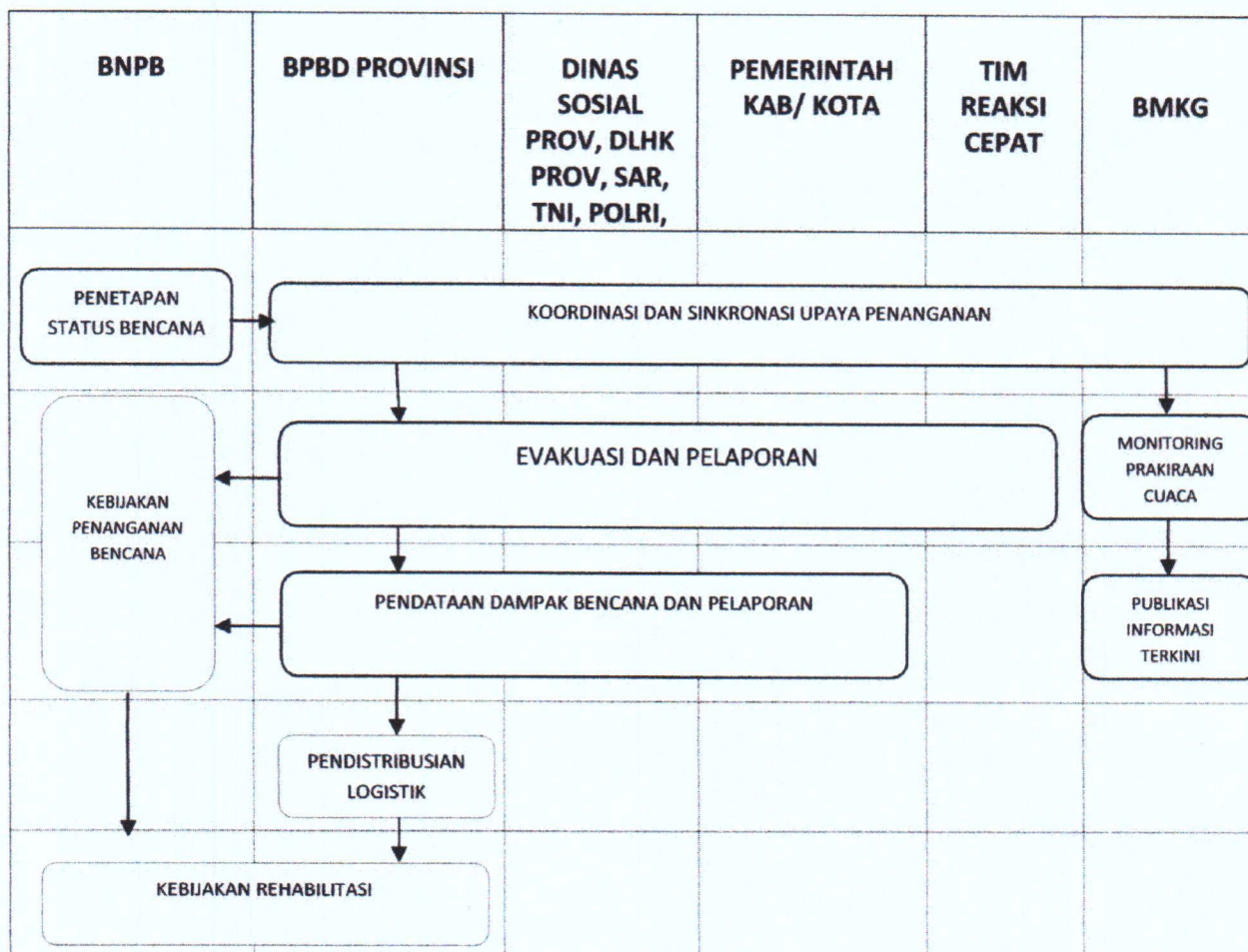
**C. PENGELOLAAN LIMBAH B3**



**A. MITIGASI BENCANA**

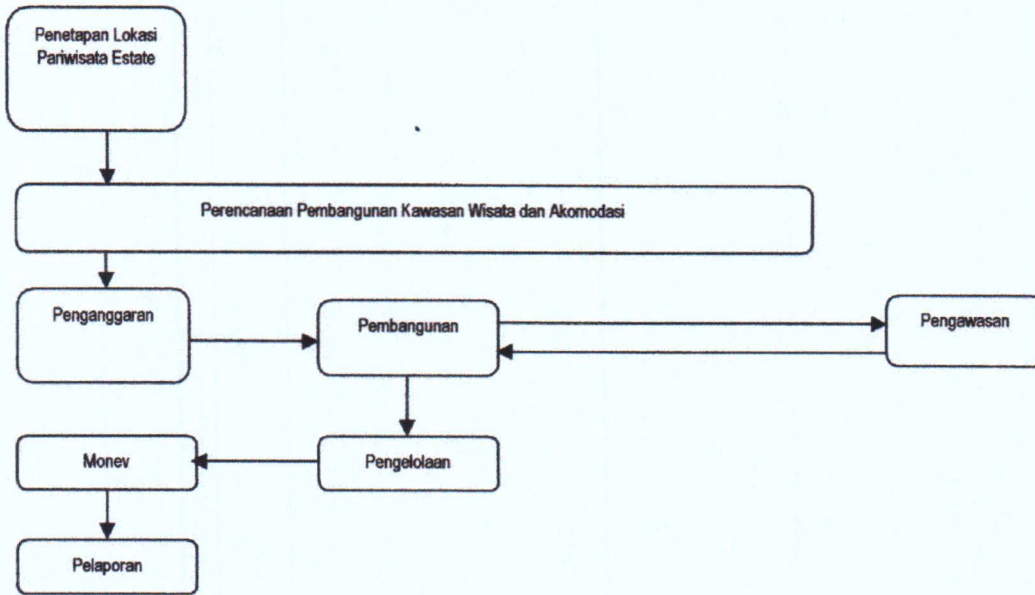


**B. PENANGANAN BENCANA**



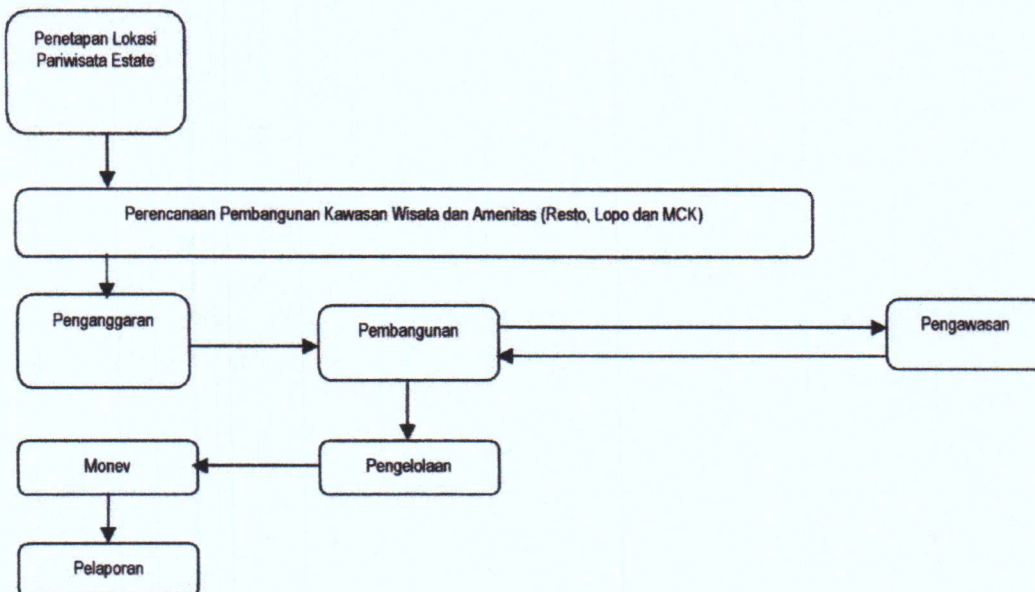
**A. AKOMODASI**

<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROV. NTT</b>	<b>POKMAS</b>	<b>PEMERINTAH KAB/KOTA</b>	<b>TENAGA AHLI</b>
---	---------------	--------------------------------	--------------------



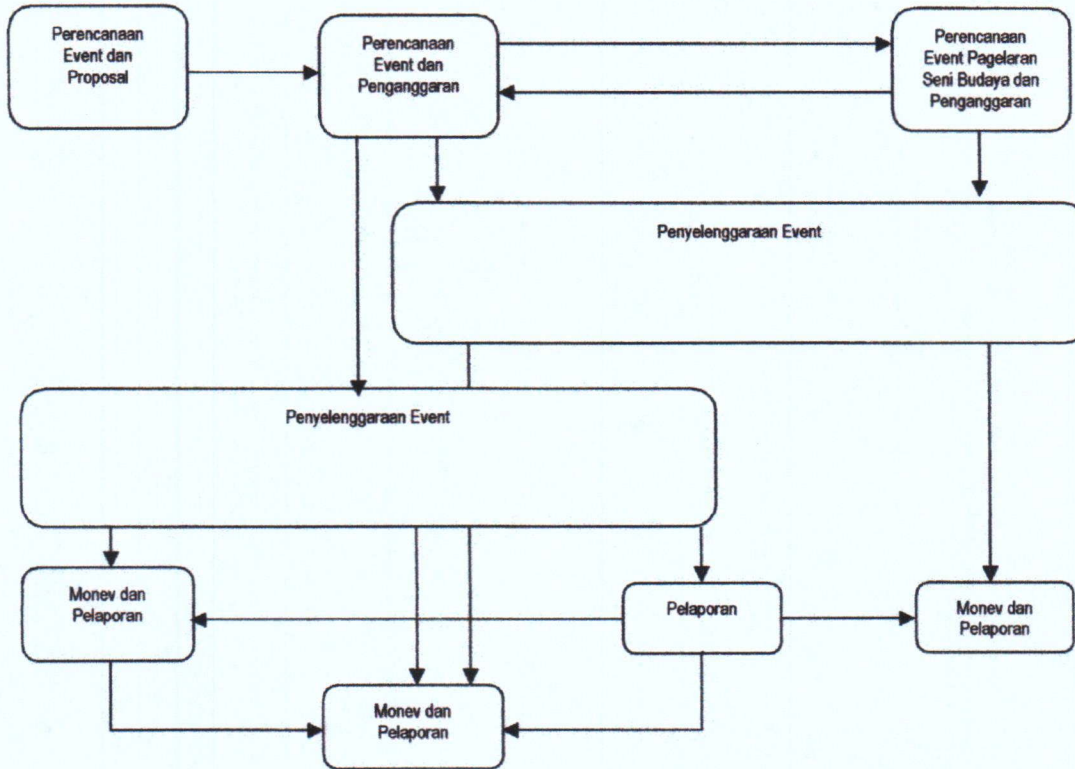
**B. AMENITAS**

<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROV. NTT</b>	<b>POKMAS</b>	<b>PEMERINTAH KAB/KOTA</b>	<b>TENAGA AHLI</b>
---	---------------	--------------------------------	--------------------



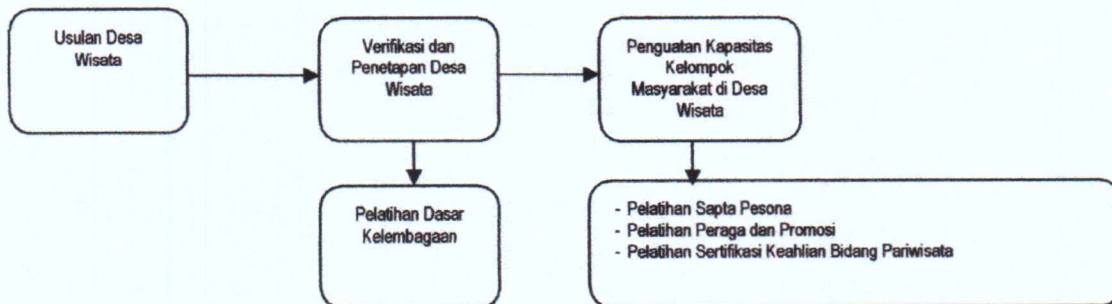
**C. ATRAKSI**

<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KAB/ KOTA</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT</b>	<b>PENYELENGGARA / EVENT ORGANIZER</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
---	--	--	--



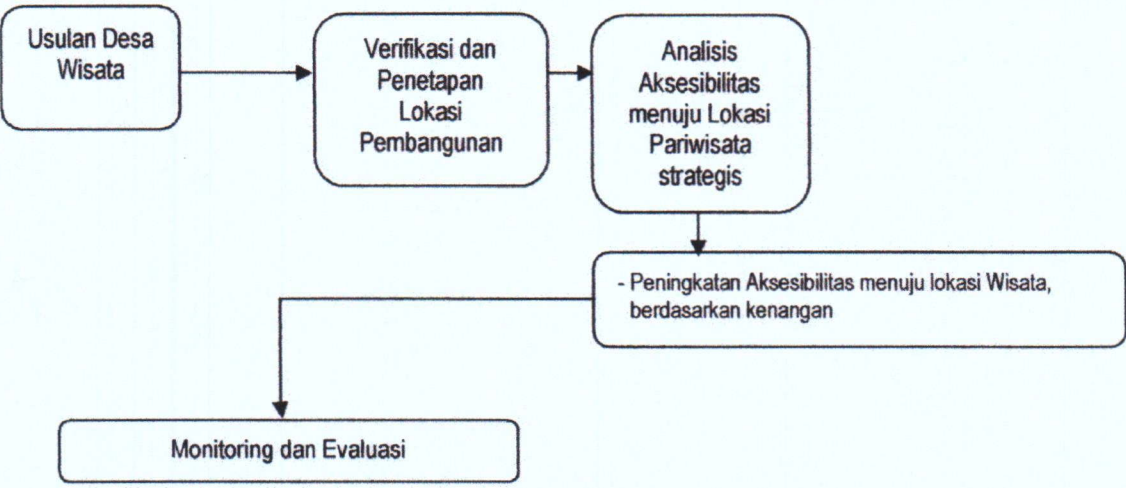
**D. AWARNES / PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA**

<b>POKMAS</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KAB/ KOTA</b>	<b>DINAS PARIWISATA PROVINSI NTT</b>	<b>DINAS PMD, DINAS KOPERASI DAN NAKERTRANS</b>
---------------	---	--	---



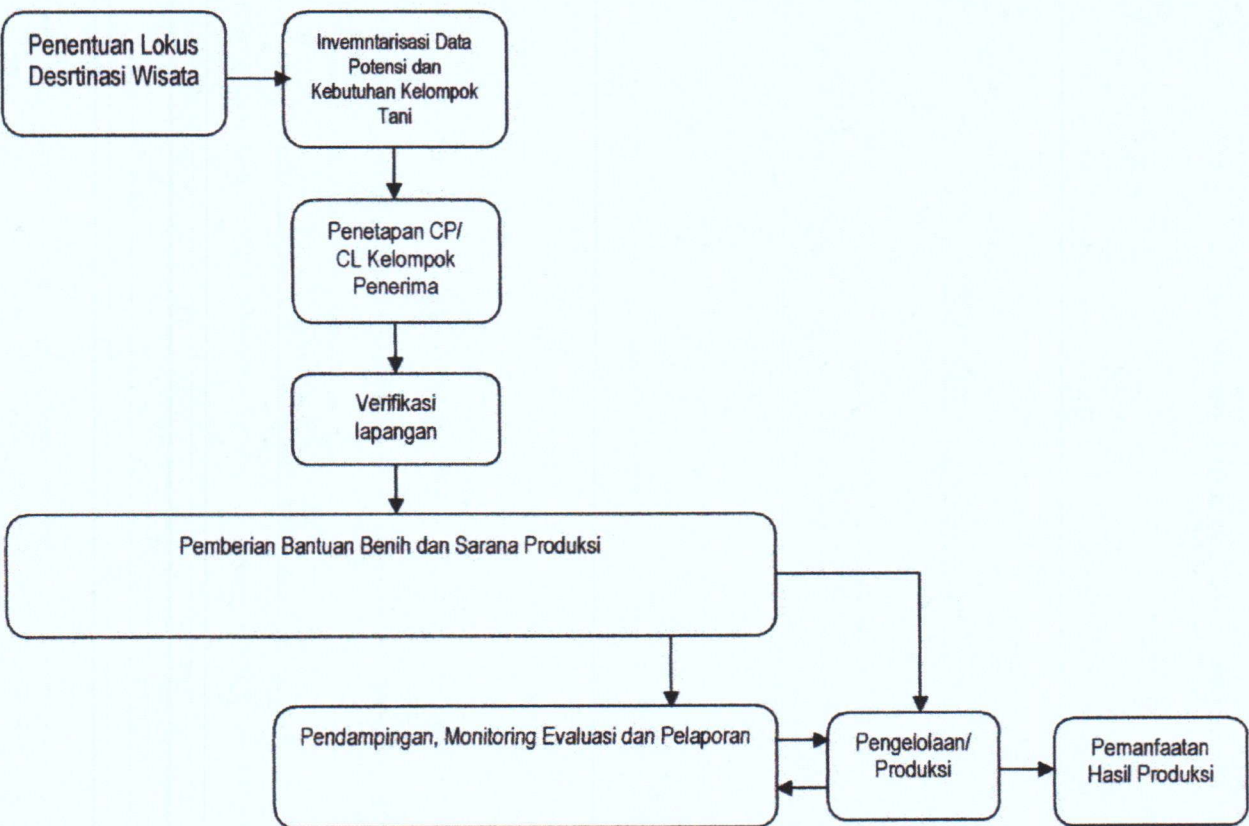
**NTT-04.SP2. PENINGKATAN KUALITAS AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI WISATA DAN SARANA AIR BERSIH DI LOKASI WISATA**

<b>BAPPELITBANGDA</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT</b>	<b>DINAS PUPR PROVINSI NTT</b>	<b>DINAS PUPR KAB/ KOTAS</b>
-----------------------	--	--------------------------------	------------------------------

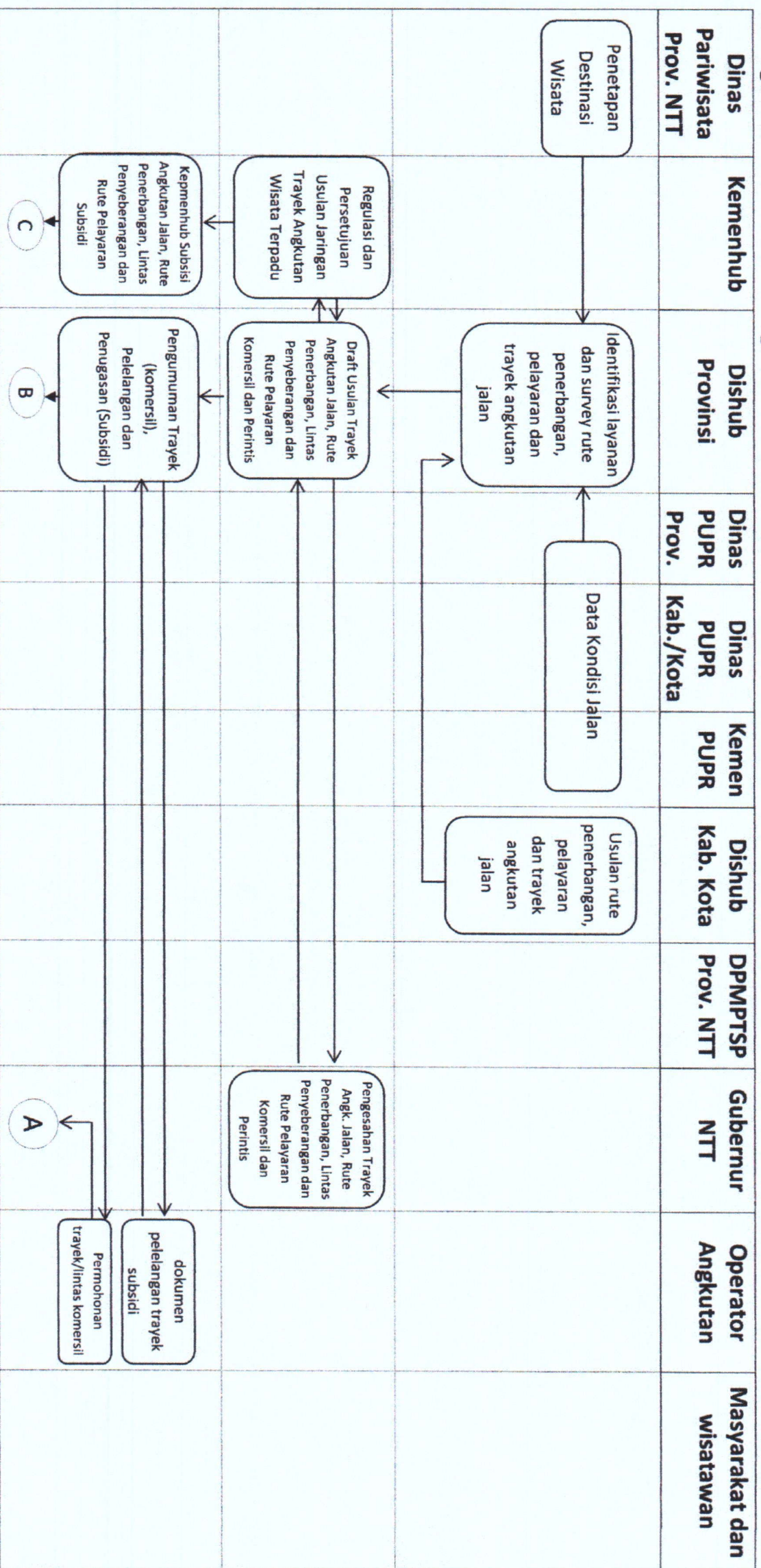


**NTT-04.SP3. PENINGKATAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN DI SEKITAR KAWASAN WISATA**

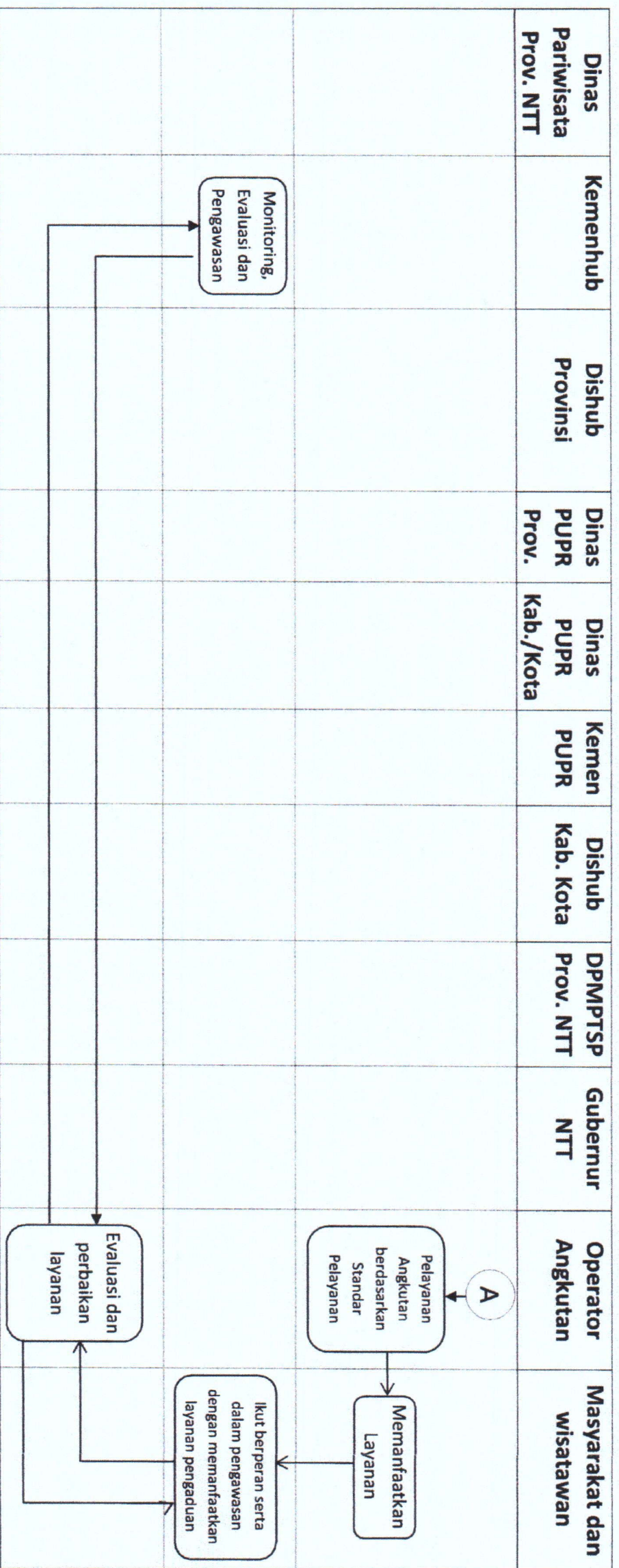
<b>BAPPELITBANGDA PROVINSI, DISPAREKRAF PROVINSI</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KP PROVINSI</b>	<b>KELOMPOK TANI</b>	<b>INVESTOR/ UMKM/ MASYARAKAT</b>
--	--	----------------------	-----------------------------------



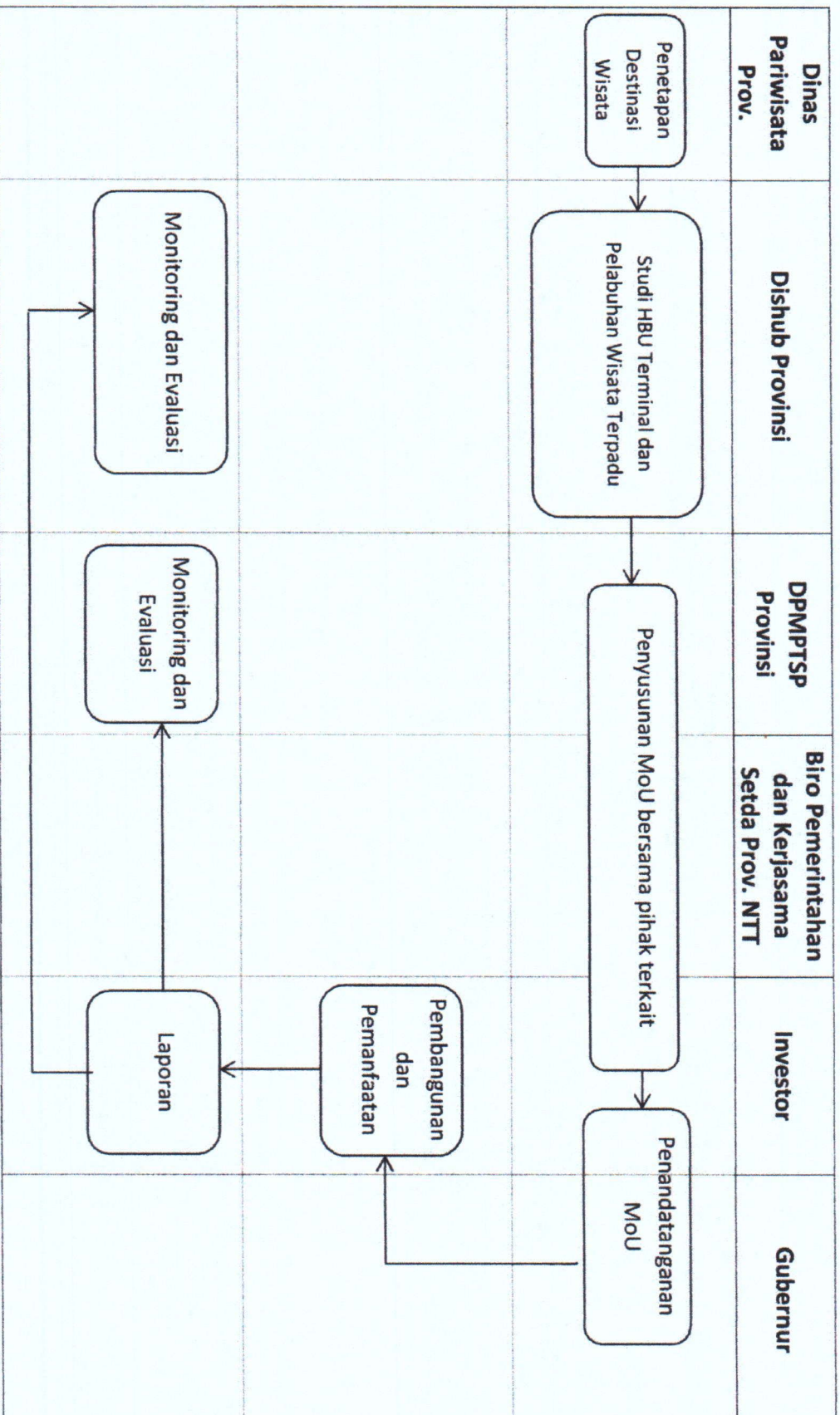
A. Peningkatan Sarana Perhubungan di Pariwisata Estate



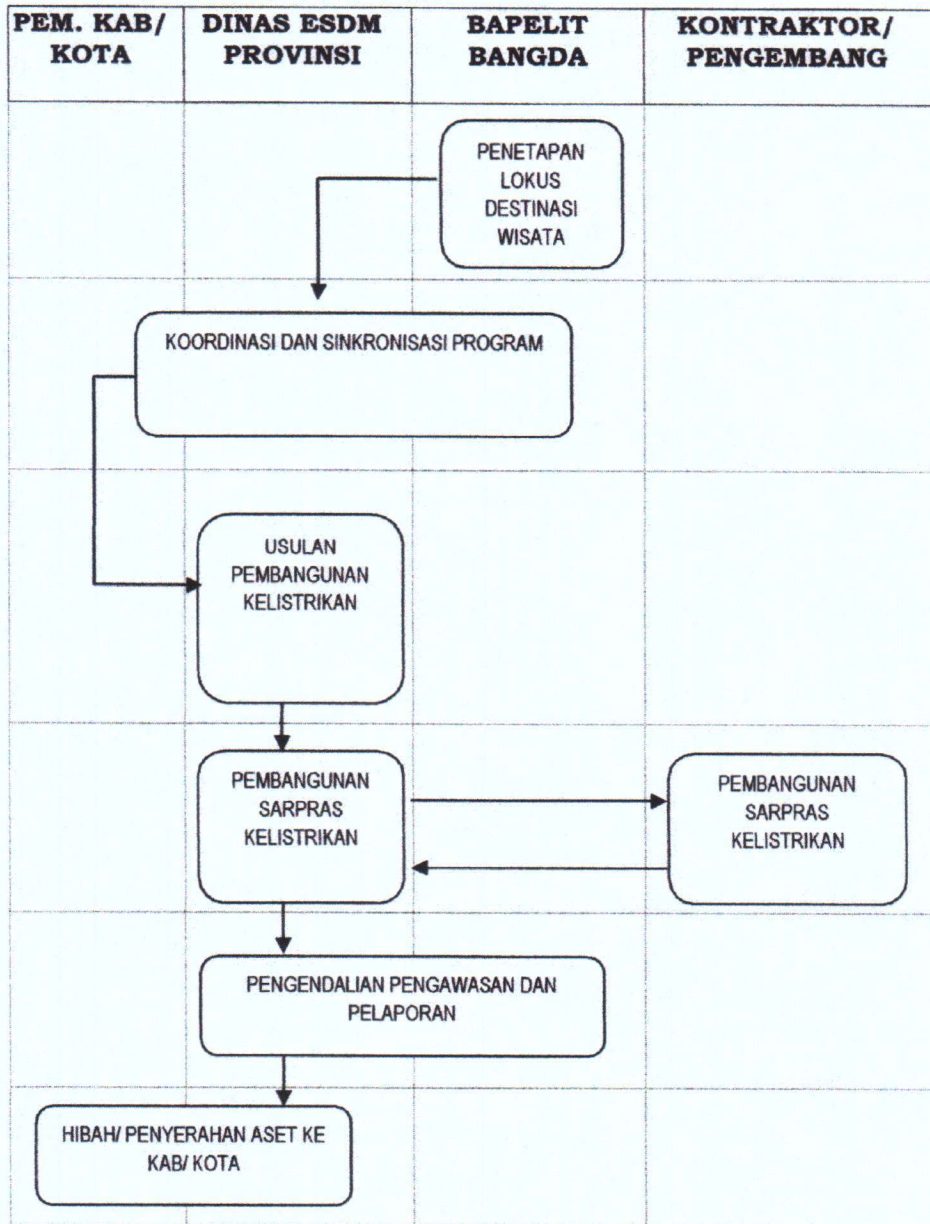




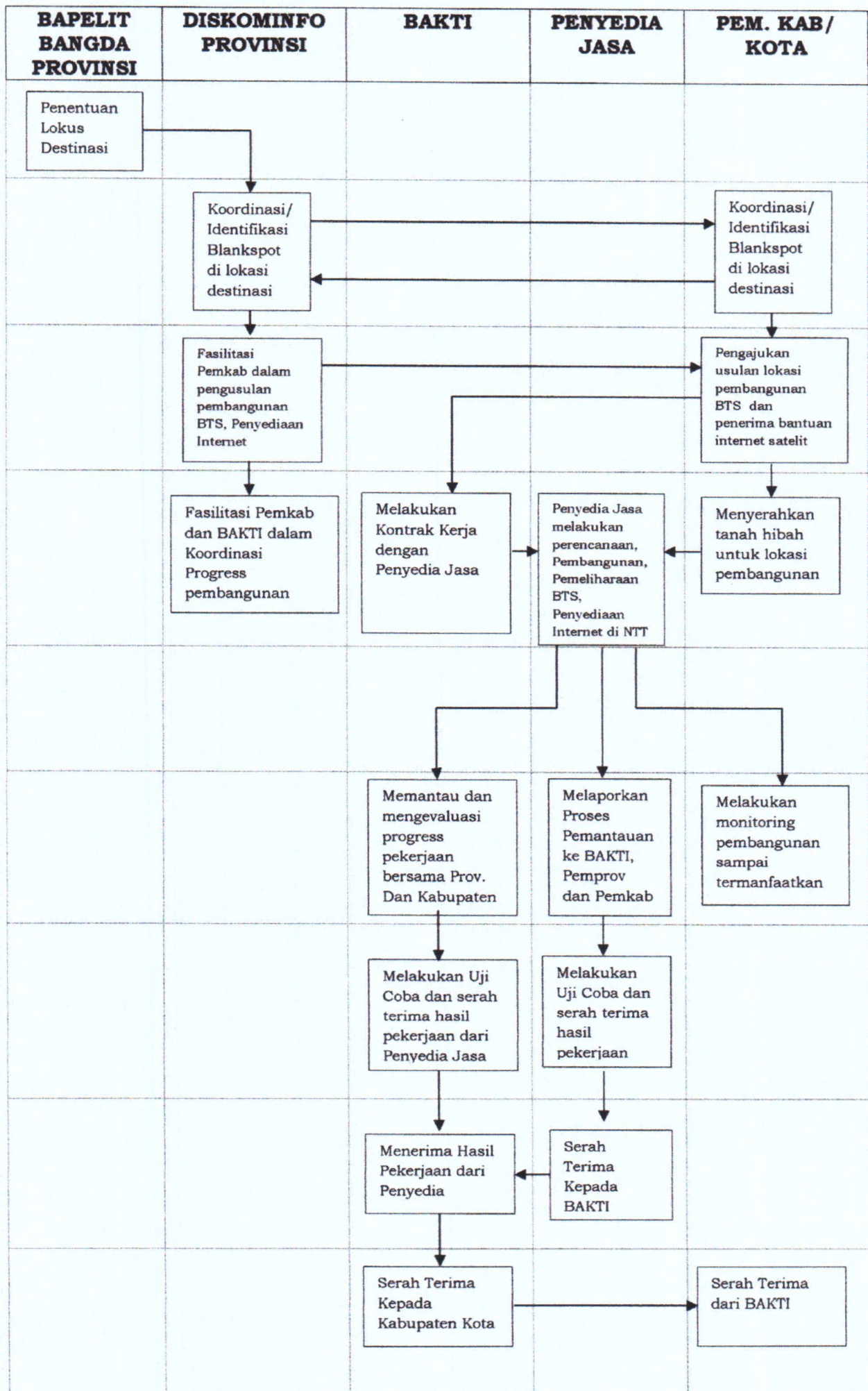
**B. Peningkatan Prasarana Perhubungan di Pariwisata Estate**

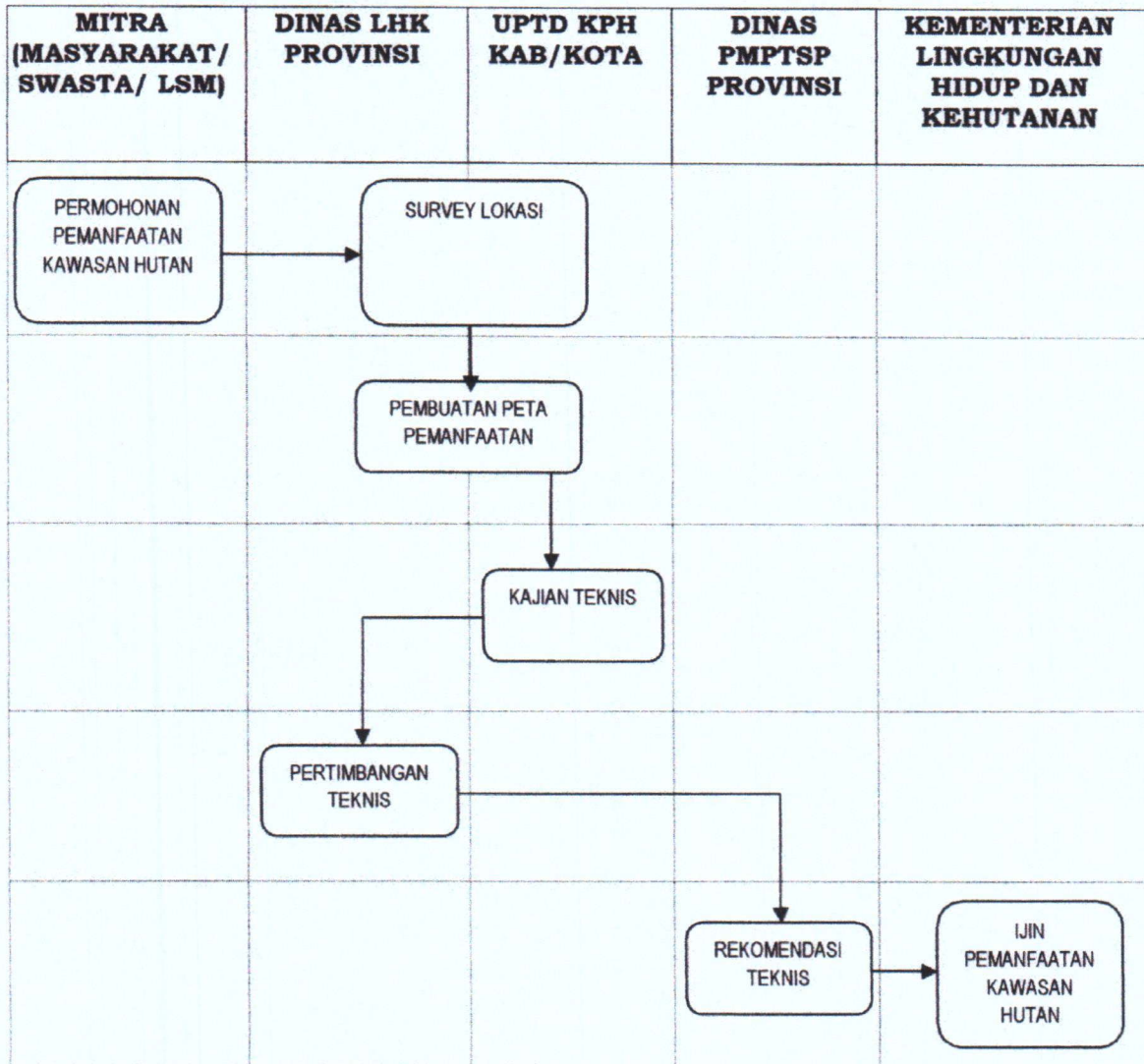


NTT-04.SP5. PENINGKATAN DUKUNGAN ELEKTRIFIKASI DI LOKASI PARIWISATA ESTATE

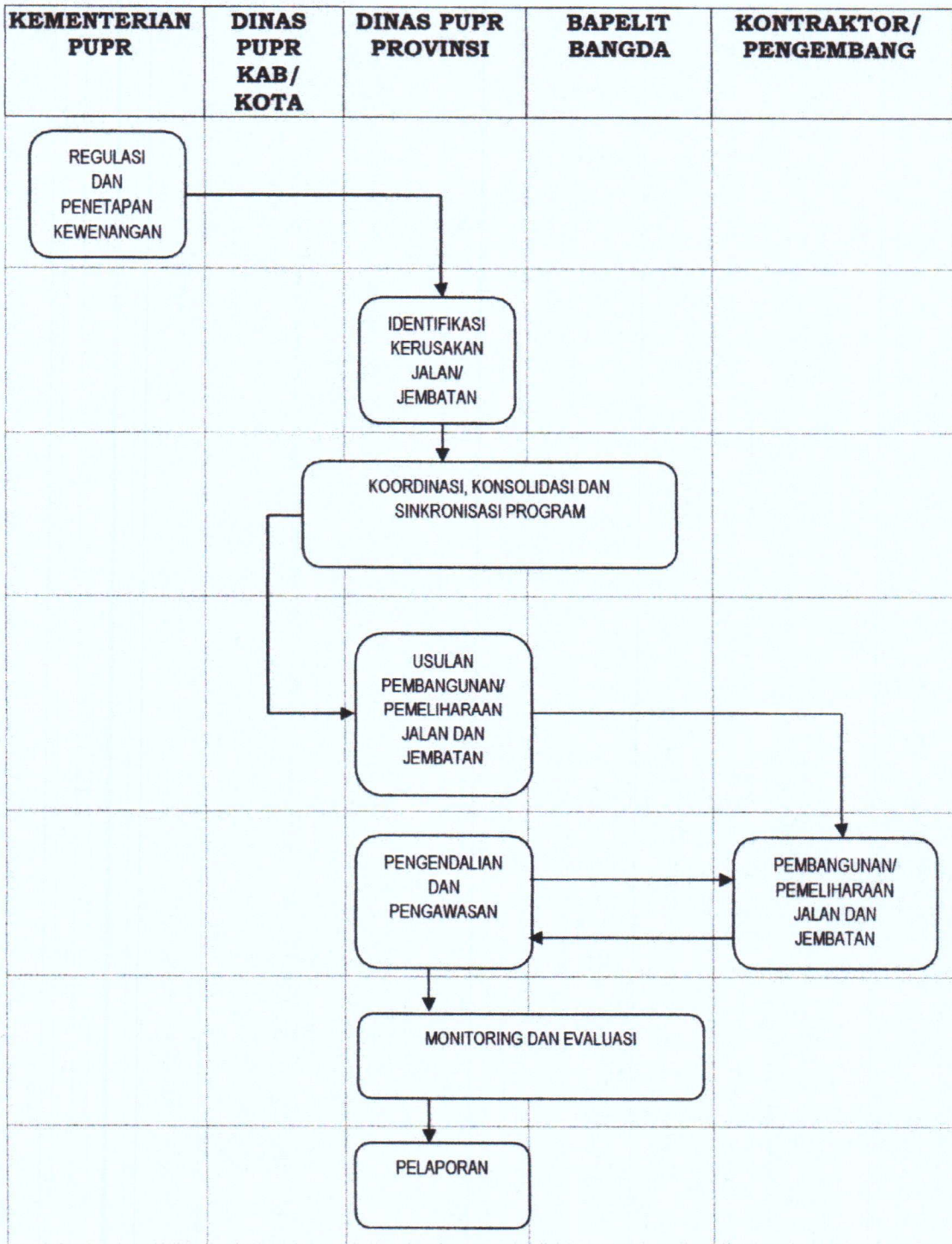


**NTT-04.SP6. PENGEMBANGAN PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI LOKASI PARIWISATA**

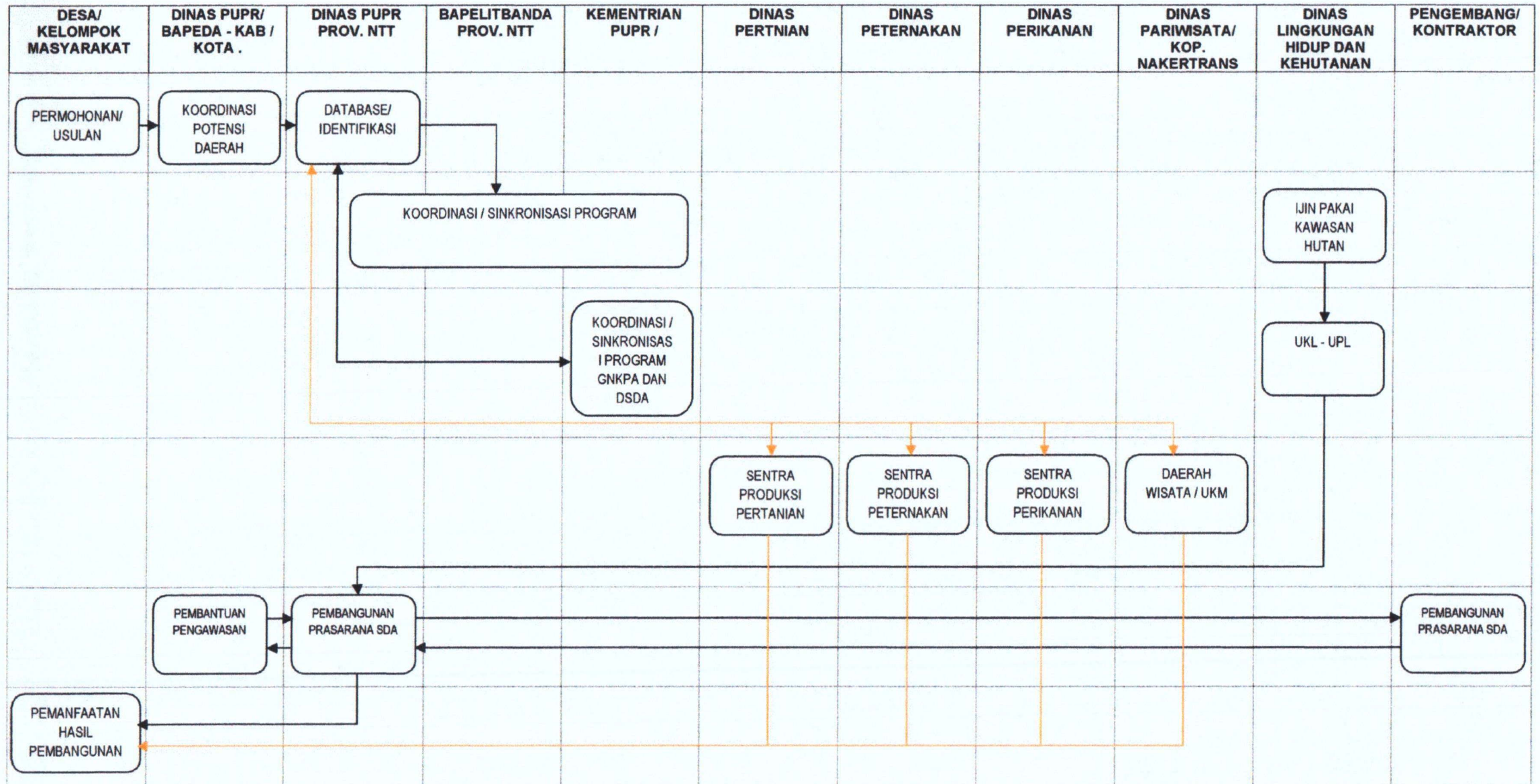




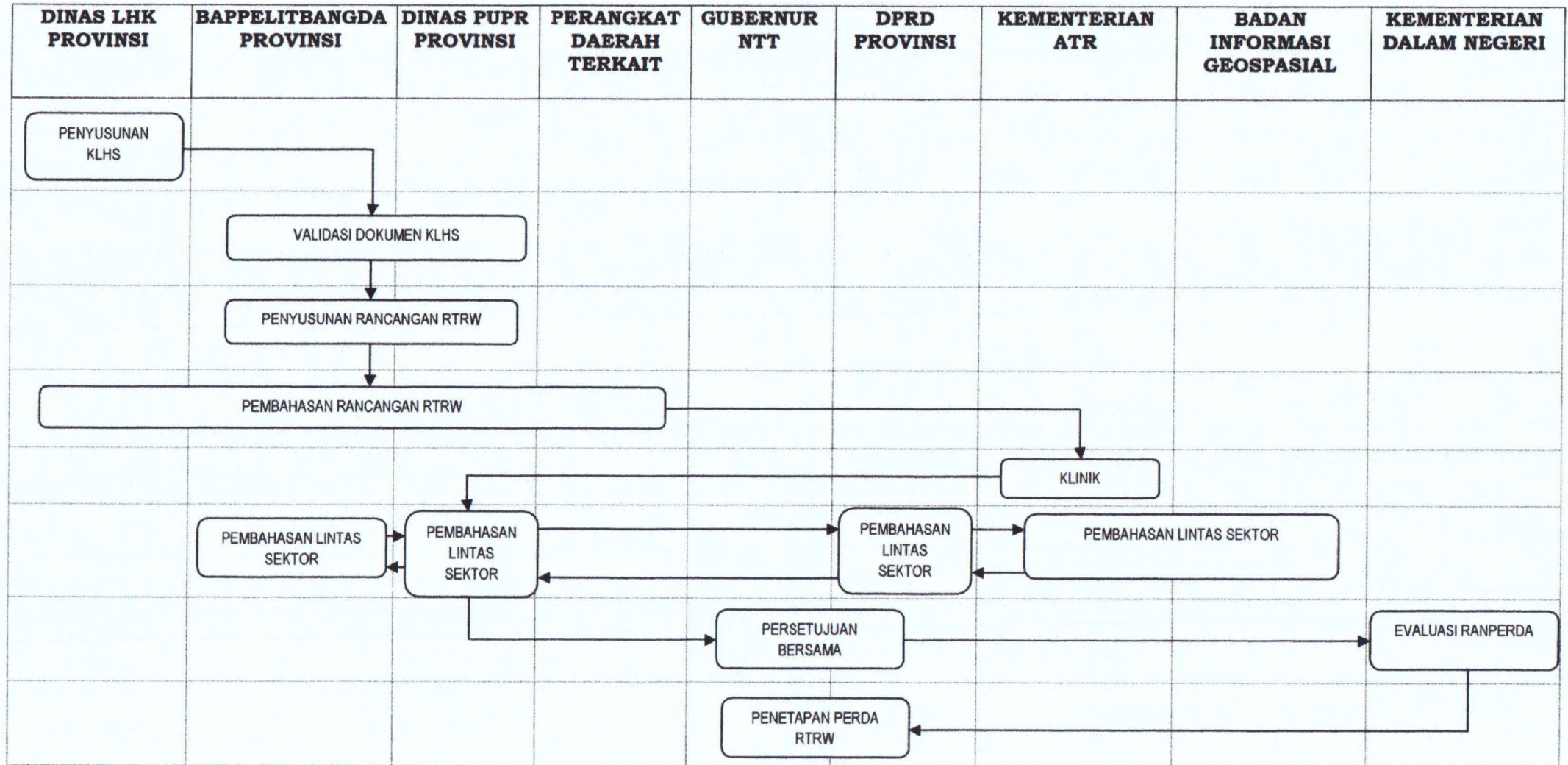
A. PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN



**B. PENINGKATAN KUALITAS EMBUNG DAN AIR BAKU**

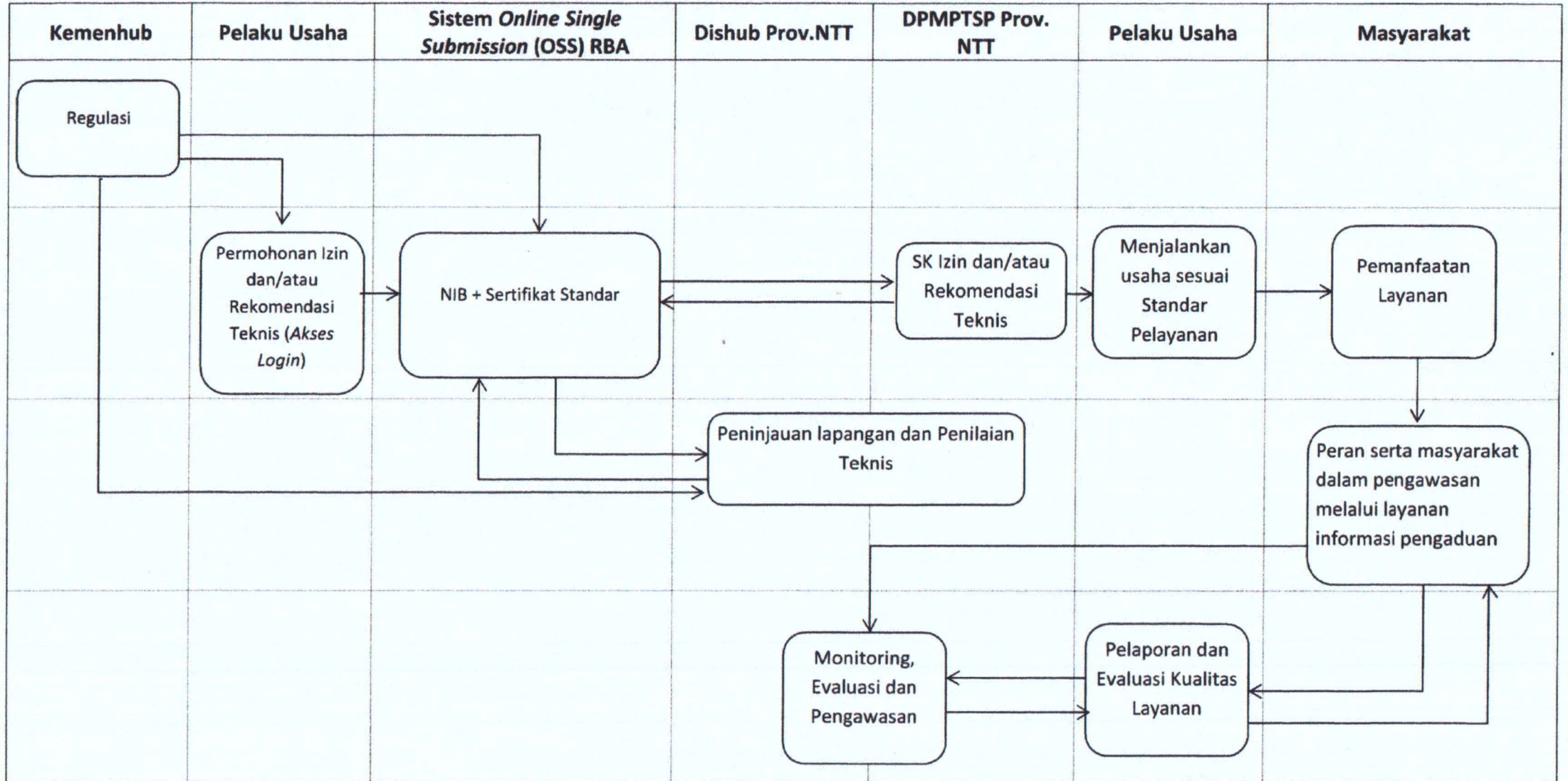


NTT-05.SP2. PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

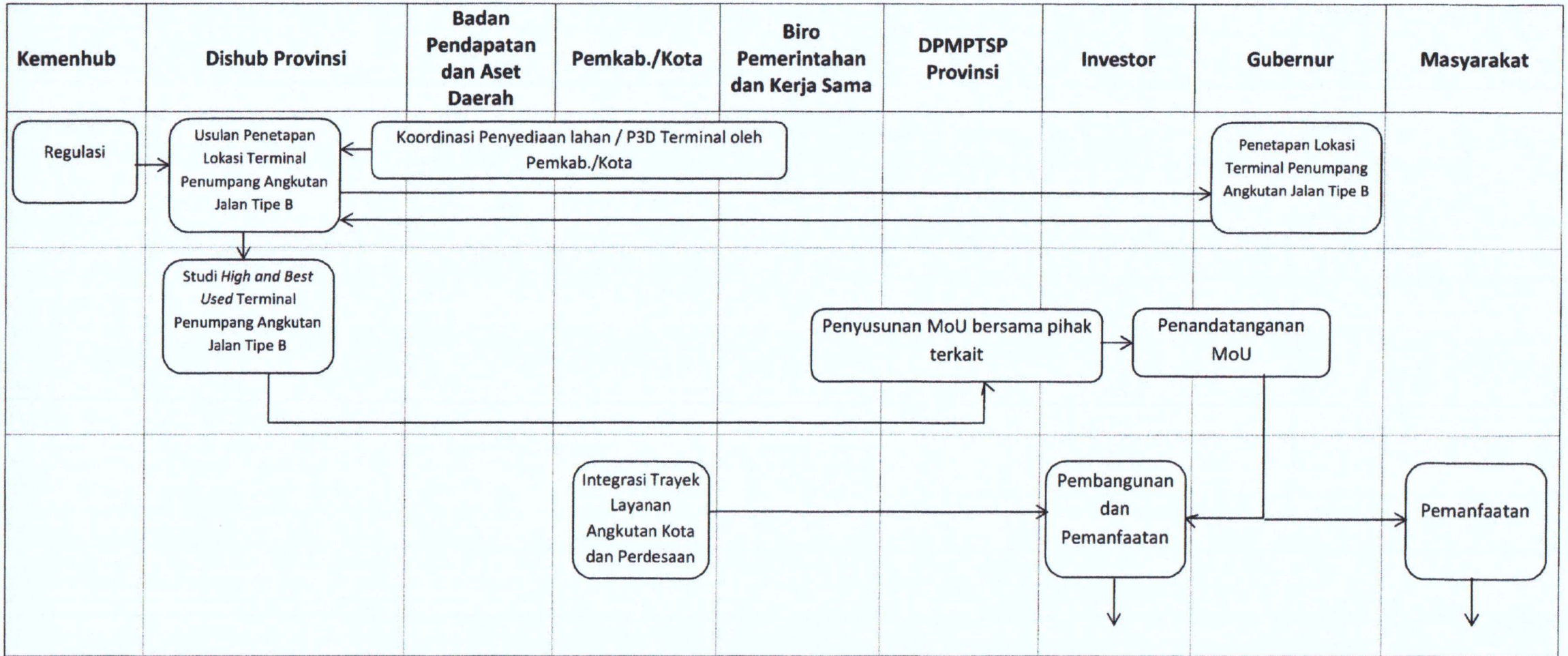


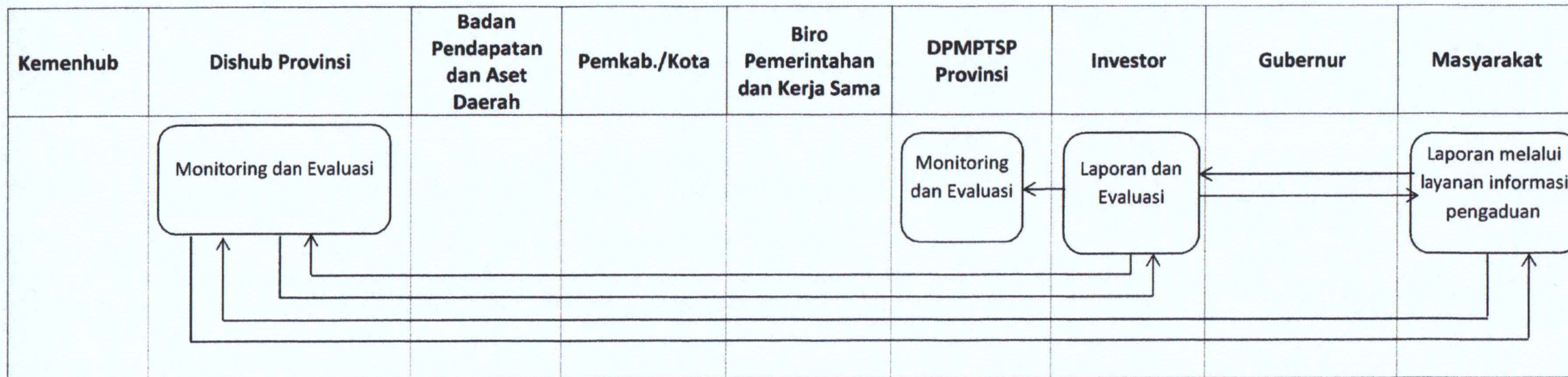
NTT-05.SP3. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

A. Peningkatan Sarana Perhubungan (Penerbitan Rekomendasi Teknis=Angkutan Jalan, Angkutan Pelayaran dan Lalu Lintas Jalan)

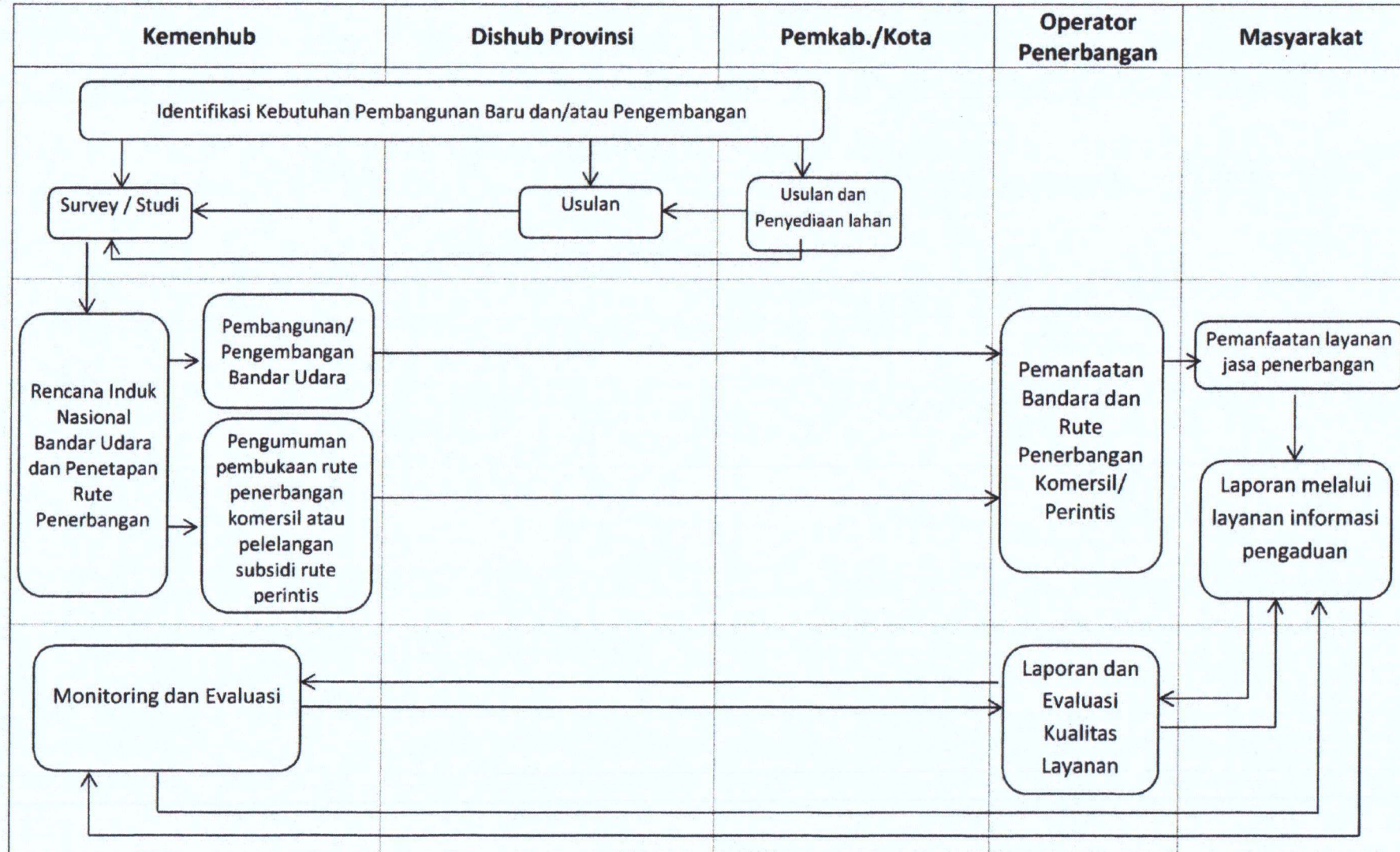


B. Peningkatan Prasarana Perhubungan (Terminal Tipe B)

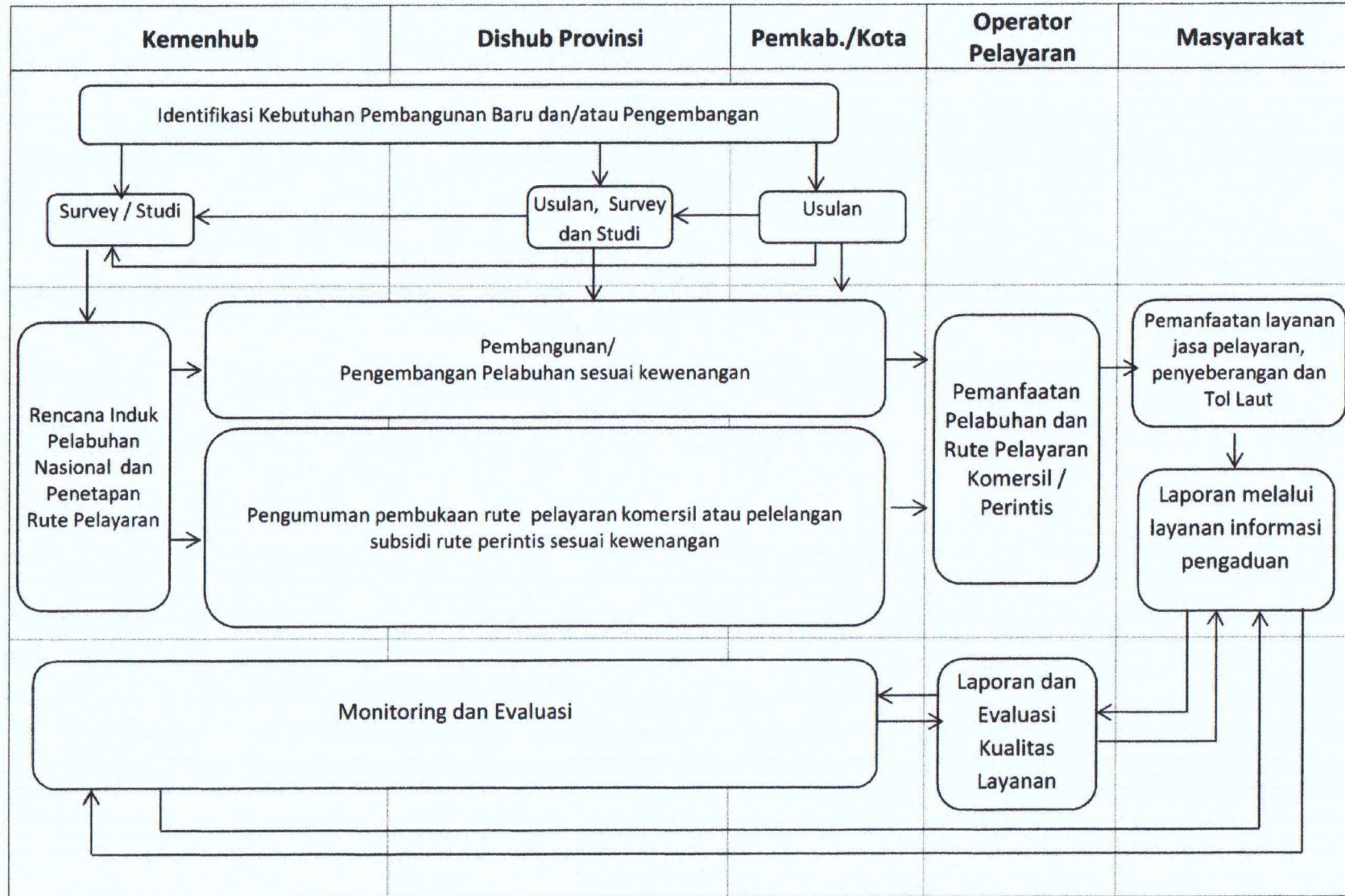




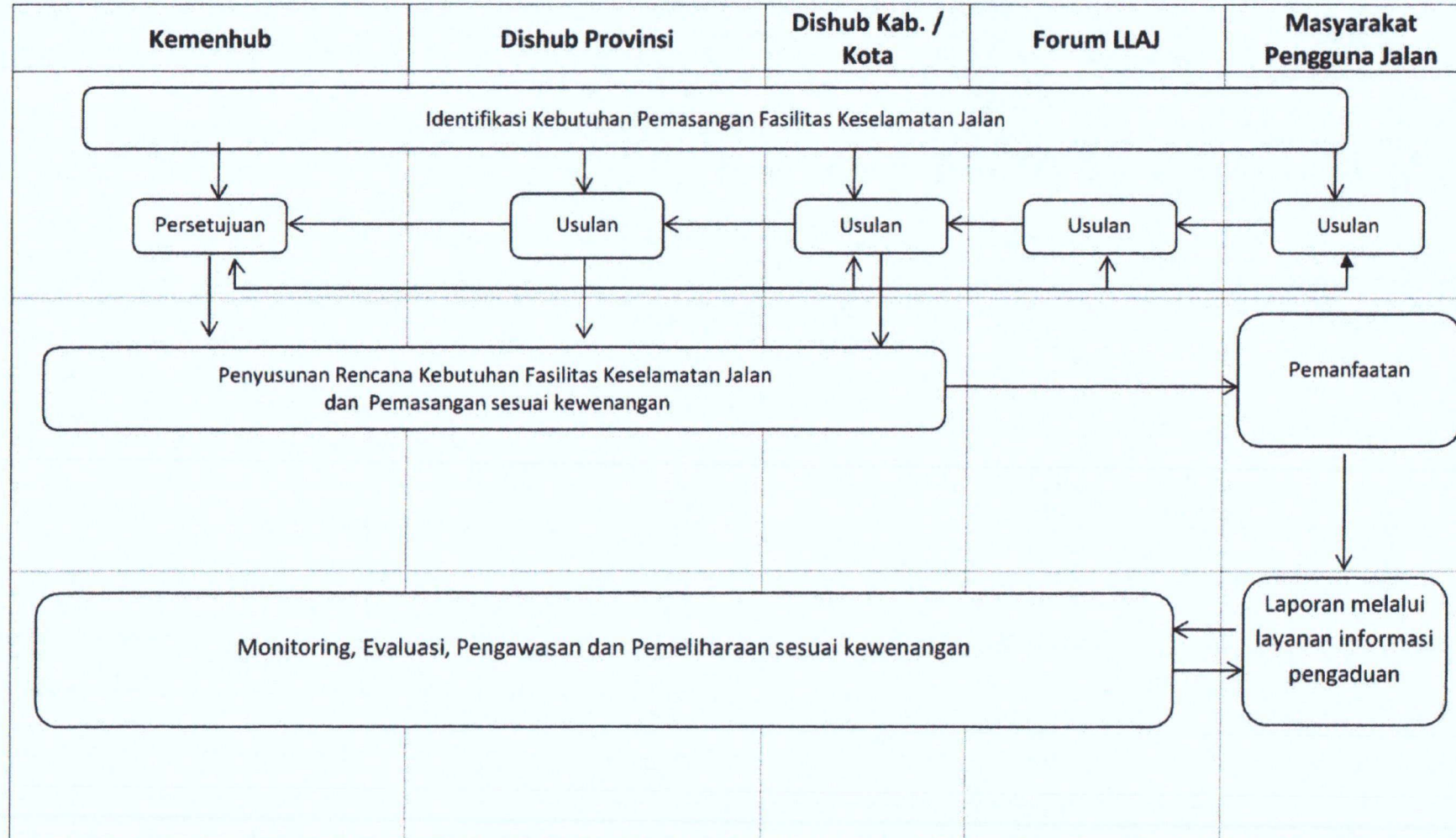
C. Peningkatan Prasarana Perhubungan (Bandar Udara dan Rute Penerbangan)



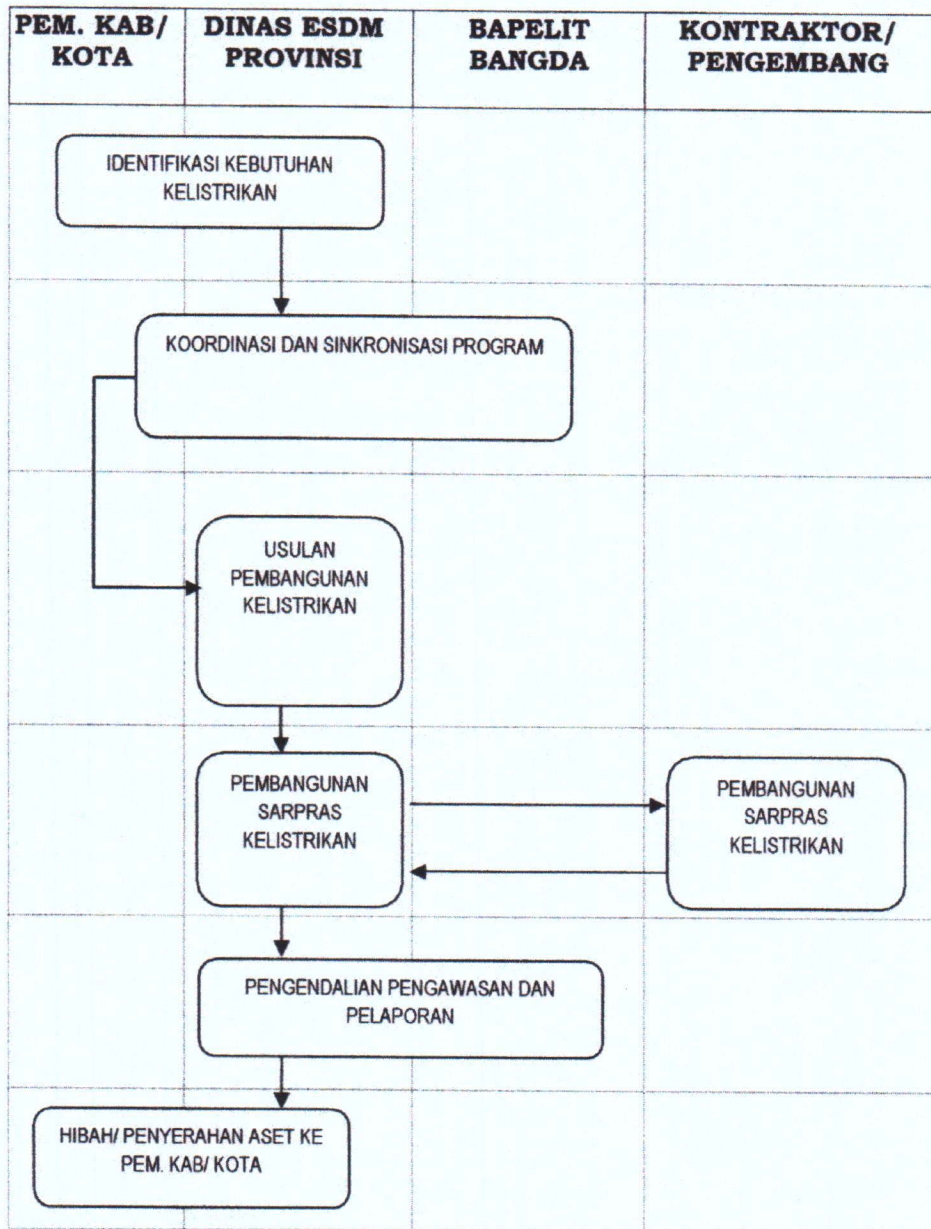
D. Peningkatan Prasarana Perhubungan (Pelabuhan dan Rute Pelayaran dan Penyeberangan)



E. Peningkatan Prasarana Perhubungan (Fasilitas Keselamatan Jalan)



NTT-05.SP4. PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI



NTT-06.SP1. PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN

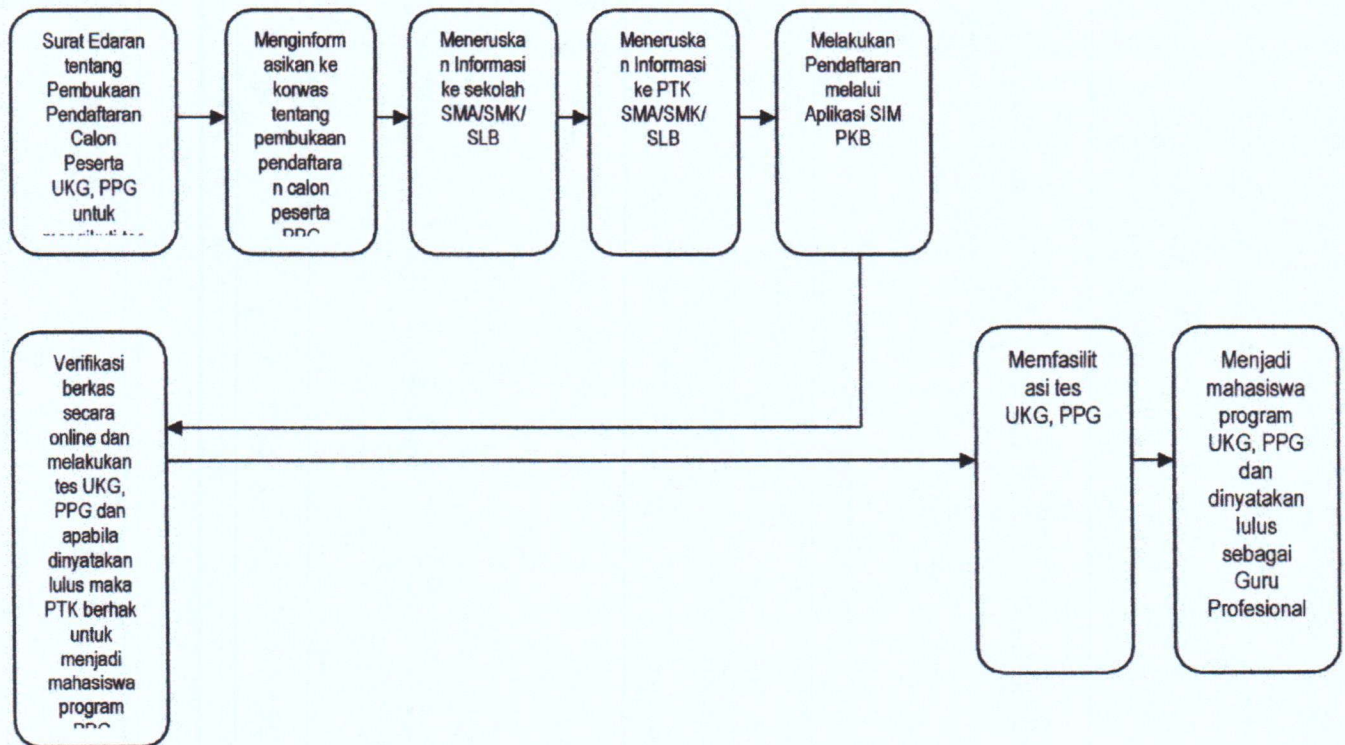
**A. PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMA/SMK.SLB**

PRESIDEN RI	KEMENKEU RI	KEMENDIKBUD RI	PUPR PROVINSI	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	PENYEDIA BARANG
-------------	-------------	----------------	---------------	--------------------------------	--	-----------------

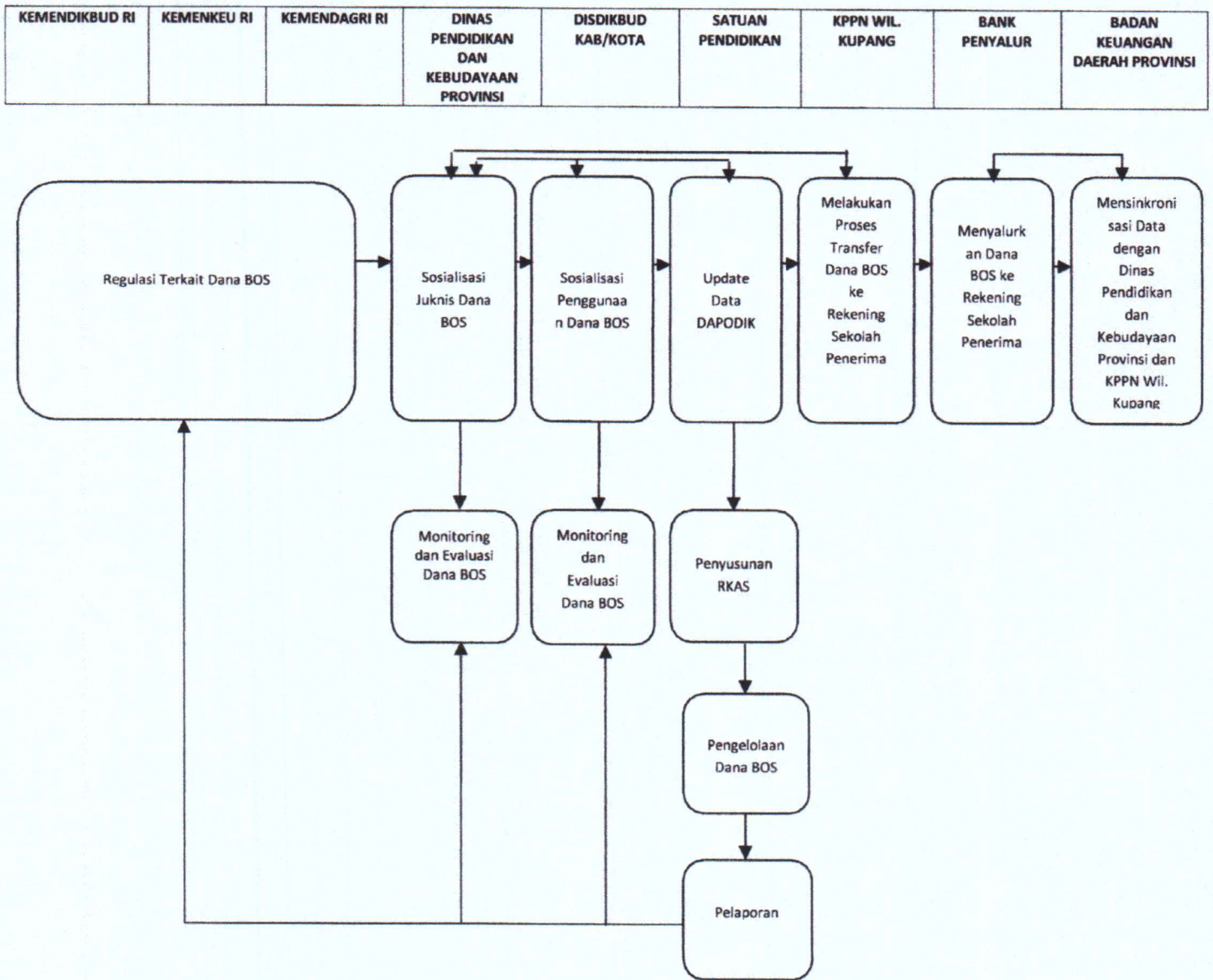


**B. PENGEMBANGAN KARIER PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB**

KEMENDIKBUD (APLIKASI SIM PKB)	DINAS P&K PROVINSI NTT	KORWAS	SEKOLAH	PTK	LPMP	PERGURUAN TINGGI
--------------------------------	------------------------	--------	---------	-----	------	------------------

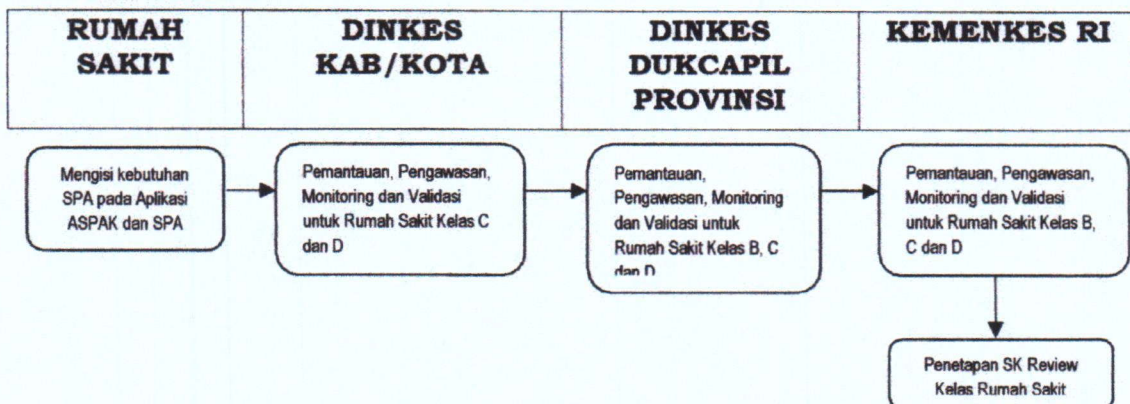


### C. PENGELOLAAN DANA BOS

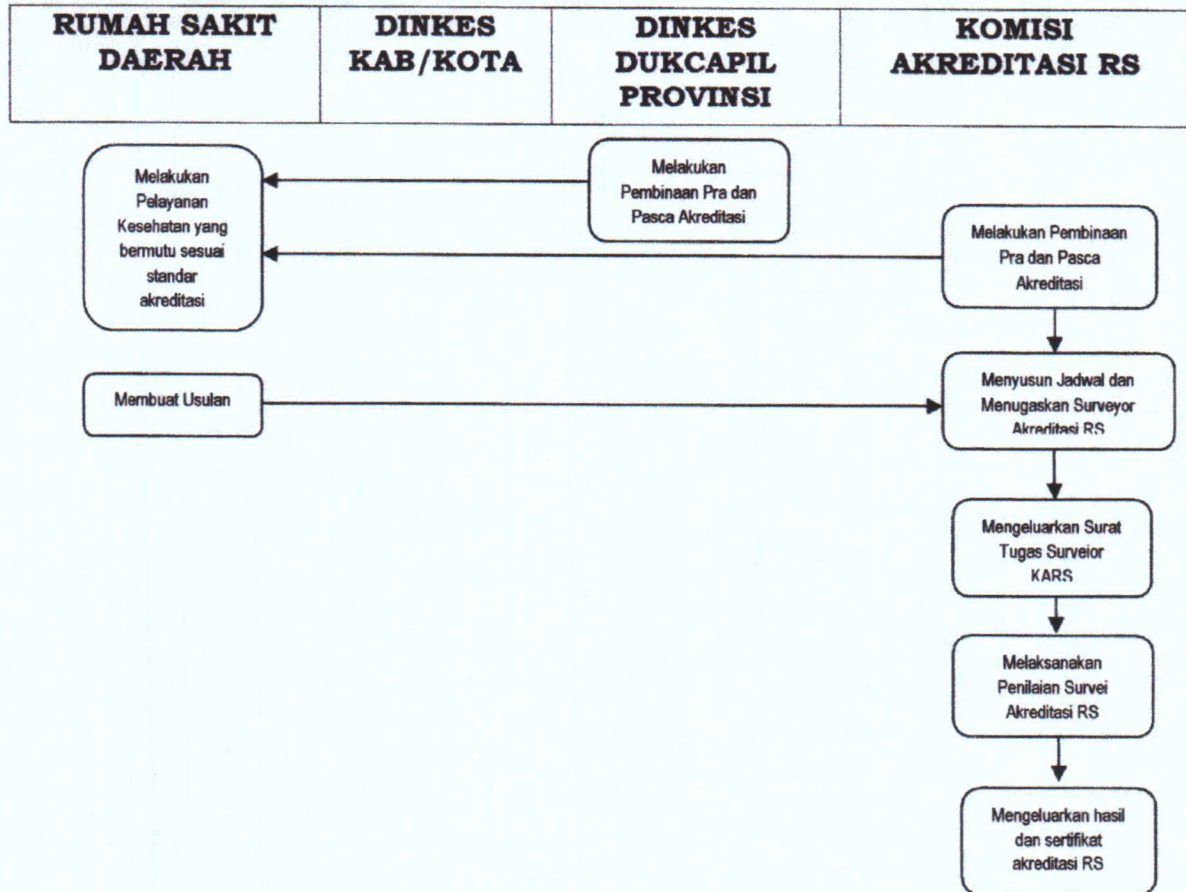


## NTT-06.SP2. PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN

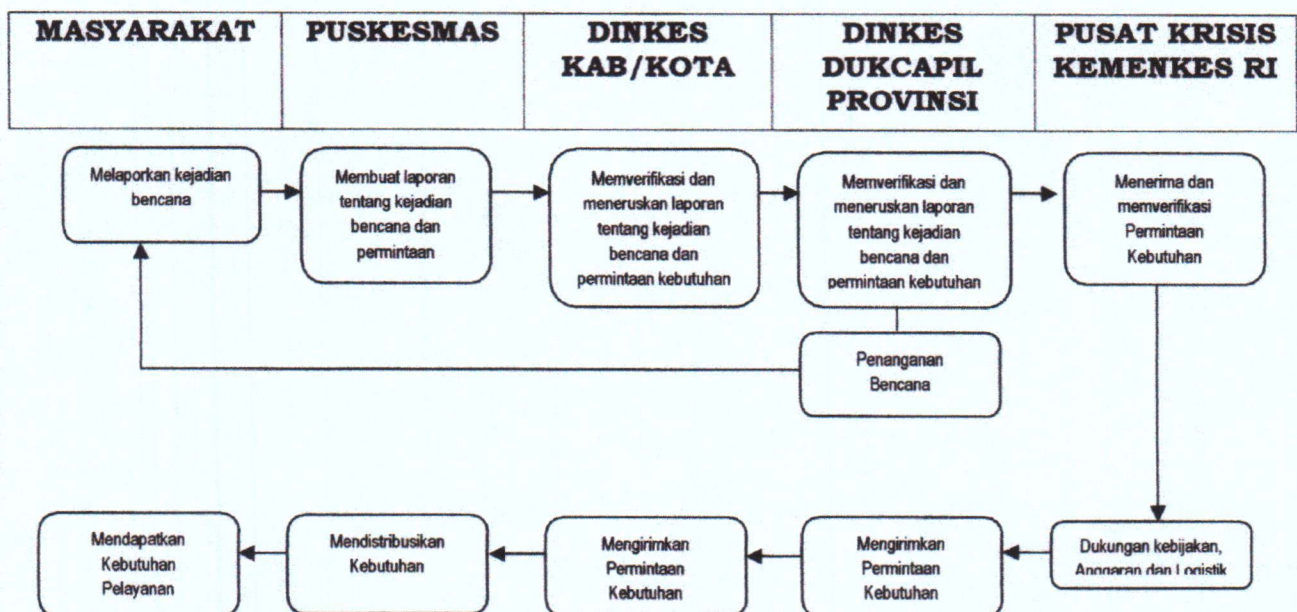
### A. UPAYA PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (SPA) RUMAH SAKIT



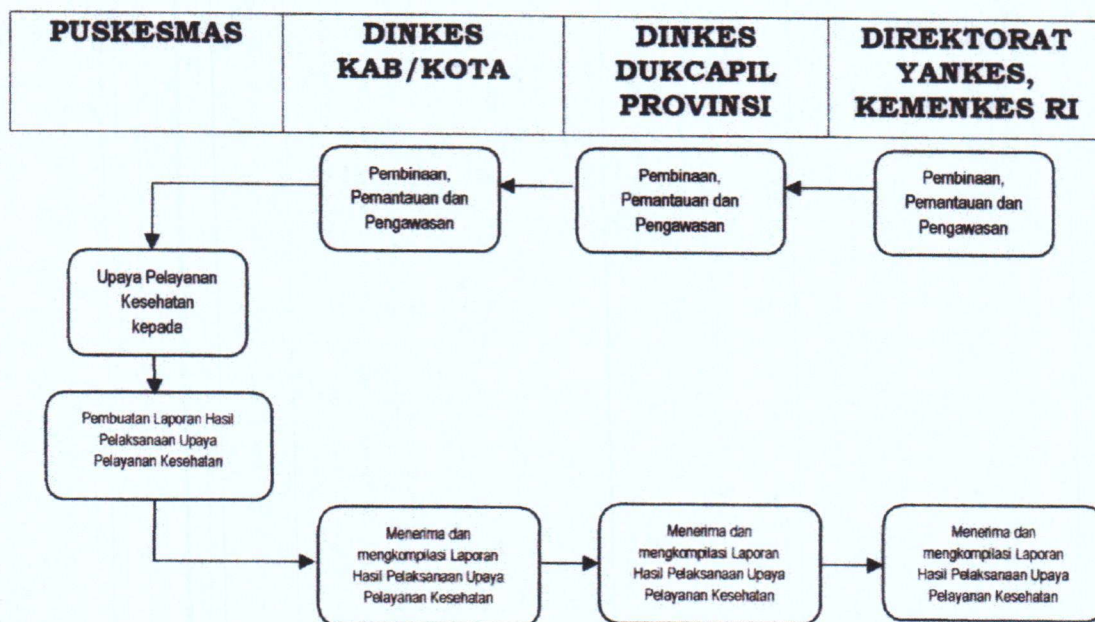
## B. UPAYA PERIJINAN DAN AKREDITASI FKRTL



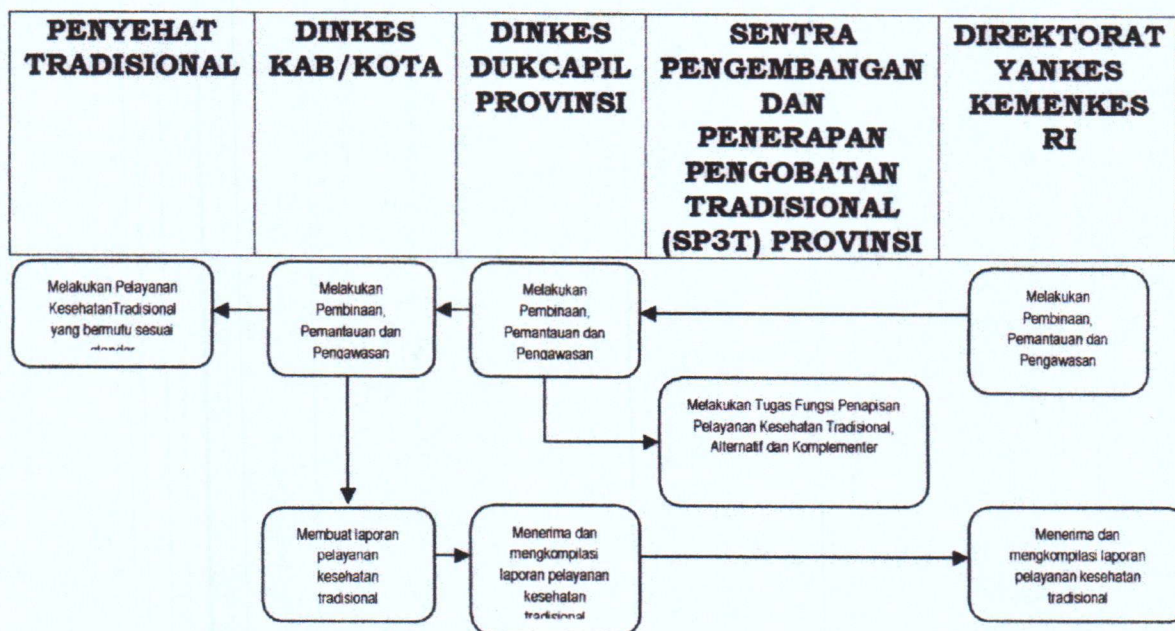
## C. PENANGANAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA



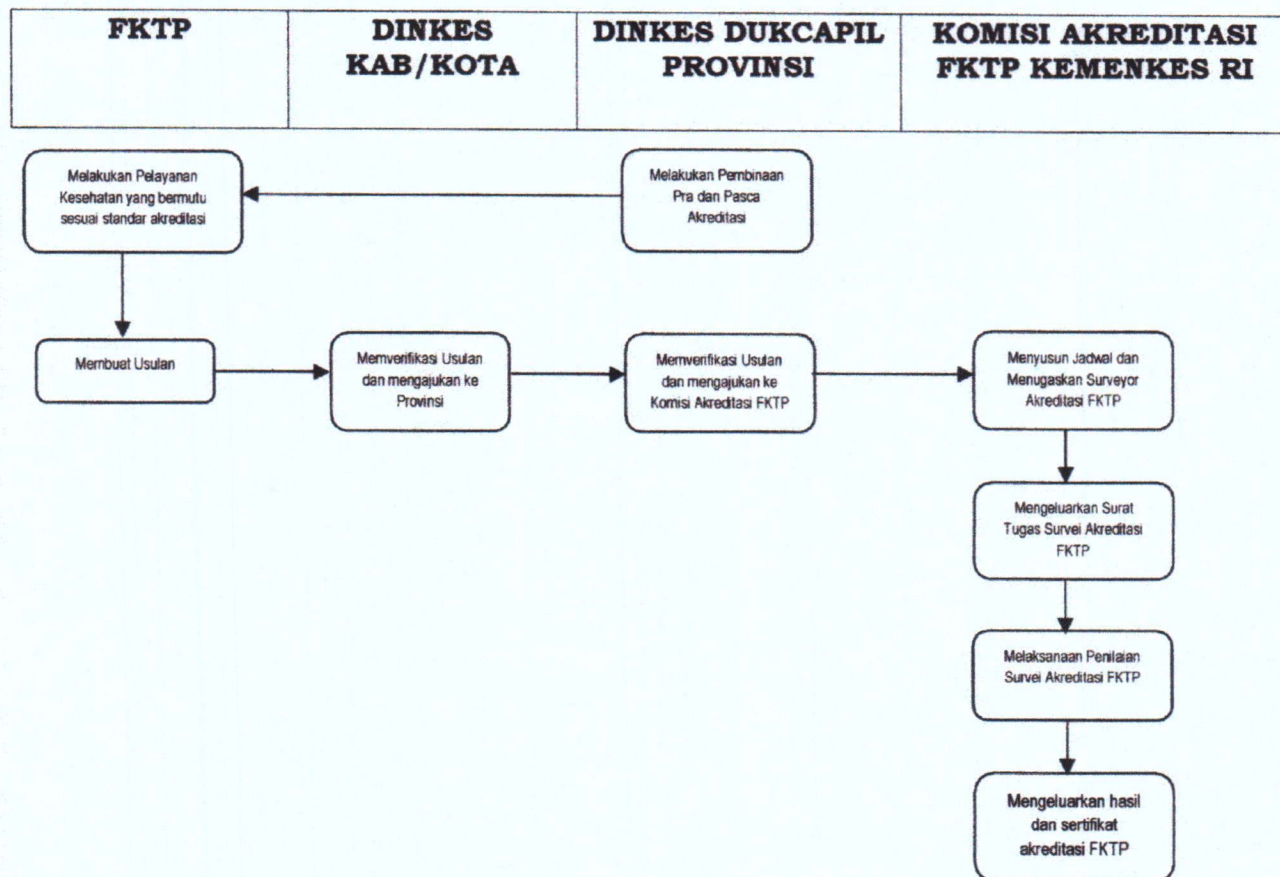
### D. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER



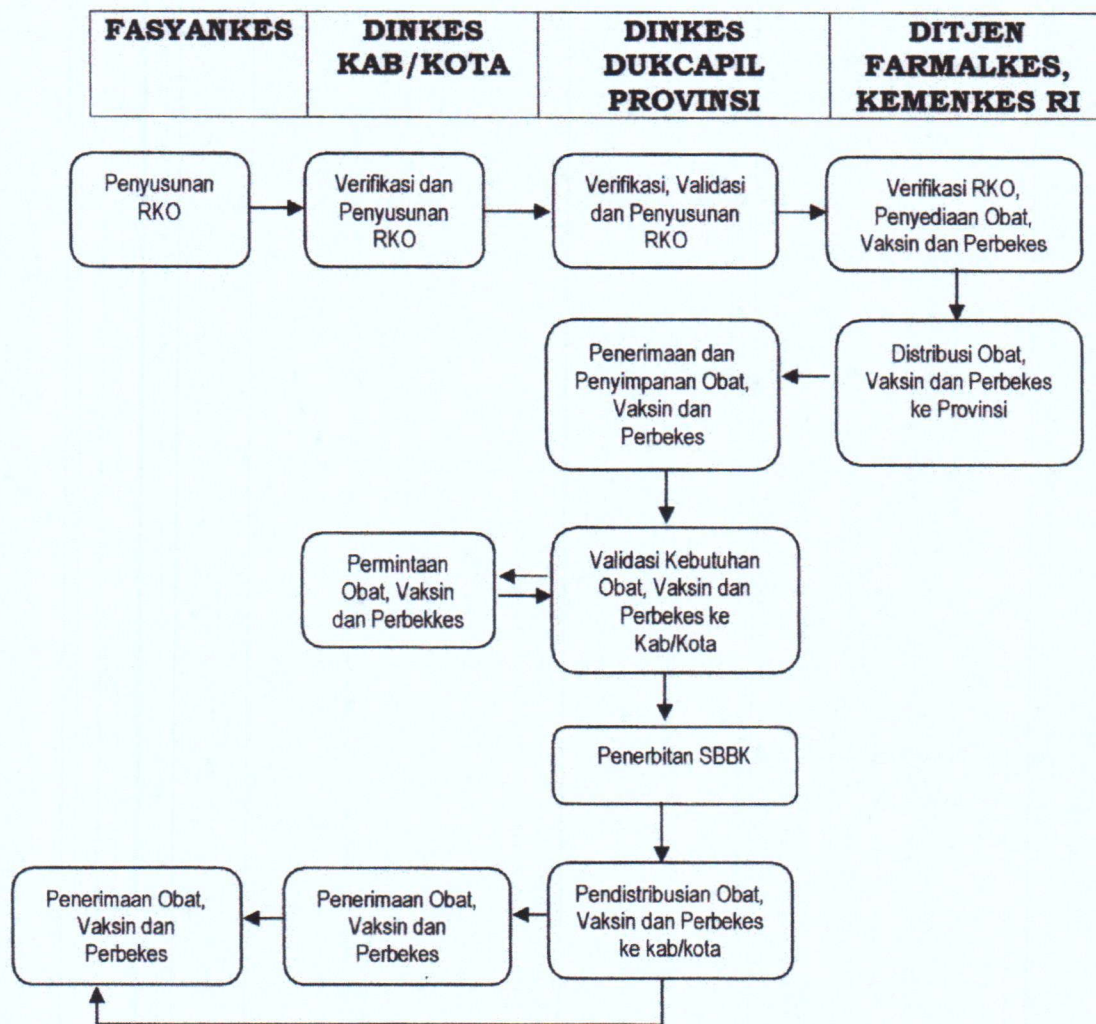
### E. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL



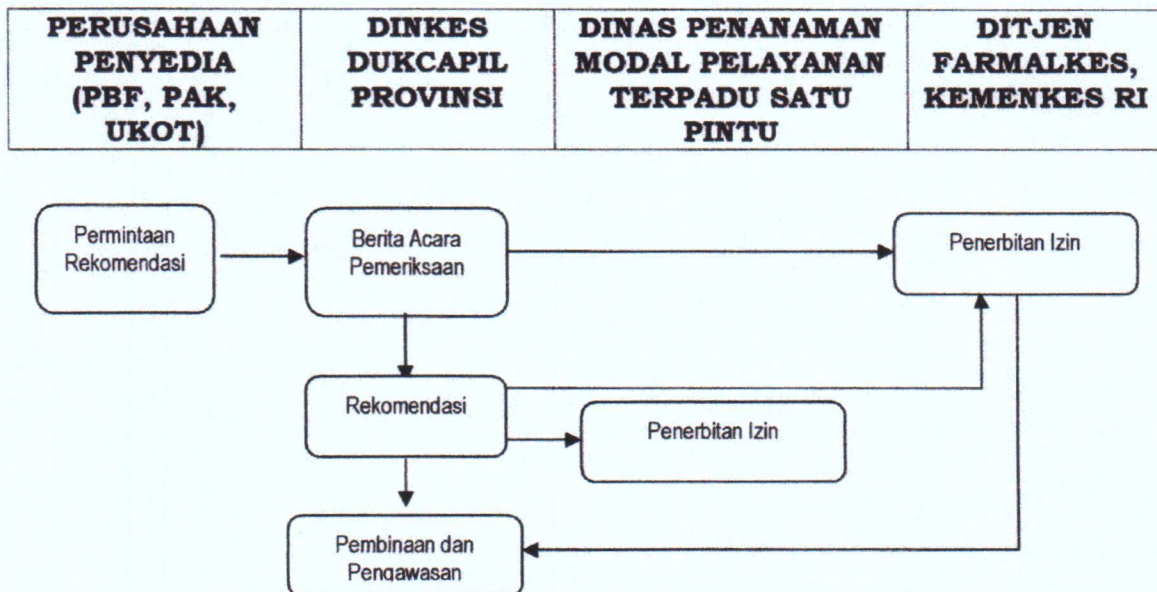
**F. UPAYA PERIJINAN DAN AKREDITASI FKTL**



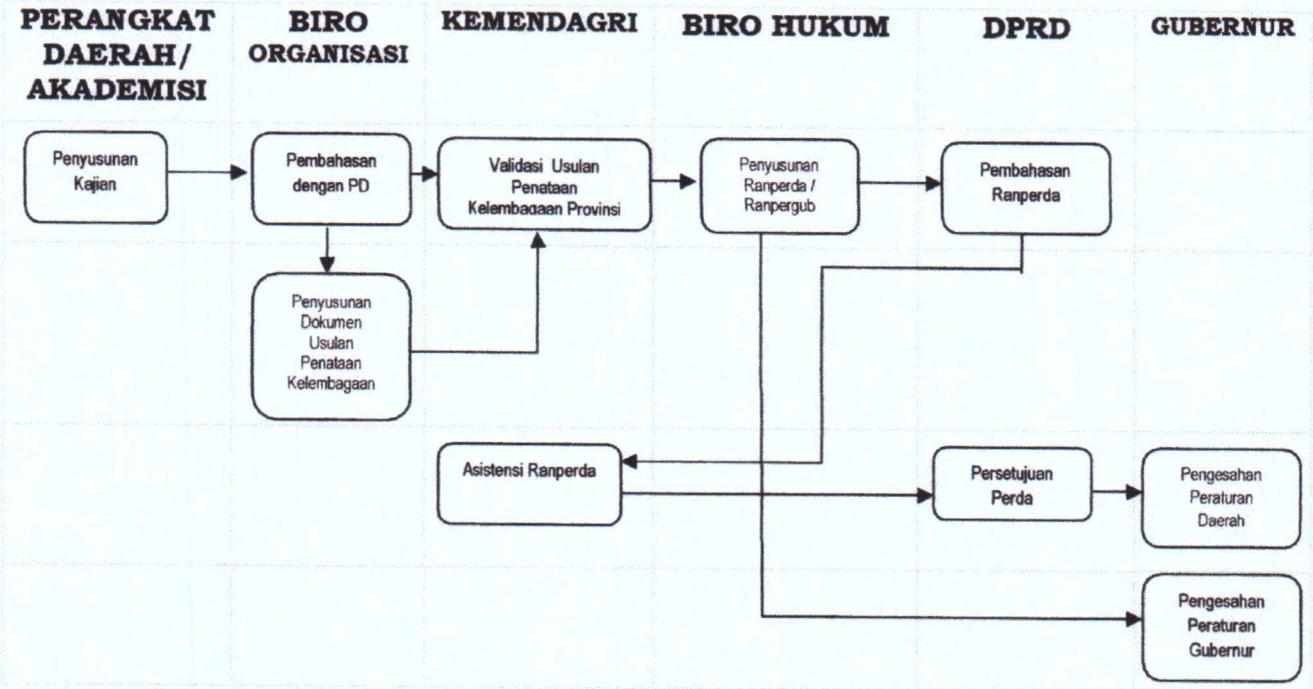
**G. PELAKSANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT, VAKSIN DAN PERBEKALAN KESEHATAN**



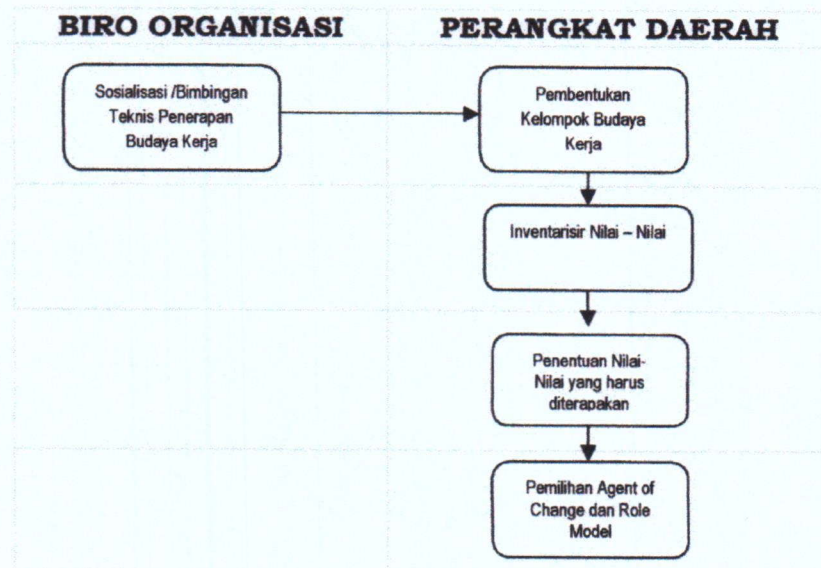
**H. PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS BAGI PENGELOLA DAN PERUSAHAAN PENYEDIA**

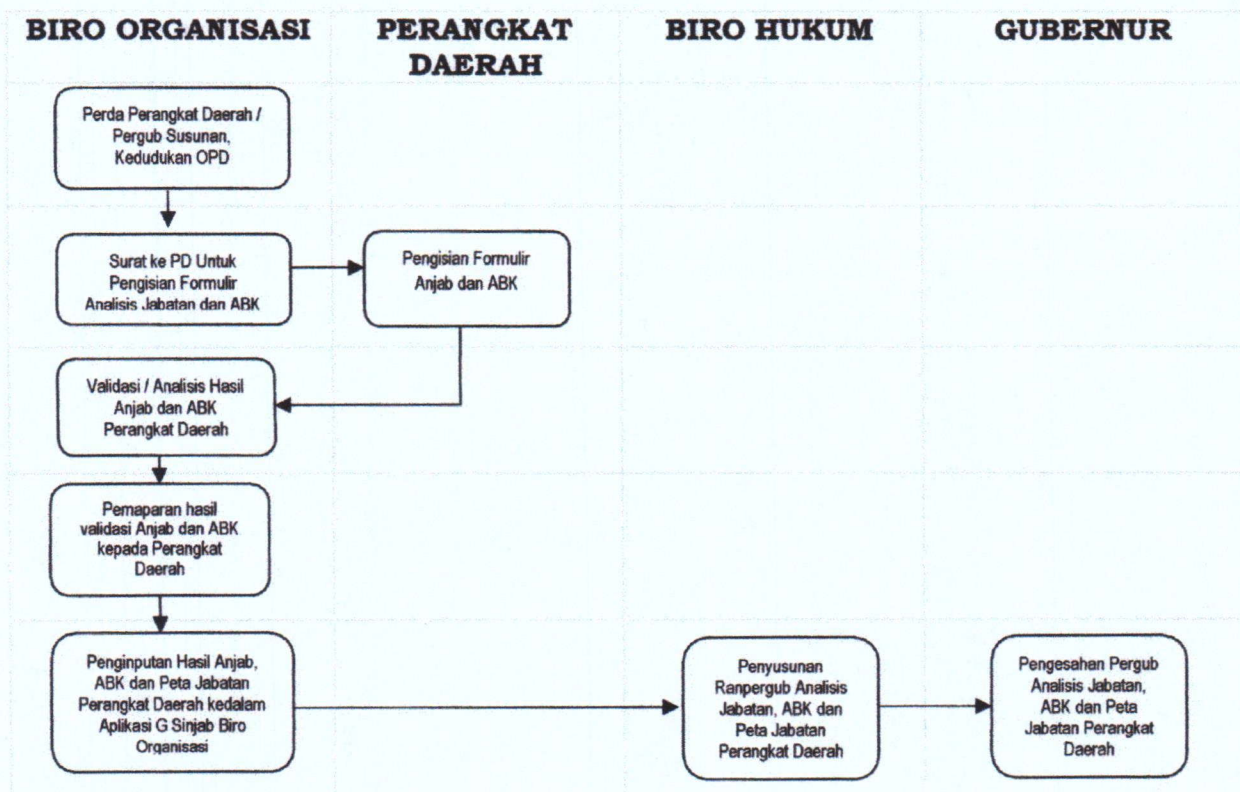


NTT-07.SP1 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

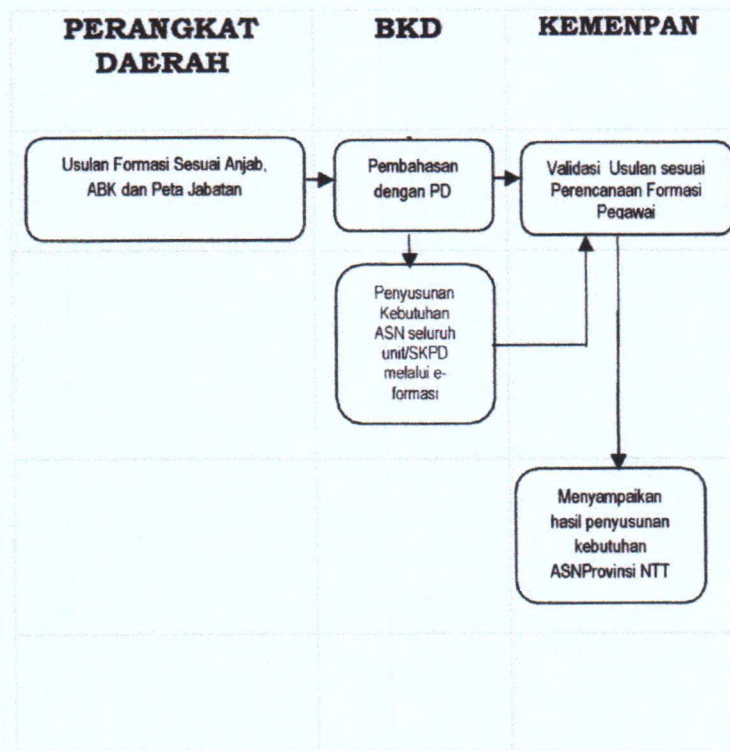


NTT-07.SP2 MANAJEMEN PERUBAHAN

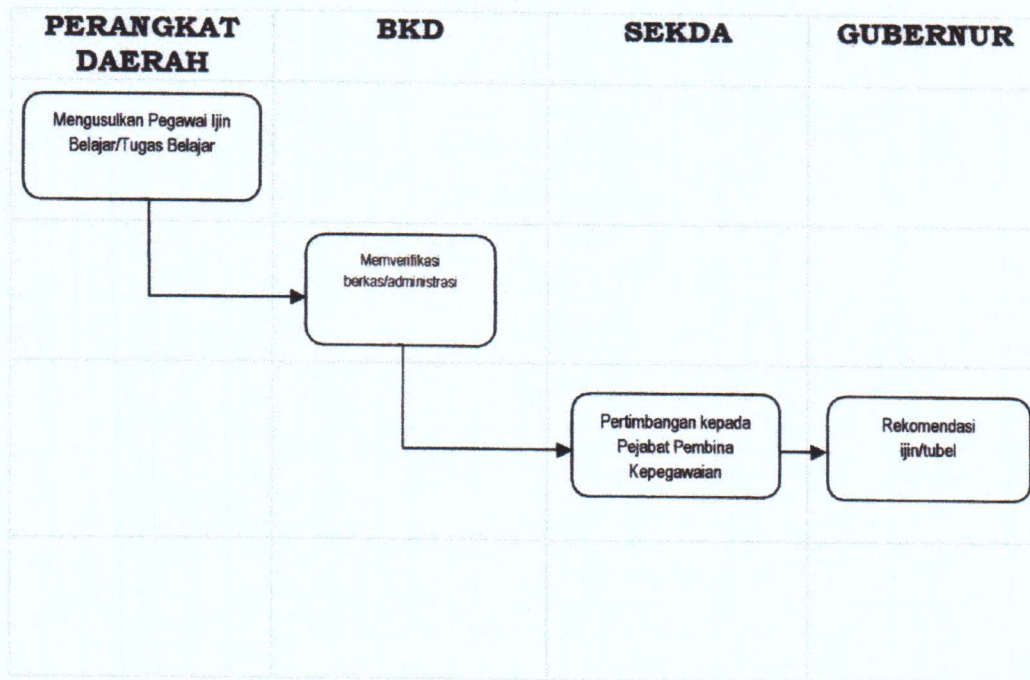




**B. PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI**

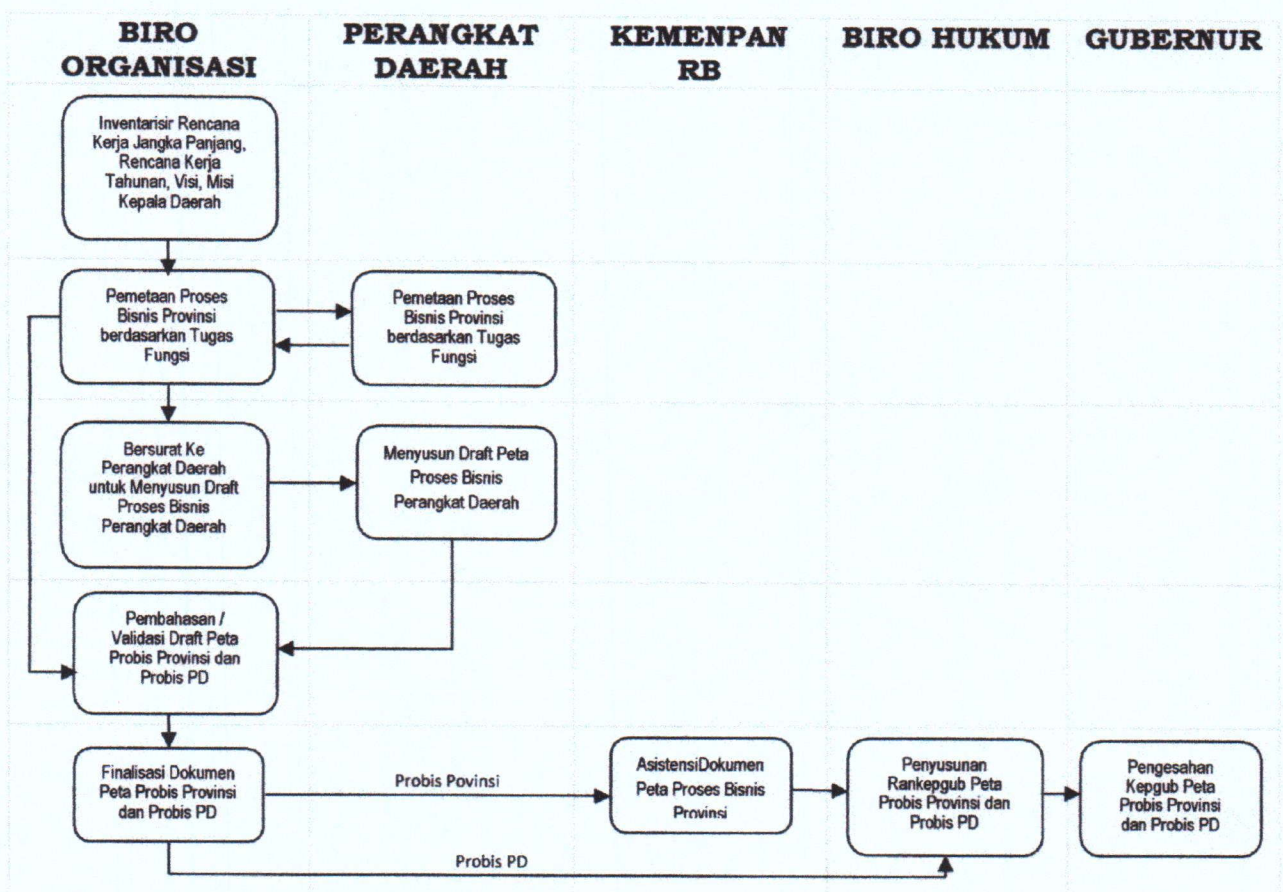


### C. PENDIDIKAN APARATUR

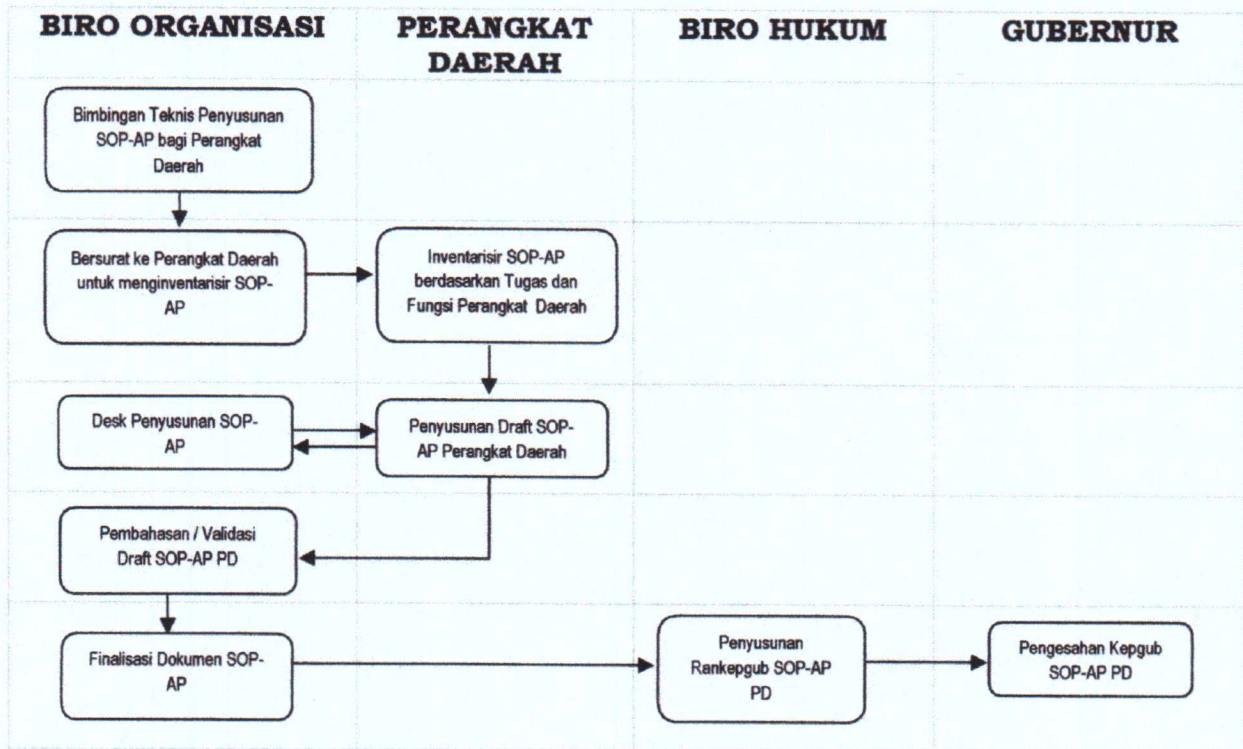


## NTT07-SP4 PENATAAN TATALAKSANA

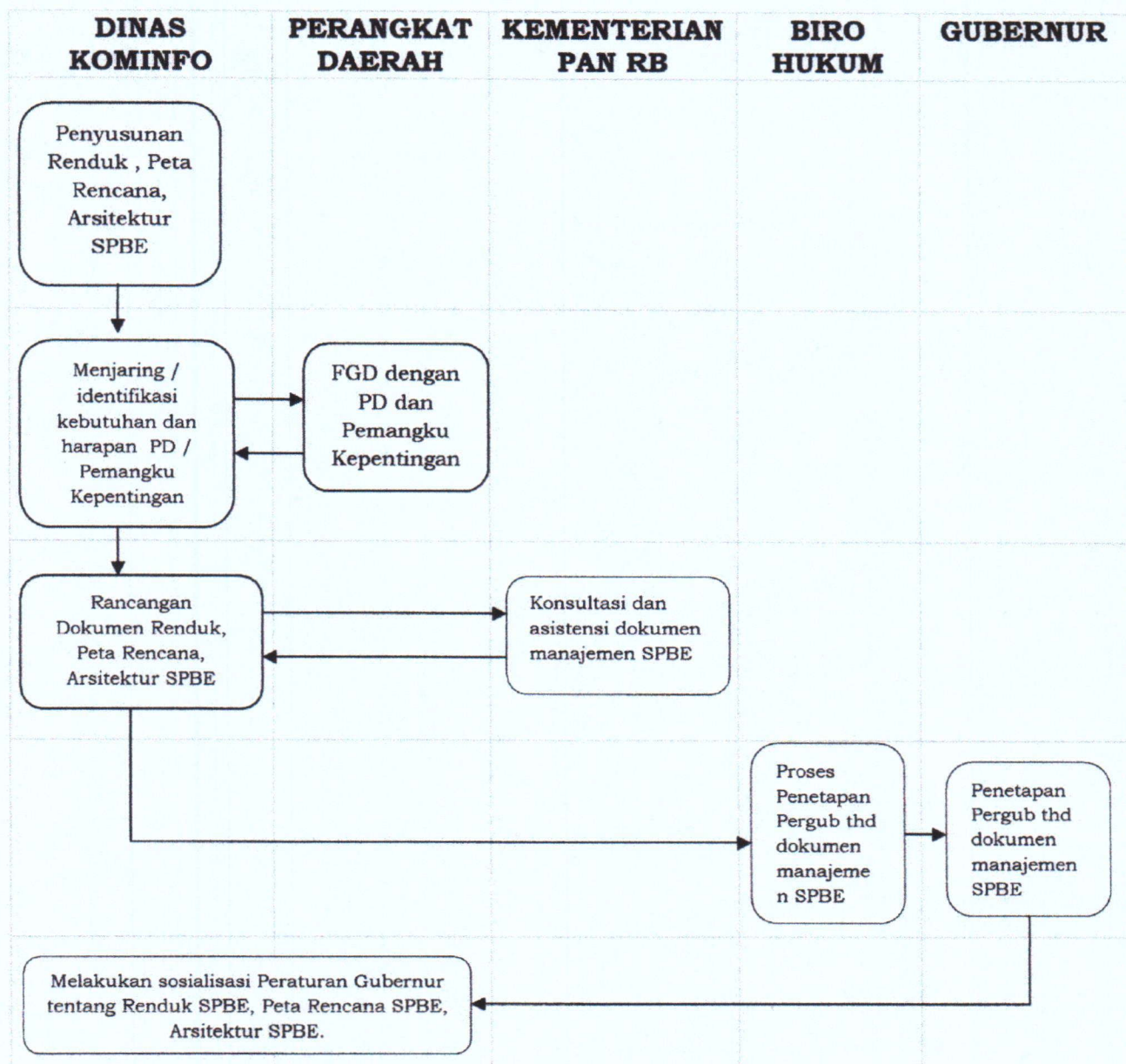
### A. PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS



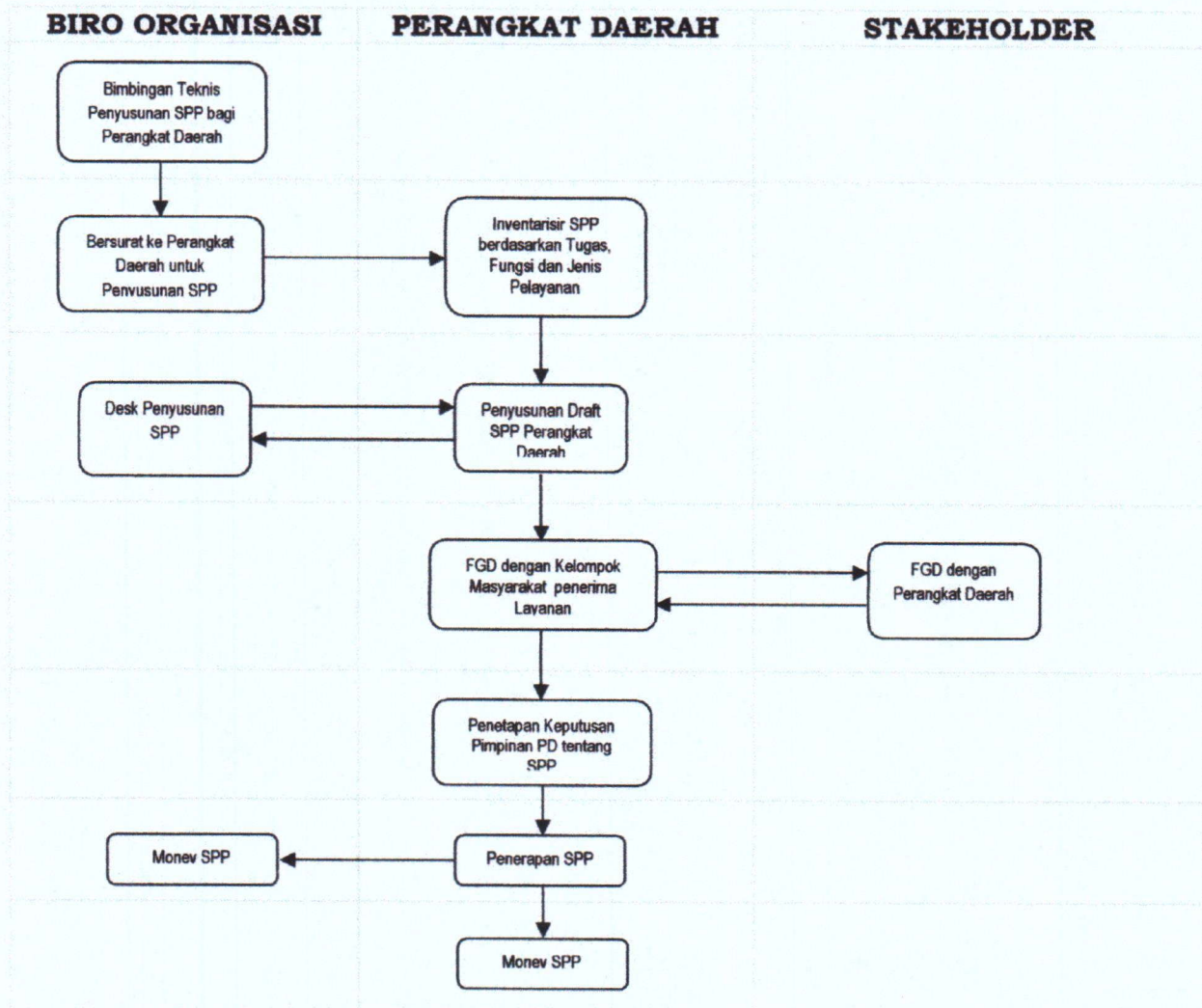
## B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



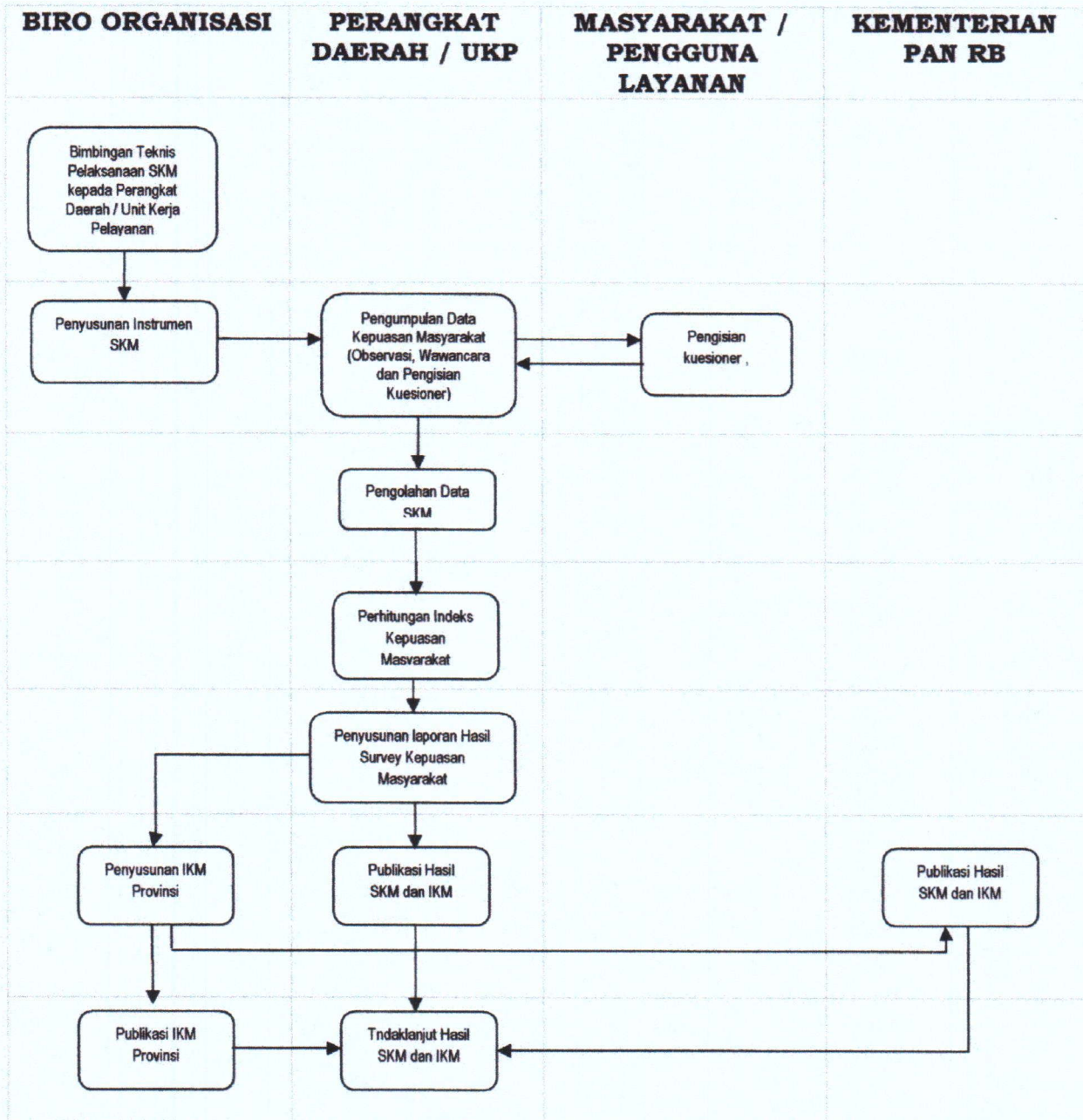
## C. PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SPBE



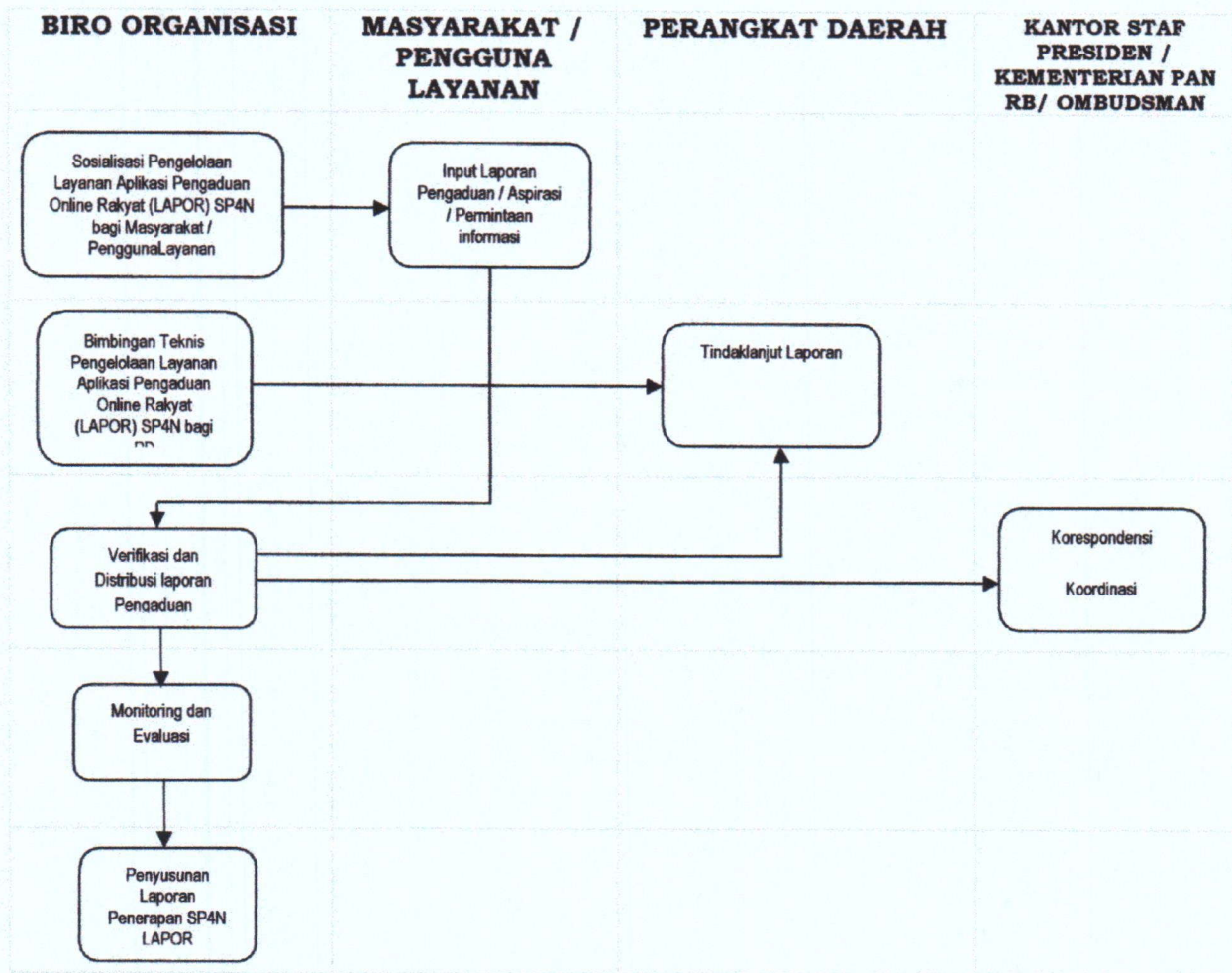
**A. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK**



## B. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

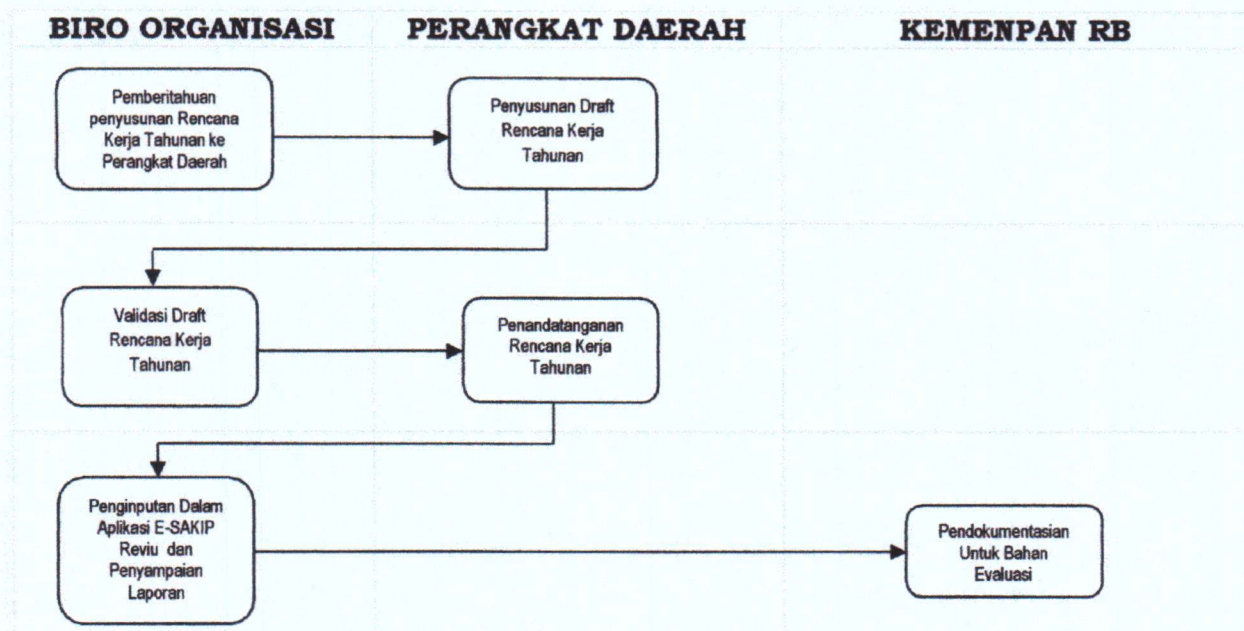


### C. PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI LAPOR SP4N

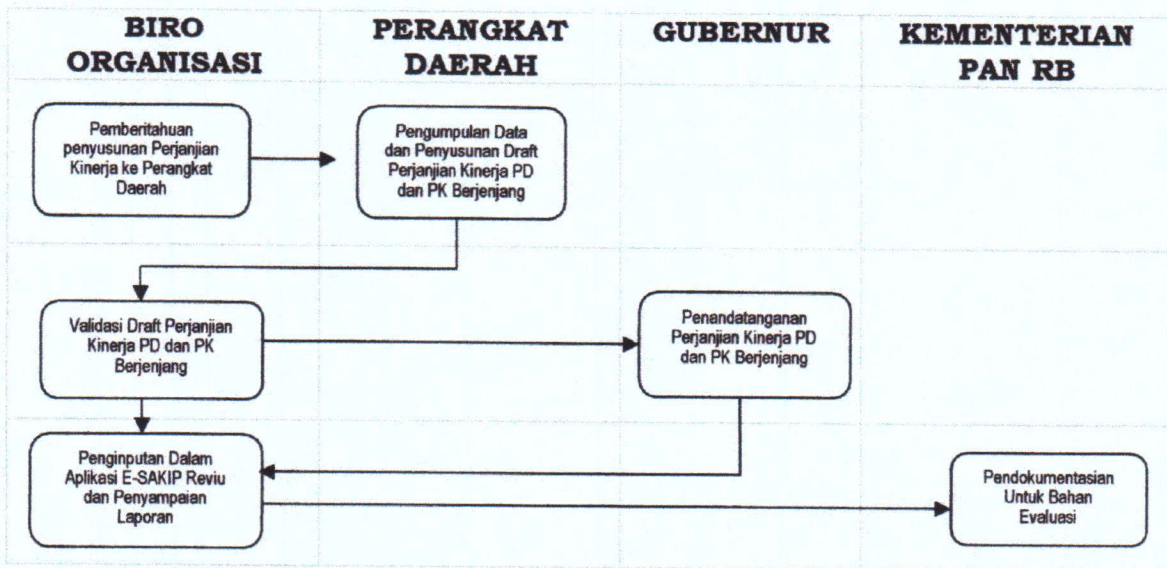


### NTT07.SP6 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

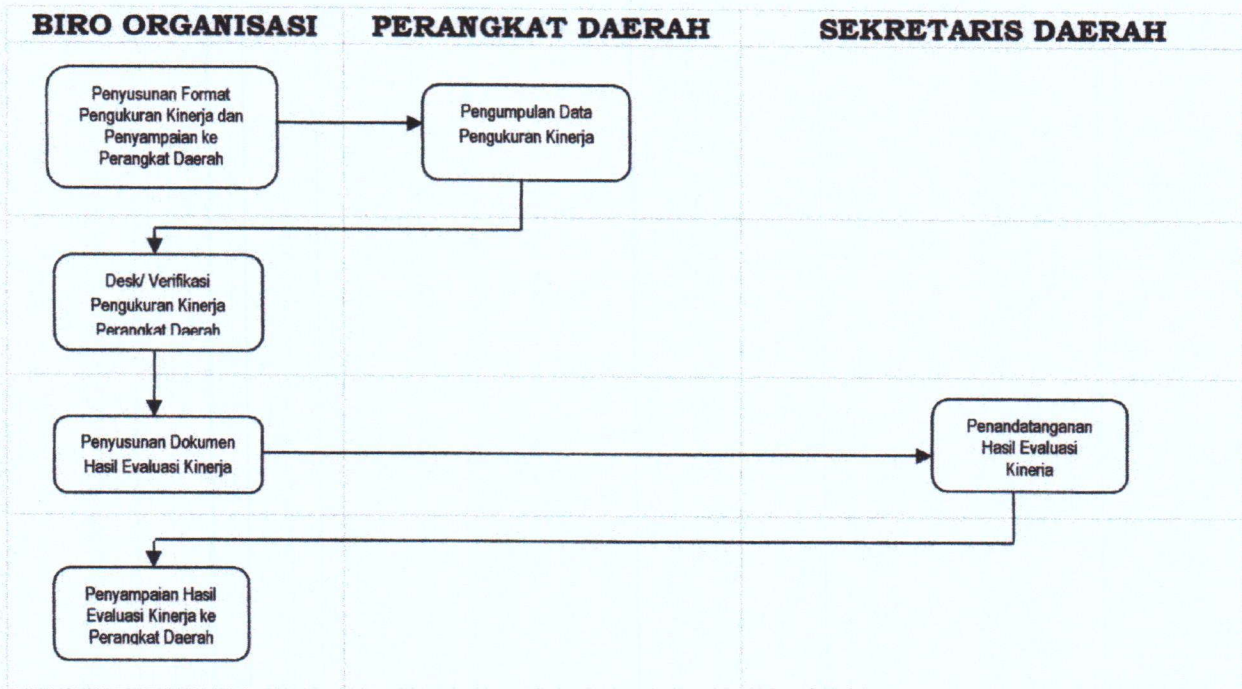
#### A. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN



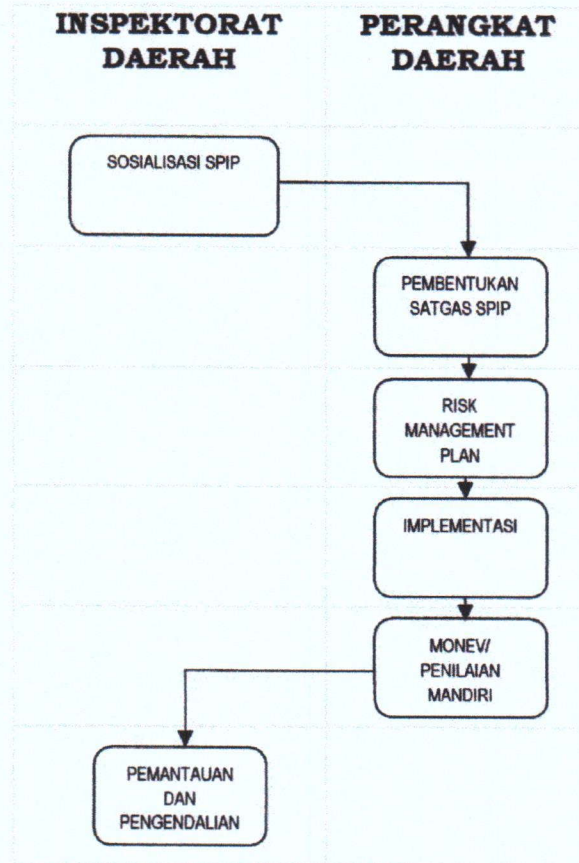
## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA



## C. PENGUKURAN KINERJA

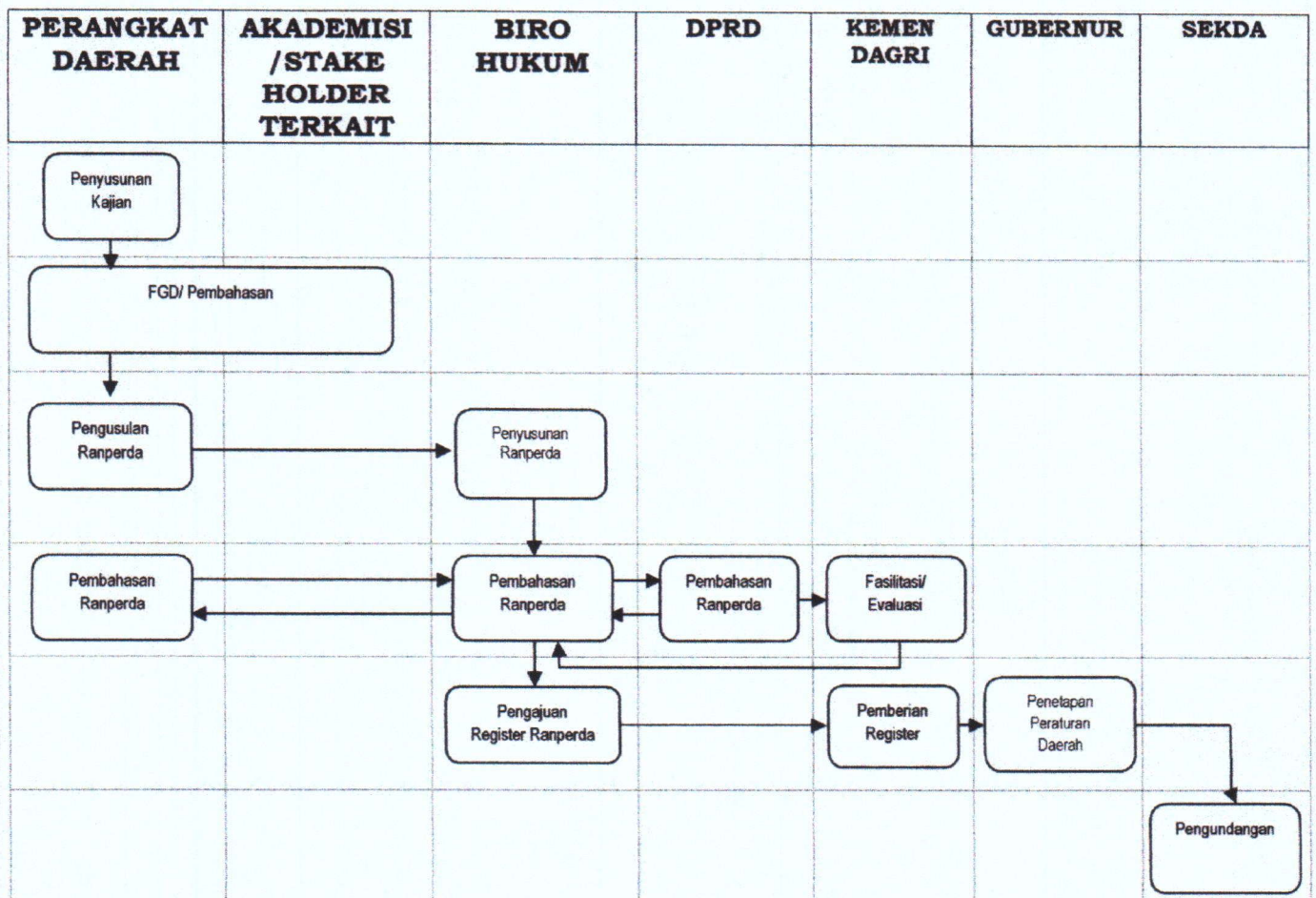


NTT-07.SP7 PENGUATAN PENGAWASAN

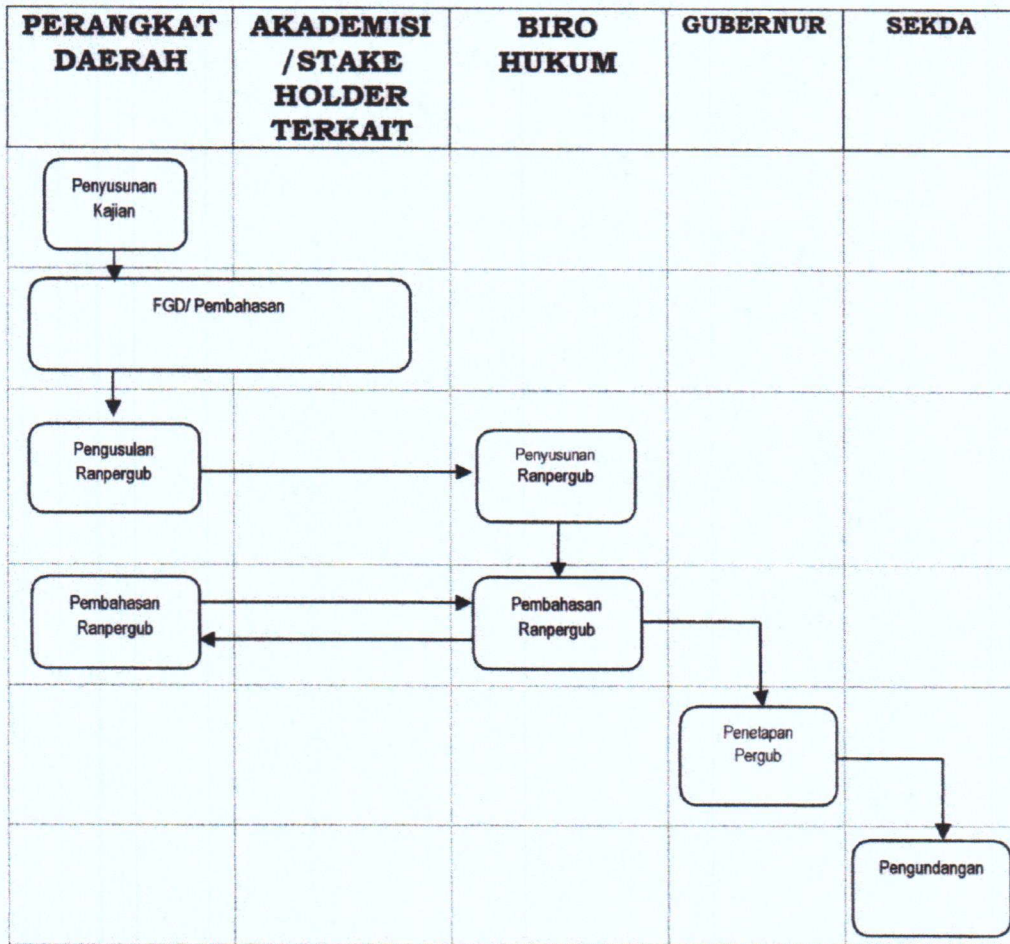


NTT-07.SP8 PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN

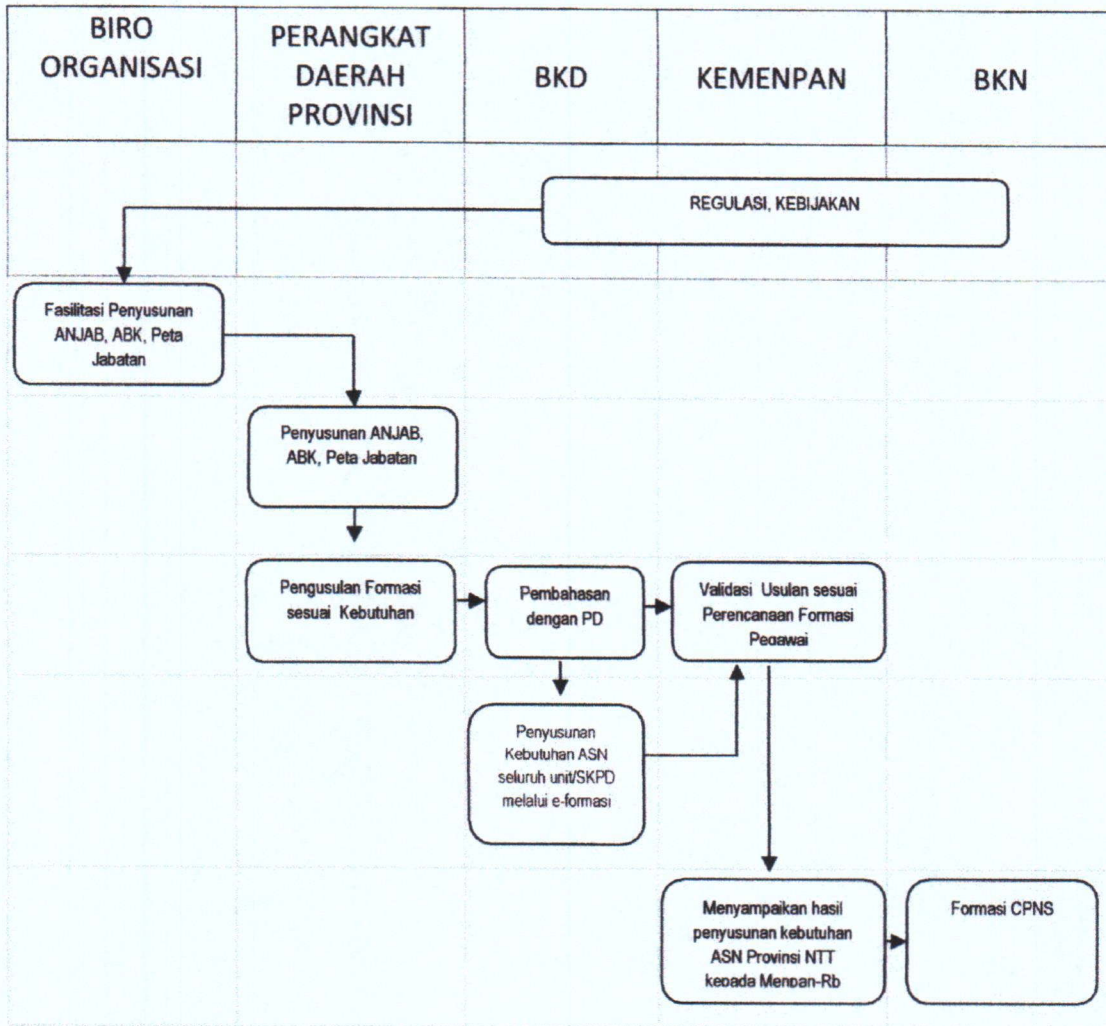
A. PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH



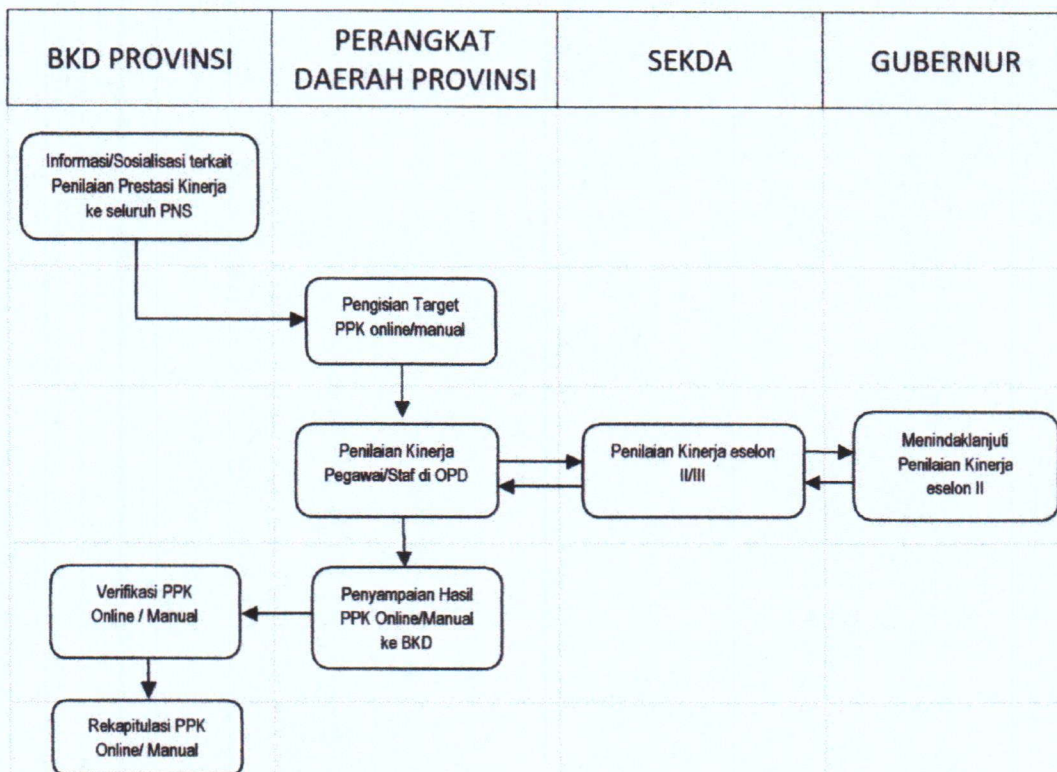
**B. PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN GUBERNUR**



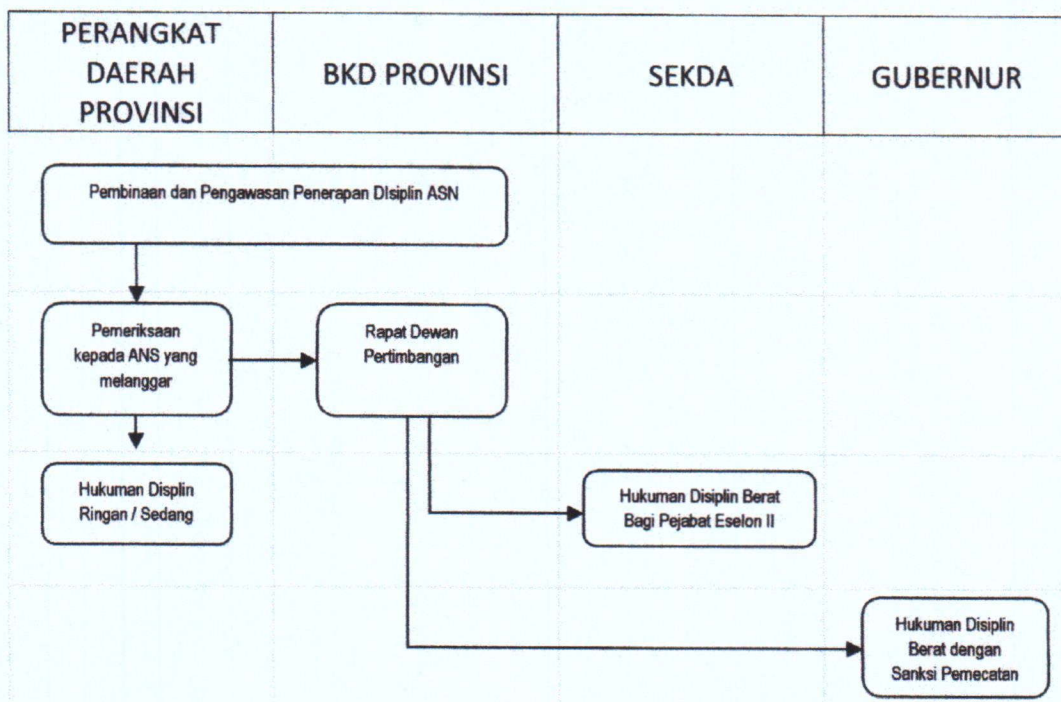
**NTT-08.SP1  
PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI**



**NTT-08.SP2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA**

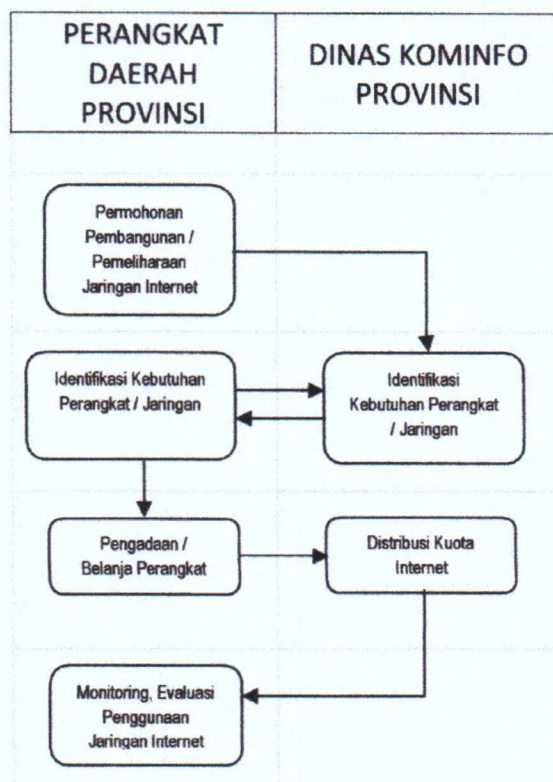


### NTT-08.SP3 PENERAPAN DISIPLIN ASN

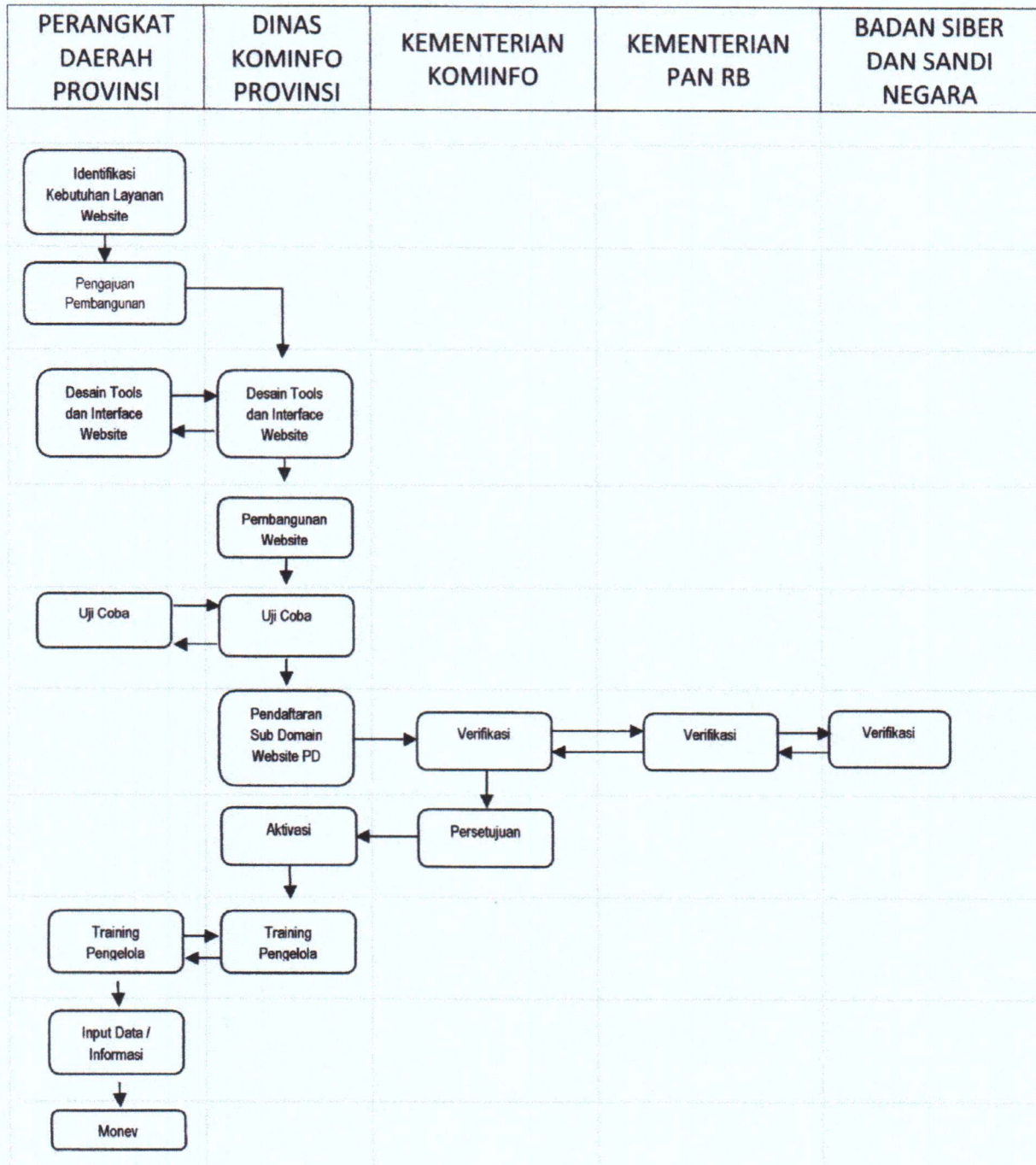


### NTT-09.SP1

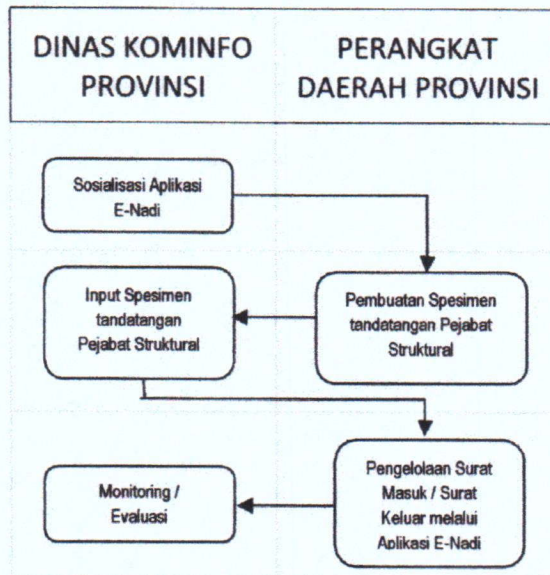
#### PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET PERKANTORAN



NTT-09.SP2 PENGELOLAAN WEBSITE

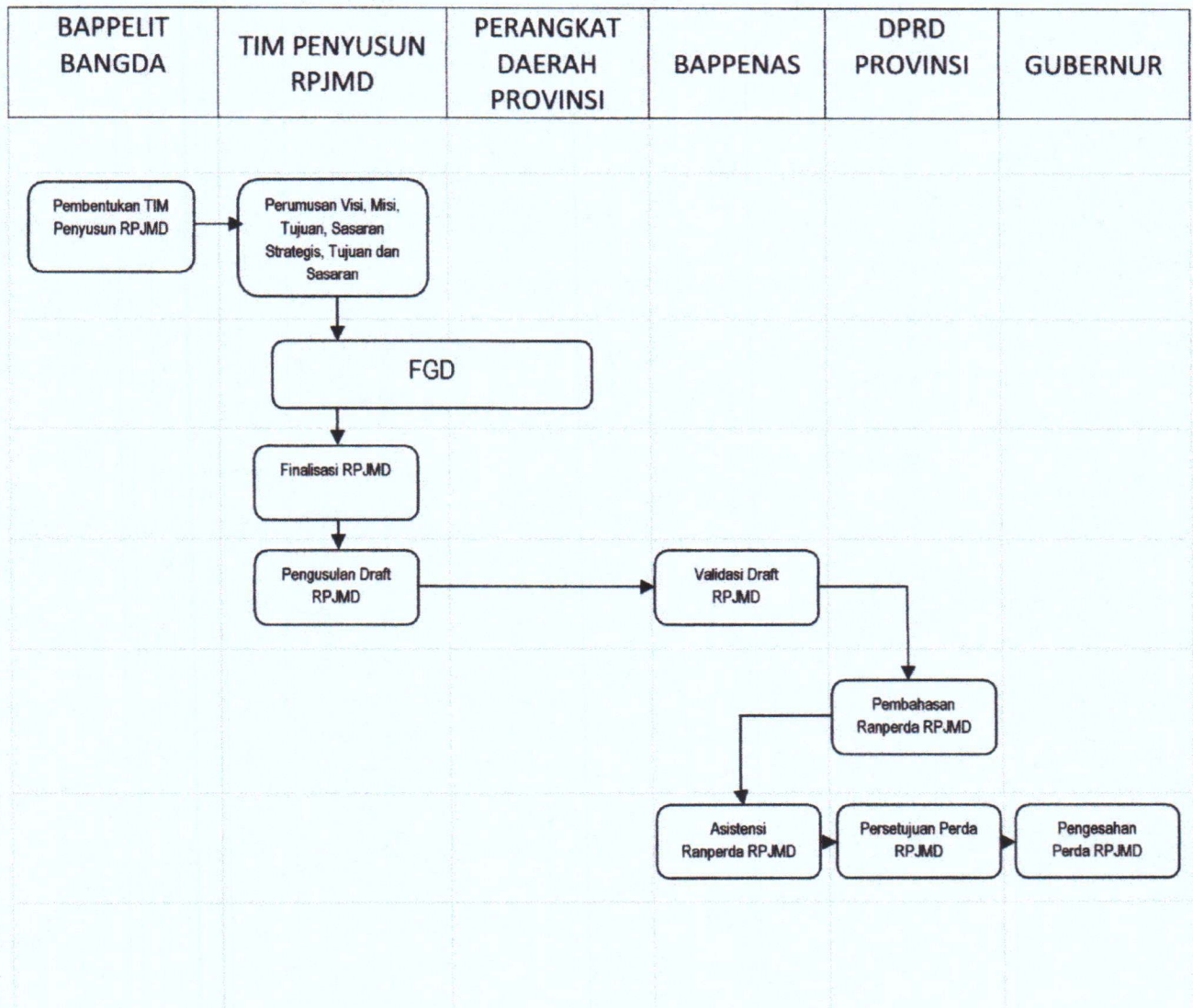


NTT09.SP3 PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI

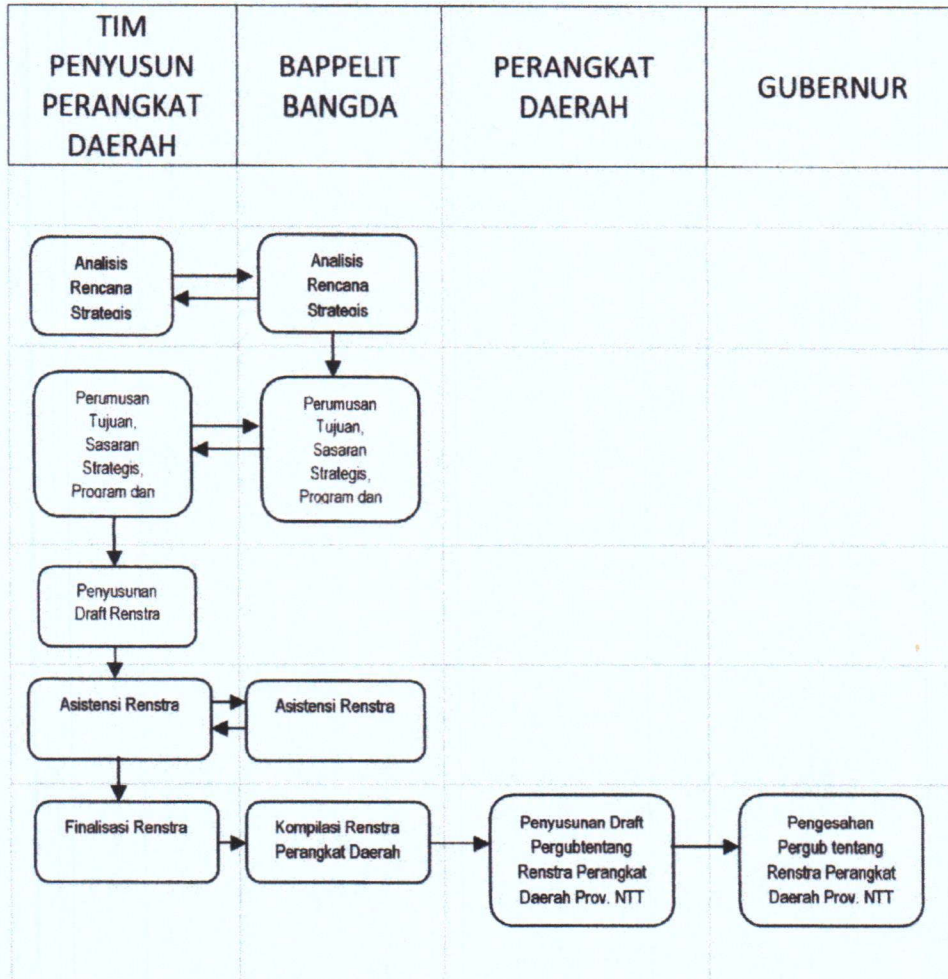


NTT-10.SP1 PERENCANAAN

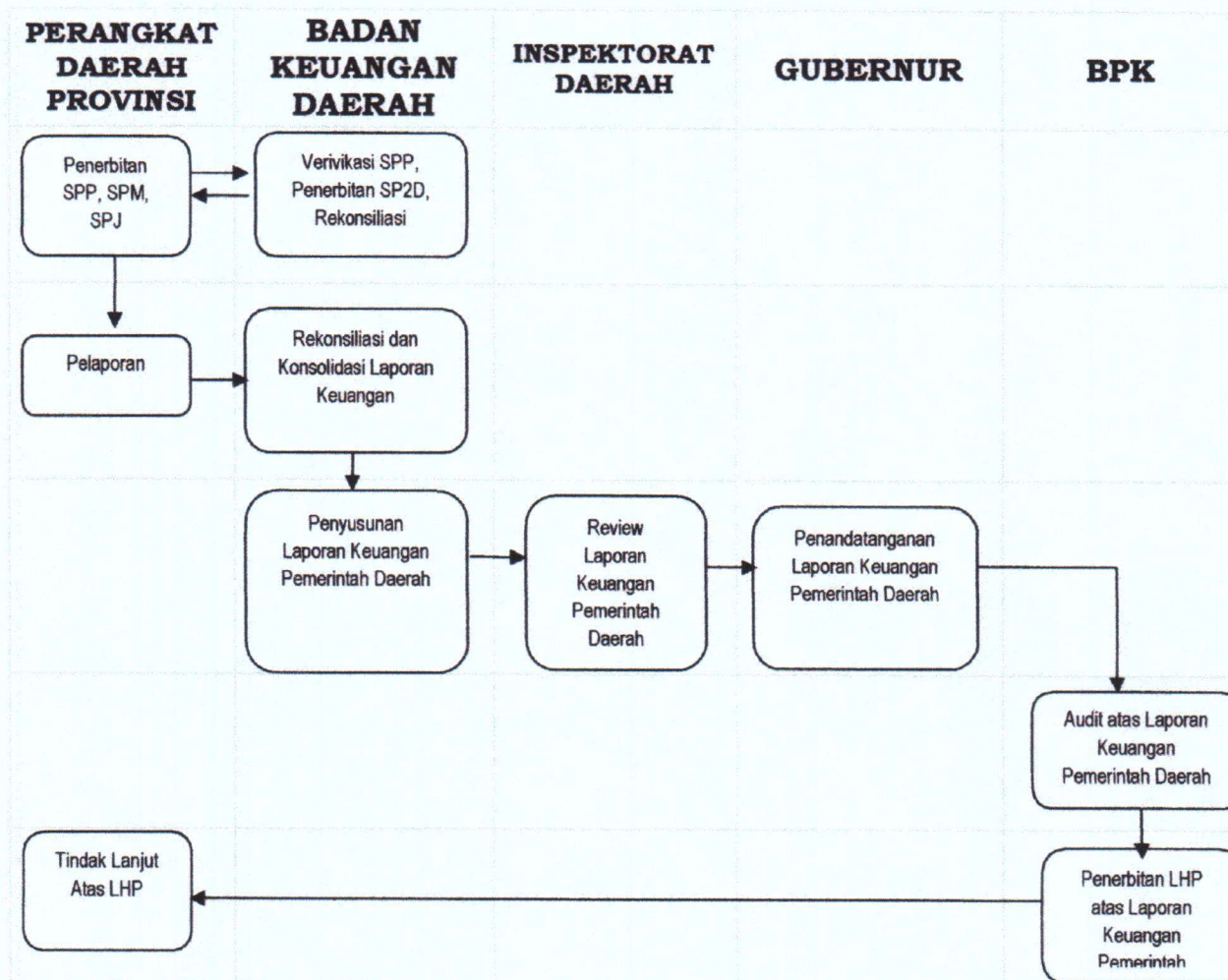
A. PENYUSUNAN RPJMD



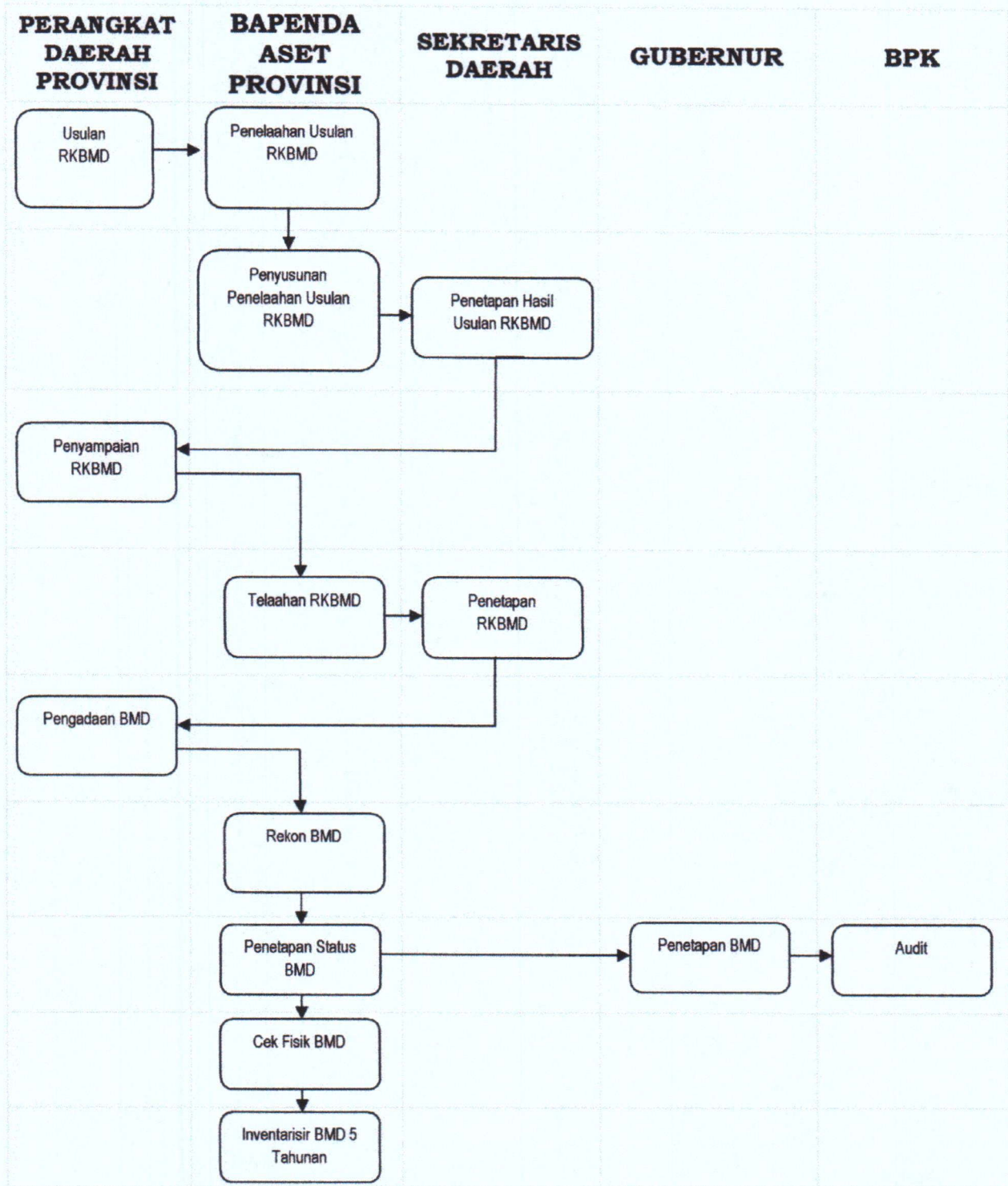
**B. PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**



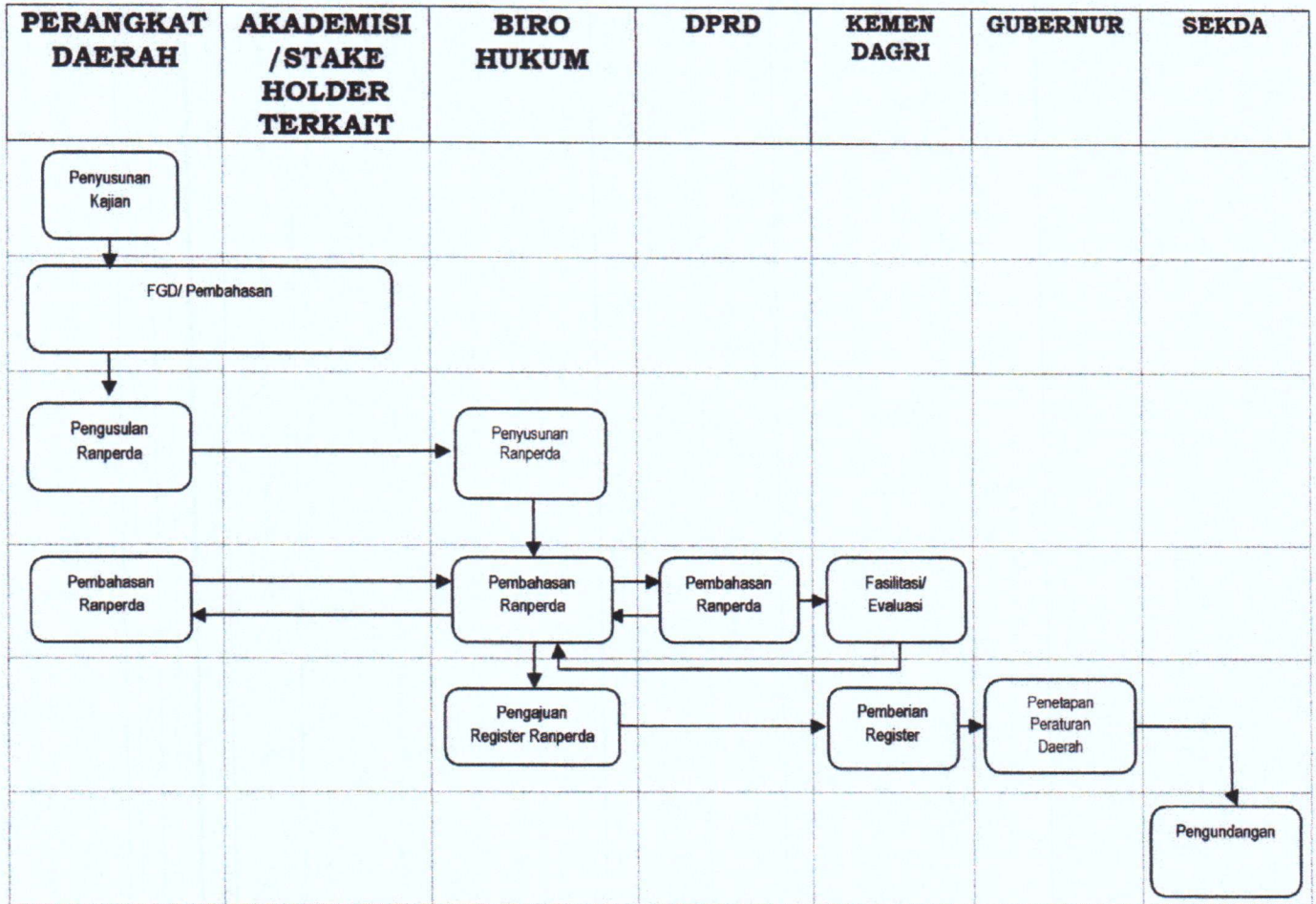
NTT-10.SP2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN



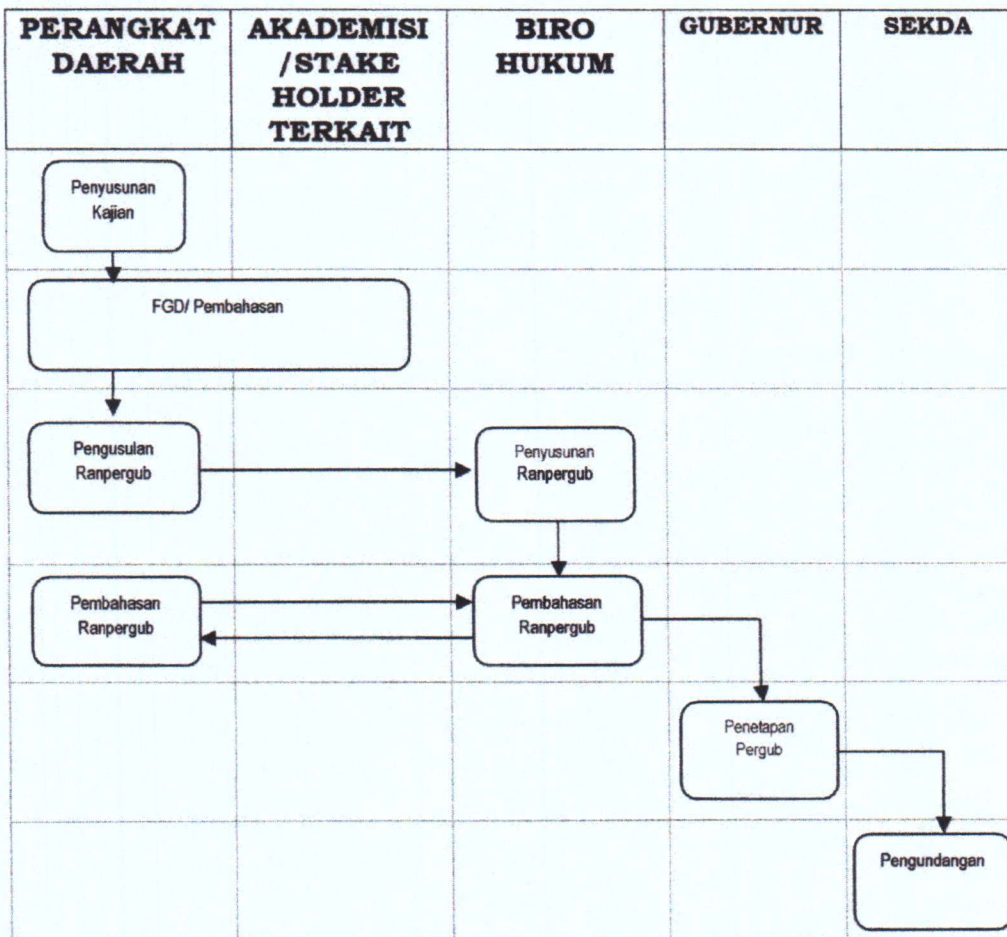
NTT-11.SP1 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH



**A. PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH**

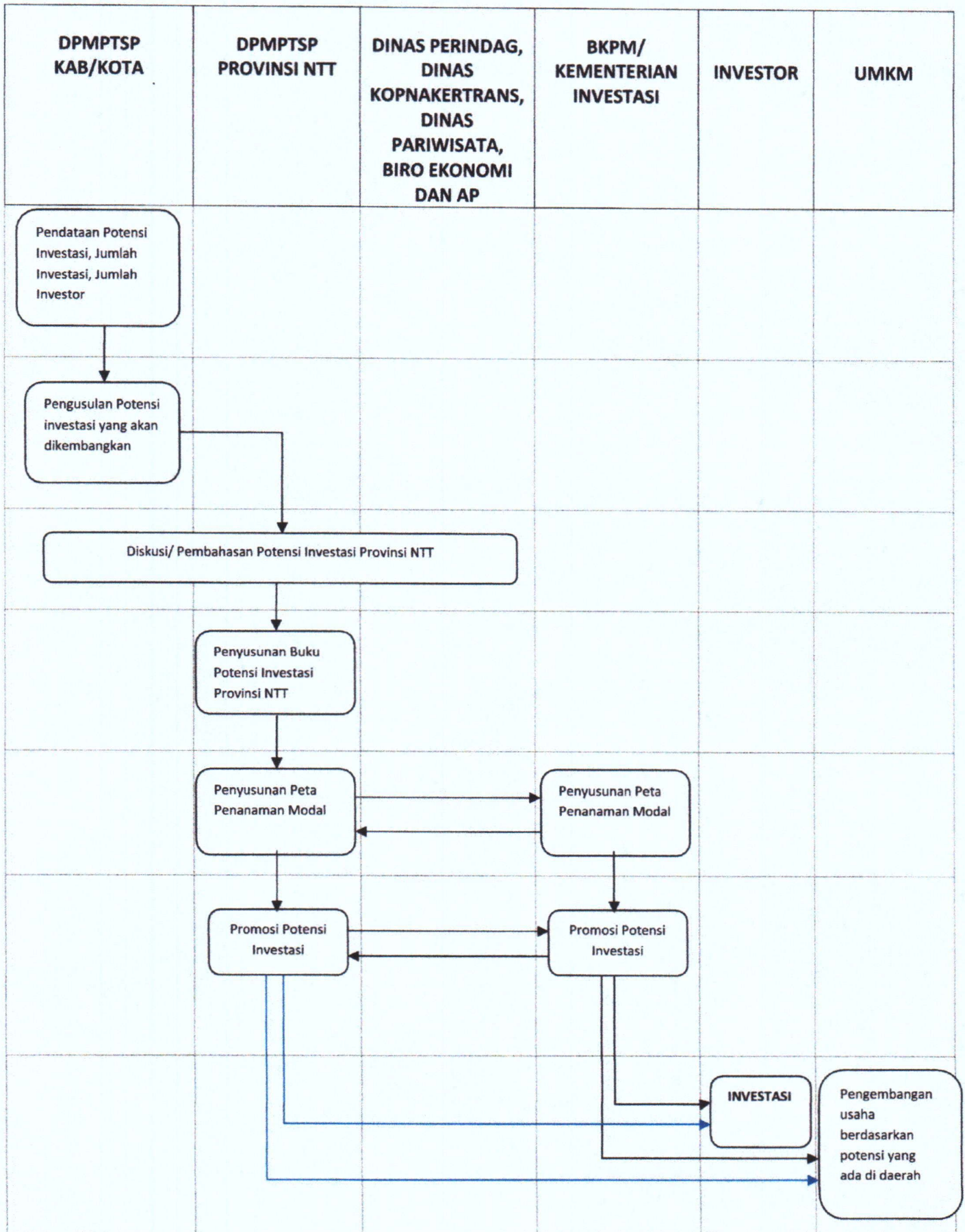


**B. PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN GUBERNUR**

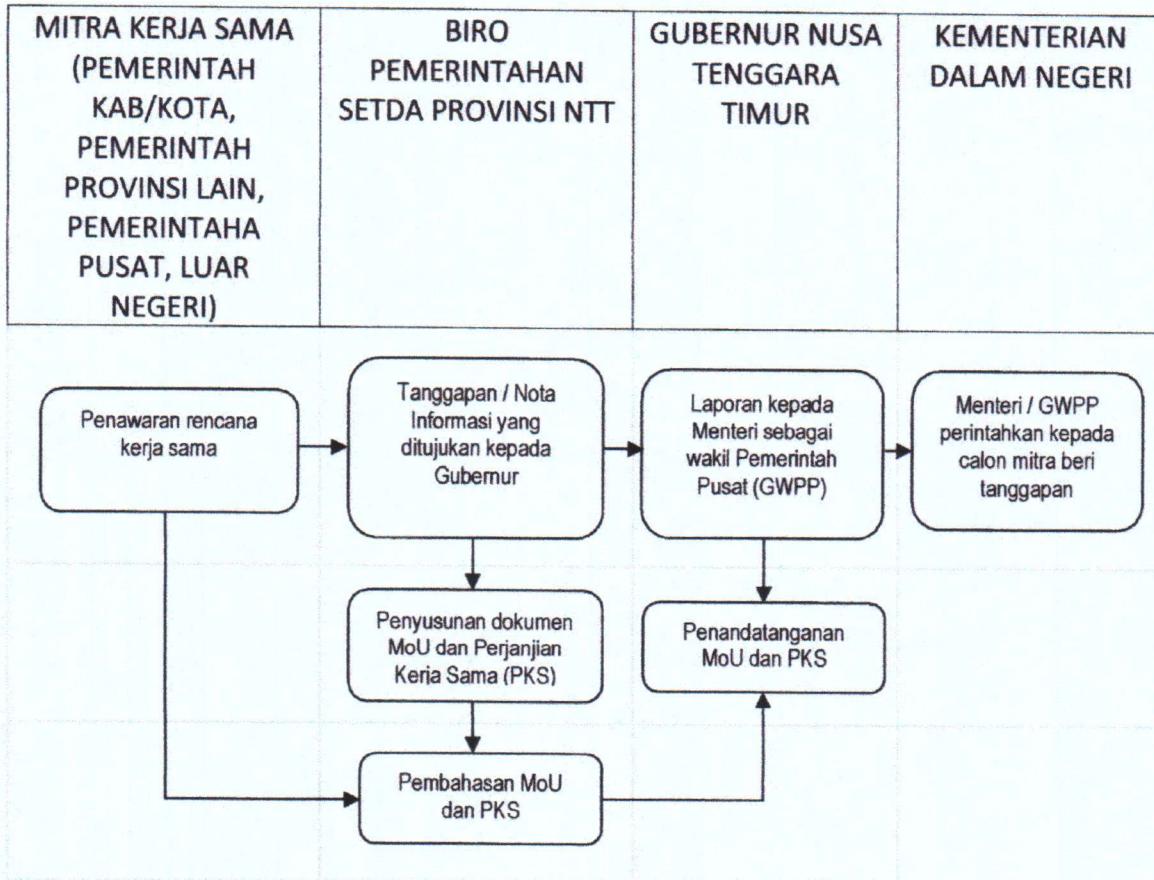




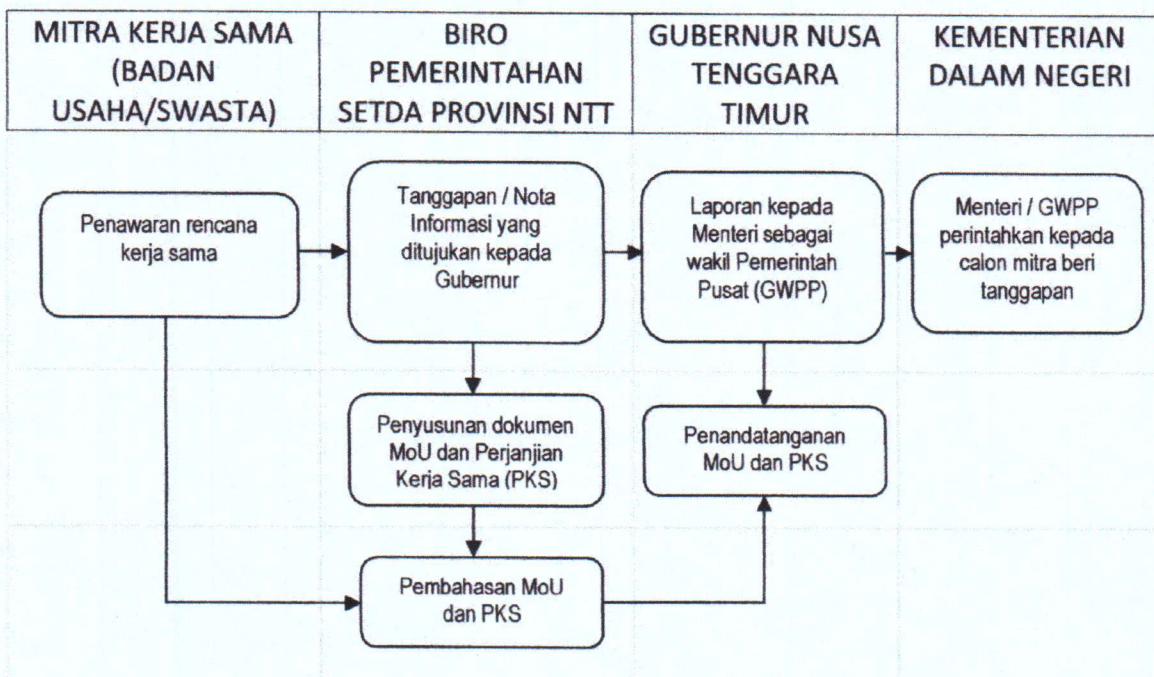
NTT-13.SP1 PENDATAAN POTENSI INVESTASI DAN KERJA SAMA



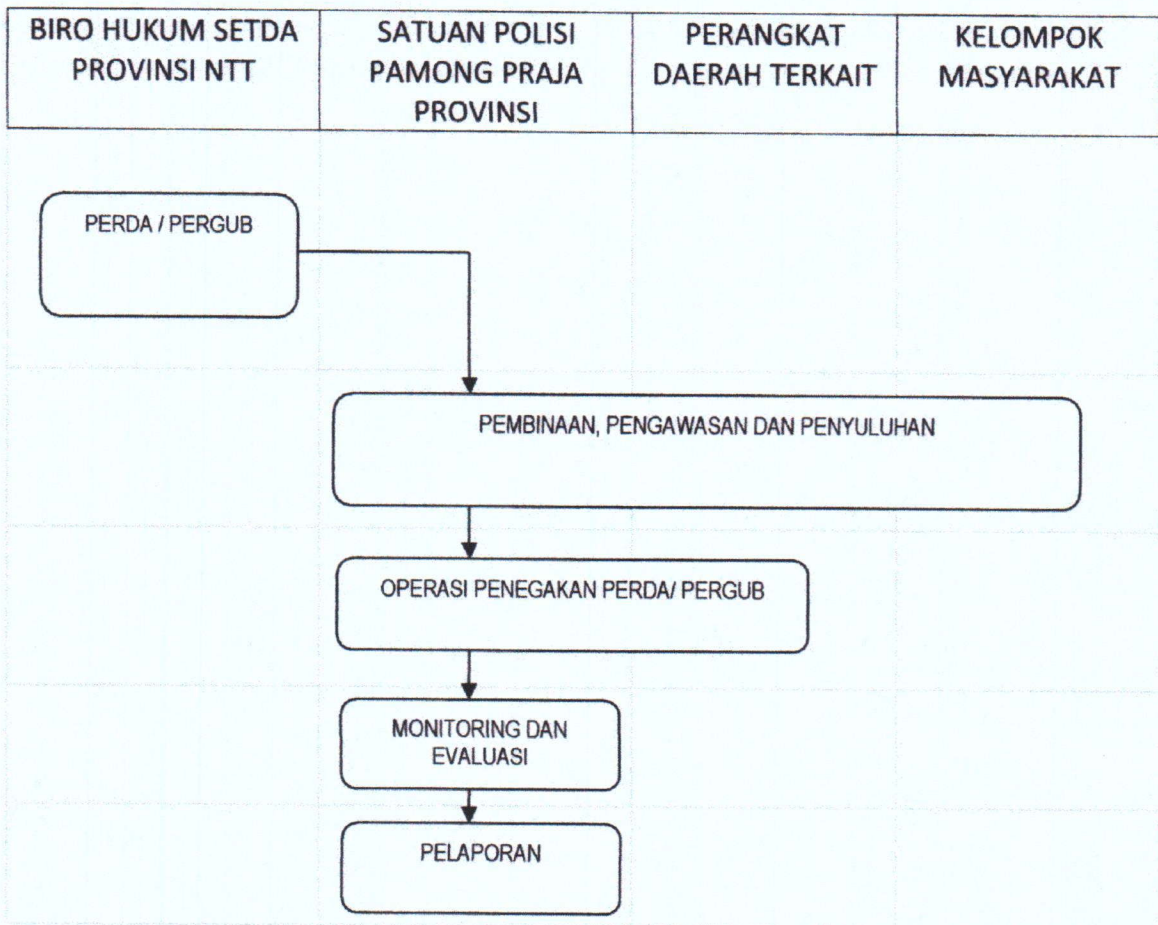
**A. KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH**



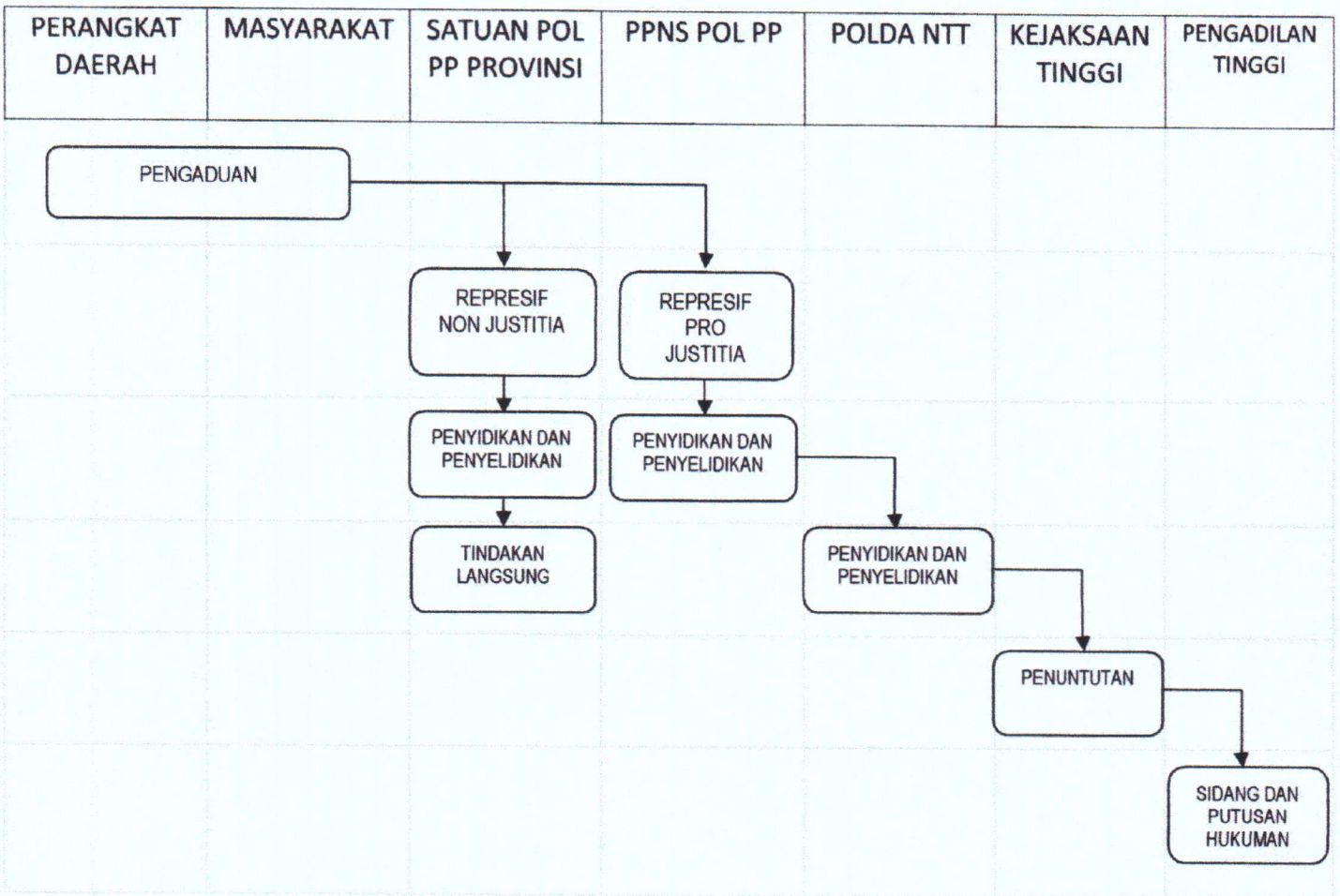
**B. KERJA SAMA BADAN USAHA/ SWASTA**



NTT-14.SP1 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN



NTT-14.SP2 PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

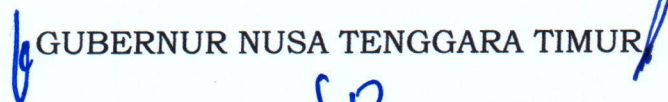




### **BAB III**

### **PENUTUP**

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ini wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Prioritas untuk mencapai Visi Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**